



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan Daerah secara adil dan merata dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat Daerah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan di Daerah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan Daerah sehingga dapat dilaksanakan secara sinergi dan selaras yang didukung dengan kondisi wilayah dan masyarakat sesuai dengan visi dan misi Bupati;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Demak.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah ke dalam struktur ruang dan pola ruang.
21. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

- a. landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029;
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
- c. pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;

- d. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
- e. instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah Tahun 2024.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRW;
 - c. RPJMN;
 - d. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. kajian lingkungan hidup strategis.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota sekitar.

Bagian Kedua Sistematika

Pasal 5

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : berisi pendahuluan;
 - b. Bab II : berisi gambaran umum daerah;
 - c. Bab III : berisi visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;
 - d. Bab IV : berisi program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 - e. Bab V : berisi penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan RPJMD;

- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan Daerah dan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra-PD.

Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Perda.

Pasal 9

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2030-2034 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan 5 (lima) tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034 serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5 - 137 / 2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Demak



Konsep: Inani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah-atas yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dokumen rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Rencana pembangunan jangka menengah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Demak untuk periode 5 (lima) tahun yang dimaksudkan untuk memberikan arahan sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, RPJMD disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selanjutnya, dokumen RPJMD dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan

tahunan, yang kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Daerah dan nasional” adalah apabila bertentangan dengan kebijakan daerah/nasional

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “goncangan politik” adalah situasi di mana ketidakstabilan dan konflik dalam sistem politik terjadi akibat terjadinya protes/demonstrasi, gerakan politik, perubahan kebijakan, kerusuhan dan kekerasan, dan penyelenggaraan pemilu ulang atau perubahan pemerintahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5



PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK

2025
2029

R A N P E R D A
RPJMD
KABUPATEN
DEMAK





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Demak memiliki keistimewaan historis yang menjadikannya pusat peradaban Islam di Jawa. Sebagai tempat berdirinya Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, wilayah ini telah memainkan peran penting dalam membentuk budaya dan agama di sekitarnya. Masjid Agung Demak yang didirikan oleh Walisongo menjadi bukti nyata dari sejarah tersebut. Lebih dari sekadar tempat ibadah, masjid ini berfungsi sebagai pusat dakwah dan penyebaran Islam, menjadikan Demak sebagai destinasi wisata religi yang menarik banyak pengunjung hingga kini. Hal ini menjadikan karakteristik masyarakat Kabupaten Demak sangat lekat dengan nilai-nilai Islam dan tradisi lokal.

Potensi utama Kabupaten Demak terletak pada sektor agraris dan kelautannya. Dengan lahan pertanian yang subur, Demak dikenal sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Tengah. Posisi geografisnya di pesisir pantai utara Jawa juga memberikan keunggulan sumber daya laut, seperti perikanan dan tambak garam. Kedua sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah yang terus berkembang. Dibutuhkan peningkatan infrastruktur untuk mendukung nilai tambah produk hasil agraris dan kelautan.

Dari aspek sosio kultural, perayaan budaya seperti Grebeg Besar, tradisi Megengan, Syawalan serta berbagai kegiatan keagamaan menjadi cerminan kentalnya budaya religiositas di Kabupaten Demak. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Demak terus menunjukkan perkembangan positif, terutama di sektor industri dan perdagangan. Kabupaten Demak merupakan salah satu pusat industri di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa. Kombinasi antara warisan sejarah, kekayaan alam, dan dinamika masyarakat yang progresif menjadikan Demak sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang di berbagai sektor.

Pembangunan di Kabupaten Demak difokuskan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan strategi yang terencana, pemerintah daerah berupaya menciptakan pemerataan pendapatan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat daya saing daerah. Dalam hal ini, penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029 menjadi sangat penting sebagai pedoman utama bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program-program prioritas yang mendukung

pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Demak merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu penyusunan rencana pembangunan ini juga memedomani peraturan lainnya, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, RPJMD harus disahkan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Dengan dilantikanya dr. Hj. Eisti'anah, S.E. sebagai Bupati dan Muhammad Badruddin, M.Pd. sebagai Wakil Bupati pada tanggal 20 Februari 2025, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera mewujudkan visi dan misi pembangunan yang disusun dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Dengan adanya Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunan RPJMD dilakukan beberapa pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis, (*top-down*) atas-bawah dan (*bottom-up*) bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Kemudian dalam pelaksanaan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 melalui beberapa tahapan yaitu (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan awal; (3) penyusunan rancangan; (4) pelaksanaan musrenbang; (5) perumusan rancangan akhir dan (6) penetapan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peranan krusial dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak. RPJMD berfungsi sebagai peta jalan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan yang secara sistematis menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan yang terukur dan realistis. Dengan adanya RPJMD, arah pembangunan menjadi jelas dan terfokus pada prioritas-prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi daerah. Dokumen ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Demak memiliki landasan yang kuat dan saling terintegrasi, sehingga sumber daya yang ada dapat dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil

yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk menjadikan lima tahun ke depan sebagai periode transformasi menuju keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Komitmen ini diwujudkan melalui pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam setiap aspek perencanaan dan penganggaran daerah, dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, penguatan daya saing ekonomi berbasis potensi lokal, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah juga akan mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk bersama-sama mengimplementasikan program-program strategis yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada skala lokal.

Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Demak menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Proses penyusunannya yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, kelompok rentan, akademisi hingga dunia usaha, memastikan adanya partisipasi dan transparansi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas dalam RPJMD, kemajuan pembangunan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan, serta melakukan koreksi yang diperlukan demi tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Nomor 3 tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8 Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

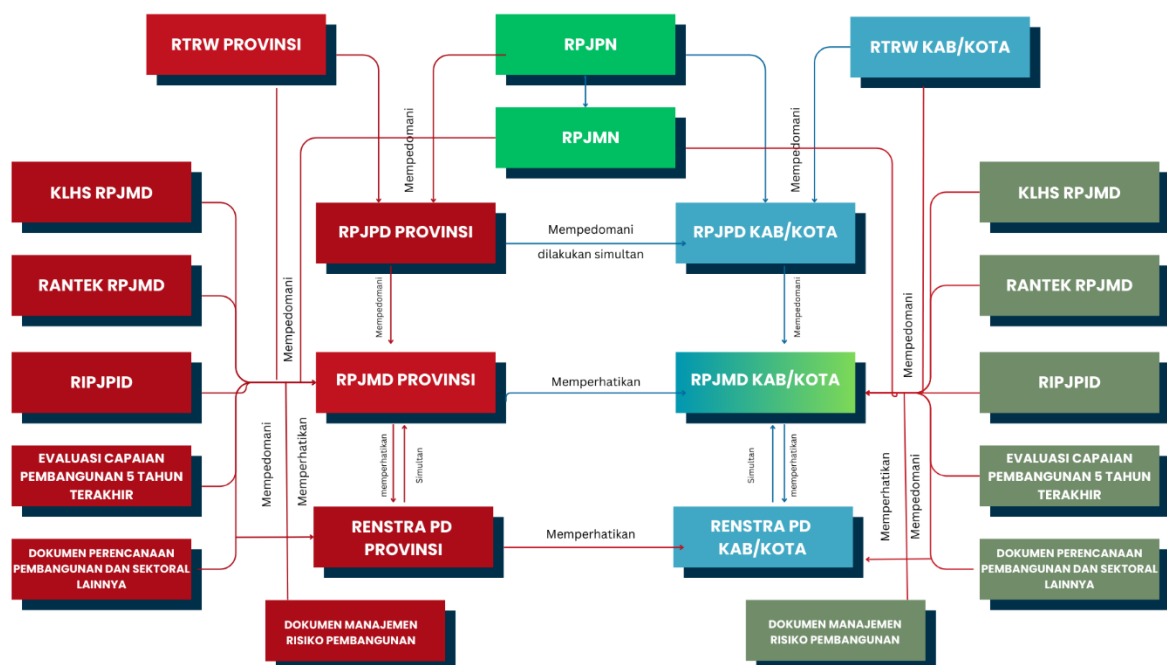
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
- 22 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor.....Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 1);
- 27 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
- 28 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);
- 29 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 13).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Gambar I.1.

Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Keterkaitan ini memastikan keselarasan dan sinergi antara program-program pembangunan di berbagai

tingkatan pemerintahan. RPJMD harus mencerminkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, sehingga penyusunannya melibatkan penjabaran aspirasi tersebut ke dalam rencana pembangunan yang konkret. Proses ini juga melibatkan acuan pada dokumen-dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi (RPJMD Provinsi). Dengan demikian, RPJMD berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan nasional dan provinsi dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di tingkat daerah.

Berdasarkan Gambar 1.1 keterkaitan RPJMD Kabupaten Demak dengan dokumen perencanaan lainnya dijabarkan sebagai berikut:

a. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan strategis dengan RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai pedoman pembangunan nasional. Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Demak mengacu pada prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi lokal, serta perlindungan lingkungan hidup. Penyesuaian program, kegiatan, dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Demak bertujuan untuk memastikan sinergi dengan target nasional, sekaligus menjawab kebutuhan dan potensi daerah. Dengan demikian, RPJMD ini berfungsi sebagai alat implementasi RPJMN di tingkat daerah, mendukung tercapainya visi pembangunan Indonesia yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

b. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 disusun selaras dengan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2025-2029 untuk memastikan harmoni perencanaan pembangunan antara tingkat kabupaten dan provinsi. Sebagai bagian integral dari Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Demak mengacu pada prioritas pembangunan provinsi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing ekonomi, pengembangan infrastruktur yang merata, dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Demak memetakan program-program strategis yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan lokal dan potensi daerah. Melalui hubungan ini, RPJMD Kabupaten Demak berkontribusi dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang adil, makmur, dan berdaya saing.

c. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari tahapan implementasi RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045, yang menjadi pedoman jangka panjang pembangunan daerah. Sebagai dokumen strategis lima tahunan, RPJMD 2025-2029 memuat langkah-langkah awal untuk mewujudkan visi dan misi jangka panjang RPJPD, yaitu pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. RPJMD ini merinci prioritas pembangunan yang disesuaikan dengan tujuan strategis dalam RPJPD, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan keterkaitan yang erat ini, RPJMD 2025-2029 berfungsi sebagai peta jalan menuju keberhasilan agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak, memastikan kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah.

d. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Demak

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak sebagai landasan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah. RTRW berperan sebagai acuan untuk penentuan lokasi, pola pemanfaatan ruang, dan pengelolaan wilayah yang mendukung pelaksanaan program-program pembangunan dalam RPJMD. Seluruh program prioritas dalam RPJMD, seperti pengembangan infrastruktur, kawasan ekonomi strategis, dan pengelolaan lingkungan hidup, harus sesuai dengan arahan peruntukan ruang yang ditetapkan dalam RTRW. Hubungan ini memastikan pembangunan yang direncanakan dalam RPJMD berjalan selaras dengan prinsip keterpaduan, keberlanjutan, dan pengelolaan tata ruang yang optimal, sehingga menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Demak.

e. Hubungan antara RPJMD Kabupaten Demak dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen operasional untuk melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Hubungan ini bersifat hierarkis, di mana Renstra Perangkat Daerah merinci program, kegiatan, dan indikator kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab menyusun Renstra yang selaras dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Dengan

adanya keterpaduan ini, Renstra Perangkat Daerah menjadi instrumen pelaksanaan pembangunan yang efektif dan terarah, sehingga memastikan harmonisasi antar sektor dalam mencapai target pembangunan Kabupaten Demak secara menyeluruh.

f. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki hubungan erat dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai instrumen untuk memastikan integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan daerah. KLHS memberikan analisis mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta potensi dampak lingkungan dari program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD. Melalui KLHS, RPJMD dapat disusun dengan mempertimbangkan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang, sehingga setiap kebijakan dan prioritas pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai target pembangunan, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, hubungan ini memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Demak mendukung pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan.

g. Hubungan RPJMD dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID)

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki hubungan strategis dengan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) sebagai panduan untuk mengintegrasikan pengembangan IPTEK dalam pembangunan daerah. RIPJPID berperan sebagai dokumen yang menetapkan arah, prioritas, dan strategi pemanfaatan IPTEK untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Program dan kegiatan dalam RPJMD, seperti peningkatan daya saing ekonomi, pelayanan publik berbasis digital, dan pengelolaan sumber daya alam yang inovatif, dirancang selaras dengan arahan RIPJPID untuk memastikan optimalisasi teknologi dalam pembangunan. Hubungan ini memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Demak tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kapasitas inovasi dan pemanfaatan IPTEK untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

h. Hubungan RPJMD Kabupaten Demak dengan Dokumen perencanaan Sektoral

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan sektoral, yang mencakup rencana-rencana strategis pada sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi. Dokumen perencanaan sektoral menjadi bagian integral dari

pelaksanaan RPJMD, karena berisi program dan kegiatan rinci yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. RPJMD berfungsi sebagai dokumen induk yang menetapkan arah pembangunan secara makro, sementara dokumen sektoral merinci langkah-langkah operasional sesuai dengan kebutuhan spesifik sektor masing-masing. Hubungan ini memastikan adanya sinergi antar sektor dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Demak yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Demak dalam melaksanakan pembangunan selama (5) lima tahun ke depan. Dokumen ini berfungsi untuk merumuskan arah kebijakan, program prioritas, serta target pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan. Tujuan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. RPJMD dirancang untuk menerjemahkan visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi, kebijakan, dan langkah-langkah konkret pembangunan;
2. RPJMD bertujuan untuk memastikan keterpaduan dan sinergi antara perencanaan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, seperti RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah;
3. Dengan arah kebijakan yang jelas dan terukur, RPJMD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam alokasi sumber daya serta pelaksanaan program pembangunan;
4. RPJMD memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berdampak positif pada jangka pendek, tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa mendatang;
5. Dokumen ini memberikan panduan untuk menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan mengukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Penyusunan RPJMD bertujuan untuk mengakomodasi kebutuhan, potensi, dan aspirasi masyarakat Kabupaten Demak, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara merata.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RPJMD, landasan hukum, hubungan/keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Demak secara menyeluruh yang menjadi dasar dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aspek yang dijabarkan antara lain yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum. Selain itu, dalam bab ini juga memuat gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, dalam bab ini dijabarkan strategi, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian ini merinci program-program perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja beserta target dan alokasi anggaran indikatif. Selain itu, bab ini juga memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD), sebagai alat evaluasi terhadap capaian pembangunan pemerintahan secara menyeluruh.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi arahan transisi untuk memastikan keberlanjutan pembangunan daerah. Selain itu, pedoman implementasi RPJMD 2025-2029 dijelaskan untuk menjaga keselarasan pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki cita-cita luhur yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkualitas melalui pelaksanaan pembangunan. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Demak. Sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945, keseluruhan potensi sumber daya tersebut akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti yang dibunyikan dalam Pasal 33 Ayat 3 “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Demak terus berupaya untuk memberdayakan setiap elemen pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses yang kompleks di mana bertujuan untuk memedomani serta mengelola pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dalam berbagai aspek. Esensi perencanaan pembangunan suatu daerah sendiri meliputi berbagai aspek yang penting guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah dengan berpijak pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi daerah. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan lima tahunan sehingga solusi permasalahan pembangunan tepat sasaran dalam menyejahterakan masyarakat.

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Kondisi Geografi dan Wilayah Administrasi

Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada koordinat 6°43'26"-7°09'43" LS dan 110°27'58"-110°48'47" BT. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031, Kabupaten Demak memiliki luas

wilayah 99.532 ha. Batas-batas administrasi Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

- sebelah Utara: Kabupaten Jepara dan Laut Jawa;
- sebelah Timur: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan;
- sebelah Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang;
- sebelah Barat: Kota Semarang.

Wilayah administratif Kabupaten Demak terdiri dari 14 kecamatan, 6 kelurahan, 243 desa, terbagi menjadi 786 dusun, 1.324 Rukun Warga (RW) dan 6.942 Rukun Tetangga (RT). Secara rinci, luas wilayah masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

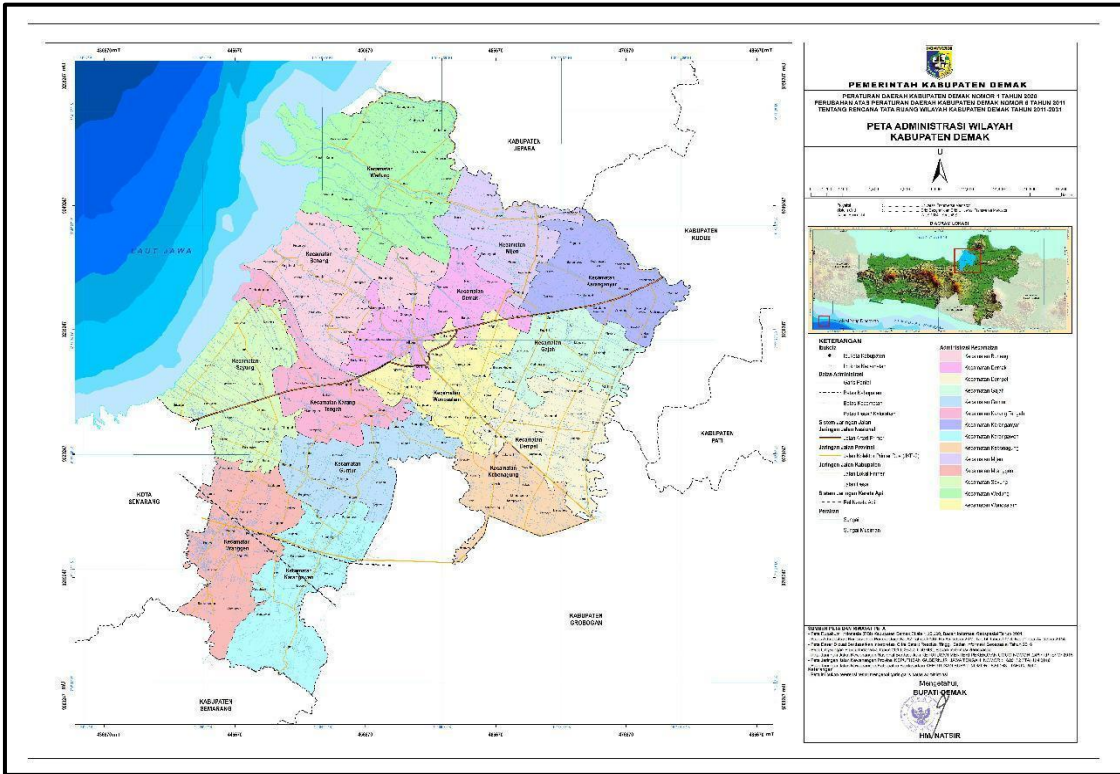
Tabel II.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (km ²)	Jumlah Kelurahan/Desa	Persentase Luas (%)
1.	Mranggen	77,97	19	7,82
2.	Karangawen	82,87	12	8,31
3.	Guntur	63,06	20	6,33
4.	Sayung	84,39	20	8,46
5.	Karangtengah	58,00	17	5,82
6.	Bonang	87,26	21	8,75
7.	Demak	65,65	19	6,59
8.	Wonosalam	62,87	21	6,31
9.	Dempet	64,23	16	6,44
10.	Kebonagung	44,40	14	4,45
11.	Gajah	51,83	18	5,20
12.	Karanganyar	71,53	17	7,17
13.	Mijen	53,99	15	5,42
14.	Wedung	128,90	20	12,93
Jumlah		996,94	249	100,00

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak (2025)

Kecamatan Wedung merupakan kecamatan terluas, yaitu dengan wilayah seluas 128,90 km² atau 12,93% dari luasan Kabupaten Demak. Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Kebonagung yakni 44,40 km² atau sebesar 4,45% dari luasan Kabupaten Demak. Semua wilayah kecamatan di Kabupaten Demak mudah dijangkau dan memiliki akses transportasi umum, terutama pusat-pusat perkembangan perekonomian daerah. Wilayah administrasi Kabupaten Demak dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Demak



Sumber: Pemkab. Demak (2024)

B. Topografi

Wilayah Kabupaten Demak terdiri atas dataran rendah, kawasan pantai/pesisir serta perbukitan, dengan rata-rata ketinggian permukaan antara 0-100 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Demak dibatasi atas 3 region, sebagai berikut:

- Region A: 0-3 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Bonang, Demak, Karangtengah, Mijen, Sayung, dan Wedung;
- Region B: 3-10 meter, meliputi sebagian besar di tiap-tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Demak; 10-25 meter, meliputi sebagian besar Kecamatan Dempet, Karangawen, dan Mranggen;
5-100 meter, meliputi sebagian besar Kec. Karangawen dan Mranggen;
- Region C: lebih dari 100 meter, meliputi sebagian kecil Kecamatan Karangawen, dan Mranggen.

Kemiringan lahan di Kabupaten Demak sebagian besar relatif datar, yaitu berada pada lahan dengan kemiringan 0-8%. Sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Demak memiliki kemiringan lahan yang sangat bervariasi terutama di wilayah Desa Banyumeneng dan Sumberejo. Kedua desa ini memiliki lahan dengan kemiringan 0-2%, 2-8%, 8-15%, 15-40%, dan lebih besar dari 40%.

C. Klimatologi

Kabupaten Demak mengalami musim hujan pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada bulan-bulan tersebut, angin bertiup dari Asia dan Samudra

Pasifik. Pada bulan Juni sampai dengan September, angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga Kabupaten Demak mengalami musim kemarau. Di antara kedua musim tersebut, terdapat masa peralihan yaitu pada bulan Oktober-November dan April-Mei.

Tabel II.2
Jumlah Hari Hujan dan Rata-Rata Curah Hujan
di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Hari Hujan (hari)	Rata-rata Curah Hujan (mm)
2020	126	2.404
2021	122	2.567
2022	182	2.663
2023	120	1.904
2024	148	2.404

Sumber: BPS, diolah (2025)

Berdasarkan data tersebut di atas, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah hari hujan sebanyak 182 hari dan rata-rata curah hujan sebesar 2.663 mm.

Tabel II.3
Unsur Iklim menurut Bulan di Kabupaten Demak Tahun 2024

Bulan	Rata-rata			
	Suhu (°C)	Kelembaban (%)	Kecepatan Angin (knot)	Tekanan Udara (mbar)
Januari	28,3	84	3	1.010,0
Februari	28,2	83	4	1.011,0
Maret	28,5	83	4	1.009,8
April	29,2	79	4	1.008,5
Mei	30,0	73	4	1.009,1
Juni	28,9	76	4	1.010,1
Juli	28,2	69	12	1.012,5
Agustus	28,6	68	15	1.011,2
September	29,5	67	16	1.010,1
Oktober	29,9	71	13	1.010,1
November	29,2	75	14	1.008,7
Desember	28,2	82	13	1.007,8

Sumber: BPS Kabupaten Demak Dalam Angka (2025)

Suhu udara di Kabupaten Demak tahun 2024 berkisar antara 28,2°C sampai dengan 30,0°C. Sedangkan untuk kelembaban udara bervariasi dari 67% sampai dengan 84% selama tahun 2024 ini. Adapun kecepatan angin paling tinggi di bulan Oktober sebesar 16 knot dengan tekanan udara paling tinggi di bulan Agustus yang mencapai 1.012,5 mbar.

D. Geologi

Secara geologis, Kabupaten Demak terbagi beberapa jenis tanah, di antaranya: 1) Alluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai; 2) Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen; 3) Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Wedung, Kebonagung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Demak, Wonosalam, Dempet, dan Sayung, dan 4) Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.

Sebagian besar kondisi tanah di Kabupaten Demak pada musim kemarau menjadi keras dan retak-retak, sehingga tidak dapat ditanami secara intensif untuk pertanian. Ketika musim hujan, tanah bersifat lekat, volumenya membesar, serta lembap sehingga sulit ditanami dan memerlukan sistem drainase yang memadai. Pada beberapa daerah tertentu kondisi air tanah yang asin dapat mempengaruhi usaha pertanian. Gejala-gejala yang disebabkan oleh air tanah yang asin terutama terjadi pada wilayah dekat pantai dan sungai/saluran pembuangan yang pada musim kemarau dimasuki air laut.

Struktur geologi Kabupaten Demak terdiri dari: 1) Struktur Aluvium terdapat hampir semua Kecamatan di Kabupaten Demak yaitu di Kecamatan Mijen, Bonang, Demak, Gajah, Karanganyar, Wonosalam, Karangtengah, Dempet, Sayung, Guntur, Mranggen, dan Karangawen; 2) Miosen, fasies sedimen terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 3) Pliosen, fasies sedimen terdapat di sebagian kecamatan Karangawen yaitu di Desa Jragung dan sebagian di Kecamatan Mranggen; 4) Plistosen, fasies gunung api terdapat di sebagian Kecamatan Karangawen (Desa Margohayu dan Wonosekar) dan terdapat di Kecamatan Mranggen (Desa Sumberejo); dan 5) Pliosen, fasies batu gamping yaitu hanya terdapat di Kecamatan Mranggen.

E. Hidrologi

Sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Demak terdiri atas sumber air prasarana sumber daya air. Sumber air meliputi air permukaan (sungai, embung, dan bendungan) dan air tanah pada cekungan air tanah. Kabupaten Demak dilewati 12 sungai yaitu Sungai Serang, Kali Wulan, Kali Kenceng, Kali Loben, Kali Jajar, Kali Tuntang, Kali Jragung, Kali Setu, Kali Dolog, Kali Daleman, Kali Mondoliko, dan Kali Babon. Cekungan air tanah yang terdapat di Kabupaten Demak yaitu cekungan air tanah Kudus dan cekungan air tanah Semarang-Demak. Namun demikian, rata-rata kualitas air tanah dangkal (sumur gali) dan air tanah dalam (sumur bor) di Demak kurang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai air minum. Hal tersebut akibat air tanah di Demak banyak mengandung

unsur besi dan pada musim kemarau kapasitasnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Prasarana sumber daya air terdiri atas sistem jaringan, sistem pengendalian banjir dan rob, jaringan untuk air bersih dan jaringan air bersih ke kelompok pengguna. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, Kabupaten Demak pada tahun 2021 mulai mengembangkan Daerah Irigasi Suka Baru yang digunakan untuk mengairi areal persawahan Kecamatan Bonang. Hingga tahun 2024, Kabupaten Demak memiliki sistem jaringan irigasi yang berada di 13 daerah irigasi (DI) yaitu:

1. Daerah Irigasi Sedadi;
2. Daerah Irigasi Glapan Timur;
3. Daerah Irigasi Glapan Barat;
4. Daerah Irigasi Klambu Kiri;
5. Daerah Irigasi Jragung;
6. Daerah Irigasi Guntur;
7. Daerah Irigasi Pelayaran Sayung Batu;
8. Daerah Irigasi Penggaron;
9. Daerah Irigasi Sumberejo;
10. Daerah Irigasi Polder Batu;
11. Daerah Irigasi Gablok;
12. Daerah Irigasi Pelayaran Buyaran;
13. Daerah Irigasi Dolok.

F. Penggunaan Lahan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2011-2031 menyebutkan bahwa berdasarkan kajian citra satelit, diketahui luas wilayah Kabupaten Demak yaitu 99.532 ha. Luas ini sedikit berbeda dari penghitungan sebelumnya, yaitu 89.743 ha. Sebagian besar lahan di Kabupaten Demak merupakan lahan sawah (58,85%). Lahan pertanian bukan sawah yang terdiri dari tegal/kebun, tambak dan hutan rakyat menempati 22,45% luas keseluruhan, sedangkan sisanya (18,70%) digunakan untuk perumahan-pemukiman, industri, perdagangan dan perkantoran serta prasarana umum lainnya.

Penggunaan lahan sawah mendominasi di Kabupaten Demak, karakteristik geografis berada di hilir DAS menyebabkan mempunyai jenis ekoregion dataran alluvial. Dataran alluvial memiliki tanah subur yang berasal dari endapan mineral dari tanah yang terbawa oleh aliran sungai. Selain itu, tanah alluvial mudah untuk penyerapan dan mengalirkan air. Aspek kesuburan tanah

dan ketersediaan air melimpah menyebabkan sesuai untuk tanaman semusim seperti padi. Hingga sampai saat ini, Kabupaten Demak menjadi salah satu penyangga pangan secara regional tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Dengan demikian pemanfaatan lahan diperlukan dalam rangka peningkatan produktivitas dan produksi tanaman, khususnya tanaman padi.

Tabel II.4
Luas Lahan berdasarkan Penggunaan Lahan
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Tahun	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan (Ha)
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
2020	53.597	18.938	17.208	89.743
2021	52.761	20.759	16.223	89.743
2022	52.681	20.260	16.801	89.743
2023	52.813	20.149	16.782	89.743
2024	53.034	19.908	16.800	89.743

Sumber: Dinpertan Pangan Kabupaten Demak (2024)

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah di Kabupaten Demak berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. Perda Nomor 1 Tahun 2020 merupakan hasil peninjauan RTRW yang telah dilakukan sejak tahun 2016 dan telah ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2020 serta diundangkan pada tanggal 2 Maret 2020.

Dari hasil peninjauan RTRW, basis ruang wilayah di Kabupaten Demak mengalami pergeseran dari semula *berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata* menjadi *berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan*. Perbedaan besar terletak pada sektor industri yang semula menjadi sektor pendukung menjadi sektor utama, serta penambahan klausul *berwawasan lingkungan yang berkelanjutan* sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam mendukung capaian *Sustainable Development Goals (SDGs) 2030*.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 – 2031 berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Demak meliputi:

1. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
2. pengembangan komoditas pertanian yang prospektif;
3. pengembangan kawasan pesisir;
4. pengembangan pusat pelayanan;
5. pengembangan prasarana wilayah pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
6. peningkatan pengelolaan kawasan lindung;
7. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
8. pengembangan kawasan industri yang mempertimbangkan efektivitas ruang; dan
9. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

Rencana struktur ruang terdiri atas rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Kabupaten Demak berada di kawasan Kedungsepur (Kendal – Demak – Ungaran – Semarang - Salatiga - Purwodadi) dengan Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen sebagai kawasan yang melayani kegiatan utamanya. Jaringan prasarana wilayah terdiri dari jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, sumber daya air dan jaringan prasarana lainnya.

Berdasarkan rencana pola ruang, Kabupaten Demak dibagi menjadi dua, yaitu kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya. Dalam tinjauan RTRW, kawasan resapan air di Kabupaten Demak berada di Kecamatan Karangawen dan Mranggen dengan luas kurang lebih 322 ha. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan saluran irigasi sempadan embung dan ruang terbuka hijau yang tersebar di wilayah Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 1.776 ha.

Kawasan ekosistem mangrove dan kawasan lindung geologi disebutkan lebih spesifik. Kabupaten Demak saat ini memiliki 701 ha kawasan ekosistem mangrove yang terbentang di sepanjang pesisir pantai Kecamatan Bonang, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Sayung dan Kecamatan Wedung. Ekosistem mangrove perlu dipertahankan bahkan dikembangkan karena berperan besar dalam mencegah erosi dan abrasi pantai, salah satu ancaman lingkungan yang dihadapi Kabupaten Demak selama bertahun-tahun. Selain itu, ekosistem mangrove berfungsi sebagai filter bahan pencemar, menjadi habitat bagi spesies lain dan berpotensi menjadi kawasan wisata daerah.

Kawasan peruntukan budi daya dibagi ke dalam kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Demak berada di Kecamatan Karangawen dan Mranggen dengan luas kurang lebih

3.278 Ha, di mana terdiri dari kawasan hutan produksi terbatas seluas 568 Ha yang berada di Kecamatan Karangawen dan kawasan hutan produksi tetap seluas 2.710 hektar di Kecamatan Karangawen dan Mranggen. Kawasan pertanian terdiri atas kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura. Kawasan tanaman pangan Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 56.763 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan dan kawasan lahan pangan berkelanjutan kurang lebih 56.530 ha yang termasuk dalam kawasan tanaman pangan serta kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 1.556 Ha. Kawasan perikanan di Kabupaten Demak terdiri atas perikanan tangkap dan perikanan budi daya di mana budidaya tambak memiliki luasan total kurang lebih 6.062 Ha yang tersebar di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang, Mijen dan Wedung. Sedangkan pada perikanan tangkap meliputi fasilitas perikanan tangkap dan pengembangan pengolahan perikanan. Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Demak berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang termasuk Wilayah Kerja Blok Blora.

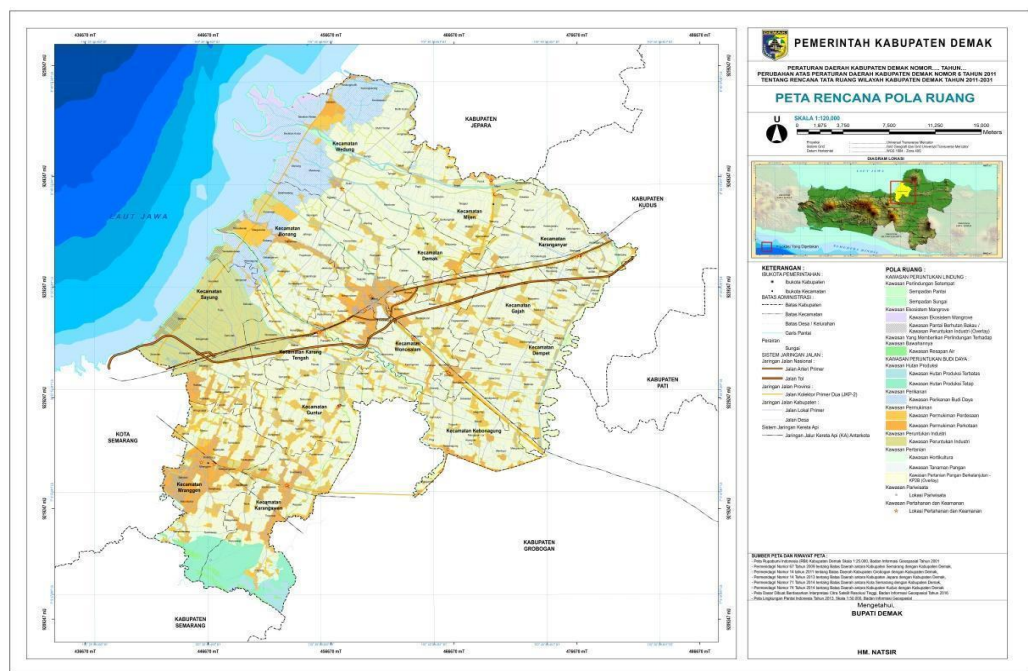
Kawasan peruntukan industri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 Perda RTRW Kabupaten Demak Tahun 2011-2031 tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Demak dengan luas kurang lebih 7.646 Ha. Alokasi kawasan peruntukan industri terbesar pada Kecamatan Sayung dan Karangtengah karena merupakan prioritas utama dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Kawasan pariwisata di Kabupaten Demak masih mengandalkan wisata religi Masjid Agung Demak dan Makam Sunan Kalijaga serta Makam Syekh Mudzakir yang berada di Pantai Morosari yang merupakan Kawasan Strategis Provinsi di dukung dengan wisata alam seperti Pantai Morosari maupun Pantai Tambakbulsan. Beberapa kawasan pariwisata lain yang juga memberikan kontribusi pembangunan seperti Pantai Morodemak, Pantai Surodadi, Hutan Wisata Wonosekar, Waduk Bengkah, dan Pantai Onggojoyo yang merupakan pariwisata alam. Dari sisi pariwisata budaya juga ada Museum Masjid Agung, Tradisi Grebeg Besar Demak dan Tradisi Sedekah Laut. Sedangkan pada pariwisata buatan, terdapat Bendung Gerak Kali Jajar, Bendung Karet Kali Jajar, Bendung Karet Kali Kumpulan, Taman Ria Kota Demak, Agrowisata Kebonbatur dan Agrowisata Jambu Lele.

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 19.055 Ha. Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Demak terdiri atas Kantor Tentara Nasional Indonesia dan Kantor Kepolisian Republik Indonesia di seluruh kecamatan.

Gambar II.2

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Demak 2011-2031



Sumber: Pemerintah Kabupaten Demak (2022)

Pada rencana struktur ruang wilayah pembangunan Kabupaten Demak terdiri dari rencana sistem perkotaan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem perkotaan terdiri dari struktur perkotaan dan sistem wilayah. Pada potensi pengembangan wilayah difokuskan pada struktur perkotaan di mana dapat dirincikan sebagai berikut:

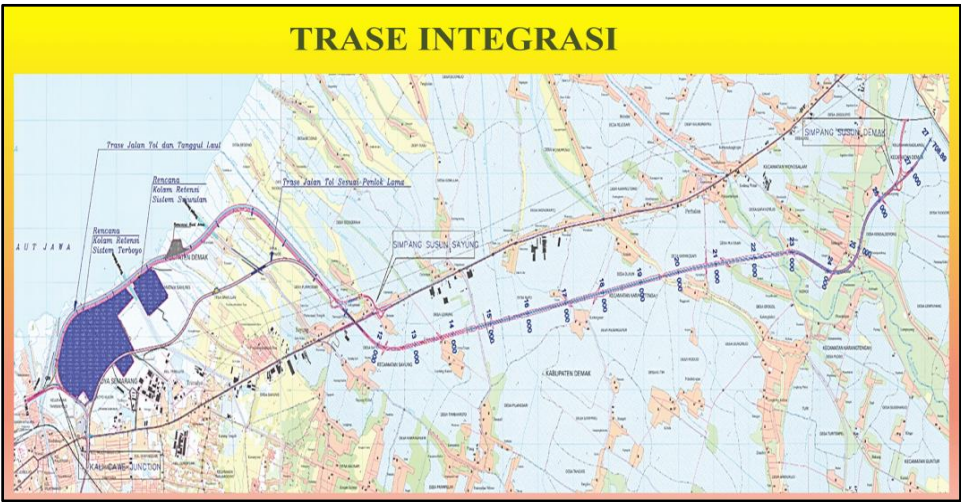
1. PKN (Pusat Kegiatan Nasional) merupakan bagian dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran –Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.
2. PKL (Pusat Kegiatan Lokal) meliputi kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen. Kawasan perkotaan Sayung dan kawasan perkotaan Wedung didorong untuk berperan sebagai PKL.
3. PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi kawasan perkotaan Gajah, Dempet, Guntur, Sayung, Karangtengah, Bonang, Wedung, Karangawen, Wonosalam, Karanganyar, Mijen, dan Kebonagung.
4. PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) meliputi:
 - a. Desa Tambirejo berada di Kecamatan Gajah,
 - b. Desa Dempet dan Desa Sidomulyo berada di Kecamatan Dempet,
 - c. Desa Pamongan berada di Kecamatan Guntur,
 - d. Desa Gemulak dan Desa Bulusari berada di Kecamatan Sayung,
 - e. Desa Pulosari dan Desa Karangsari berada di Kecamatan Karangtengah,
 - f. Desa Gebang dan Desa Bonangrejo berada di Kecamatan Bonang,
 - g. Desa Tlogorejo berada di Kecamatan Karangawen,

- h. Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli berada di Kecamatan Wonosalam,
- i. Desa Cangkring berada di Kecamatan Karanganyar,
- j. Desa Bakung berada di Kecamatan Mijen,
- k. Desa Werdoyo berada di Kecamatan Kebonagung, dan
- l. Desa Buko dan Desa Bungo berada di Kecamatan Wedung.

Dari sudut kepentingan ekonomi, maka sebagai wilayah yang masuk ke dalam kawasan strategis nasional Kedungsepur, Kabupaten Demak harus memperhatikan pembangunan pada lokasi kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung – Karangtengah – Demak – Wonosalam – Gajah – Karanganyar, kawasan industri terpadu Sayung, kawasan wisata pantai Surodadi di Kecamatan Sayung serta kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak di Kecamatan Bonang. Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi kawasan rawan abrasi dan rob pantai di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah dan Kecamatan Bonang dengan kegiatan berupa penanganan masalah rob dan abrasi, serta kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul di Kecamatan Wedung dengan kegiatan berupa identifikasi tanah Negara dan arahan pengelolaannya.

Dalam Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang; dan Perpres 109 Tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; Kabupaten Demak direncanakan mendapat proyek pembangunan Jalan Tol Tanggul Laut Semarang – Demak, peningkatan terminal tipe A, reaktivasi jalur KA Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.

Gambar II.3
Proyek Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak



Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2021

Selain itu, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan dilaksanakan setelah penyelesaian *exit* tol (Sayung dan Wonosalam) dan ditindaklanjuti pula dengan peningkatan konektivitas jaringan jalan. Adapun dalam pengembangan pariwisata, maka dilakukan pembangunan berbagai sarana prasarana pendukung seperti pembangunan Terminal Tipe A dan Reaktivasi Jalur Rel KA Semarang - Demak - Kudus- Pati -Rembang yang merupakan kegiatan nasional sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2019.

Rencana sistem jaringan prasarana meliputi sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaringan prasarana lainnya. Sistem jaringan transportasi terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, serta jaringan transportasi laut. Sistem jaringan energi terdiri dari jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta ketenagalistrikan.

Jaringan telekomunikasi terbagi menjadi dua yakni jaringan tetap yang berupa pengembangan sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel berada di seluruh Kecamatan. Sistem jaringan prasarana telekomunikasi jaringan kabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan. Sedangkan jaringan bergerak yang dimaksud adalah jaringan bergerak seluler berupa pembangunan menara telekomunikasi sistem nirkabel di seluruh wilayah.

Adapun sistem jaringan sumber daya air dibagi menjadi dua yakni sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten dan sistem jaringan sumber daya air kabupaten. Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten difokuskan pada peningkatan pengelolaan Wilayah Sungai Strategis Nasional Jratun Seluna. Sedangkan sistem jaringan sumber daya air kabupaten meliputi DAS Babon, DAS Tuntang, DAS Jragung, DAS Serang, DAS Dolok, DAS Kaliombo, dan DAS Setu.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

Dalam melihat kondisi lingkungan hidup, diperlukan penjelasan pada muatan dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang salah satunya meliputi kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air, dan lahan. Daya dukung lahan diuraikan dalam bentuk daya dukung terbangun dan fungsi lindung. Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan yang dituangkan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air yang dituangkan dalam bentuk sebaran kualitas air. Berikut detail daya dukung dan daya tampung pada kondisi lingkungan hidup Kabupaten Demak.

a. **Daya Dukung Air Permukaan**

Daya dukung air dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila ketersediaan air lebih tinggi dibandingkan kebutuhan maka masih belum terlampaui. Sebaliknya apabila kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan maka Terlampaui. Daya dukung air dibagi menjadi dua perhitungan yaitu ketersediaan dan kebutuhan air.

Ketersediaan Air diasumsikan dengan data jasa penyedia air dan potensi air Daerah Aliran Sungai maupun sumber air permukaan. Semakin tinggi nilai koefisien jasa lingkungan penyedia air dan potensi DAS maka semakin tinggi. Hasil perhitungan dari menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Demak berdasarkan metode grid sebesar 706.419.709 m3 per tahun. Kecamatan Wedung mempunyai ketersediaan air paling tinggi yaitu 76 juta m3 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Kebonagung, yaitu hanya 35 juta m3. Kecamatan Wedung mempunyai luasan jasa penyedia air kelas sangat tinggi yaitu 6.276 hektar. Angka tersebut tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya sehingga tingkat ketersediaan airnya juga tinggi.

Daya dukung air dianalisis berdasarkan perhitungan kebutuhan dan ketersediaan air. Apabila ketersediaan air lebih tinggi dibandingkan kebutuhan maka masih belum terlampaui. Sebaliknya apabila kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan maka Terlampaui. Daya dukung air dibagi menjadi dua perhitungan yaitu ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan Air diasumsikan dengan data jasa penyedia air dan potensi air Daerah Aliran Sungai maupun sumber air permukaan. Semakin tinggi nilai koefisien jasa lingkungan penyedia air dan potensi DAS maka semakin tinggi. Hasil perhitungan dari menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Demak berdasarkan metode grid sebesar 706.419.709 m3 per tahun. Kecamatan Wedung mempunyai ketersediaan air paling tinggi yaitu 76 juta m3 sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Kebonagung, yaitu hanya 35 juta m3. Kecamatan Wedung mempunyai luasan jasa penyedia air kelas sangat tinggi yaitu 6.276 hektar. Angka tersebut tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya sehingga tingkat ketersediaan airnya juga tinggi.

Tabel II.5
Luas Daya Dukung Air Berbasis Grid

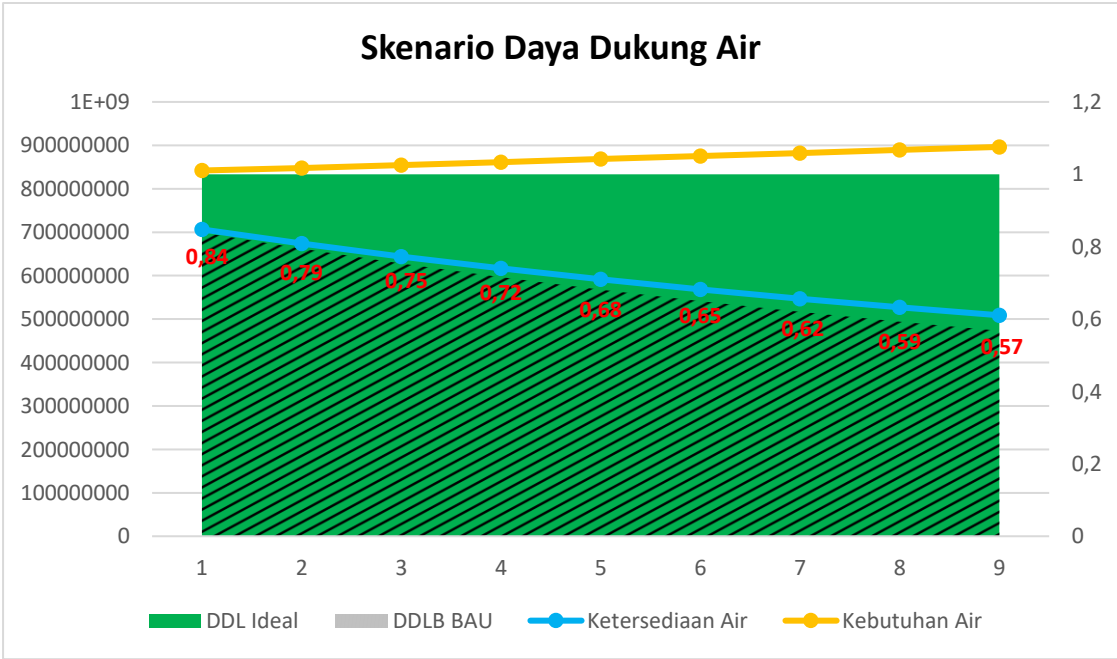
Kecamatan	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	Total
Bonang	3.334,86	38,31	5.371,17	61,69	8.706,03
Demak	1.448,71	22,98	4.856,40	77,02	6.305,11
Dempet	1.137,26	17,79	5.256,75	82,21	6.394,01
Gajah	869,48	16,18	4.503,72	83,82	5.373,20
Guntur	1.533,78	23,86	4.894,35	76,14	6.428,13
Karang Tengah	1.931,34	34,22	3.712,55	65,78	5.643,88

Kecamatan	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	Total
Karanganyar	855,01	12,24	6.132,47	87,76	6.987,48
Karangawen	4.267,93	52,24	3.902,67	47,76	8.170,60
Kebonagung	910,26	20,47	3.535,91	79,53	4.446,17
Mijen	727,99	13,24	4.771,91	79,53	5.499,90
Mranggen	3.359,29	43,29	4.400,20	56,71	7.759,49
Sayung	6.242,68	72,62	2.353,6	27,38	8.596,64
Wedung	3.457,48	26,71	9.484,82	73,29	12.942,30
Wonosalam	1.422,34	22,65	4.857,08	77,35	6.279,42
Total	31.498,40	31,65	68.033,95	68,35	99.532,35

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Perhitungan daya dukung air dipengaruhi beberapa faktor di antaranya yaitu jumlah penduduk dan kebutuhan air. Berdasarkan skenario BAU daya dukung air Kabupaten Demak Tahun 2023 hingga tahun 2031, dapat diketahui bahwa daya dukung air Kabupaten Demak mengalami penurunan dan berada di bawah kondisi ideal daya dukung air. Kondisi ideal daya dukung air di suatu wilayah berada pada minimal 1. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2023 daya dukung air berada pada angka 0,84. Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2031 daya dukung air Kabupaten Demak menjadi 0,57.

Gambar II.4
Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2031



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

Kondisi tersebut dikarenakan meningkatnya angka kebutuhan air Kabupaten Demak, sedangkan ketersediaan air di wilayah Kabupaten Demak cenderung mengalami penurunan. Kondisi daya dukung air terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 9 tahun, dengan demikian diperlukan upaya atau strategi untuk menghadapi hal tersebut di antaranya yaitu:

- Peningkatan kualitas air sungai agar layak dimanfaatkan sebagai sumber air baku dengan mengurangi beban cemar pada air dari kegiatan industri, rumah tangga, dan pertanian;
- Meningkatkan penangkapan air melalui pembangunan embung dan waduk
- Penerapan sistem produksi bersih pada kegiatan industri agar dapat menghemat penggunaan air;
- Penerapan insentif bagi kegiatan produksi baik pertanian maupun industri yang dapat menekan atau menghemat penggunaan air.

Tabel II.6
Skenario Daya Dukung Air Tahun 2023-2031

Daya Dukung Air	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DDL Ideal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DDLB BAU	0.84	0.79	0.75	0.72	0.68	0.65	0.62	0.59	0.57
Ketersediaan Air	706419 709.8	673704 396.9	643885 149.4	616593 713.3	591521 730.3	568409 036.5	547034 600.7	527209 433.5	508770 984.1
Kebutuhan Air	842070 102.5	847959 912.7	854715 870	861525 654.2	868389 693.9	875308 421.7	882282 273	889311 687.1	896397 106.8

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

b. Daya Dukung Pangan

Komponen perhitungan daya dukung terdiri dari dua yaitu kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*). Kebutuhan dicerminkan oleh jumlah penduduk di suatu wilayah sedangkan produksi dan luas lahan pertanian menggambarkan ketersediaan. Rumus yang digunakan merujuk pada PermenLH nomor 17 tahun 2009 tentang penentuan daya dukung untuk penataan ruang. Rumus daya dukung pangan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan.

Hasil perhitungan menunjukkan hampir semua kecamatan di Kabupaten Demak masih memiliki daya dukung untuk pangan. Hanya terdapat dua kecamatan yang sudah terlampaui yaitu Mranggen dan Sayung. Ketersediaan lahan pertanian dan jumlah penduduk yang masif menjadi salah satu alasan daya dukungnya sesudah terlampaui. Luas panen dua kecamatan tersebut paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Demak. Luas panen di Kecamatan Sayung hanya 1.039 hektar sedangkan Mranggen 2.949 hektar, padahal kecamatan lainnya di atas 5.000 hektar. Selain itu jumlah penduduk di dua kecamatan tersebut relatif tinggi di Kabupaten Demak. Kecamatan Mranggen memiliki jumlah penduduk 177.837 jiwa, terbanyak se-kabupaten. Sedangkan Kecamatan Sayung sebanyak 106.503, tertinggi ke 4. Hal ini ada ketidakseimbangan antara kebutuhan pangan semakin naik, sedangkan lahan pertanian bertambah sempit.

Fenomena alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Demak. Alih fungsi yang tidak terkontrol dapat mengurangi lahan sawah produktif di masa yang akan datang. Pengurangan lahan akan berdampak pada kemampuan mendukung memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Padahal peran Demak sebagai wilayah penyuplai pangan cukup penting di tingkat regional.

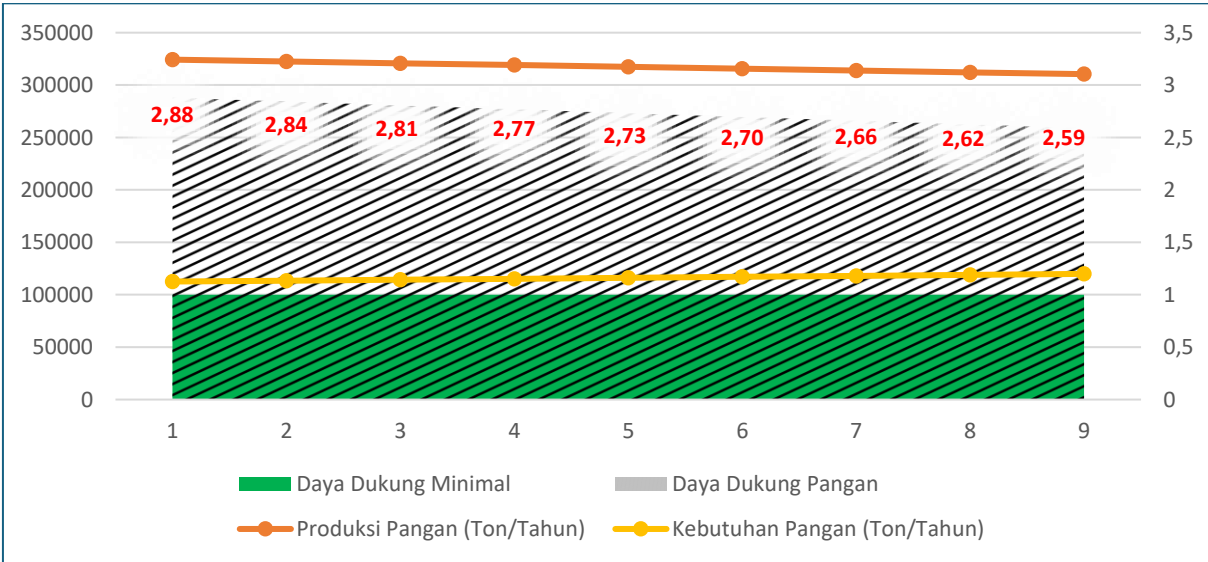
Tabel II.7
Daya Dukung Pangan Kabupaten Demak

Kecamatan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Jumlah Penduduk	Kebutuhan Layak	Kebutuhan Lahan (Ha)	Selisih	Status
Demak	8.295	55,02	6632.89	111,576	113,48	1,909	6,386	Belum Terlampaui
Bonang	9.322	56,682	6080.49	107,915	113,48	2,014	7,308	Belum Terlampaui
Wonosalam	7.525	48,087	6390.31	86,638	113,48	1,539	5,986	Belum Terlampaui
Dempet	8.248	55,466	6724.76	60,921	113,48	1,028	7,22	Belum Terlampaui
Kebonagung	6.971	46,78	6710.64	41,955	113,48	709	6,262	Belum Terlampaui
Karangtengah	3.968	22,525	5676.58	70,154	113,48	1,402	2,566	Belum Terlampaui
Guntur	5.77	34,701	6014.06	88,228	113,48	1,665	4,105	Belum Terlampaui
Sayung	1.039	6,16	5928.70	106,503	113,48	2,039	1000	Terlampaui
Mranggen	2.949	18,948	6425.10	177,837	113,48	3,141	192	Terlampaui
Karangawen	5.285	33,683	6373.24	96,198	113,48	1,713	3,572	Belum Terlampaui
Mijen	6.894	44,086	6394.88	59,395	113,48	1,054	5,84	Belum Terlampaui
Wedung	10.585	67,209	6349.47	84,073	113,48	1,503	9,082	Belum Terlampaui
Gajah	8.782	57,676	6567.49	53,101	113,48	918	7,864	Belum Terlampaui
Karanganyar	10.224	67,924	6643.57	78,723	113,48	1,345	8,879	Belum Terlampaui

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Perhitungan daya dukung pangan dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya angka produksi padi, angka konsumsi beras, dan jumlah penduduk di suatu wilayah. Berdasarkan perhitungan daya dukung pangan, dapat diketahui bahwa daya dukung pangan di Kabupaten Demak Tahun 2023 berada pada angka 2,88. Berdasarkan skenario BAU, daya dukung pangan di Kabupaten Demak terus mengalami penurunan mulai tahun 2023 hingga tahun 2031.

Gambar II.5
Skenario Daya Dukung Pangan Tahun 2023-2031



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

Penurunan tersebut terjadi dikarenakan selama tahun 2023 hingga 2031 produksi pangan mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan pangan mengalami kenaikan. Meskipun mengalami penurunan, kondisi daya dukung lahan pangan Kabupaten Demak masih berada di atas ambang batas daya dukung pangan. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2023 hingga tahun 2031, Kabupaten Demak dapat berkontribusi atau memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Demak.

Tabel II.8
Skenario Daya Dukung Pangan Tahun 2023-2031

Daya Dukung LH	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Daya Dukung Minimal	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Produksi Pangan (Ton/Tahun)	324.272,87	322.545,44	320.817,99	319.090,56	317.363,13	315.635,70	313.908,26	312.180,83	310.453,39
Daya Dukung Pangan	2.88	2.84	2.81	2.77	2.73	2.70	2.66	2.62	2.59
Kebutuhan Pangan (Ton/Tahun)	112.621,59	113.409,31	114.312,88	115.223,65	116.141,67	117.067,01	117.999,71	118.939,85	119.887,48

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

c. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan untuk kawasan terbangun Kabupaten Demak mempertimbangkan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, dan luas lahan terbangun, berikut hasil perhitungannya:

Tabel II.9
Daya Dukung Lahan Terbangun

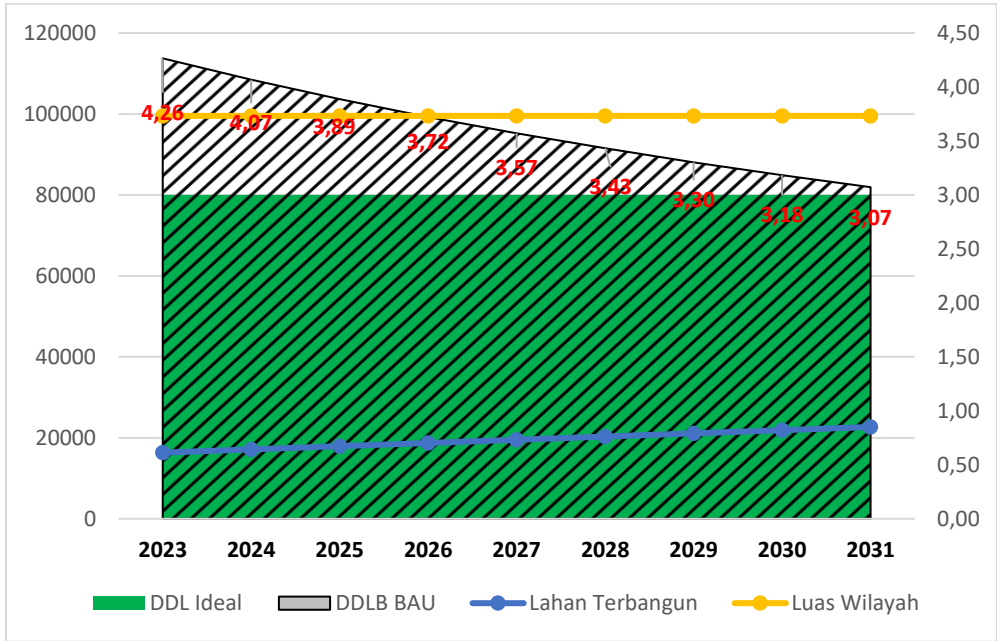
Keterangan	Luas	Satuan
Luas Wilayah	99.532,35	Ha
Luas Lahan Bangunan (LB)	15.787,63	Ha
Luas untuk Infrastruktur (20% LB)	-	Ha
Luas Lahan Terbangun (LTB)	15.787,63	Ha
Daya Dukung	4,41	Indeks

Sumber: Dokumen D3TLH Kabupaten Demak, 2023

Jadi, DDLB Kabupaten Demak secara keseluruhan sebesar 4,41 yang termasuk dalam daya dukung lahan terbangun baik (>3). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang untuk pengembangan kegiatan terbangun, masih bisa dikembangkan kembali. Perlu adanya pembatasan lahan terbangun. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya degradasi lahan yang dapat terjadi apabila dilakukan pembangunan khususnya terkait lahan pertanian dan ruang terbuka hijau. Penurunan nilai daya dukung lahan terbangun dapat berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup khususnya terkait limpasan permukaan dan polusi udara. Oleh karena itu, keseimbangan antara jumlah penduduk dan kebutuhan lahan merupakan faktor yang harus diperhatikan.

Perhitungan daya dukung lahan terbangun menggunakan luasan lahan terbangun pada RTRW Kabupaten Demak, menunjukkan hasil bahwa pada tahun 2023 DDLB Kabupaten Demak sebesar 4,26 yang termasuk dalam kategori baik Berdasarkan skenario daya dukung lahan terbangun Kabupaten Demak Tahun 2021-2031, dapat diketahui tren daya dukung lahan total, tren daya dukung lahan terbangun BAU, dan tren lahan terbangun pada tahun 2023 hingga tahun 2031. Selama tahun 2023 hingga tahun 2031, tren daya dukung lahan terbangun BAU mengalami penurunan dari 4,26 pada tahun 2023 hingga menjadi 3,07 pada tahun 2031. Kondisi daya dukung lahan pada suatu wilayah dikatakan baik jika minimal berada pada angka 3. Penurunan tersebut terjadi dikarenakan luasan lahan terbangun di Kabupaten Demak yang semakin bertambah tiap tahunnya, sedangkan luas wilayah Kabupaten Demak berada dalam luasan yang stagnan. Penurunan tren daya dukung lahan terbangun BAU tersebut tidak terjadi secara signifikan.

Gambar II.6
Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Tahun 2023-2031



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

Kondisi daya dukung lahan terbangun mengalami penurunan hingga di bawah kategori ideal, dengan demikian perlu dilakukan beberapa langkah strategi untuk menghadapi hal tersebut di antaranya yaitu:

- Pembangunan kawasan perkotaan yang kompak dengan mendorong penggunaan bangunan vertikal sesuai kemampuan lahan untuk efisiensi penggunaan lahan terutama untuk kawasan peruntukan permukiman perkotaan.
- Penerapan 30% RTH pada kawasan terbangun terutama permukiman tetap menyediakan ruang terbuka.

Tabel II.10
Skenario Daya Dukung Lahan Terbangun Tahun 2023-2031

DDL (SHP)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Luas Lahan Terbangun (Ha)	16336.14	17129.43	17922.72	18716.01	19509.3	20302.59	21095.88	21889.16	22682.45
DDL Ideal	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
DDL BAU	4.26	4.07	3.89	3.72	3.57	3.43	3.30	3.18	3.07
Luas Wilayah (Ha)	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35	99532.35

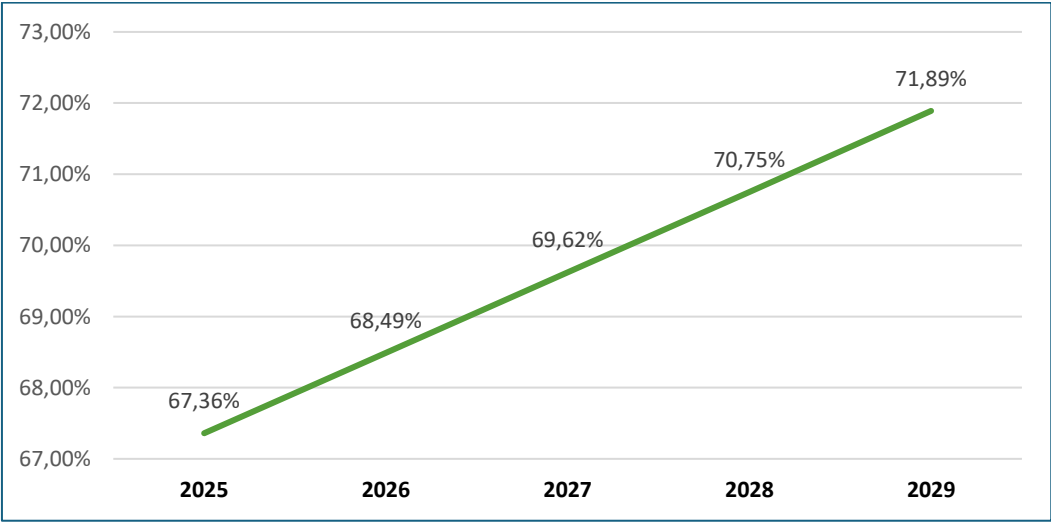
Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

c. Skenario Pengelolaan Sampah

Perkiraan layanan sampah di Kabupaten Demak secara total akan meningkat sangat kecil. Hal ini karena pelayanan pengelolaan sampah masih difokuskan pada kawasan perkotaan. Sementara perkembangan penduduk dan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan akan terus meningkat baik di perkotaan maupun di perdesaan. Skenario pengelolaan sampah yang dapat terolah di

fasilitas persampahan terus meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Pada tahun 2025, pengelolaan sampah di Kabupaten Demak ditargetkan mencapai angka 67,36% dan pada tahun 2029 ditargetkan mencapai angka 71,89%. Berikut adalah skenario peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Demak.

Gambar II.7
Skenario Sampah yang Terolah di Fasilitas Persampahan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Demak, 2024

TPA di Demak seluruhnya telah habis usia teknisnya pada 2019, sehingga secara teknis sudah tidak dapat digunakan lagi. Untuk mewujudkan peningkatan layanan sampah di atas maka perlu dikembangkan beberapa strategi berikut.

- Peningkatan layanan untuk perkotaan mencapai 100% sedangkan di perdesaan sekitar 30%.
- Mereduksi sampah di tingkat sumber dengan menerapkan bank sampah dan TPS 3R.
- Mengembangkan TPST dalam skala beberapa kecamatan dengan konsep pengelolaan 3R dengan ditambah *landfill*.
- Mengembangkan TPA sebagai penampungan residu dari TPST serta mengembangkan teknologi PLTS dan teknologi lain yang dapat mereduksi sampah di TPA.

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketersediaan air baku di Kabupaten Demak masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan sebagai upaya ketahanan air di masa depan. Kondisi geografi wilayah kabupaten Demak yang berada di daerah pesisir menjadi tempat bermuaranya beberapa sungai besar seperti Kali Tuntang, Kali Wulan, dan Kali Jajar. Namun, kualitas dan kuantitas air permukaan menjadi persoalan, mengingat air sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Demak memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi dengan keberlangsungan debit andalan rendah

terutama pada saat musim kemarau. Sementara di wilayah pesisir pantai, kadar salinitas air yang tinggi akibat adanya rob maupun intrusi air laut ke darat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air baku.

Sampai saat ini, air tanah dan air permukaan (sungai) menjadi sumber air baku andalan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk air bersih. Tantangan menjadi bertambah mengingat wilayah Kabupaten Demak termasuk Zona Merah untuk pengambilan air tanah, sementara ketersediaan air sungai tidak kontinu. Di sisi lainnya pemanfaatan air hujan (air permukaan) belum optimal karena belum adanya bendungan, waduk, atau penampungan air lainnya di Kabupaten Demak yang memiliki kapasitas cukup untuk keperluan pemenuhan air baku.

Tabel II.11
Cakupan Akses Air Minum Layak di Kabupaten Demak Berdasarkan Sumber (2020–2024)

Tahun	Cakupan Total Air Minum Layak (%)	PDAM (%)	Non-PDAM (%)
2020	80.08	16,82	63,26
2021	82,98	17,11	65,87
2022	85.58	18.09	67.49
2023	87.64	20.51	67.13
2024	92.26	20,22	72,04

Sumber: Dinputaru Kabupaten Demak (2025)

Cakupan akses air minum layak di Kabupaten Demak tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dari 80,08% pada tahun 2020 menjadi 92,26% pada tahun 2024. Meskipun cakupan layanan dari PDAM mengalami sedikit fluktuasi, yakni meningkat dari 18,09% pada 2022 menjadi 20,51% pada 2023, lalu sedikit menurun menjadi 20,22% pada 2024. Capaian cakupan total air minum layak terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan sebesar 12,18%. Kontribusi utama peningkatan akses air minum layak berasal dari sumber non-PDAM. Cakupan air minum layak non-PDAM naik dari 67,49% pada 2022 menjadi 72,11% pada 2024. Hal ini mencerminkan peran penting sumber air alternatif, seperti sumur gali, sumur bor, atau sistem penyediaan air berbasis masyarakat, dalam memperluas akses air minum layak di wilayah Kabupaten Demak.

Kondisi energi di Kabupaten Demak mencerminkan kebutuhan energi, khususnya listrik, terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, serta ekspansi sektor industri dan jasa. Konsumsi listrik menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat pembangunan dan kualitas hidup masyarakat.

Tabel II.12

Daya Terpasang, Produksi Listrik, dan Listrik Terjual

Bulan	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)
Januari	649.479.388	135.158.945	111.130.616
Februari	651.328.338	128.979.956	105.606.265
Maret	653.498.138	136.817.725	115.055.935
April	653.613.388	124.610.958	98.711.081
Mei	658.032.438	150.427.215	124.888.248
Juni	662.228.738	147.020.363	118.858.570
Juli	665.953.288	151.453.634	132.492.639
Agustus	669.474.438	152.014.488	124.086.480
September	677.502.602	148.939.354	119.627.886
Oktober	680.184.388	162.948.453	129.260.856
November	683.754.388	158.820.537	124.239.097
Desember	691.755.188	154.793.323	125.310.284

Sumber: PLN UP3 Grobogan Kabupaten Demak

Data terkait daya terpasang, produksi listrik, listrik terjual, serta jumlah pelanggan listrik pada tahun 2024 mencerminkan kondisi sistem kelistrikan yang tidak hanya mencakup wilayah Kabupaten Demak, tetapi juga mencakup Kabupaten Grobogan. Hal ini disebabkan oleh sistem jaringan kelistrikan kedua kabupaten yang berada dalam satu wilayah layanan operasional dan pencatatan oleh pihak penyedia listrik, sehingga data yang tersedia merupakan hasil agregasi dari dua wilayah tersebut.

Sepanjang tahun 2024, Kabupaten Demak menunjukkan tren peningkatan kapasitas dan konsumsi listrik. Daya terpasang meningkat dari 649 juta VA pada Januari menjadi 691 juta VA pada Desember, mencerminkan bertambahnya kebutuhan listrik akibat pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi. Produksi listrik juga cenderung naik, dengan puncaknya terjadi pada Oktober sebesar 162,9 juta KWh. Sementara itu, listrik yang terjual mencapai angka tertinggi pada Juli sebesar 132,4 juta KWh, mencerminkan tingginya konsumsi masyarakat pada periode tersebut. Data ini menunjukkan adanya dinamika positif dalam sektor kelistrikan yang perlu diimbangi dengan penguatan sistem distribusi dan efisiensi pemanfaatan energi.

Tabel II.13.

Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Bulan
di Kabupaten Demak 2020-2024

Bulan	2020	2021	2022	2023	2024
Januari	298.456	306.419	395.366	406.332	418.696
Februari	299.147	306.956	396.375	407.081	419.733
Maret	299.809	307.790	397.319	407.905	420.701
April	300.344	308.595	398.188	408.500	421.737
Mei	300.784	309.216	398.945	409.398	422.956
Juni	301.344	310.131	399.966	410.181	424.231
Juli	301.967	310.855	400.858	411.114	425.464
Agustus	302.551	311.925	401.864	412.455	427.020
September	302.950	312.701	402.721	413.759	428.246

Oktober	303.614	313.703	403.497	414.947	429.735
November	304.679	314.656	404.545	416.286	431.064
Desember	305.669	315.551	405.619	417.566	432.241

Sumber : PLN UP3 Grobogan Kabupaten Demak dan BPS Demak (2025)

Data jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Demak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2022 hingga 2024. Pada Januari 2022 tercatat sebanyak 395.366 pelanggan, dan jumlah ini terus bertambah hingga mencapai 432.241 pelanggan pada Desember 2024. Pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya akses dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan listrik, seiring dengan perkembangan wilayah dan aktivitas sosial-ekonomi. Peningkatan yang stabil tiap bulan juga mengindikasikan kinerja distribusi dan penyambungan listrik yang cukup baik di daerah ini.

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemis dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Tabel II.14
Ketahanan Pangan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Tahun	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
2020	8,02	85,04
2021	8,80	85,82
2022	9,00	87,38
2023	7,77	89,03
2024	7,59	90,47

Sumber: BPS, Badan Pangan Nasional, 2024

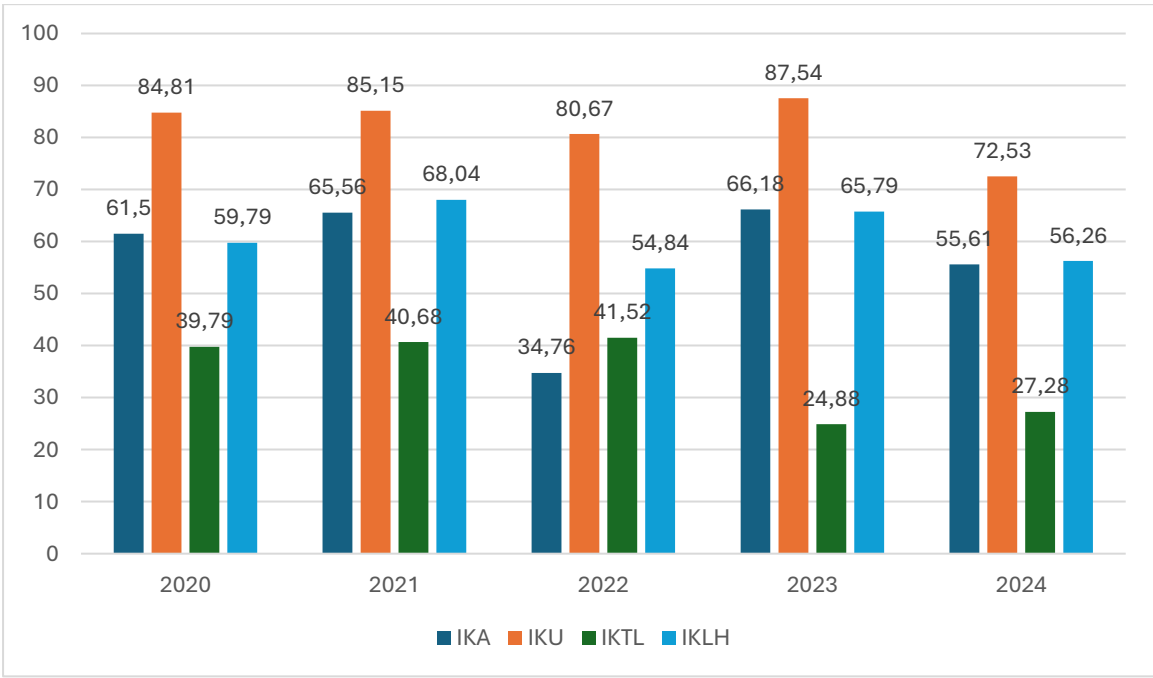
Secara umum, kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Demak sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari capaian Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan yang mengindikasikan proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan pangan mengalami

penurunan hingga mencapai 7,59 persen di tahun 2024. Selain itu, Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Demak juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 90,47 pada tahun 2024.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu dapat diketahui melalui **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** (IKLH). Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: indeks kualitas pencemaran air, indeks kualitas pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Klasifikasi kualitas indeks lingkungan hidup berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup di antaranya: kondisi waspada berkisar <50, kondisi sangat kurang berkisar 50-58, kondisi kurang berkisar 58-66, kondisi cukup berkisar 66-72, kondisi baik berkisar 74-82, kondisi sangat baik berkisar 82-90, dan kondisi unggul berkisar lebih dari 90.

Gambar II.8
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (2024)

Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, IKLH Kab/Kota dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: $IKLH\ Kab/Kota = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$. Diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak tahun 2024 adalah 56,28. Angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi IKLH sebesar 65,79. Capaian IKLH Kabupaten Demak masih jauh di bawah capaian nasional yaitu 72,5.

Rendahnya realisasi disebabkan adanya perbedaan rumus penghitungan, pada awal perencanaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Demak berdasarkan Permen LHK Nomor P.78/SETJEN/SET.1/9/2016. Namun

setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan hidup, maka perhitungan dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berbeda.

Perhitungan IKLH untuk tahun 2022-2026 pada *input* data indikator/parameternya mengalami perubahan dalam jumlah, jenis, dan sistem perhitungannya, sehingga akan lebih rendah nilai IKLH dibandingkan dengan tahun 2016 – 2021. Beberapa komponen IKLH dihitung berdasarkan:

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Komponen pertama pada pengukuran IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA). Tingkat pencemaran air tertinggi Kabupaten Demak tersebar di Kecamatan Sayung, Karangtengah, dan Mijen. Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami tren positif meningkat, hal ini dikarenakan kondisi iklim, pertumbuhan industri, dan aktivitas masyarakat 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang diimbangi dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan pencemaran air. Meskipun mengalami peningkatan kualitas tiap tahunnya, klasifikasi kualitas IKA di kabupaten Demak termasuk kategori kurang. Capaian IKA Kabupaten Demak sebesar 55,61 pada tahun 2024. Angka capaian tersebut akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada rencana pembangunan tahun berikutnya guna mencapai IKA yang ideal.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Komponen kedua pada pengukuran IKLH adalah Indeks Kualitas Udara (IKU). Tingkat pencemaran udara tertinggi berada di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Karangawen, dan Mranggen. Sementara pada tahun 2020 – 2024, Indeks Kualitas Udara mengalami perubahan secara fluktuatif, dengan capaian tahun tertinggi 72,53 pada tahun 2024. Meskipun menurun akibat perubahan penghitungan, perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas udara di Kabupaten Demak.

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Komponen pengukuran IKLH selanjutnya adalah Indeks kualitas lahan (IKL). Meskipun IKLH Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan, namun klasifikasi kualitas menunjukkan indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Demak adalah kurang. Indeks yang menyumbangkan angka terendah adalah Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan capaian 27,28 pada tahun 2024.

Dalam hal penanganan sampah dan sanitasi, Kabupaten Demak masih mengalami tantangan. Kondisi geografis Kabupaten Demak sebagian berupa

pesisir dengan potensi penurunan tanah yang tinggi, potensi air baku di wilayah Kabupaten Demak cenderung payau, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi karena topografi ataupun kondisi ekonomi

Tahun 2024, **Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi** sebesar 96,13 persen atau terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. **Capaian sanitasi aman** Kabupaten Demak tahun 2024 sebesar 5,78% meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 4,36 persen. Sedangkan **akses layanan air minum aman** mencapai 41,47 persen pada tahun 2023. Bantuan dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu dukungan capaian. Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama bidang air minum dan sanitasi.

Saat ini, pemerintah Kabupaten Demak telah berhasil mencapai ODF sejak bulan November 2022. Ke depan, pemerintah Kabupaten Demak akan memaksimalkan pelayanan sanitasi dengan memfokuskan kegiatan pada rumah tangga yang belum berakses sanitasi, mengajukan penganggaran baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk mendukung peningkatan akses sanitasi dan pencapaian *Open Defecation Free* (ODF) Kabupaten Demak.

Masalah **sampah** adalah isu global yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan ekonomi. Untuk membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah, maka diperlukan pengelolaan sampah yang baik. Kabupaten Demak melalui program pengelolaan sampah berkontribusi dalam meningkatkan capaian IKLH dengan cara mengelola sampah secara teratur dan efektif, sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air permukaan. Program ini mencakup tindakan seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah. Pengelolaan sampah mampu menekan pencemaran air permukaan dan kualitas lingkungan hidup dapat terjaga.

Selengkapnya capaian Timbulan Sampah, Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah Kabupaten Demak:

Tabel II.15
Timbulan Sampah, Pengurangan Sampah dan Penanganan Sampah
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Timbulan Sampah	Ton/hari	652,72	722,37	722,37	733,93	626,49
2.	Pengurangan Sampah/ Recycling rate	%	5,74	6,00	0,68	0,10	0,07
3.	Penanganan Sampah	%	18,23	43,19	12,46	10,54	77,83
4.	Total Timbulan Sampah	Ton/tahun	238.241,00	263.666,36	263.666,36	267.884,52	228.667,03

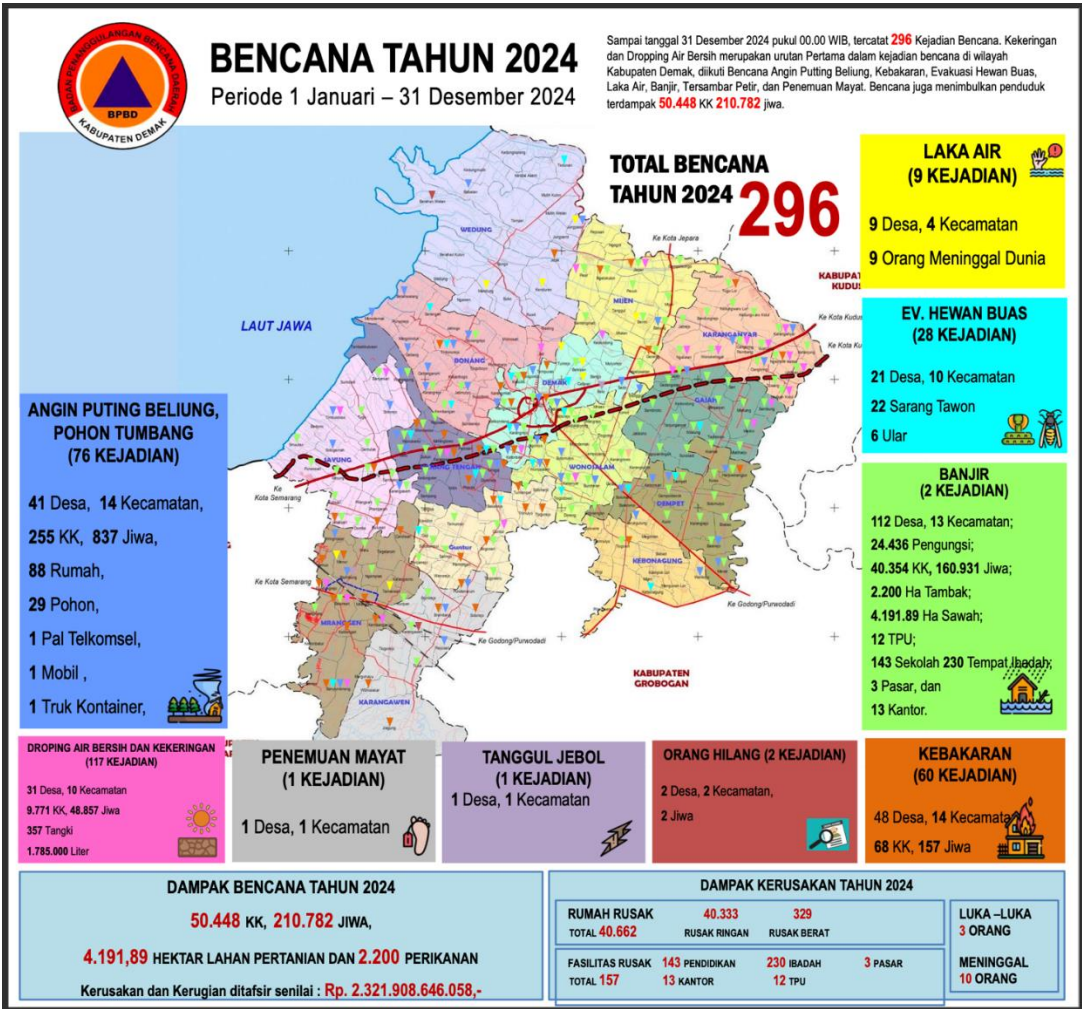
No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
5.	Total Pengurangan Sampah	Ton/ tahun	13.672,60	15.826,40	1.800,94	273,02	156,04
6.	Total Penanganan Sampah	Ton/ Tahun	43.435	113.872,70	32.850,00	28.247,71	177.981,30
7.	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah	%	2,14	2,70	15,23	15,40	17,88
8	Sampah terkelola tahunan	Ton/ tahun	n/a	129.699,10	34.650,94	28.520,74	178.137,33
9	Sampah terkelola	%	n/a	49,19	13,14	10,65	77,90
10	Daur ulang sampah tahunan	Ton/ tahun	n/a	15.826,40	1.800,94	273,02	156,04

Sumber: SIPSN (2024)

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Demak terletak di utara pulau jawa yang berbatasan langsung dengan laut jawa. Kebencanaan yang berkait dengan air laut menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Demak.

Gambar II.9
Peta Bencana Kabupaten Demak Tahun 2024



Sumber: BPBD Kabupaten Demak Tahun 2024

Di Kabupaten Demak, wilayah rawan bencana secara umum meliputi:

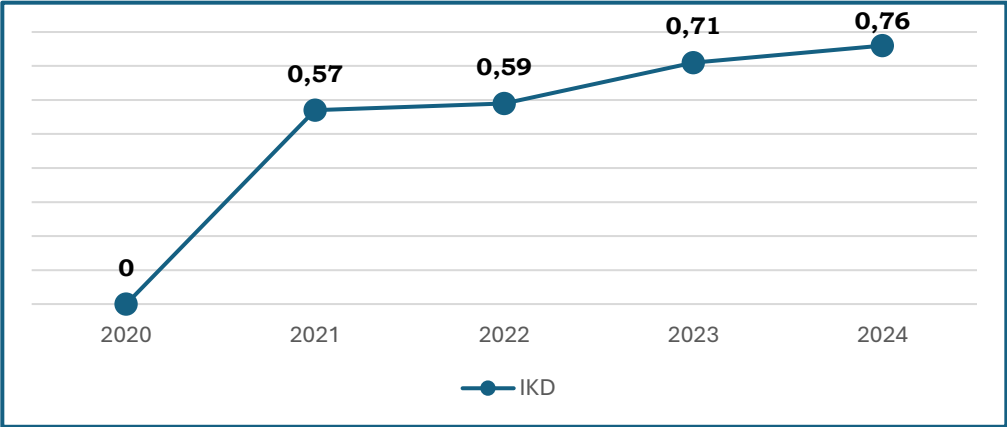
- a. wilayah rawan banjir yang tersebar di semua wilayah Kabupaten Demak.
 - b. wilayah rawan gelombang pasang dan abrasi tersebar di Kecamatan Sayung, Karangtengah, Bonang dan Wedung. Banjir dan rob di kawasan pesisir Sayung telah menenggelamkan beberapa desa yang kemudian menjadi kawasan kumuh.
 - c. wilayah rawan kekeringan juga terjadi di hampir seluruh Kabupaten Demak. Hal ini terjadi apabila musim kemarau panjang sampai mengakibatkan tanah persawahan menjadi retak-retak.
 - d. Wilayah rawan longsor meliputi, Kecamatan Mranggen dan Karangawen.
- Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Demak selama tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah banjir, kebakaran, angin topan/puting beliung dan kekeringan. Intensitas bencana yang paling sering terjadi pada tahun 2024 adalah kekeringan. Meskipun demikian, pada awal tahun 2024 Kabupaten Demak mengalami banjir besar selama 10 tahun terakhir dengan 11 kecamatan dan 89 desa terdampak. Rincian bencana dan taksiran kerugian tertera dalam tabel berikut.

Tabel II.16
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2020-2024

Jenis Bencana	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Banjir	Kejadian	16	22	8	12	2
Angin Puting Beliung / Pohon Tumbang / Angin Kencang	Kejadian	66	60	78	66	76
Kebakaran	Kejadian	43	37	39	80	60
Kekeringan	Kejadian	-	18	7	279	117
Kecelakaan Air	Kejadian	7	4	9	12	9
Tersambar Petir	Kejadian	4	1	2	2	-
Korban Terdampak	Jiwa	32.691	19.319	184.368	269.537	210.142
Meninggal Dunia	Jiwa	18	15	13	14	1
Taksiran kerugian	(Rp.000)	7.466.282	24.751.021	228.166.325	8.934.813	2.321.908.646.085

Sumber: BPBD Kab. Demak (2025)

Gambar II.10
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



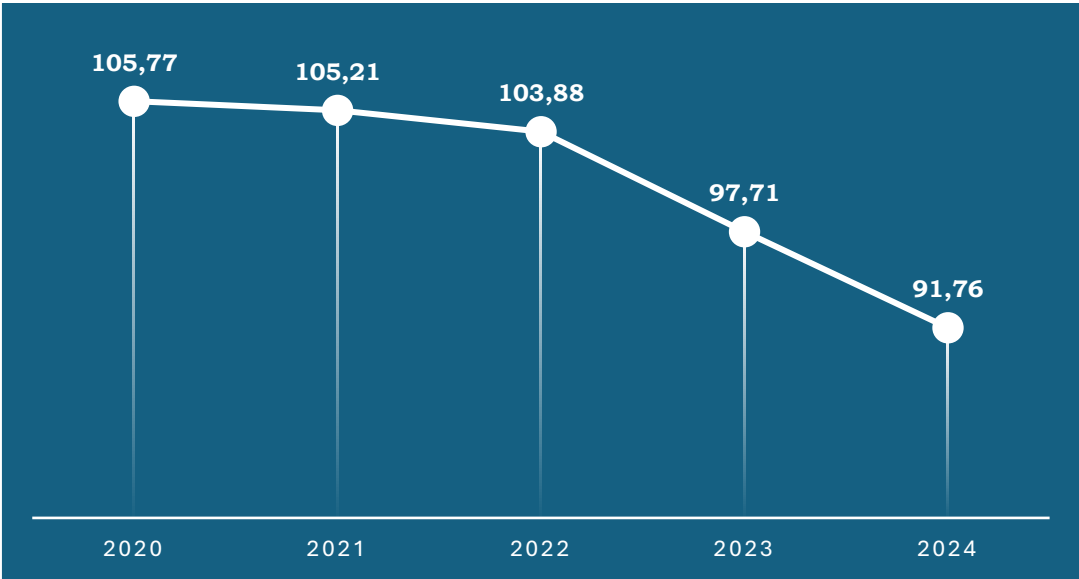
Sumber : BPBD Kab. Demak Tahun 2024

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Demak menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai IKD dari tahun ke tahun mengalami kenaikan signifikan. Tren kenaikan nilai IKD Kabupaten Demak merupakan capaian bersama semua pihak dalam mewujudkan Demak Tangguh menghadapi bencana sebagaimana yang tertuang dalam indikator penilaian IKD.

Meskipun data tahun 2020 belum tersedia, capaian IKD mulai tercatat pada 2021 dengan skor 0,57 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada 2022, nilai IKD naik menjadi 0,59, kemudian melonjak signifikan menjadi 0,71 di tahun 2023, dan mencapai 0,76 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam memperbaiki tata kelola data, meningkatkan akurasi, serta mendorong pemanfaatan data yang lebih berkualitas untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Capaian IKD Kabupaten Demak tahun 2020 – 2024 berpengaruh terhadap capaian Indeks Risiko bencana. Berikut data capaian IRBI tahun 2020 – 2024:

Gambar II.11
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Buku IRBI BNPB (data diolah oleh BPBD Kabupaten Demak)

Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Demak mengalami progres penurunan secara gradual dari 105,77 di tahun 2020 menjadi 91,76 pada tahun 2024. Meskipun demikian, kategori risiko bencana Kabupaten Demak masih di level sedang. Menurunnya angka IRB tidak terlepas dari kerja sama dan koordinasi oleh pemerintah dengan sejumlah instansi vertikal, lembaga masyarakat (BBWS Pemali Juwana, PSDA dan sejumlah Relawan), terbentuknya 5 relawan yang tersebar di lima kecamatan, di antaranya: (1. Relawan Kalijaga di Kecamatan Karangawen, 2. Relawan Jakatingkir di Kecamatan Mijen, 3. Relawan Angling Kusumo di Kecamatan Mranggen, 4. Relawan Glagah Wangi di Kecamatan Sayung dan yang ke- 5, Relawan Demak Rescue di Kecamatan Demak) serta Relawan Desa yang terbentuk melalui Desa Tangguh Bencana yang sampai dengan Tahun 2022 sudah terbentuk 29 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

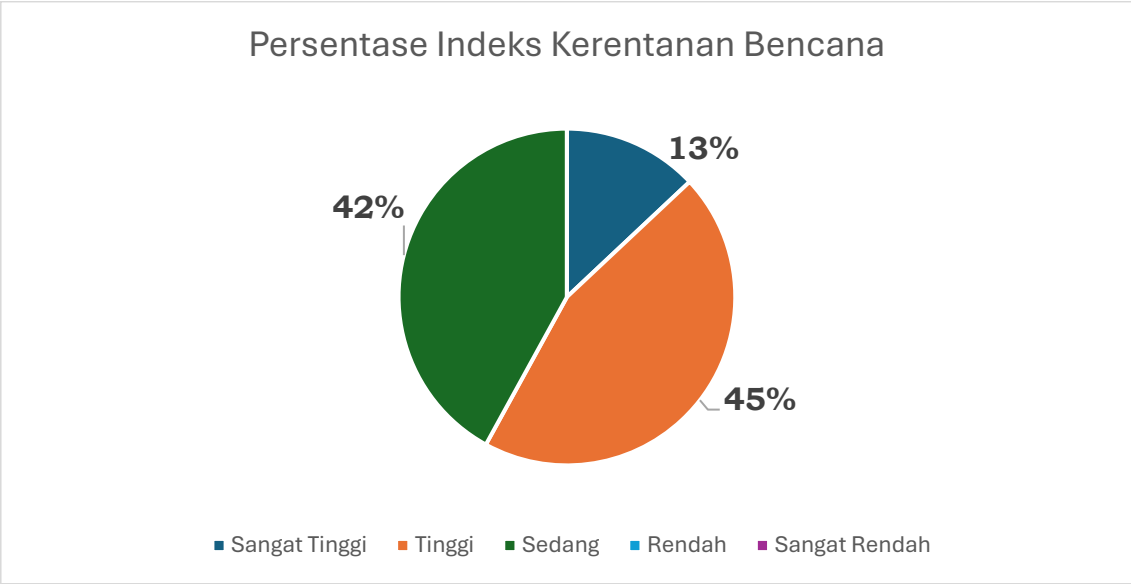
Dalam rangka memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana, Pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong pelaksanaan kegiatan pendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Dari total 249 desa dan kelurahan yang ada, sebanyak 123 desa berada di wilayah rawan bencana. Namun hingga tahun 2024, baru 37 desa yang telah ditetapkan sebagai Destana.

Upaya pembentukan Destana akan terus ditingkatkan secara bertahap, dengan mengutamakan wilayah berisiko tinggi. Selain itu, penguatan kesiapsiagaan juga dilakukan melalui pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak dengan dukungan dari BPBD, guna memastikan satuan pendidikan memiliki sistem tanggap darurat yang memadai. Langkah strategis lainnya adalah pemasangan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) di wilayah-wilayah rawan, sebagai bagian dari sistem mitigasi struktural untuk mempercepat respon terhadap potensi bencana. Seluruh upaya ini menjadi bagian integral dalam mewujudkan ketahanan daerah terhadap bencana secara sistematis dan berkelanjutan.

Hasil kerentanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Demak didapatkan berdasarkan Indeks Kerentanan Adaptasi (IKA) dan Indeks Kerentanan Sosial (IKS). Indeks Kerentanan Adaptasi (IKA) dan Indeks Kerentanan Sosial (IKS) digunakan untuk mengukur tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di Kab. Demak. IKA menunjukkan kemampuan adaptasi suatu wilayah, sedangkan IKS menunjukkan seberapa rentan suatu wilayah terhadap dampak perubahan iklim. Kombinasi kedua indeks ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat kerentanan

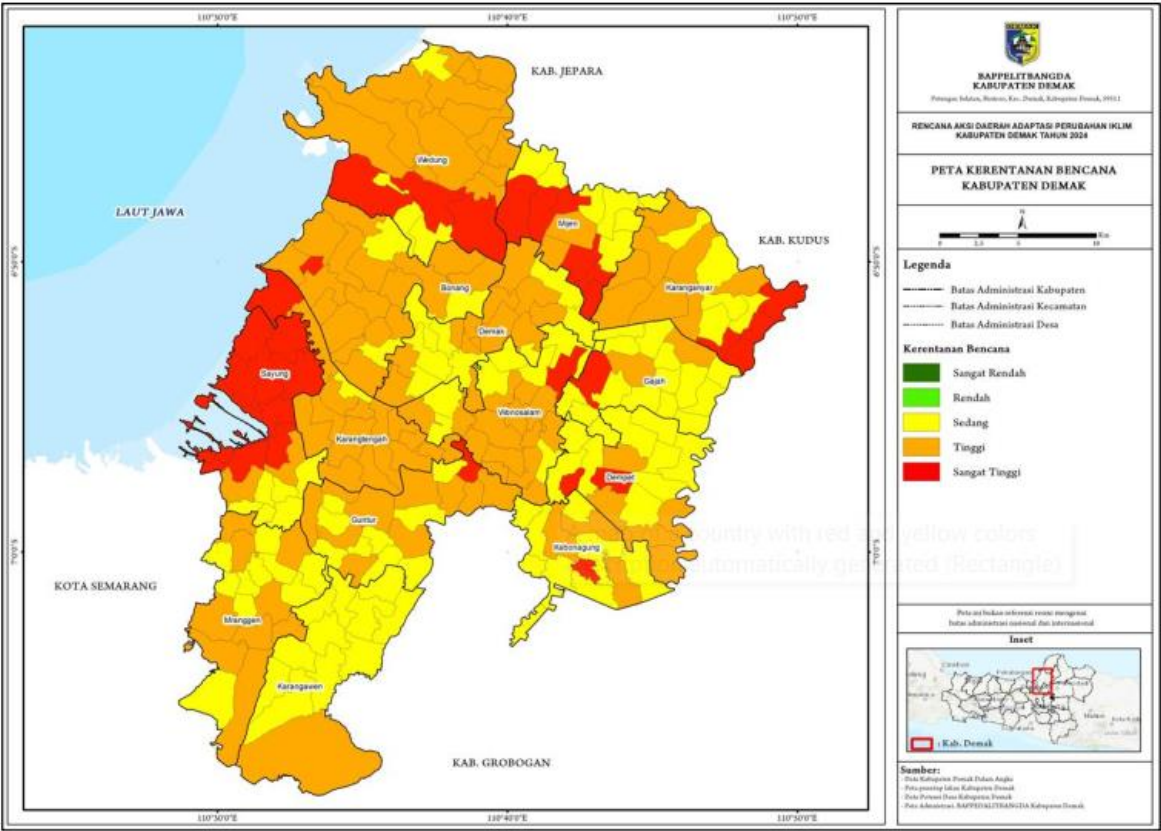
suatu wilayah terhadap perubahan iklim. Kerentanan adalah kecenderungan suatu wilayah untuk mengalami dampak negatif. Berdasarkan dokumen RAD API, wilayah di Kabupaten Demak dengan kerentanan sangat tinggi berada di 33 desa (13%), kerentanan tinggi di 111 desa (45%), dan kerentanan sedang di 105 desa (42%).

Gambar II.12
Persentase Indeks Kerentanan Bencana Kabupaten Demak



Sumber: Dokumen RAD API Kabupaten Demak

Gambar II. 13
Peta Kerentanan Kabupaten Demak



Sumber: Dokumen RAD API Kabupaten Demak

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan pemicu terjadinya pemanasan global (*global warming*) dan mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam kehidupan manusia. Seperti kualitas dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian, dan ekosistem wilayah pesisir.

Tabel II.17

Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Demak 2020-2024 (Ton CO₂eq)

Tahun	Capaian Tahunan	Penurunan Kumulatif
2020	18,4	18,4
2021	2,41	20,81
2022	17.265,00	17.285,81
2023	23.088,38	40.374,19
2024	61.970,97	102345,16

Sumber : Aplikasi AKSARA (2025)

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Demak menunjukkan tren yang semakin progresif sepanjang periode 2020–2024. Pada awal periode, capaian tahunan masih relatif rendah, yaitu 18,4 ton CO₂ ekuivalen pada 2020 dan sedikit meningkat menjadi 2,41 ton pada 2021, menghasilkan penurunan kumulatif sebesar 20,81 ton. Namun demikian, lonjakan drastis terjadi pada tahun 2022 dengan capaian tahunan sebesar 17.265 ton, yang secara signifikan meningkatkan penurunan kumulatif menjadi 17.285,81 ton. Kenaikan tajam ini disebabkan oleh adanya perubahan dan penyempurnaan metode perhitungan dalam sistem AKSARA (Aplikasi Inventarisasi GRK Nasional) yang mulai mengakomodasi lebih banyak sektor emisi dan aksi mitigasi, termasuk dari sektor pertanian dan limbah. Tren peningkatan capaian berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan penurunan masing-masing sebesar 23.088,38 ton dan 61.970,97 ton, sehingga penurunan kumulatif mencapai 102.345,16 ton CO₂ ekuivalen pada akhir 2024. Data ini mencerminkan keberhasilan Kabupaten Demak dalam memperkuat aksi mitigasi lintas sektor secara konsisten dan terukur.

Emisi GRK dihasilkan dari berbagai sumber antara lain adalah penggunaan energi dari kegiatan transportasi, perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, dan pengelolaan limbah baik padat maupun cair. Pengelolaan untuk mengendalikan GRK sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Demak. Upaya yang dilakukan oleh Kabupaten Demak adalah aksi mitigasi kepada kelompok-kelompok yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan maupun penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), seperti petani (baik sawah maupun kebun), pelaku transportasi, sektor

industri, perusahaan, serta masyarakat umum. Kabupaten Demak yang memiliki dominasi pada sektor pertanian dan industri menjadikan kedua bidang tersebut sebagai sasaran utama dalam pengendalian emisi GRK secara terukur dan berkelanjutan.

Data emisi gas rumah kaca (GRK) Kabupaten Demak tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang positif, di mana total emisi menurun dari 1.652,41 Gg CO₂eq pada tahun 2020 menjadi 1.470,37 Gg CO₂eq pada tahun 2024. Penurunan ini terutama terjadi pada sektor pengelolaan limbah dan sektor pertanian, kehutanan, serta penggunaan lahan lainnya (AFOLU), yang masing-masing turun signifikan hingga mencapai level terendah selama lima tahun terakhir. Meskipun sektor energi sempat mengalami peningkatan emisi pada tahun 2022 dan 2023, pada tahun 2024 sektor ini berhasil ditekan hingga di bawah level tahun 2020. Penurunan emisi ini menunjukkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Demak yang semakin berpihak pada prinsip keberlanjutan dan rendah karbon, di mana semakin rendah angka emisi yang dihasilkan, semakin baik pula kualitas pengelolaan lingkungan yang dilakukan.

Tabel II.18
Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (Gg CO₂eq)

Sektor	Emisi (Gg CO ₂ eq)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan dan Penggunaan Energi	788,94	757,33	855,21	895,18	749,67
Proses Industri dan Penggunaan Produk	27,22	28,67	29,41	32,11	37,5
Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya	680,29	703,81	685,51	625,99	577,08
Pengelolaan Limbah	155,95	150,93	145,73	135,15	106,13
Total	1.652,41	1.640,73	1.715,86	1.688,43	1.470,37

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak (2024)

2.1.1.7 Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Demak mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, di mana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akanSkenario Pengelolaan Sampah menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah.

A. **Kependudukan**

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan. Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, 2025), jumlah penduduk Kabupaten Demak tahun 2024 sebanyak 1.252.970 jiwa, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel II.19
Jumlah Penduduk Kabupaten Demak per Kecamatan
Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Mranggen	159.603	164.399	169.503	172.505	181.444
2.	Karangawen	92.528	95.175	98.253	99.221	98.566
3.	Guntur	83.933	86.937	4.676	91.563	91.123
4.	Sayung	102.775	105.525	107.761	108.372	108.177
5.	Karangtengah	67.506	69.803	71.808	72.751	72.140
6.	Wonosalam	81.683	84.778	87.595	88.655	89.384
7.	Dempet	58.952	59.928	61.545	61.620	62.686
8.	Gajah	50.488	51.877	53.548	53.849	54.948
9.	Karanganyar	75.218	77.362	79.431	79.899	80.582
10.	Mijen	57.089	58.730	60.384	61.015	61.019
11.	Demak	109.701	111.585	114.320	115.115	113.928
12.	Bonang	103.348	107.314	109.961	111.499	110.024
13.	Wedung	80.694	83.509	85.507	86.401	86.250
14.	Kebonagung	41.407	42.043	43.458	43.594	42.699
Jumlah		1.164.925	1.198.965	1.147.750	1.246.059	1.252.970

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Demak (2025)

Berdasarkan data tersebut, kepadatan rata-rata Kabupaten Demak pada tahun 2024 yaitu sekitar 1.257,00 jiwa/km². Kepadatan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Mranggen (2.327,00 jiwa/km²). Tingkat kepadatannya mencapai lebih dari tiga kali lipat kepadatan Kecamatan Wedung yang merupakan kecamatan terendah kepadatannya di Kabupaten Demak (669,00 jiwa/km²). Hal ini dapat dijelaskan karena Kecamatan Mranggen berbatasan dengan Kota

Semarang sehingga menarik minat kaum urban bermukim di daerah tersebut, sedangkan Kecamatan Wedung mempunyai karakteristik pesisir yang sebagian besar lahannya berupa tambak sehingga kepadatan penduduknya rendah.

Tabel II.20
Kepadatan Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
1.	Mranggen	77,59	181.444	2.327
2.	Karangawen	81,71	98.566	1.189
3.	Guntur	64,28	91.123	1.445
4.	Sayung	85,97	108.177	1.282
5.	Karangtengah	56,44	72.140	1.244
6.	Wonosalam	62,79	89.384	1.422
7.	Dempet	63,94	62.686	976
8.	Gajah	53,73	54.948	1.060
9.	Karanganyar	69,87	80.582	1.127
10.	Mijen	54,99	61.019	1.130
11.	Demak	63,05	113.928	1.735
12.	Bonang	87,06	110.024	1.261
13.	Wedung	129,42	86.250	669
14.	Kebonagung	44,47	42.699	962
2024		996,94	1.252.970	1.257,00
2023		995,32	1.246.059	1.251,92
2022		995,32	1.147.750	1.153,15
2021		995,32	1.198.965	1.204,60
2020		995,32	1.164.925	1.170,40

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Demak (2025)

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Terdapat dua metode perhitungan laju pertumbuhan penduduk, yaitu menggunakan data registrasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan data hasil proyeksi Sensus Penduduk *Long Form* 2020 oleh BPS. Pada pertumbuhan penduduk di bawah, menggunakan data hasil Proyeksi *Long Form* Sensus Penduduk 2020 oleh BPS. Pada tahun 2024, terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak di mana capaian pertumbuhan penduduk menurun dari 1,09% (2023) menjadi 1,07% (2024).

Tabel II.21
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Demak
Tahun 2023-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa) 2023	Jumlah Penduduk (jiwa) 2024	Laju Pertumbuhan Penduduk 2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2024 (%)
1.	Mranggen	179.998	181.444	0,88	0,86
2.	Karangawen	97.572	98.566	1,11	1,09
3.	Guntur	89.845	91.123	1,55	1,52
4.	Sayung	107.555	108.177	0,63	0,62
5.	Karangtengah	71.284	72.140	1,31	1,28
6.	Wonosalam	88.179	89.384	1,49	0,82
7.	Dempet	61.922	62.686	1,34	1,31
8.	Gajah	54.126	54.948	1,66	1,62
9.	Karanganyar	79.809	80.582	1,06	1,03
10.	Mijen	60.323	61.019	1,26	1,23
11.	Demak	112.974	113.928	0,92	0,90
12.	Bonang	109.185	110.024	0,84	0,82
13.	Wedung	85.327	86.250	1,18	1,15
14.	Kebonagung	42.411	42.699	0,74	0,72
Demak		1.240.510	1.252.970	1,09	1,07

Sumber: Hasil Long Form Sensus Penduduk BPS, 2020

Metode proyeksi memiliki kelemahan yaitu tidak sepenuhnya menangkap kejadian-kejadian khusus yang terjadi di masyarakat, misalnya saat terjadi bencana alam, pandemi, maupun intervensi program. Namun, metode ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan penghitungan dan sangat berguna untuk daerah yang belum memiliki *database* yang memadai. Sebaliknya, data registrasi lebih mutakhir, tetapi perlu diperhitungkan kemungkinan belum semua dinamika kependudukan terekam di kantor pencatatan sipil.

Tabel II.22
Persentase Dokumen Kependudukan Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	2020	2022	2022	2023	2024
1	Persentase Kepemilikan IKD	n/a	n/a	n/a	n/a	2,53
2	Persentase Penerbitan KK	99,43	99,79	99,92	98,73	98,83
3	Perekaman KTP Elektronik	98,21	97,91	97,87	99,65	98,70
4	Persentase Kepemilikan KIA	22,26	44,95	43,04	57,87	59,91
5	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	100	100	100	100	100

No.	Tahun	2020	2022	2022	2023	2024
6	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	95,75	96,66	98,01	98,30	98,65
7	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	100	100	100	100	100
8	Persentase Kepemilikan Akte Perceraian	100	100	100	100	100
9	Persentase Indofmasi Kependudukan	100	100	100	100	100

Sumber: Dindukcapil Kabupaten Demak (2025)

Data pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2020-2023 belum ada data karena Dindukcapil Kabupaten Demak belum melaksanakan kegiatan tersebut. Begitu pula dengan buku pokok pemakaman, pada tahun 2020 belum diterbitkan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.23
Capaian Pelayanan Admindukcapil Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Jenis Pelayanan	2020	2021	2022	2023	2025
Penerbitan akta perkawinan	100%	100%	100%	100%	100%
Penerbitan akta perceraian	100%	100%	100%	100%	100%
Buku Pokok Pemakaman	NA	18,07% 45 desa/kel	75,50% 188 desa/kel	100% 249 desa/kel	100% 249 desa/kel
Identitas Kependudukan Digital (IKD)	NA	NA	NA	NA	2,53%

Sumber: Dindukcapil Kab. Demak (2025)

B. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir selalu lebih banyak daripada perempuan, dengan *sex ratio* di atas 101 yang mengindikasikan bahwa terdapat sekitar 101-102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Adapun terjadi penurunan *sex ratio* di tahun 2024 yang berarti pertumbuhan penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk laki-laki.

Tabel II.24
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Demak berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2024	632.049	620.921	1.252.970	102,00

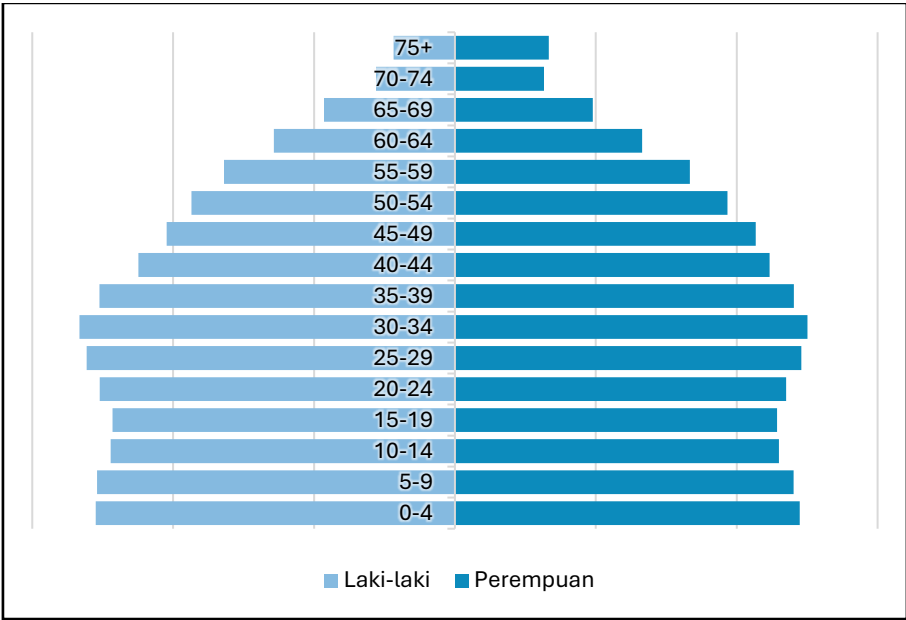
No.	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
2	2023	630.017	616.042	1.246.059	102,27
3	2022	621.789	611.080	1.232.869	101,75
4	2021	604.845	594.120	1.198.965	101,81
5	2020	587.080	577.845	1.164.925	101,60

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

C. Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Gambar II.14

Piramida Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2024



Sumber: LFSP 2020 BPS Kabupaten Demak (2024)

Piramida penduduk Kabupaten Demak cenderung berkarakter stasioner yaitu jumlah penduduk di tiap kelompok umur hampir sama. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian laju pertumbuhan penduduk di masa lalu sudah cukup baik. Meskipun demikian, terjadi tren kenaikan jumlah penduduk pada kelompok umur tua (>65 tahun) dalam tiga tahun terakhir. Keadaan ini perlu disikapi agar beban tanggungan penduduk tidak semakin bertambah.

Jika dilihat dari struktur piramida penduduk daerah, maka penduduk usia muda dan produktif memiliki porsi yang seimbang di mana akan menurun pada usia tua. Hal ini tentu saja menjadi suatu potensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar mampu memberdayakan generasi muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri sehingga dapat bersaing di berbagai aspek kehidupan. Selain potensi, kelemahan drastisnya penurunan pada kelompok usia tua adalah karena kurangnya derajat kesehatan masyarakat dikarenakan belum optimalnya penyelenggaraan layanan kesehatan.

D. Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren

demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penduduk di Kabupaten Demak diproyeksikan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. Penduduk yang diproyeksikan sejumlah 1.265,05 ribu jiwa pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 1.308,75 ribu jiwa pada tahun 2029. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 658,92 ribu jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 649,82 ribu jiwa sehingga rasio jenis kelamin mencapai 101,40. Penambahan penduduk di setiap tahunnya ini tentu saja meningkatkan kepadatan penduduk di mana pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 1.314-1.315 jiwa per kilometer persegi.

Kabupaten Demak pada tahun 2025 hingga 2029 berada pada jendela bonus demografi di mana rasio ketergantungan selama lima tahun tersebut berada di bawah 50. Hal ini mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia non produktif berada di bawah setengah dari jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik.

Tabel II.25
Proyeksi Penduduk Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	1265,05	1276,68	1287,85	1298,55	1308,75
Laki-laki	637,95	643,59	648,97	654,08	658,92
Perempuan	627,1	633,1	638,89	644,46	649,82
Rasio Jenis Kelamin	101,73	101,66	101,58	101,49	101,40
Kepadatan Penduduk	1271,00	1282,68	1293,91	1304,66	1314,90
Rasio Ketergantungan	44,51	44,86	45,20	45,52	45,83
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)					
0–14	294,57	294,62	294,38	293,82	292,91
15–64	875,40	881,32	886,98	892,34	897,43
65+	95,09	100,76	106,50	112,38	118,42

Sumber: BPS Kabupaten Demak, 2024 (Data diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Beberapa kondisi kesejahteraan masyarakat selama tiga tahun terakhir ini cukup rentan sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal ini cukup terlihat jelas dari adanya kontraksi

pertumbuhan ekonomi hingga dampak negatif lainnya terhadap masyarakat dari ketenagakerjaan hingga sosial. Namun, pasca penanganan dan pemulihan pandemi, Kabupaten Demak mampu bangkit dan terus berupaya mengembalikan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Adapun penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak dapat terlihat sebagai berikut.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Demak utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Demak. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Demak antara lain Laju Pertumbuhan Ekonomi, ketimpangan kesejahteraan, kemiskinan hingga ketenagakerjaan masyarakat. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Nilai PDRB Kabupaten Demak atas dasar harga konstan, mencapai 21.894,60 miliar rupiah pada tahun 2024. Angka tersebut meningkat dari 20.839,75 miliar rupiah pada tahun 2023. Dari kondisi tersebut, maka perekonomian Kabupaten Demak tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif,

yaitu sebesar 5,06%. Angka ini sedikit meningkat jika dibandingkan pencapaian pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 5,01%.

Tabel II.26
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Atas Dasar Harga Konstan berdasarkan Lapangan Usaha di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No.	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,49	-2,16	-0,51	-1,48	0,63
B	Pertambangan dan Penggalian	-19,13	2,97	-9,53	13,73	8,51
C	Industri Pengolahan	-3,08	4,65	6,84	5,03	4,77
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-2,66	11,12	6,73	5,46	6,23
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,42	3,70	0,46	4,96	2,20
F	Konstruksi	19,28	2,44	2,12	8,94	9,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,30	4,80	4,56	5,30	4,46
H	Transportasi dan Pergudangan	-27,90	1,14	56,45	9,63	5,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	- 3,70	3,55	11,83	12,13	7,29
J	Informasi dan Komunikasi	18,95	11,37	5,98	10,35	9,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,21	1,94	0,52	5,27	5,16
L	Real Estat	-0,06	0,49	4,66	7,02	6,34
M,N	Jasa Perusahaan	- 5,73	6,24	6,25	7,34	9,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	- 0,67	-0,56	2,62	5,42	8,12
P	Jasa Pendidikan	- 1,30	1,07	2,23	6,23	6,41
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	1,99	2,91	5,95	6,44
R,S,T,U	Jasa Lainnya	- 7,60	1,17	11,33	7,97	6,32
Laju PDRB (ADHK) (%)		-0,23	2,62	5,25	5,01	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Dari sisi produksi, membaiknya kinerja perekonomian terjadi di 16 lapangan usaha. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang bernilai positif pada 16 lapangan usaha tersebut. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 9,92%. Lapangan usaha selanjutnya yang memiliki pertumbuhan tinggi yaitu Konstruksi, yaitu tumbuh mencapai 9,53%. Kemudian, lapangan usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan sekitar 9,10%.

Struktur ekonomi Kabupaten Demak selama lima tahun terakhir tidak berubah, didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu: Industri Pengolahan, Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat

dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Demak.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat pula dihitung berdasarkan PDRB menurut pengeluaran. Komponen yang digunakan dalam memperoleh nilai PDRB menurut pengeluaran adalah: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPRT), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto. Pendekatan pengeluaran sejalan dengan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa, demikian pula sebaliknya.

Laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran sejalan dengan LPE berdasarkan PDRB menurut lapangan usaha. Jika dilihat dari jenis pengeluarannya, pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada jenis pengeluaran konsumsi LNPRT yang mencapai 14,29 persen.

Tabel II.27
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Demak
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Persen)
Tahun 2020-2024

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,22	1,97	5,43	6,26	5,03
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,75	2,37	4,63	7,02	14,29
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,82	0,90	0,52	2,80	3,88
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,77	3,98	2,65	7,90	7,10
LPE	-0,23	2,62	5,25	5,01	5,06

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

B. Tingkat Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Terdapat berbagai pendekatan dalam mendefinisikan kemiskinan. BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, yang kemudian batasan dari sisi pengeluaran ini disebut sebagai Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk sandang, kesehatan,

perumahan dan pendidikan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 (tiga) indikator kemiskinan yang digunakan yaitu:

1. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan;
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan;
3. Indeks Keparahan Kemiskinan, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Kondisi persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak fluktuatif dari tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2020 meningkat sebesar 0,68 poin dengan capaian jumlah penduduk miskin yang meningkat menjadi 146.870 jiwa sebagai akibat dari wabah pandemi yang memiliki dampak terhadap menurunnya perekonomian. Dampak negatif tersebut berlanjut di tahun 2021 dengan capaian tingkat kemiskinan sebesar 12,92% dan jumlah penduduk miskin sebanyak 151.740 jiwa. Dengan adanya penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, maka kemiskinan berangsur menurun di tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing tingkat kemiskinan mencapai 12,09% dan 12,01%. Dan pada tahun 2024 berhasil menurun menjadi 11,89%.

Tabel II.28
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Demak tahun 2020–2024

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Garis kemiskinan (Rp)
2020	1.173.592	146.870	12,54	432.533
2021	1.198.965	151.740	12,92	445.176
2022	1.227.634	143.010	12,09	471.818
2023	1.240.510	143.260	12,01	511.145
2024	1.252.970	142,92	11,89	535.134

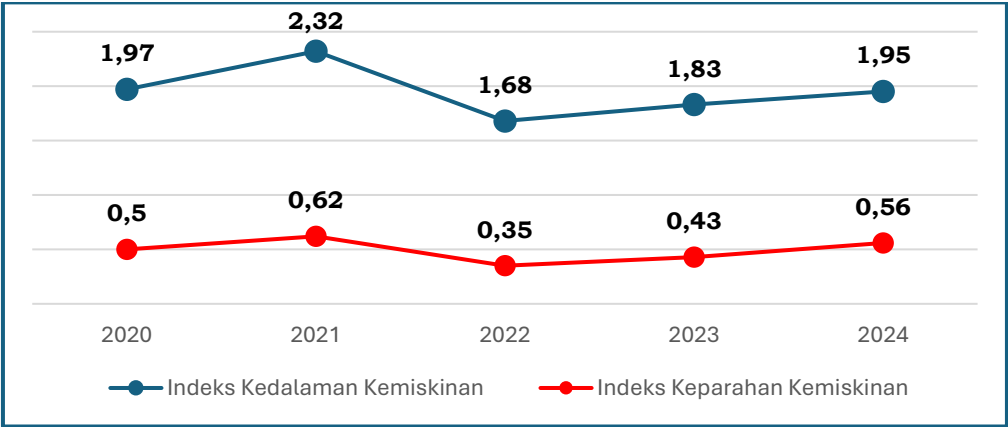
Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Kemiskinan merupakan salah satu tujuan utama dalam *Sustainable Development Goals* (Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan), di mana beberapa program yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Demak untuk mengentaskan kemiskinan di antaranya: pemberian BASIMDA SD-SMP dan Bansos untuk RTM/Disabilitas/Lansia. Diharapkan berbagai program pengentasan kemiskinan ini mampu menurunkan angka kemiskinan Kabupaten Demak di setiap periode pembangunan.

Dalam menganalisis kemiskinan, terdapat pula ukuran kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun kondisi indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Demak cukup fluktuatif di mana capaian tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan tahun 2022. Meskipun begitu, capaian ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 2,32 sekaligus merupakan capaian indeks kedalaman kemiskinan terbesar selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 indeks kedalaman kemiskinan berada di angka 1,95.

Gambar II.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Demak Tahun 2020–2024



Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Jika P1 digunakan untuk melihat seberapa dalam rata-rata penduduk miskin berada di bawah garis kemiskinan, maka indeks keparahan kemiskinan (P2) dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan di kalangan penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Demak berhasil menurun dari 0,62 (tahun 2021) menjadi 0,35 di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 dan 2024, kondisi ini meningkat kembali menjadi 0,43 di tahun 2023 dan 0,56 pada tahun 2024.

Selain kemiskinan, Kabupaten Demak juga termasuk daerah yang memiliki angka kemiskinan ekstrem yang cukup tinggi, Kemiskinan ekstrem adalah kondisi paling parah dari kemiskinan yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar secara layak. Hal ini mencakup kekurangan pendapatan untuk membeli makanan bergizi, kurangnya akses terhadap air bersih, sanitasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan tempat tinggal yang layak. Orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem seringkali menghadapi keterbatasan sosial yang menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi. Implementasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem selama 5 tahun ke depan tetap berpedoman pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan

dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupatenf Kota, sehingga memastikan kembali strategi penanggulangan kemiskinan sudah mengelaborasi strategi yang tertuang pada kedua peraturan tersebut serta disesuaikan dengan fokus pentapahan pembangunan per tahunnya. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut juga didukung oleh perbaikan tata kelola dan basis data serta fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan secara kolaboratif dan multisektor

Di Indonesia, kemiskinan ekstrem ditentukan berdasarkan kriteria garis kemiskinan ekstrem yang merujuk pada standar global Bank Dunia sebesar USD 1,90 per kapita per hari (PPP). Namun, pengukuran ini juga dipadukan dengan pendekatan multidimensi melalui data mikro seperti tingkat pendidikan kepala keluarga, kondisi rumah, kepemilikan aset, dan keterpaduan program bantuan sosial. Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas nasional dan masuk dalam agenda percepatan penghapusan kemiskinan pada berbagai level pemerintahan.

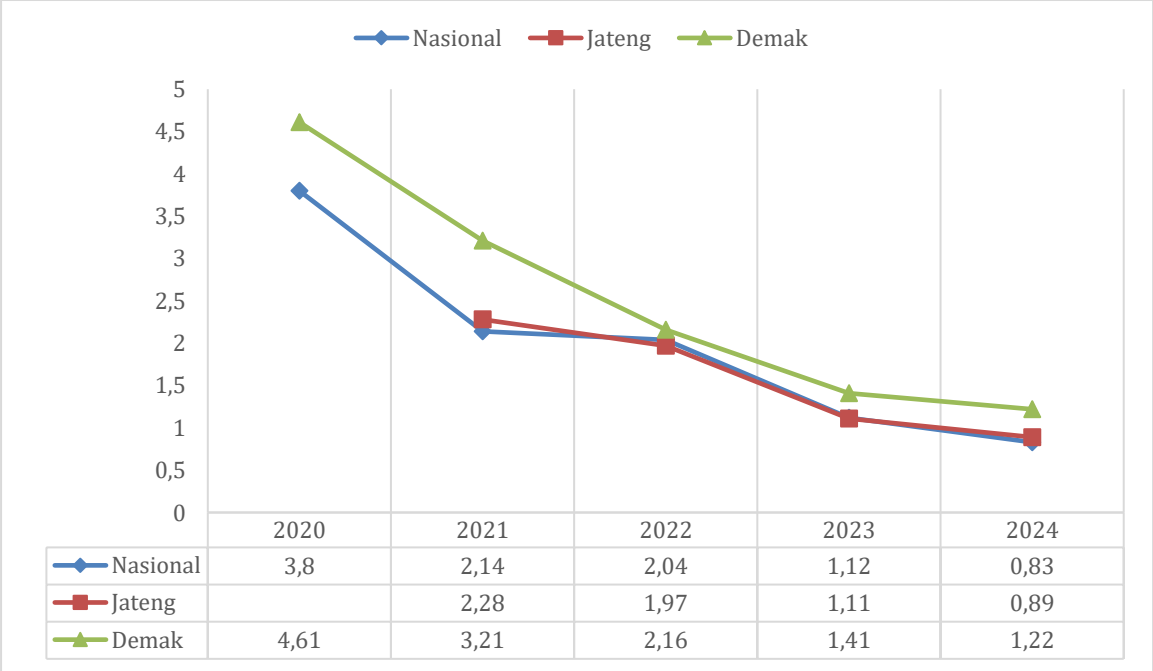
Kabupaten Demak termasuk salah satu Kabupaten/Kota dengan kemiskinan ekstrem, yaitu di angka 1,22 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 142.910 ribu jiwa (11,89 persen). Meskipun menurun dari tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Demak masih berada di bawah capaian nasional (0,83 persen) dan provinsi (0,89 persen). Dengan demikian dibutuhkan keseriusan dan perbaikan kinerja pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Selengkapnya capaian kemiskinan ekstrem Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024:

Tabel II. 28
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak Tahun 2024

No.	Keterangan	Satuan	Demak	Jateng	Nasional
1	Tingkat Kemiskinan	%	11,89	10,77	9,36
2	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Jiwa	142,91	3.396,34	24.060
3	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	%	1,22	0,89	0,83

Sumber: BPS Kab. Demak (2024), BPS Prov. Jateng (2024), BPS (2024)

Gambar II.16
Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



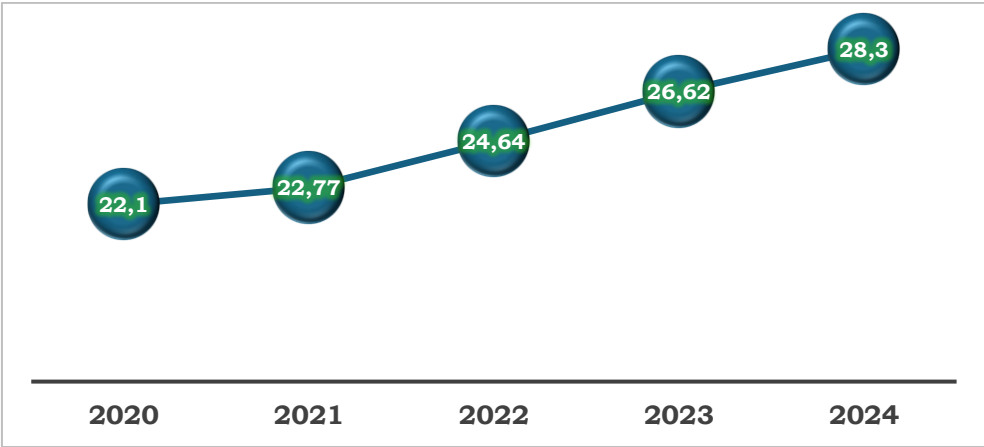
Sumber: BPS Kab. Demak (2024), BPS Prov. Jateng (2024), BPS (2024)

C. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per kapita penduduk di suatu wilayah sehingga representatif dalam menunjukkan tingkat kemakmuran penduduk. Nilai PDRB per satu penduduk dapat diketahui melalui PDRB ADHB per kapita yang menggunakan dasar harga berlaku pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Asumsi awal adalah semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut. Hal ini dikarenakan peningkatan PDRB per Kapita merupakan sinyal awal adanya peningkatan perekonomian daerah sehingga secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak secara langsung.

PDRB per kapita (ADHB) Kabupaten Demak meningkat dari 22,10 juta rupiah di tahun 2020 menjadi 28,30 juta rupiah di tahun 2024. Selama pandemi Covid-19, PDRB per kapita Kabupaten Demak mengalami penurunan di tahun 2020 namun masih mampu meningkat kembali di tahun 2021. Kondisi ini terus meningkat pada masa pemulihan ekonomi di tahun 2022 dan 2023.

Gambar II.16
PDRB per Kapita (Juta Rupiah/Kapita)
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

D. Ketenagakerjaan

Pemerintah Kabupaten Demak berusaha secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja lokal. Hal itu dinilai dapat membantu persoalan ketenagakerjaan dan angka pengangguran di Kabupaten Demak. Perkembangan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) mengalami fluktuasi. Kelompok usia ini dapat dibagi menjadi dua kelompok: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang bekerja, bekerja sementara dan pengangguran, sementara bukan angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berikut capaian urusan ketenagakerjaan Kabupaten Demak:

Tabel II.29
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan kerja	orang	619.892	595.111	608.754	671.407	695.174
2	Bukan angkatan kerja	orang	268.280	303.462	300.203	277.490	265.513
3	Penduduk usia kerja	orang	888.172	898.573	908.957	948.897	960.687
4	Penduduk bekerja	orang	574.602	563.708	571.566	635.271	662.147
5	Jumlah Pengangguran	orang	45.290	31.403	37.188	36.136	33.027
6	Jumlah Penduduk	orang	1.200,87	1.214,42	1.227,63	1.240,51	1.252,97
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	69,79	66,23	66,97	70,76	72,36
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,31	5,28	6,11	5,38	4,75

Sumber: Dinnakerind & BPS Kabupaten Demak (2025)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dihitung dengan memersentasekan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Pada tahun 2024, TPAK Kabupaten Demak mencapai 72,36 meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Demak pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,75 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 5,38 persen. Sebagai tindaklanjut, Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengevaluasi kinerjanya dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka, juga menurunkan potensi kerawanan sosial akibat pengangguran.

Adapun persentase penduduk bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2021 hingga 2024 didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SD ke Bawah, termasuk di dalamnya tidak bersekolah. Bahkan persentase terendah pendidikan tenaga kerja adalah penduduk yang berpendidikan diploma/universitas di mana pada tahun 2024 hanya sebesar 8,60 persen. Kondisi ini tentu menjadi perhatian mengingat kualitas tenaga kerja sangat menentukan kesejahteraan masyarakat.

Tabel II.30
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SD Ke Bawah	41,16	39,99	39,36	39,11	36,43
SMP	23,29	20,95	21,58	24,82	20,27
SMA	21,10	21,71	21,58	21,05	23,88
SMK	7,31	8,63	8,34	6,31	10,82
Diploma dan Universitas	7,14	8,72	9,13	8,71	8,60

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Beberapa permasalahan dalam melihat ketenagakerjaan Demak dikarenakan masih rendahnya kualitas dan produktivitas pendidikan tenaga kerja dan pekerja, penempatan tenaga kerja di dalam negeri dan TKI ke luar negeri belum dapat dilakukan secara optimal, masih adanya angka pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja, relatif rendahnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja/pekerja, serta relatif kurangnya peran dan fungsi lembaga ketenagakerjaan. Dengan demikian diperlukan strategi sebagai tindak lanjut kendala tersebut, di antaranya: melalui pelatihan vokasi dan kurikulum yang mengarah pada tenaga kerja mandiri sekaligus bursa kerja, Peningkatan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan dunia kerja melalui proses pemagangan dalam negeri; pembinaan secara berkala kepada Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pekerja dan pengusaha; pembekalan kepada angkatan kerja; pemanfaatan wajib lapor perusahaan secara *online* terkait penempatan dan

ketenagakerjaan; peningkatan kapasitas instruktur melalui sertifikasi/uji kompetensi instruktur; mendorong partisipasi *Non Goverment Organization* (NGO) dalam peningkatan kapasitas angkatan kerja melalui pelatihan dan pendidikan (seperti Baznas dan BUMD); serta kegiatan pemagangan kerja ke luar negeri sektor informal. Pelatihan dan pembinaan UMKM juga dilakukan pemerintah Kabupaten Demak guna memberikan keterampilan masyarakat untuk berwirausaha.

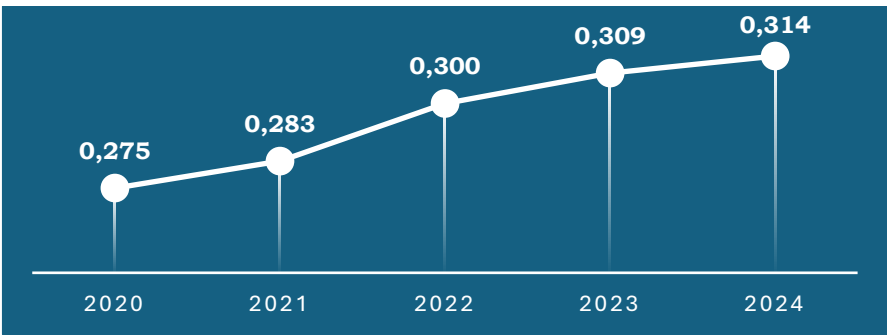
E. Indeks Gini

Selain perolehan PDRB dan inflasi dalam satu daerah, perlu diketahui juga pemerataan pendapatan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, ketimpangan sempurna ditandai dengan nilai Indeks Gini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- $0,00 < G < 0,35$: pemerataan tinggi / ketimpangan rendah;
- $0,35 < G < 0,50$: pemerataan / ketimpangan sedang;
- $G > 0,50$: pemerataan rendah / ketimpangan tinggi.

Kabupaten Demak telah melakukan upaya untuk mengurangi disparitas atau ketimpangan ekonomi di antaranya dengan meningkatkan investasi, mendorong UMKM, membangun infrastruktur seperti kawasan permukiman, sarana prasarana umum, irigasi, dan jalan penghubung. Nilai Indeks Gini Kabupaten Demak tahun 2024 sebesar 0,314 atau dalam kategori merata. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak cukup rendah sehingga pemerataan pembangunan sudah cukup terlihat. Meskipun begitu, capaian tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023 sehingga perlu perhatian agar tidak semakin tinggi ketimpangan kesejahteraan masyarakat Demak.

Gambar II.18
Indeks Gini Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Demak, (2024)

F. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indeks tersebut dapat disederhanakan menjadi tiga dimensi, yaitu indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Indeks kesehatan dicerminkan melalui indikator Usia Harapan Hidup Saat Lahir (UHH). Indeks pendidikan dikonstruksi dari indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan indeks pengeluaran digambarkan melalui indikator pengeluaran per kapita.

Tabel II.31
Indikator Pembangunan Manusia Kabupaten Demak
menurut Indikator Pembentuk Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,40	75,46	75,52	75,60	75,79
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,31	13,32	13,33	13,34	13,36
3	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,71	7,86	8,10	8,27	8,28
4	Pengeluaran per kapita	Rp.000	10.128	10.248	10.698	11.166	11.591
5	IPM	Angka	72,22	72,57	73,36	74,07	74,57

Sumber: BPS Kab. Demak (2025)

Secara nasional, IPM terus naik dari tahun ke tahun, tak terkecuali Kabupaten Demak yang meningkat hingga mencapai 74,57 pada tahun 2024. Tahun 2020, Posisi IPM Kabupaten Demak berhasil di atas Provinsi dan di atas capaian Nasional. Kabupaten Demak berada di peringkat ke-15 di tingkat provinsi. Meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Demak masih berada di bawah rata-rata. Hal ini dikarenakan pembangunan kualitas SDM di Kabupaten Demak masih terkendala khususnya di bidang pendidikan, kesehatan maupun perekonomian masyarakat.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Angka Harapan Hidup yang merupakan indikasi dari derajat kesehatan masyarakat, juga mengalami kenaikan di mana pada tahun 2024 mencapai 75,79 tahun. Capaian tersebut menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan pada tahun 2024 mempunyai harapan hidup mencapai umur 75-76 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2023. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan menjadi indikator penentu Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) di Kabupaten Demak.

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Demak ditunjukkan oleh tren penurunan jumlah kasus kematian ibu selama lima tahun terakhir, dari

18 kasus pada tahun 2021 menjadi 8 kasus pada tahun 2024. Secara proporsional, Angka Kematian Ibu (AKI) juga mengalami penurunan signifikan, dari 63,88 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 menjadi 48,50 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Capaian ini mencerminkan meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya terkait peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB) yang naik dari 3,41 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023 menjadi 7,46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi kesehatan pada masa neonatal dan perbaikan layanan kesehatan dasar bagi bayi baru lahir.

Capaian Angka Kematian Balita (AKABa) di Kabupaten Demak pada tahun 2024 meningkat menjadi 6,12 per 1000 kelahiran hidup dari 5,6 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Peningkatan angka tersebut disebabkan antara lain masih ditemukan kasus kekurangan gizi, stunting, dan penyakit menular. Pada tahun 2024 masih terdapat 3,82 % balita dengan gizi kurang, 0,05% balita dengan gizi buruk. Berdasarkan data tahun 2024 masih ditemukan 10,0% baduta stunting.

Selama kurun waktu 5 tahun, prevalensi stunting di Kabupaten Demak mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Demak sebesar 10,0 %, dari kondisi tahun 2020 yang mencapai 35,76% berdasarkan (Studi Status Gizi Balita di Indonesia (SSGBI) 2019).

Meskipun demikian, pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya agar kasus stunting tidak ada lagi di wilayah Kabupaten Demak. Dalam upaya percepatan penanggulangan stunting, sejak tahun 2023 pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan lokasi prioritas intervensi program dan kegiatan. Pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 34 desa lokasi prioritas penanggulangan stunting yang kemudian berkurang menjadi 24 desa pada tahun 2025. Berkurangnya desa lokasi prioritas disebabkan karena berkurangnya kasus stunting di Kabupaten Demak.

Tabel II.32
Indikator Kesehatan Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,4	75,46	75,52	75,6	75,79
Prevalensi Stunting	%	35,76*	25,5*	16,20*	9,5	10,0
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	4,9	3,8	3,73	3,41	7,46

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Balita (AKABa) per 1000 kelahiran hidup	%	5.8	4,5	4,76	5,6	6,12
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	%	57,59	91,19	67,3	63,88	48,50
Jumlah Kematian Ibu (AKI)	Kasus	12	18	13	12	8

Sumber: Dinkesda Kabupaten Demak (2025)

*SSGI

Tabel II.33
Jumlah Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit
di Kabupaten Demak 2024

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur
1	RSUD Sunan Kalijaga Demak	298
2	RSUD Sultan Fattah Demak	168
3	RSI NU Demak	116
4	RS Pelita Augrah	163
5	RS Hj Fatimmah Sulhan PKU Muhammadiyah	50
6	Charlie Hospital	105
Jumlah		900

Sumber : Dinkesda Kabupaten Demak (2025)

Tabel II.34 .
Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Demak 2024

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit		
1	Rumah Sakit Umum	6
2	Rumah Sakit Khusus	0
Puskesmas Dan Jaringannya		
1	Puskesmas Rawat Inap	15
	- Jumlah Tempat Tidur	144
2	Puskesmas Non Rawat Inap	12
3	Puskesmas Keliling	56
4	Puskesmas Pembantu	45
Sarana Pelayanan Lain		
1	Klinik Pratama	56
2	Klinik Utama	1
3	Tempat Praktik Mandiri Dokter	55
4	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	11
5	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis	0
6	Tempat Praktik Mandiri Bidan	414
7	Tempat Praktk Mandiri Perawat	11
8	Griya Sehat	0
9	Panti Sehat	0
10	Unit Transfusi Darah	1
11	Laboratorium Kesehatan	2

Sumber : Dinkesda Kabupaten Demak (2025)

Pada tahun 2024, sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Demak menunjukkan kapasitas yang cukup memadai dengan keberadaan 6 rumah sakit umum yang menyediakan total 900 tempat tidur, termasuk RSUD Sunan Kalijaga sebagai rumah sakit dengan kapasitas terbesar yakni 298 tempat tidur. Selain rumah sakit, terdapat pula 15 puskesmas rawat inap dengan total 144 tempat tidur, 12 puskesmas non rawat inap, serta jaringan layanan seperti puskesmas keliling (56 unit) dan puskesmas pembantu (45 unit). Sarana pelayanan kesehatan

lainnya juga cukup beragam, termasuk 56 klinik pratama, 55 praktik mandiri dokter, dan 414 praktik mandiri bidan. Data ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Demak dalam memperluas akses dan ketersediaan layanan kesehatan yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

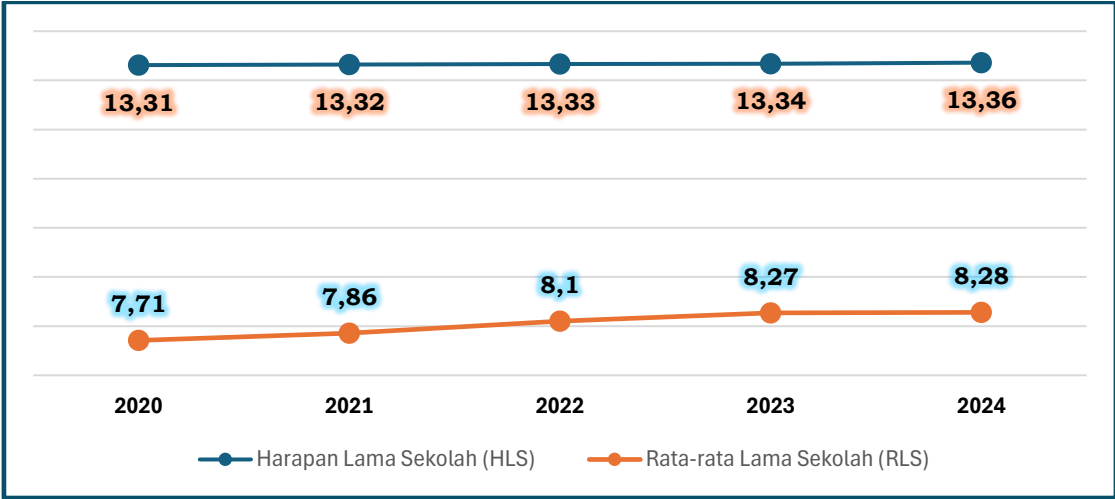
Tabel II.35			
Rasio Fasilitas Layanan Kesehatan Di Kabupaten Demak 2024			
nama faskes	Jumlah	Jumlah penduduk Tahun 2024	rasio per 100000 penduduk
1	2	3	4=(2/3)*100000
PUSKESMAS	27	1.254.204	2,153
rumah sakit	6	1.254.204	0,478
Klinik swasta	57	1.254.204	4,545

Sumber : Dinkesda Kabupaten Demak (2025)

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting yang dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dari segi penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat menjadi tolok ukur sejauh mana suatu daerah mampu membangun kapasitas dan kompetensi warganya untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pendidikan diwakili oleh dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) yang menunjukkan estimasi lamanya waktu yang diharapkan seseorang dapat mengenyam pendidikan formal, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan capaian aktual lamanya pendidikan yang telah diselesaikan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peluang dan capaian pendidikan di suatu wilayah, sekaligus mencerminkan kualitas investasi sumber daya manusia di masa kini dan masa mendatang. Data rata-rata lama sekolah dan harapamn lama sekolah Kabupaten Demak Adalah sebagai berikut.

Gambar II.19
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Demak, (2025)

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 tahun ke atas di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah (HLS) selama kurun waktu lima tahun terakhir meningkat setiap tahunnya pada kisaran 13 tahun, artinya anak usia 7 tahun berpeluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA dan D1. Sementara itu, angka harapan lama sekolah (HLS) tahun 2024 sebesar 13,36 dan meningkat 0,02 poin dari tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Demak akan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan secara luas dan jangka panjang. Namun, persepsi masyarakat tentang pendidikan yang diartikan hanya sebatas baca tulis dan hitung menjadi kendala yang sering ditemukan, kondisi ekonomi orang tua menjadi kendala selanjutnya.

Peran pemerintah guna meningkatkan angka harapan lama sekolah di antaranya: program Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA), dana Bantuan operasional sekolah (BOS), Beasiswa *Ayo Sekolah Kembali*, Program Indonesia Pintar (PIP) dan program pemerintah lainnya yang mampu mengurangi beban biaya sekolah yang harus ditanggung orang tua siswa. Pemerintah Kabupaten Demak juga mengoptimalkan peran pendidikan kesetaraan dalam melayani pendidikan anak usia sekolah yang tidak sekolah yang tidak mau sekolah di sekolah formal dan bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan layanan Pendidikan muadalah bagi pondok pesantren yang tidak memiliki sekolah formal/ tidak membolehkan santrinya tidak bersekolah formal. Selanjutnya diperlukan sosialisasi tentang arti pendidikan serta melibatkan desa untuk memberikan beasiswa bagi warga tidak mampu menggunakan Dana Desa.

Kondisi pembangunan pada aspek pendidikan dapat pula dilihat dari indikator **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** penduduk di wilayah tersebut. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal. RLS Kabupaten Demak tahun 2024 berada di angka 8,28 tahun atau meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya, artinya rata-rata penduduk Demak usia di atas 25 tahun berhenti bersekolah formal di pertengahan kelas 8, atau kelas 2 SMP sederajat.

Kendala tertinggi capaian RLS adalah kemiskinan, sementara itu upaya pemerintah meningkatkan RLS di antaranya pemberian bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan Siswa Miskin Daerah (BASIMDA) untuk pelajar dari keluarga tidak mampu, pendidikan gratis bagi warga miskin berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Jenjang DIKDAS, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yaitu BOP PAUD dan BOP Kesetaraan untuk Jenjang PAUD dan DIKMAS, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik melibatkan pihak ketiga (BAZDA, CSR) dalam pemberian bantuan pendidikan serta menerapkan gerakan orang tua asuh (GNOTA).

Literasi pendidikan merujuk pada kemampuan individu dalam memahami, mengevaluasi, menggunakan, dan berinteraksi dengan berbagai bentuk informasi yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam lingkungan pendidikan. Sedangkan **numerasi** adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan konsep serta keterampilan matematika dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan lebih dari sekadar kemampuan dasar untuk menghitung. Pengembangan literasi maupun numerasi pendidikan yang kuat sangat penting untuk mempersiapkan individu menghadapi tantangan dunia modern dan berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Adapun pencapaian literasi maupun numerasi di Kabupaten Demak sudah cukup baik dan meningkat signifikan di mana capaian pada tahun 2024 pada literasi membaca SD/Sederajat mencapai 85,53; literasi membaca jenjang SMP/ sederajat sebesar 78,62; numerasi SD/ sederajat sebesar 78,82; dan numerasi SMP/ sederajat sebesar 74,42.

Tabel II.36
Literasi dan Numerasi Pendidikan Kabupaten Demak
Tahun 2022-2024

Indikator	2022	2023	2024
a. Literasi Membaca SD/Sederajat	72,73	65,39	85,53
b. Literasi Membaca SMP/Sederajat	69,26	70,72	78,62
c. Numerasi SD/Sederajat	59,44	53,68	78,82
d. Numerasi SMP/Sederajat	48,58	62,39	74,42

Sumber: Dindikbud Kabupaten Demak (2025)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Perpustakaan sebagai institusi layanan publik yang wajib memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat, upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak sebagai *leading sector* pengembangan dan pembinaan dan kegemaran membaca diamanatkan untuk menjalankan sejumlah program terkait dengan pengembangan budaya literasi.

Nilai indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2024 adalah 64,88 atau meningkat 14,08 dari tahun 2023 yang mencapai angka 50,8. Meningkatnya angka indeks pembangunan literasi masyarakat tidak terlepas dari berbagai upaya pemerintah Kabupaten Demak, antara lain: Adanya aplikasi iDemak (Perpustakaan digital), membuat taman baca integratif, mengadakan lomba minat baca (lomba pengunjung dan peminjaman tergiat), mengadakan event pameran buku murah, bangun gerakan giat membaca (melalui inklusi sosial), membentuk forum dan komunitas literasi dan mengadakan kegiatan inklusi sosial (seperti: pelatihan menulis, pelatihan membuat kue nastar, lomba menggambar, pelatihan sulam pita, membatik dan pelatihan *make up*).

Literasi dapat meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan dan memperoleh informasi baru dengan harapan mampu diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Dalam rangka menumbuhkan kembangkan budaya literasi, saat ini Dinperpusar telah melakukan kerja sama dengan perangkat daerah, di antaranya: Dindikbud mengenai peningkatan minat baca masyarakat melalui Taman Baca Masyarakat; dengan Dinpermades P2KB mengenai peningkatan sumber daya ekonomi masyarakat desa melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dan peningkatan kualitas pengelola perpustakaan desa serta dengan Dindagkop UKM mengenai pelatihan keterampilan usaha.

Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah

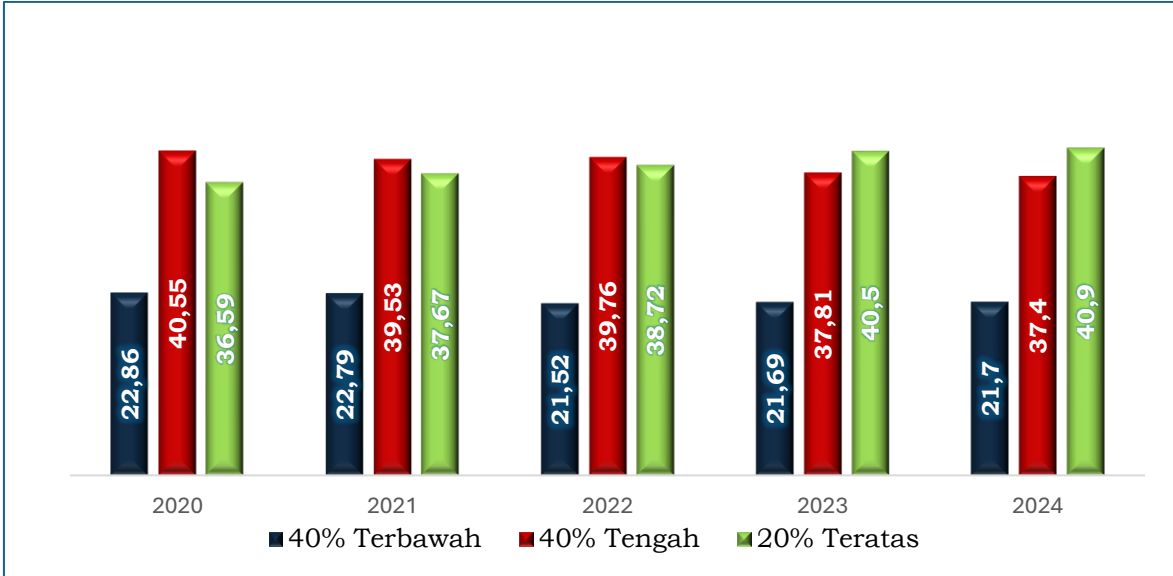
daerah dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya budaya kegemaran membaca bagi masyarakat adalah tolok ukur masyarakat berpengetahuan (literate), maka pembudayaan kegemaran membaca terus didorong dan diupayakan secara berkelanjutan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat sesuai dengan pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama di antaranya frekuensi membaca, durasi membaca dan jumlah buku yang dibaca. Pada Tahun 2024 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat mencapai 75,26 yang mengalami peningkatan dari Tahun 2023 yang mencapai angka 66,72.

Dalam meningkatkan minat baca masyarakat, Pemerintah Kabupaten Demak memiliki program perpustakaan keliling dan meminjamkan buku secara gratis, mengadakan pameran buku, lomba tentang menulis buku, menyediakan taman pojok baca di pusat keramaian masyarakat, dan melaksanakan layanan perpustakaan pada kegiatan *Car Free Day* di hari minggu.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Indikator lain yang dapat menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah indikator pemerataan pendapatan versi Bank Dunia yang fokus menilai ketimpangan berdasarkan kelompok pendapatan dengan pendapatan 40 persen terendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok tersebut, maka distribusi pendapatan penduduknya semakin merata. Terlihat distribusi masyarakat yang memiliki pendapatan 20 persen teratas mengalami kenaikan sedangkan masyarakat dengan pendapatan 40 persen terbawah mengalami penurunan. Berdasarkan grafik pemerataan pendapatan versi Bank Dunia di Kabupaten Demak tahun 2020–2023, terlihat adanya kesenjangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Kelompok 40% terbawah memiliki porsi pendapatan yang relatif kecil dan cenderung menurun dari 22,86% pada 2020 menjadi 21,69% pada 2023. Sebaliknya, kelompok 20% teratas justru mengalami peningkatan porsi pendapatan, dari 36,59% pada 2020 menjadi 40,50% pada 2023, yang menandakan terjadinya konsentrasi pendapatan pada kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara itu, kelompok 40% menengah menunjukkan tren penurunan porsi pendapatan dari 40,55% pada 2020 menjadi 37,81% pada 2023. Pola ini mengindikasikan bahwa dalam empat tahun terakhir, kesenjangan pendapatan di Kabupaten Demak semakin melebar, dengan distribusi yang semakin berpihak pada kelompok berpendapatan tinggi, sedangkan kelompok menengah dan bawah mengalami penurunan proporsi pendapatan. Hal ini dapat menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan

Gambar II.20
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

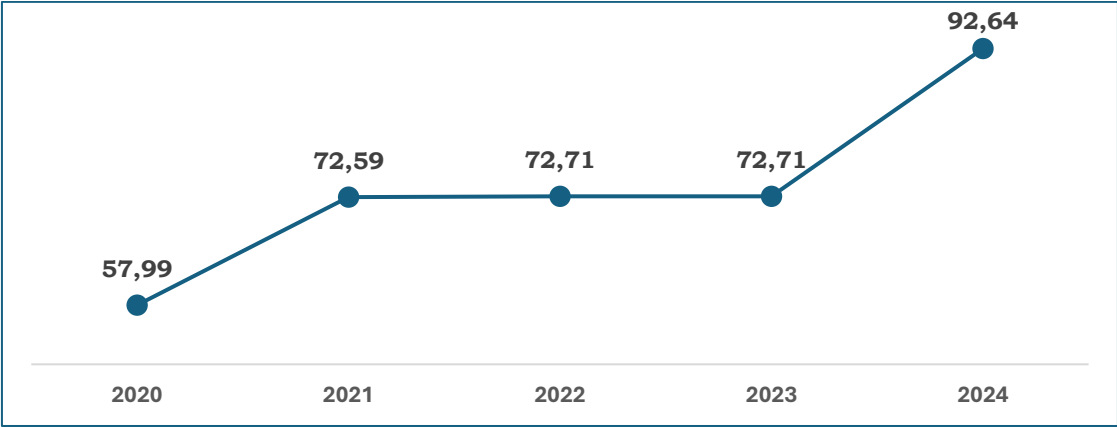


Sumber: BPS Kabupaten Demak (2024)

Tahun 2024, Kabupaten Demak mengalami dampak dari kejadian banjir besar akibat jebolnya tanggul di beberapa titik. Selain itu Kabupaten Demak juga mengalami kejadian bencana alam seperti kekeringan, kebakaran, angin puting beliung. Hal itu menyebabkan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) meningkat. Hal tersebut telah menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Demak untuk terus mengendalikan dampak bencana yang terjadi. Upaya – upaya pemerintah yang dilakukan Kabupaten Demak dalam meningkatkan daya jual beli masyarakat melalui program perlindungan dan jaminan sosial di antaranya:

- a. Program keluarga harapan;
- b. Program PBI JKN;
- c. Program Sembako;
- d. Bansos DBHCHT;
- e. Bansos Premi Asuransi;
- f. Bansos Bantuan Kematian DTKS;
- g. Program Pemberdayaan Ekonomi (Kube dan UEP);
- h. Program Rehabilitasi Sosial melalui pemberian bantuan sosial maupun pendampingan/pelatihan/pembinaan bagi PPKS;
- i. Program SOSH bagi Anak terlantar;
- j. Program Bantuan Sosial bagi korban bencana;
- k. Bantuan Sosial Permakanan, Sandang dan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial.

Gambar II.21
Persentase Pelaku Usaha yang Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Dinnakerind Kabupaten Demak, (2025)

Salah satu jaminan sosial ketenagakerjaan adalah BPJS Ketenagakerjaan yang menjamin bagi para tenaga kerja dalam pelaksanaan aktivitas pekerjaannya yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Adapun pelaku usaha yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Demak meningkat hingga mencapai 92,64 persen di tahun 2024 yang mengindikasikan meningkatnya jaminan sosial terhadap tenaga kerja dan kesadaran pada pelaku usaha untuk mendaftarkan tenaga kerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan pemberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka menengah daerah tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya.

Arah pembangunan ini menjelaskan tentang penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Kabupaten Demak merupakan kabupaten dengan peninggalan sejarah budaya yang termasyhur di Nusantara. Sebagai pusat penyebaran Agama Islam pada masa lalu, Kabupaten Demak yang dahulu merupakan wilayah Kerajaan Demak memiliki banyak warisan seni dan budaya. Dalam upaya pelestarian warisan budaya, diselenggarakan pertunjukan seni dan budaya.

Penurunan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2020 yang hanya mengadakan 20 festival seni dan budaya, kemudian disusul pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 hanya menyelenggarakan 5 festival seni dan budaya. Hal ini terjadi akibat diberlakukannya pembatasan penyelenggaraan kegiatan akibat pandemi Covid-19 agar tidak menimbulkan kerumunan. Penyelenggaraan pertunjukan seni budaya kemudian mulai dialihkan menggunakan media elektronik dan *online* seperti *Youtube* ataupun bekerja sama dengan TVRI.

Sementara itu, gedung untuk menyalurkan ekspresi kesenian di Kabupaten Demak masih terbatas. Pemerintah Kabupaten Demak pada tahun 2020 panggung kesenian yang berlokasi di kawasan Tembiring berhasil dibangun. Dengan adanya panggung kesenian, harapannya akan lebih banyak seniman yang bermunculan dan mengekspresikan karya-karyanya.

Pembangunan kebudayaan merupakan proses yang bertujuan untuk memperkuat, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya suatu masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai, tradisi, seni, dan praktik budaya, serta memastikan bahwa budaya tersebut dapat terus hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman. Pencapaian pembangunan kebudayaan di Kabupaten Demak terus ditingkatkan sebagai upaya menjaga warisan budaya bangsa maupun lokal. Adapun penanaman kecintaan dan penjagaan terhadap budaya dimulai sejak masa sekolah di mana sebanyak 80,23% satuan pendidikan di tahun 2023 memiliki guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan. Selain itu dari sisi objek budaya, maka sebanyak 18,15% Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) telah dilestarikan dan pengunjung tempat bersejarah juga meningkat hingga mencapai lebih dari dua juta orang pada tahun 2023, meskipun sempat menurun di tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak Pandemi Covid-19 termasuk penurunan jumlah wisatawan mancanegara pada tahun yang sama. Dari sisi seni budaya juga terlihat adanya kenaikan pada kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dan kebudayaan dalam satu tahun terakhir (2023) hingga sebanyak 18,25%.

Tabel II.37
Indikator Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya Dan Mengarusutamakan Kebudayaan (%)	N/A	N/A	79,03	80,23	N/A
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	18,01	18,01	18,1	18,15	60,00

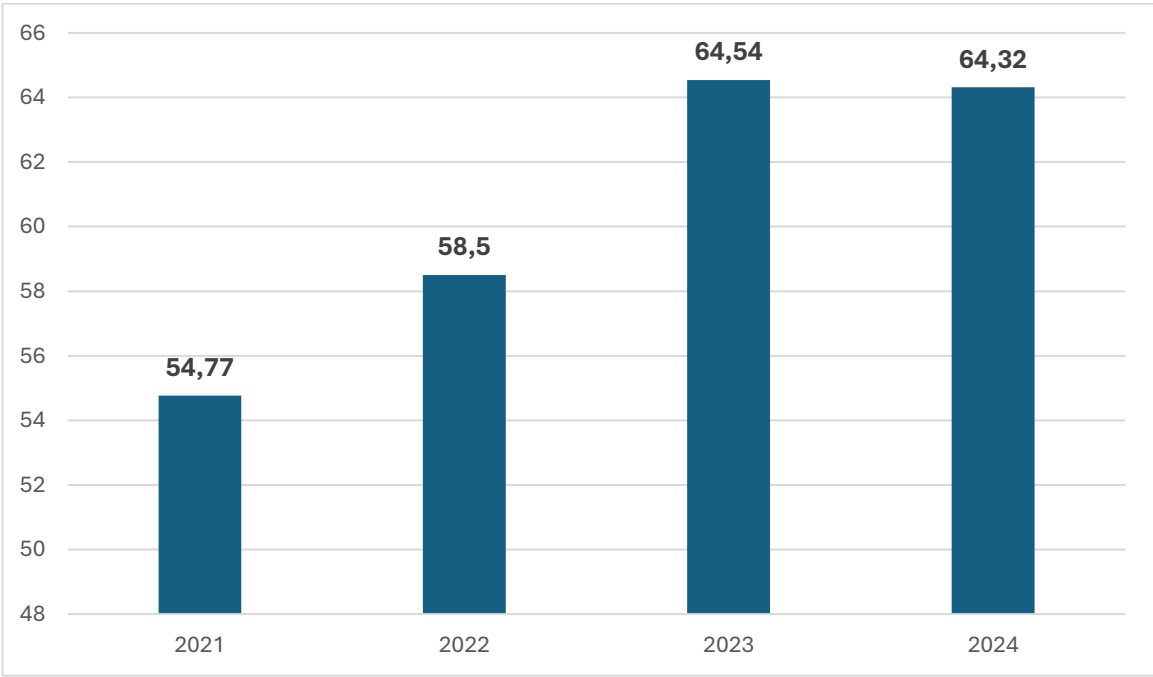
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (Orang)	419.013	401.891	1.468.347	2.059.102	1.144.795
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	42	3	4	174	194
Persentase Kelompok Kesenian Yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam 1 Tahun Terakhir (%)	N/A	N/A	18,1	18,25	18,30

Sumber: Dindikbud dan Dinparta Kabupaten Demak, (2025)

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Pada arah pembangunan ini menjelaskan tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan, termasuk pengarusutamaan gender. Pembangunan kualitas keluarga merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup keluarga melalui berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta hubungan antar anggota keluarga. Pembangunan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, harmonis, dan sejahtera, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Adapun peningkatan pembangunan keluarga di Kabupaten Demak mengalami peningkatan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 64,32.

Gambar II.22
Indeks Pembangunan Keluarga Kabupaten Demak
Tahun 2021-2024 (%)



Sumber: Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, 2024

Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan

ketimpangan gender. Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan menjadi salah satu poin dalam tujuan pembangunan di Kabupaten Demak. Selain IPG, hasil/*outcome* pembangunan berperspektif gender juga dilihat pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Dalam mengukur capaian pemberdayaan gender, Kabupaten Demak menggunakan sebuah indeks komposit yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG dan IDG merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi perubahan terhadap perempuan.

Berdasarkan data dari Dinsos P2PA, bahwa realisasi IPG tahun 2021 sama dengan realisasi tahun 2022, hal ini disebabkan data masih dalam proses BPS Provinsi Jawa Tengah. Realisasi IPG tahun 2022 mencapai 91,30 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020. Dan pada tahun 2024 IPG mencapai 91,25 Kabupaten Demak telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal tersebut didukung dengan capaian IPG tahun 2020 hampir mendekati angkut 100%, yaitu mencapai 90,90%. Artinya kualitas pemberdayaan manusia terpilah perempuan dan laki-laki di lihat dari gender dan sisi kesehatan, pendidikan dan ekonomi perempuan dan laki-laki hampir tidak ada kesenjangan.

Adapun pencapaian pemberdayaan gender di Kabupaten Demak mengalami kenaikan hingga mencapai 68,56 pada tahun 2023. Meskipun meningkat, namun secara umum capaian tersebut masih cukup rendah sehingga perlu adanya akselerasi dalam melaksanakan program pengarusutamaan gender di Kabupaten Demak secara komprehensif pada urusan pembangunan yang terkait.

Tabel II.38
Indikator Pembangunan Kesetaraan Gender Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
2020	90,90	66,85	0,243
2021	91,16	66,83	0,453
2022	91,30	66,83	0,390
2023	91,17	68,56	0,244
2024	91,25	66,22	0,326

Sumber: BPS dan Dinsos P2PA Kabupaten Demak, 2025

Ketimpangan gender adalah perbedaan perlakuan, kesempatan, dan hak antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi politik. Ketimpangan ini sering kali disebabkan oleh norma-norma sosial, budaya, dan kebijakan yang mendiskriminasi satu gender terhadap gender

lainnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan gender tersebut agar terealisasi kesetaraan gender yang berkualitas. Adapun capaian tersebut dapat terlihat dari Indeks Ketimpangan Gender di mana Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Demak cukup fluktuatif dengan pola menurun hingga tahun 2024 sebesar 0,326.

Pemenuhan hak anak dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang secara jasmani, rohani, dan sosial dapat diwujudkan, sehingga ketika anak memasuki usia dewasa akan dapat terus berkembang menjadi sumber daya pembangunan. Situasi demikian akan mewujudkan kehidupan anak yang berkualitas dan sejahtera sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kajian tentang kemajuan kesejahteraan anak telah dilakukan dengan membuat indeks komposit kesejahteraan anak. Indeks Komposit Kesejahteraan Anak terdiri dari 5 dimensi yaitu: (a) Dimensi kelangsungan hidup (*survival*), (b) Hak perlindungan (*protection*), (c) Hak tumbuh kembang (*development*), (d) Hak berpartisipasi (partisipasi), (e) Hak anak atas identitas.

Metode Perhitungan IKKA menggunakan 2 tahapan kehidupan yaitu balita (0-4 tahun) dan anak (5-17 tahun). Perhitungan IKKA dilakukan oleh Kementerian PP dan PA RI bekerja sama dengan BPS Pusat, serta perhitungan terbaru yang menjadi dasar data oleh Kementerian PP dan PA RI adalah IKKA tahun 2018, yang dipublikasikan pada tahun 2020 sehingga data yang digunakan untuk capaian tahun 2022 adalah capaian IKKA tahun 2018. Semakin tinggi nilai IKKA & dimensi, serta semakin mendekati angka 100 menunjukkan pemenuhan hak anak semakin baik. Nilai IKKA Kabupaten Demak tahun 2022 (2018) mencapai 68,36 (menengah), dengan peringkat nomor 32 dari 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, sementara angka capaian IKKA Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,92. Berdasarkan angka tersebut, pemerintah Kabupaten Demak perlu melakukan evaluasi dan perbaikan dalam mengambil keputusan untuk tahun selanjutnya.

Selanjutnya, jumlah kasus kekerasan terhadap anak tahun 2023 dilaporkan sebanyak 31 kasus dan sepenuhnya telah terselesaikan, atau mengalami penurunan sebanyak 12 kasus dari tahun 2022. Kasus KDRT dan kekerasan terhadap anak diibaratkan seperti gunung es, yaitu kasus yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak dari kasus yang dilaporkan. Jika dilihat dari sisi positif, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Sebagai Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama, Pemerintah Kabupaten Demak berusaha meningkatkan status menjadi tingkat utama melalui: advokasi, pembinaan dan mengadakan sosialisasi Kabupaten Layak Anak, serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan mengupayakan peningkatan peran serta

masyarakat dalam melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel II.39
Pemenuhan Perlindungan Anak
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Angka	68,36	68,36	68,36	69,36	69,36
2	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka	500	575,01	697,4	673,67	N/A
3	Jumlah penyelesaian kekerasan terhadap anak	Kasus	38	39	43	31	48

Sumber: Dinsos P2PA Kabupaten Demak (2025)

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di samping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Salah satu indikator untuk melihat daya saing sumber daya manusia adalah angka ketergantungan (*dependency rasio*). Angka ketergantungan Kabupaten Demak pada tahun 2024 yaitu sebesar 44,14 yang berarti 100 orang usia produktif menanggung setidaknya 44 orang non produktif. Meskipun masih di bawah 50, tetapi beban tanggungan menunjukkan tren kenaikan pada tahun sebelumnya yaitu 43,76.

Tabel II.40
Penduduk Kabupaten Demak berdasarkan
Kelompok Umur dan Rasio Beban Tanggungan, Tahun 2020-2024

Tahun	Umur 0-14 Tahun	Umur 15-64 Tahun	Umur >65 Tahun	% Usia Produktif	% Usia Tidak Produktif	Rasio Beban Tanggungan
2024*	294.216	869.278	89.476	69,38	30,62	44,14
2023*	293.630	862.875	84.005	69,56	30,44	43,76
2022	290.639	854.421	78.166	69,85	30,15	43,16
2021	297.230	829.661	72.074	69,20	30,80	44,51
2020	299.262	826.943	66.507	69,33	30,67	44,23

Sumber: Dindukcapil Kab. Demak (2025)

*LFSP2020

Kondisi rasio beban tanggungan di bawah 50 ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Demak berada pada jendela Bonus Demografi di mana beban tanggungan usia produktif terhadap usia non produktif cukup rendah. Bonus Demografi ini secara umum merupakan isu yang mampu mengakselerasi pelaksanaan pembangunan jika dipersiapkan dengan baik. Namun bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran. Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

2.1.3.2 IPTEK, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan Iptek dan inovasi di Kabupaten Demak menjadi pendorong untuk tidak hanya menjaga, melainkan juga mempercepat keberlanjutan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi dalam jangka menengah maupun panjang.

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat dihitung dengan memersentasekan jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Pada

tahun 2024, TPAK Kabupaten Demak mencapai 72,36 persen atau mengalami peningkatan sebanyak 1,60 persen poin dari tahun 2023.

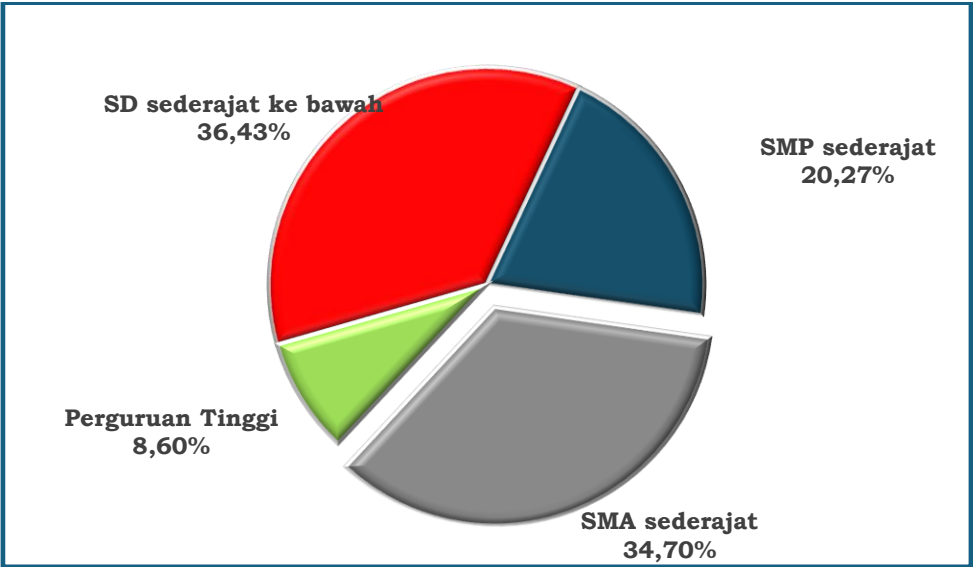
Tabel II.41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

Tahun	Angkatan Kerja (orang)	Bukan Angkatan Kerja (orang)	TPAK (%)
2024	695.174	265.513	72,36
2023	671.407	277.490	70,76
2022	608.754	300.203	66,97
2021	595.111	303.462	66,23
2020	619.892	268.280	69,79

Sumber: Dinnakerind & BPS Kabupaten Demak, (2025)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan tenaga kerja yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan. Sebagian besar tenaga kerja memiliki pendidikan tertinggi sebatas SD sederajat ke bawah (termasuk tidak tamat SD maupun belum bersekolah) sebesar 36,43 persen. Selanjutnya, tenaga kerja yang memiliki pendidikan SMA sederajat sebesar 34,70 persen dan SMP sederajat sebesar 20,27 persen. Adapun tenaga kerja berpendidikan perguruan tinggi memiliki persentase yang paling rendah hanya sebesar 8,60 persen.

Gambar II.23
Persentase Tenaga Kerja menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
Kabupaten Demak Tahun 2024 (%)

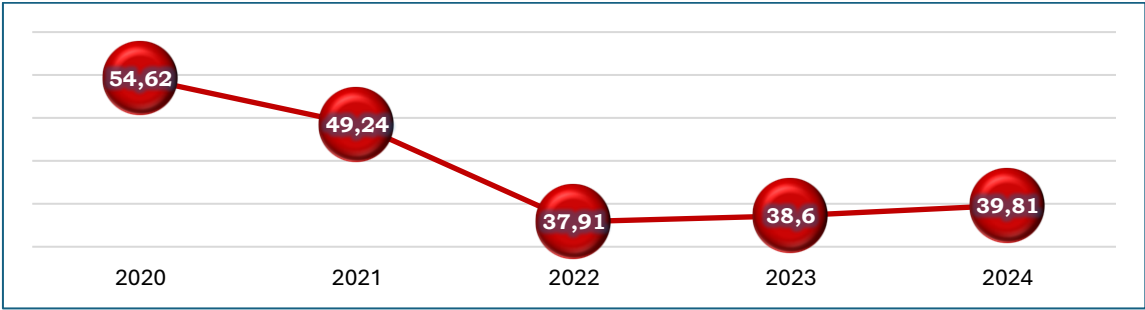


Sumber: Dinnakerind Kabupaten Demak (2025)

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Metode Penghitungan adalah Nilai Tambah dibagi dengan Jumlah tenaga kerja yang dibayar. Salah satu isu strategis pemerintah

Kabupaten Demak pada tenaga kerja adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. Tingkat produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Demak sempat meningkat pada tahun 2020 (54,62 persen) sebelum mengalami penurunan pada tahun 2021 (49,24 persen) dan 2022 (37,91 persen), namun pada tahun 2023 (38,60 persen) dan tahun 2024 (39,81 persen) tingkat produktivitas tenaga kerja kembali meningkat, hal ini menunjukkan bahwa telah ada perbaikan kinerja oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan keterampilan calon pekerja sehingga lebih siap.

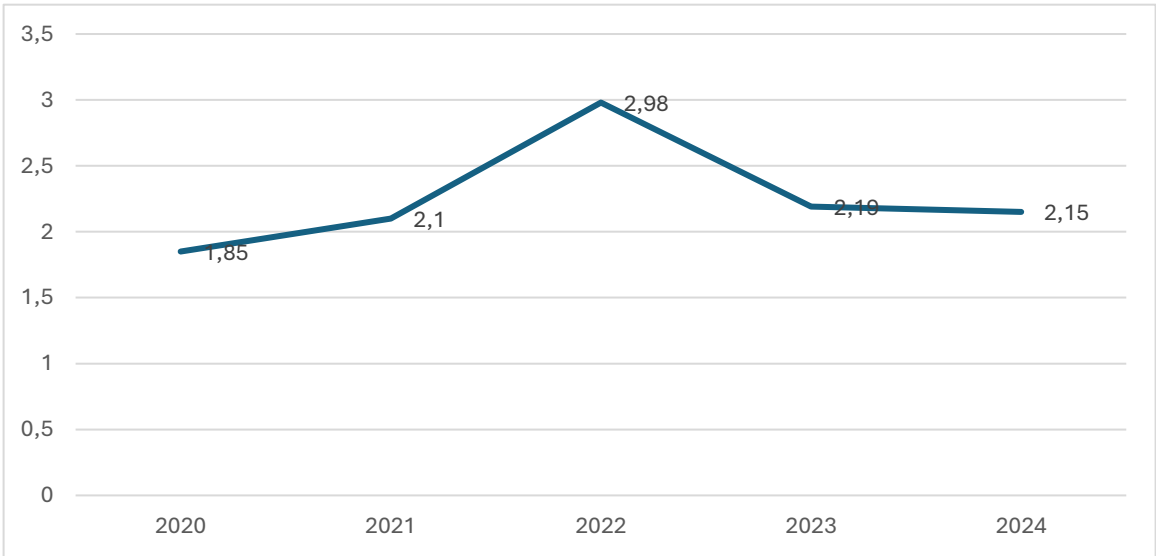
Gambar II.24
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (Juta/Orang)



Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Dari sisi pembangunan kewirausahaan daerah, Kabupaten Demak cukup perhatian dalam meningkatkan kondisi kewirausahaan daerah, khususnya usaha mikro dan kecil. Pembangunan kewirausahaan sendiri adalah proses pengembangan dan penguatan kemampuan individu atau kelompok untuk memulai, menjalankan, dan mengembangkan usaha atau bisnis baru. Adapun pencapaian kewirausahaan daerah terlihat dari rasio kewirausahaan yang merupakan proporsi suatu wirausaha di suatu wilayah. Rasio kewirausahaan di Kabupaten Demak sendiri mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Rasio kewirausahaan sebesar 1,85 persen di tahun 2020 sebagai dampak pandemi Covid-19. Namun kondisi ini kembali pulih di mana terjadi peningkatan rasio kewirausahaan hingga tahun 2022 mencapai 2,98 persen, meskipun menurun kembali di tahun 2023 menjadi 2,19 persen. Dan menurun pada tahun 2024 menjadi 2,15 persen.

Gambar II.25
Rasio Kewirausahaan (%) Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Dinnakerind dan Dindagkop UKM Kabupaten Demak (2024)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi halal dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat hanya 5 pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal. Angka ini meningkat menjadi 7 pelaku usaha pada tahun 2021 dan menjadi 9 pelaku usaha pada tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan mutu dan kepercayaan konsumen. Namun, pada tahun 2023, jumlah pelaku usaha tersertifikasi halal mengalami penurunan menjadi 7, meskipun kemudian kembali mengalami peningkatan menjadi 17 pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam proses sertifikasi, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan regulasi, kesiapan administratif pelaku usaha, dan dukungan fasilitasi dari pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun 2025 tercatat 1188 produk yang sudah bersertifikat halal. Data produk bersertifikat halal tahun 2020-2024 tidak bisa ditampilkan karena pada kurun waktu tersebut Kabupaten Demak belum melaksanakan pendataan.

Peningkatan jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal mencerminkan adanya dorongan kuat dari pemerintah dalam mendukung penguatan ekosistem industri halal daerah. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi daya saing utama produk, khususnya di sektor makanan dan minuman. Dengan adanya sertifikat halal, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan global yang memiliki preferensi terhadap produk halal.

Pemerintah Kabupaten Demak juga mendukung penuh penggunaan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk pembangunan. Penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS ditujukan untuk program Demak Peduli, Demak Sehat,

Demak Cerdas, Demak Taqwa, serta Demak Makmur. Pada tahun 2024 dana ZIS juga berkontribusi terhadap APBD sebesar Rp200.000.000,00. Berikut data penghimpunan dan penyaluran ZIS.

Tabel II.42
DATA PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN ZIS BAZNAS
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2020 – 2024

DANA ZIS	2020	2021	2022	2023	2024
Penghimpunan	4.530.425.539	4.600.398.945	8.437.763.869	8.888.428.031	8.992.844.983
Penyaluran	3.488.981.857	4.552.787.125	7.619.271.018	7.626.855.227	7.886.214.790
Penerima Manfaat	26.061	32.904	21.133	17.671	14.667

Sumber: Baznas Kab. Demak (2025)

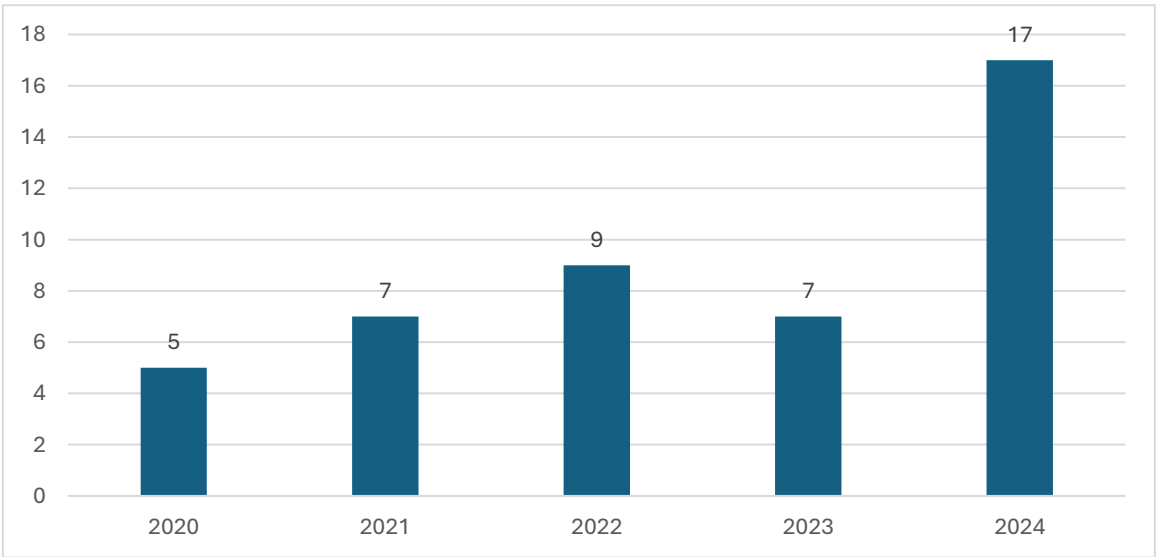
Dana ZIS Kabupaten Demak disalurkan untuk pemberdayaan dan pembangunan berbagai macam bidang. Pada tahun 2020 jumlah penyaluran dana sesuai program sejumlah Rp3.488.981.857. Jumlah tersebut secara signifikan bertambah hingga pada tahun 2024 yaitu mencapai Rp7.886.214.790. Capaian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dan penyaluran dana ZIS di Kabupaten Demak mengalami tren kenaikan positif.

Tabel II.43
PROGRAM PENYALURAN ZIS BAZNAS KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2020 – 2024

NAMA PROGRAM	2020	2021	2022	2023	2024
Pendidikan	377.597.000	258.020.000	388.495.000	1.658.467.282	1.204.440.606
Kesehatan	62.942.857	68.872.700	218.807.000	274.458.000	139.992.076
Kemanusiaan	1.541.767.000	2.427.772.625	3.928.109.860	3.123.824.575	3.520.517.740
Ekonomi	756.475.000	606.271.600	780.831.000	1.218.378.000	1.783.323.000
Dakwah Advokasi	750.200.000	1.191.850.200	2.303.028.158	1.351.727.370	1.237.941.368
JUMLAH	3.488.981.857	4.552.787.125	7.619.271.018	7.626.855.227	7.886.214.790

Sumber: Baznas Kab. Demak (2025)

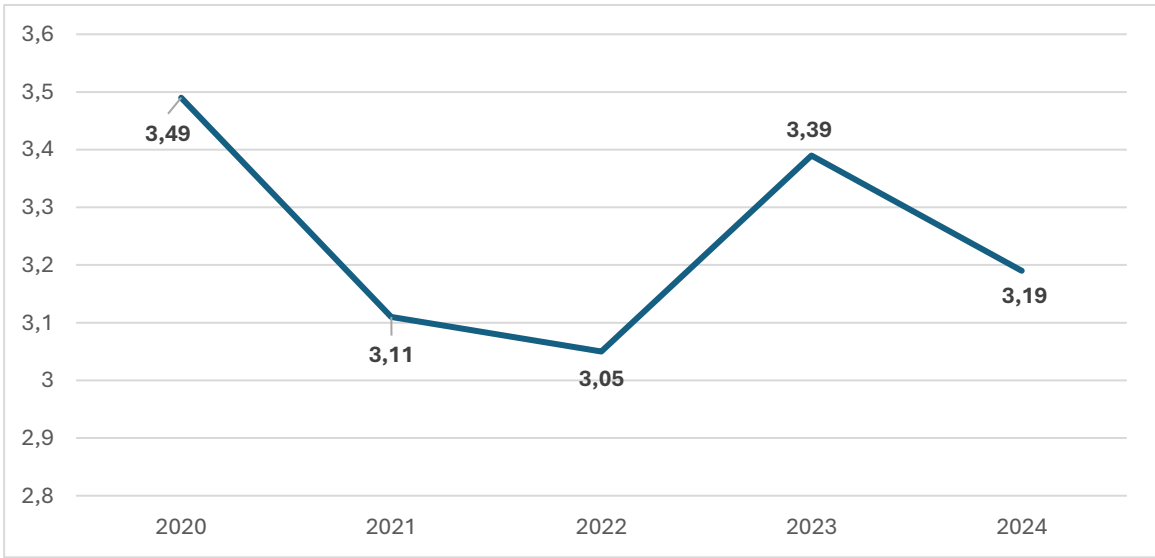
Gambar II.26
Pelaku Usaha yang Mengajukan Sertifikasi Halal
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak, (2024)

Return on Asset (ROA) adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu daerah atau entitas dalam menghasilkan keuntungan dari total aset yang dimilikinya. Rasio ini menggambarkan efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan, sehingga semakin tinggi nilai ROA, semakin baik kinerja pengelolaan aset tersebut. Berdasarkan data Kabupaten Demak tahun 2020–2024, nilai ROA berfluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2020, ROA berada di angka tertinggi yaitu 3,49 sebelum menurun signifikan menjadi 3,11 pada tahun 2021 dan kembali turun ke titik terendah 3,05 pada tahun 2022. Kondisi ini kemudian membaik di tahun 2023 dengan kenaikan ke angka 3,39, namun kembali mengalami penurunan menjadi 3,19 pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan kinerja aset, tantangan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset masih perlu menjadi perhatian.

Gambar II.27
Return on Asset Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Bapperida Kabupaten Demak (2024)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemudahan dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal, seperti perbankan, koperasi, lembaga pembiayaan, dan produk jasa keuangan lainnya. IKAD memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur, kebijakan, dan literasi keuangan mendukung inklusi keuangan di suatu daerah. Berdasarkan Surat Nomor 07727/D.03/PP.02.01/05/2025 dari Kementerian Bappenas, nilai IKAD Kabupaten Demak pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,92. Capaian ini mencerminkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam memperluas jangkauan layanan di wilayah pedesaan, memperkuat literasi keuangan, serta mendorong partisipasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Demak terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Dalam perjalanannya, penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Demak dapat terlihat pada aktivitas perekonomian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Untuk mendukung penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Demak, program yang dilakukan antara lain penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah, peningkatan produktivitas pertanian melalui praktik-praktik ramah lingkungan, pengembangan pariwisata berbasis kelestarian alam dan budaya, serta percepatan transisi energi menuju energi baru terbarukan (EBT). Penerapan ekonomi hijau salah satunya diukur dari daya saing sektor pertanian dalam arti luas. Secara umum, terjadi penurunan daya saing sektor tersebut dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya yang terlihat pada penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap struktur ekonomi Kabupaten Demak. Penurunan terlihat dari kontribusi PDRB kategori pertanian, kehutanan dan perikanan di mana capaian pada tahun 2020 sebesar 22,14 persen menurun menjadi 18,56 persen pada tahun 2024. Penurunan ini juga terlihat dari pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang kontraksi pada tahun 2021 hingga 2023 dan hanya meningkat sedikit menjadi 0,63 persen di tahun 2024.

Tabel II.44
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	2,49	-2,16	-0,51	-1,48	0,63
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	22,14	20,88	19,81	19,01	18,56

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Peningkatan pengembangan produktivitas pertanian di Kabupaten Demak dilihat melalui produktivitas padi. Pada tahun 2020 hingga 2024 terjadi fluktuasi dalam produktivitas padi di Kabupaten Demak. Meskipun terjadi peningkatan produktivitas, namun terjadi penurunan luas panen menyebabkan produksi padi ikut menurun menjadi 687.683 ton pada tahun 2020 menurun di tahun 2024 menjadi 643.898ton seiring meningkatnya luas panen dari tahun sebelumnya. Sempat terjadi penurunan produksi komoditas padi dikarenakan luas panen menurun disebabkan puso (gagal panen) akibat dampak pengaruh iklim ekstrem dengan curah hujan tinggi. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian juga

mengakibatkan penurunan produktivitas padi. Alih lahan fungsi tersebut digunakan untuk perumahan dan pemukiman. Tidak itu saja, alih fungsi lahan terjadi di wilayah pesisir yang mulai tergerus banjir rob. Di wilayah tersebut lahan pertanian mulai tidak produktif dan tidak bisa lagi ditanami padi. Tidak hanya itu saja, pembangunan jalan tol Sayung juga menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif. Hal ini menjadi faktor yang mendorong turunnya produktivitas padi di Kabupaten Demak. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan luas panen dan diikuti oleh peningkatan produksi padi.

Tabel II.45
Produktivitas Padi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi Padi	Ton	687.683	677.610	614.946	609.291	643.898
2.	Luas panen padi	Ha	106.711	97.586	95.857	87.882	91.278
3.	Produktivitas	kw/ha	67,78	69,38	64,15	69,33	70,54

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Demak (2024)

Dalam rangka mencukupi kebutuhan bibit ternak yang baik telah melaksanakan kegiatan pembibitan sapi dan pengembangan agribisnis peternakan. Untuk meningkatkan kualitas ternak telah dikembangkan teknologi Inseminasi Buatan (IB). Sedangkan dalam rangka pemberian fasilitas yang memadai bagi pemotongan dan jual beli ternak dilaksanakan perbaikan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan. Selain itu, untuk mencapai peningkatan derajat ternak dicapai pemerintah telah melakukan pengembangan pelayanan ternak berupa kegiatan pengobatan dan vaksinasi pelayanan hewan serta penanggulangan disamping itu juga dilakukan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga kasus PMK di Kabupaten Demak dapat dikendalikan. Diketahui capaian unggas tahun 2023 meningkat dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu sebesar 50.214 ekor dengan sumbangan terbesar berasal dari ternak ayam pedaging namun mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi 48.830 ekor.

Tabel II.46
Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ternak Besar (Sapi & Kerbau)	Ekor	703	648	924	817	814
2.	Ternak Kecil (Kambing & Domba)	Ekor	911	934	1.448	1.122	1.016
3.	Unggas	Ekor	31.043	31.259	38.838	50.214	48.830

Sumber: Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Demak (2024)

Dalam produktivitas sektor kelautan dan perikanan dapat dilihat melalui cakupan jaminan sosial untuk pekerja. Kolaborasi antar instansi dan peningkatan kesadaran masyarakat nelayan menjadi kunci untuk memperluas perlindungan ini. KKP bekerja sama dengan BPJS dan pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan sosial nelayan dan pelaku usaha perikanan skala kecil, melalui program seperti Asuransi Nelayan dan BPJS Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Demak, dari total 10.546 orang nelayan pada tahun 2024, baru 755 orang yang tercakup dalam Asuransi Nelayan dan 3.271 orang yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan masih perlunya perluasan cakupan perlindungan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak juga terus memperkuat penerapan prinsip ekonomi biru dalam kebijakan dan programnya, termasuk pemberdayaan kelompok nelayan yang saat ini berjumlah 233 kelompok,

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, produksi perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan tren yang meningkat selama periode 2020–2024. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari 7.109,58 ton pada tahun 2020 menjadi 9.108,00 ton pada tahun 2024, dengan capaian tertinggi pada tahun terakhir. Sementara itu, produksi perikanan budidaya juga mencatat perkembangan signifikan, dari 42.400,84 ton pada tahun 2020 menjadi 50.842,00 ton pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan kapasitas produksi serta pemanfaatan potensi sumber daya perikanan, baik tangkap maupun budidaya, yang diharapkan dapat terus dikelola secara berkelanjutan untuk mendukung perekonomian daerah.

Daya dukung pangan yang baik memastikan ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat. Dengan demikian, peternakan yang efisien dan berkelanjutan dapat meningkatkan pendapatan peternak dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian daerah. Tidak hanya pertanian, sektor peternakan juga menyumbang daya dukung pangan di Kabupaten Demak. sesuai dengan tabel di bawah ini.

Tabel II.29
Perkembangan Produksi Ternak Besar dan Kecil

No	Komoditas	Total Produksi (Ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ternak Besar (Sapi & Kerbau)	703	648	924	817,86	814,404
2.	Ternak Kecil (Kambing & Domba)	911	934	1.448	1.122,04	1016,08

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan kab

Berdasarkan data lima tahun terakhir, produksi ternak besar (sapi & kerbau) menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020 produksi tercatat sebesar 703 ton,

kemudian menurun menjadi 648ton pada 2021. Tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 924 ton, namun pada 2023 turun menjadi 817,86ton dan kembali turun tipis di 2024 menjadi 814,404 ton. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan pakan, kondisi kesehatan ternak, serta dinamika harga dan permintaan pasar.

Sementara itu, produksi ternak kecil (kambing & domba) mengalami variasi yang cukup tajam. Tahun 2020 produksi mencapai 911ton dan naik menjadi 934 ton di 2021. Pada 2022 terjadi peningkatan drastis hingga 1.448 ton, namun pada 2023 turun menjadi 1.122,04ton dan berlanjut turun pada 2024 menjadi 1.016,08 ton. Meskipun potensinya besar, keberlanjutan produksi ternak kecil juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca, harga pakan, dan penanganan kesehatan ternak.

Faktor pendorong perkembangan produksi antara lain ketersediaan pakan hijauan dan konsentrat yang memadai, adanya program pemerintah seperti inseminasi buatan, vaksinasi massal, dan bantuan bibit ternak unggul, serta permintaan pasar yang stabil. Dukungan infrastruktur peternakan, manajemen kesehatan ternak yang semakin baik, dan kemudahan akses pembiayaan juga menjadi penguat bagi peningkatan produksi.

Di sisi lain, terdapat faktor penghambat seperti fluktuasi harga pakan, ancaman wabah penyakit (PMK, LSD), perubahan iklim yang berdampak pada ketersediaan pakan alami, keterbatasan lahan penggembalaan, rendahnya regenerasi peternak, dan tantangan distribusi maupun pemasaran yang belum merata. Faktor-faktor ini memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan agar produktivitas dapat terjaga dan ditingkatkan.

Dengan mengoptimalkan faktor pendorong dan meminimalkan hambatan yang ada, diharapkan produksi ternak besar dan kecil di masa mendatang dapat lebih stabil, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan serta perekonomian daerah.

Tabel II.47
Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	7.109,58	7.929,16	7.967,38	7.619,83	9.108,00
Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	42.400,84	41.831,76	49.334,29	50.281,35	50.842,00

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak (2024)

Tabel II.48
Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2025–2029

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Target					
		Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
3.27.03.2.02.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan daerah, Dinas Pertanian dan Pangan kabupaten Demak menetapkan target **Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani** secara konsisten setiap tahun pada periode 2025–2029.

Target indikator yang ditetapkan adalah **8 unit** yang dibangun, direhabilitasi, atau dipelihara setiap tahunnya. Konsistensi jumlah target ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlanjutan fungsi irigasi, meningkatkan efisiensi penggunaan air, dan menjamin ketersediaan pasokan air untuk lahan pertanian secara optimal.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sistem irigasi dapat berfungsi secara maksimal sehingga produktivitas lahan meningkat, biaya produksi dapat ditekan, dan kesejahteraan petani dapat terus ditingkatkan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan tercapai manfaat sebagai berikut:

- **Peningkatan Produktivitas Lahan**
Lahan pertanian yang memperoleh suplai air yang cukup akan menghasilkan panen lebih optimal, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- **Pengurangan Risiko Gagal Panen**
Jaringan irigasi yang berfungsi baik dapat mengurangi ketergantungan pada curah hujan, sehingga risiko gagal panen akibat kekeringan dapat ditekan.
- **Efisiensi Penggunaan Air**
Sistem irigasi yang baik mampu menyalurkan air dengan kehilangan minimal, sehingga lebih hemat dan efektif.
- **Peningkatan Pendapatan Petani**
Produktivitas yang meningkat akan berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani, sehingga kesejahteraan mereka membaik.
- **Ketahanan Pangan Daerah**

Suplai air yang stabil akan mendukung kontinuitas produksi pangan, sehingga ketahanan pangan daerah terjaga.

Melalui pelaksanaan yang terencana, pengawasan, serta pemeliharaan yang berkelanjutan, diharapkan kegiatan ini akan memberikan dampak positif signifikan terhadap produktivitas pertanian, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan daerah. Keberhasilan program ini akan menjadi salah satu tolok ukur capaian pembangunan sektor pertanian dan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital memainkan peran penting dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi pemerintahan, serta memperkuat daya saing global. Dengan mengadopsi teknologi digital, proses administrasi pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel, memungkinkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.

Di sektor ekonomi, digitalisasi membuka peluang bagi usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berkembang melalui *e-commerce*, *fintech*, dan inovasi teknologi lainnya. Infrastruktur digital yang kuat juga mendukung peningkatan konektivitas antarwilayah, sehingga mempercepat distribusi informasi, barang, dan jasa. Selain itu, dalam bidang pendidikan dan kesehatan, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas terhadap layanan berkualitas, baik melalui platform pembelajaran daring maupun sistem *telemedicine*. Pembangunan yang berbasis digital juga mendorong keberlanjutan dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam serta menciptakan solusi ramah lingkungan.

Belum sepenuhnya masyarakat di Kabupaten Demak memiliki akses terhadap internet yang merupakan infrastruktur dalam mengimplementasikan transformasi digital. Sebanyak 84,96 persen rumah tangga di Kabupaten Demak memiliki akses internet. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 83,66 persen, namun masih belum optimal mengingat pentingnya penggunaan informasi teknologi, khususnya internet pada era sekarang.

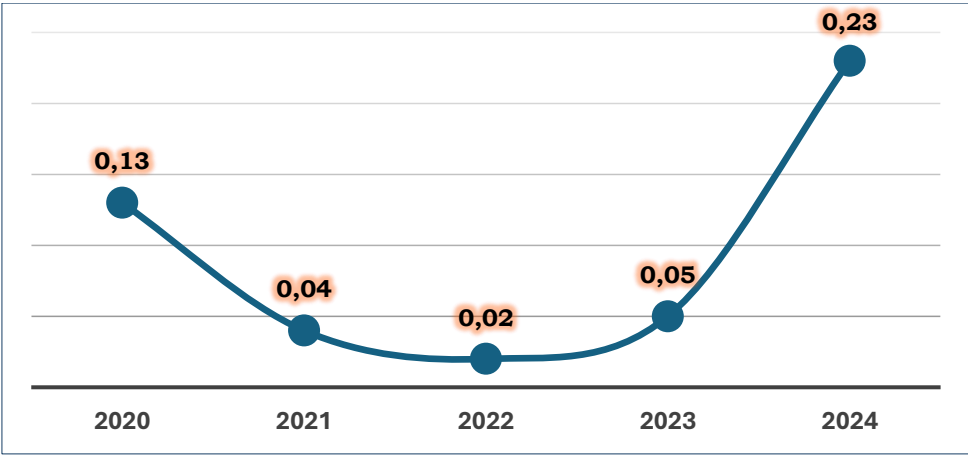
2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam perwujudan pembangunan daerah akan mendorong peningkatan produktivitas perekonomian dalam negeri yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok secara global.

Pertumbuhan nilai ekspor luar negeri pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021, yaitu dari 0,04 persen menjadi 0,02 persen. Hal ini

akibat adanya terbatasnya produk lokal yang diterima di pasar dalam negeri dan luar negeri, terbatasnya kewenangan kabupaten dalam pengembangan perdagangan luar negeri, serta kurangnya sarana promosi dan jaringan pemasaran produk unggulan daerah. Pemerintah Kabupaten Demak telah berupaya meningkatkan nilai tersebut dengan melakukan pameran, promosi produk di pasar regional, nasional dan internasional serta meningkatkan persentase produk unggulan yang diterima pasar internasional melalui kontak dagang dan lelang komoditi agro. Pada tahun 2024 Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri meningkat mencapai 0,23 persen.

Gambar II.28
Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

Tingkat Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) merupakan penambahan/pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam satu tahun. Angka perkembangan PMTB selama lima tahun terakhir di Kabupaten Demak berfluktuasi di mana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi PMTB cukup signifikan pada tahun 2021 (3,98%) dan tahun 2022 (2,65%). Namun pada tahun 2023 dan 2024, terjadi pertumbuhan ekonomi PMTB hingga mencapai 7,90 persen dan 7,10 persen. Adapun terkait net ekspor barang dan jasa, impor Kabupaten Demak mendominasi pada neraca perdagangan di mana distribusi net ekspor barang dan jasa bernilai negatif dan terus menurun hingga mencapai -17,39 persen pada tahun 2024.

Tabel II.49
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9,77	3,98	2,65	7,90	7,10
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	28,28	28,57	28,36	28,47	28,98
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-14,91	-15,16	-15,15	-16,43	-17,39

Sumber: BPS Kabupaten Demak (2025)

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pengembangan wilayah baik perkotaan dan perdesaan menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Demak. Pembangunan perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju sekaligus menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, serta pembangunan perdesaan mandiri yang memiliki keunggulan pada potensi daerah perlu diperhatikan secara seksama dalam pembangunan periode saat ini.

Sarana prasarana pembangunan merujuk pada fasilitas dan infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah atau negara. Sarana prasarana ini menjadi penting dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pengembangan sarana prasarana yang baik merupakan aspek kunci dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan baik wilayah perkotaan maupun perdesaan adalah terkait perumahan dan kawasan permukiman. Perumahan dan Kawasan Permukiman diarahkan untuk mencapai sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur daerah yang dilakukan dengan meningkatkan penyediaan perumahan dan penataan kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Adapun capaian luas kawasan kumuh yang tertangani sudah cukup baik dengan capaian di atas 100 hektar di setiap tahunnya sehingga penurunan kawasan kumuh pun juga meningkat hingga 2,56 persen pada tahun 2024. Terlihat pula peningkatan rumah tangga yang memiliki akses hunian layak sebesar 80,32 persen pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan, namun adanya masyarakat yang memiliki hunian tidak layak perlu menjadi perhatian dalam pembangunan ke depan, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Demak.

Tabel II.50
Pembangunan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Luas kawasan kumuh yang belum tertangani	Ha	116,39	211,602*	174,125	159,514	108,88
Persentase penurunan kawasan kumuh	%	45,86	-181,7	17,71	24,62	2,56
Jumlah RTLH yang tertangani	Unit	2.567	1.739	4.179	1.454	1.915
Persentase kawasan permukiman layak huni	%	74,97	79	99,09	99,16	96,63
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	n/a	75,90	70,94	71,88	80,32

**sesuai SK Nomor 475.26/120 Tahun 2021*
Sumber: Dinperkim Kabupaten Demak (2025)

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 78 disebutkan bahwa "Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat." Sedangkan Di Pasal 74 ayat (3) disebutkan "Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Peningkatan jumlah Desa Mandiri dapat menunjukkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Demak telah berupaya meningkatkan jumlah desa mandiri, hal ini terlihat dari persentase desa mandiri di Kabupaten Demak yang mengalami kenaikan cukup baik pada tahun 2024 menjadi sebanyak 45 desa mandiri dari 243 desa (18,52%). Adapun desa berstatus tertinggal juga mengalami penurunan menjadi 3 desa di mana sebelumnya sebanyak 7 desa. Selain desa mandiri, desa berstatus maju juga meningkat menjadi 126 desa dan diharapkan tahun depan dapat meningkat status kembali menjadi desa mandiri. Belum optimalnya capaian jumlah desa mandiri mengindikasikan bahwa perlu

dilakukan percepatan untuk meningkatkan jumlah desa yang naik status dari tertinggal dan berkembang menuju desa maju dan mandiri.

Tabel II.51
Jumlah Desa berdasarkan Status Desa
Tahun 2020-2024

No	Status	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mandiri	1	10	25	30	45
2	Maju	30	88	101	116	126
3	Berkembang	164	128	107	90	69
4	Tertinggal	47	17	10	7	3
5	Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0
Total		243	243	243	243	243
6	Persentase Desa Mandiri	0,41	4,12	10,29	12,35	18,52

Sumber: Dinpermades P2KB Kab. Demak (2025)

Salah satu komponen dari indeks Desa adalah indeks ketahanan ekonomi yang lihat dari pengembangan ekonomi desa secara mandiri melalui BUMDes. Di tahun 2024, jumlah BUMDes masih sama dengan tahun sebelumnya, akan tetapi terjadi peningkatan di klasifikasi BUMDesa berkembang dari 36 di tahun 2023, menjadi 59 di tahun 2024.

Tabel II.52
Jumlah dan Klasifikasi BUMDES Kabupaten Demak
Tahun 2020 – 2024

No	TAHUN	Jumlah Desa	Jumlah BUM Desa	Klasifikasi BUMDES				
				Dasar/Perintis	Tumbuh/Pemula	Berkembang	Maju	Tidak Ikut Pemeringkatan
1.	2024	243	214	93	30	59	6	26
2.	2023	243	214	129	43	36	6	0
3.	2022	243	204	99	94	9	2	0
4.	2021	243	191	111	67	7	0	6
5.	2020	243	145	1	139	5	0	0

Sumber: Dinpermades Kabupaten Demak (2025)

Pada tahun 2024, Kecamatan Karanganyar tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah BUMDes terbanyak di Kabupaten Demak, mencerminkan tingginya partisipasi desa dalam pengembangan ekonomi lokal. Pada tahun 2024, dari total 243 desa di Kabupaten Demak, tercatat sebanyak 214 desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jumlah ini mencerminkan komitmen kuat desa-desa dalam mengembangkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Dari keseluruhan BUMDes yang ada, sebagian besar masih berada pada klasifikasi dasar/perintis sebanyak 93 unit, diikuti oleh 59 BUMDes berkembang, 30 BUMDes tumbuh/pemula, dan hanya 6 BUMDes yang masuk kategori maju. Sementara itu, terdapat 26 BUMDes yang belum mengikuti proses pemeringkatan.

Dari sisi kualitas sarana prasarana pekerjaan umum, percepatan pembangunan jalan dan jembatan menjadi salah satu program prioritas daerah. Sesuai SK Bupati Demak Nomor 620/473 Tanggal 29 Desember Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Bupati Demak Nomor 620/63 Tahun

2017 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan sebagai Jalan Kabupaten di Kabupaten Demak, semula jalan kabupaten dengan panjang 426,510 Km menjadi 909,584 Km, Kondisi tersebut menunjukkan terdapat penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Peningkatan kualitas infrastruktur terutama jalan sebagai aksesibilitas masyarakat menjadi tantangan dimasa depan. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, maka semakin baik kondisi infrastruktur jalan, maka semakin baik pula roda perekonomiannya. Jumlah panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap selama lima tahun terakhir relatif menunjukkan perkembangan positif, terlihat dari jalan baik yang meningkat menjadi sepanjang 844,68 km dan panjang jalan rusak berat menjadi hanya sepanjang 16,64 km. Adapun pada tahun 2024, jenis permukaan jalan di Kabupaten Demak dari total panjang 909,58 km didominasi oleh permukaan beton dengan panjang jalan 844,68 km, permukaan aspal 16,44 km, kerikil 25,77 km, dan tanah 22,70 km. Adanya pembangunan dan rehabilitasi jalan memperlihatkan peningkatan jalan kondisi mantap yaitu sepanjang 808,072 Km dengan persentase 88,84 persen.

Tabel II.53
Panjang Jalan menurut Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan
di Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan	Km	426,51	426,51	853,52	909,58	909,58
-Baik	Km	370,53	372,06	783,5	534,68	387,7
-Sedang	Km	44,21	47,97	38,05	270,95	353,41
-Rusak	Km	9,57	5,28	14,33	53,49	93,67
-Rusak Berat	Km	2,2	1,2	17,64	50,46	74,8
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan	Km	426,51	426,51	853,52	909,58	909,58
-Aspal	Km	11,12	14,07	17,64	16,64	16,44
-Kerikil	Km	9,87	0	38,05	22,95	25,77
-Tanah	Km	6,8	9,83	14,33	24,3	22,7
-Beton	Km	NA	NA	783,5	845,69	844,68
-Lainnya	Km	398,72	402,61	NA	NA	NA
panjang jalan dalam kondisi Mantap	Km	414,74	420,03	821,55	805,63	741,11
Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten	persen	97,24	98,48	88,25	88,57	81,48

Sumber: Dinputaru Kabupaten Demak (2025)

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

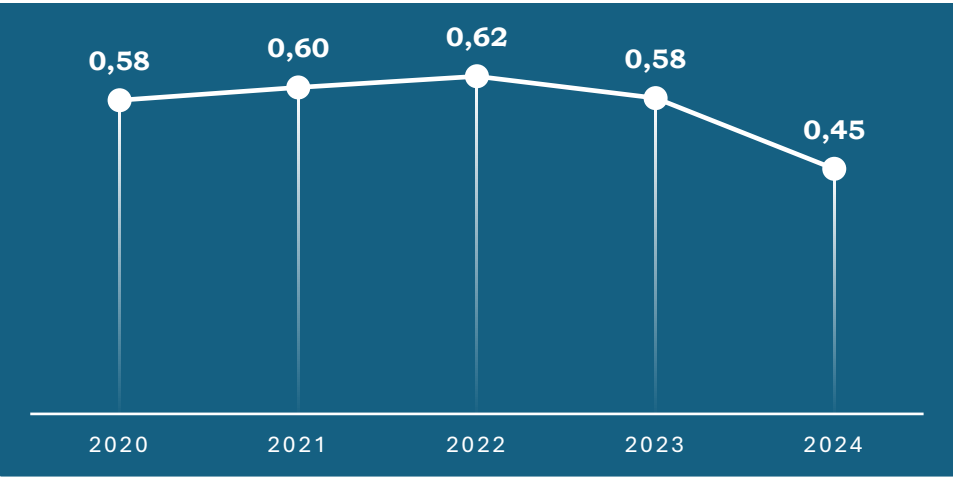
Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan. Stabilitas ekonomi makro juga merupakan fondasi utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan kondisi ekonomi yang stabil, ditandai oleh inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta defisit fiskal dan neraca

perdagangan yang terkelola dengan baik, pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan. Stabilitas ini menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan investor, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif.

Indikator lain yang menggambarkan daya saing ekonomi terdapat juga Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB Kabupaten Demak yang mencapai 4,55 persen dan Total Kredit pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB yang mencapai 4,84 persen pada tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2024, rasio Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB Kabupaten Demak sebesar 1,4%. Sedangkan Total Kredit pada Bank Milik Daerah dibandingkan nilai PDRB yang mencapai 1%.

Stabilitas ekonomi makro salah satunya dapat terlihat dari rasio pajak yang merupakan penerimaan pendapatan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan *output* nilai tambah produksi pada setiap aktivitas ekonomi. Rasio pajak terhadap PDRB mengindikasikan pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah. Terlihat bahwa rasio pajak terhadap PDRB di Kabupaten Demak masih sangat minim dan bahkan menurun di tahun 2023 dan 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak masih cukup rendah dibandingkan dengan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan.

Gambar II.29
Rasio Pajak Terhadap PDRB
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD dan BPS Kab. Demak, 2025 (data diolah)

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

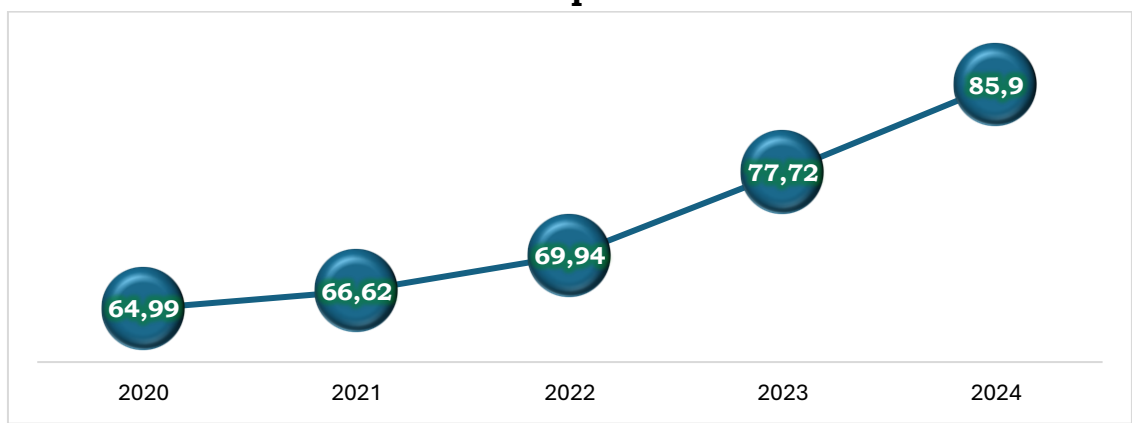
Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Demak dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

Indeks Reformasi Birokrasi, berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks RB Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 – 2024, pada tahun 2024 nilai indeks RB yakni sebesar 85,9. Hal ini menunjukkan pemerintah telah berupaya dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin baik.

Gambar II.30.
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Demak (2025)

Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Demak ini menunjukkan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di setiap tahunnya. Salah satu poin penting dalam pemerintahan daerah adalah pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dengan penilaian SAKIP sebagai indikator yang menunjukkan pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Adapun pencapaian SAKIP di Kabupaten Demak mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 69,08 pada tahun 2023, meningkat jika dibandingkan capaian 2020 sebesar 64,95.

Penggambaran keuangan daerah dapat dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Kabupaten Demak pada tahun 2021 memiliki Derajat Otonomi Fiskal sebesar 17,75 persen dan meningkat di tahun 2022 dan 2023 dengan capaian masing-masing sebesar 19,82 persen dan 21,02

persen. Penggunaan keuangan daerah pun juga memiliki opini Wajar Tanpa Pengecualian pada lima tahun terakhir.

Indikator lain yang memperlihatkan tata kelola keuangan daerah adalah Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Pencapaian IPKD di Kabupaten Demak juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir di mana pada tahun 2020 memiliki capaian 67,8421 dan meningkat di tahun 2023 mencapai 76,807.

Tabel II.54
Capaian Kinerja Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP Daerah	-	64,95	66,4	68,96	69,08	69,10
Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	n.a.
Derajat Otonomi Fiskal	Angka	n/a	17,75	19,82	21,02	22,00
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	angka	67,8421	69,8288	71,6441	76,807	82,5258
Indeks Profesionalitas ASN	Angka	n/a	80,00	75,00	90,17	83,08
Indeks Sistem Merit	Angka	0,664	0,675	276	282	282
Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,916	3,256	3,728	2,88	3,09
Indeks Integritas	Angka	77,19	81,4	74,56	71,94	n.a.
Level Maturitas SPIP	Angka	n/a	3,5	3,043	3,014	3,023
Indeks Pelayanan Publik	Angka	n/a	3,79	3,99	4,26	4,47

Sumber: Setda, Inspektorat Daerah, BPKPAD, BKPSDM Kabupaten Demak (2025)

Dalam rangka mewujudkan percepatan reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bidang kepegawaian sebagai amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, memiliki sasaran yaitu terwujudnya penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit adalah kebijakan dalam manajemen SDM aparatur negara yang berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan kinerja secara adil dan wajar. Secara umum sistem merit di Kabupaten Demak mengalami kenaikan. Adapun setelah mengalami perubahan metodologi, capaian Indeks Sistem Merit di Kabupaten Demak mencapai 282 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang memiliki nilai sebesar 276. Selain itu, terdapat indikator Indeks Profesionalitas ASN yang mengalami kenaikan hingga mencapai 90,17 pada tahun 2023 dan 83,08 pada tahun 2024.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan survei eksternal kepada masyarakat terhadap persepsi korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks Persepsi Korupsi menjadi komponen pembentuk Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Persepsi Korupsi pada komponen hasil Reformasi Birokrasi diukur dari Indeks Integritas Pemerintah Daerah, untuk Kabupaten Demak Indeks

Integritas tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan pencapaian tahun 2021 dari 81,40 menjadi 74,56 dengan nilai rata-rata nasional 72. Penurunan kembali terjadi di tahun 2023 dengan capaian Indeks Integritas Kabupaten Demak menjadi 71,94.

Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi, menilai pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi yang dilakukan masing-masing instansi. Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi. Hasil dari Indeks Persepsi Korupsi tahun 2022 jika dihitung dari konversi nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) yang berupa Indeks Integritas dengan skala 5 maka Indeks Persepsi Korupsi Kabupaten Demak adalah 3,728. Pada tahun 2023 capaian tersebut menurun menjadi 2,88. Oleh karena itu, diperlukan strategi perbaikan untuk meningkatkan capaian IPK.

Pembangunan hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik dan lebih adil. Proses ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembaruan undang-undang, peningkatan akses terhadap keadilan, serta peningkatan kualitas penegakan hukum dan peradilan. Pembangunan hukum di Kabupaten Demak juga diupayakan peningkatannya di mana pada tahun 2023 memiliki capaian Indeks Reformasi Hukum sebesar 54,20.

Dari sisi pelayanan publik, terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari Indeks Pelayanan Publik yang meningkat di tahun 2023 sebesar 4,26 dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 3,79. Selain itu, pelayanan umum yang dikelola oleh pemerintah dapat diintegrasikan ke dalam platform *e-Government* yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara *online* untuk dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keterjangkauan layanan. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan suatu metrik yang mengukur tingkat kesiapan dan kinerja pemerintah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Capaian Indeks SPBE Kabupaten Demak pun juga mengalami peningkatan di mana capaian pada tahun 2023 sebesar 3,62 meningkat menjadi 3,93 pada tahun 2024.

Adanya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mempercepat peningkatan keterpaduan dan efisiensi dalam melaksanakan SPBE di dalam dan antar instansi pemerintah. Dengan SPBE akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan juga berkinerja tinggi. Maka dari itu Indeks SPBE menjadi pilihan indikator kinerja utama Kabupaten Demak. Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SPBE Kabupaten Demak antara lain:

- a. Menjalankan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi, SPBE dari Kemenpan RB;

- b. Perlu melakukan reviu untuk Arsitektur dan Peta Rencana SPBE agar dapat menyesuaikan dan mengikuti kebijakan yang tetuang pada RPJMD;
- c. Melaksanakan forum konsultasi pemenuhan bukti dukung SPBE dengan melibatkan narasumber dari tim konsultasi SPBE KemenPAN RB dan konsultasi SPBE di luar Kementerian PAN RB;
- d. Perlu melakukan reviu Peraturan Bupati SPBE;
- e. Perlu melengkapi dengan menyusun pedoman untuk semua indikator pada domain manajemen;
- f. Mendorong pemanfaatan aplikasi umum pusat untuk menunjang SPBE di Kabupaten Demak.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan hukum diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Sedangkan pembangunan demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat.

Pemerintah Kabupaten Demak telah berupaya untuk menurunkan potensi gangguan trantibumlinmas, dalam rangka meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Begitu pun dengan investor, jika keamanan terjaga maka investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, sehingga meningkatkan PMTB. Penurunan potensi gangguan trantibumlinmas juga dapat memperbaiki citra daerah atau negara tersebut. Pada indikator ini, penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan masyarakat mencapai 100% pada tiga tahun terakhir. Selain itu, pada tahun 2023 menunjukkan tidak terjadi kejadian konflik sosial. Capaian ini perlu dipertahankan untuk menjaga kondusivitas wilayah.

Tabel II.55
Gangguan Trantibumlinmas dan Kejadian Konflik Sosial
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kejadian gangguan trantibumlinmas yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	0	0	0

Sumber: Satpol PP dan BPBD Kab. Demak (2025)

Layanan kesatuan bangsa dan politik terutama untuk menjaga rasa nasionalisme, meningkatkan iklim demokrasi dan menjaga kondusivitas wilayah.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak berupaya melakukan operasionalisasi berbagai forum yaitu FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), FPK (Forum Pembauran Kebangsaan), FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat), Forum Kewaspadaan Daerah (FKD) serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Berdasarkan data dari Bakesbangpol, bahwa kinerja capaian pada tahun 2023 adalah:

- a. Kasus konflik antar/intra umat beragama adalah 0 atau tidak ada kasus dengan capaian 100 persen;
- b. Angka kejadian konflik sosial adalah 0 atau tidak ada kejadian dengan capaian 100 persen;
- c. Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik realisasi sebesar 77,06 persen dengan capaian 101 persen;
- d. Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa terealisasi 82 persen dari target 81,2 persen dengan capaian 100,9 persen

Selengkapnya, berikut angka kejadian konflik Kabupaten Demak tahun 2020 – 2024:

Tabel II.56
Angka Kejadian Konflik Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus konflik antar/intra umat beragama	Kasus/ Kejadian	0	0	0	0	0
2	Angka kejadian konflik sosial	Kasus/ Kejadian	0	0	0	0	0
3	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Politik	Persen	73,4	73,4	75,3	77,06	78,2
4	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	Persen	78	78	80	82	83

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Demak (2025)

Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa sepanjang tahun 2023, di wilayah Kabupaten Demak selalu dalam kondisi kondusif tidak ada kejadian konflik sosial berupa pertikaian antar warga, antar pelajar dan terutama konflik antar umat beragama.

Tabel II.57 Data Rasio Fatalitas Kecelakaan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024						
No	Tahun	Korban Kecelakaan	Korban Meninggal Dunia	Kejadian Kecelakaan	Indeks Fatalitas	Rasio Fatalitas
1	2019	887	165	696	24%	19%
2	2020	752	154	593	26%	20%
3	2021	378	131	570	23%	35%
4	2022	723	150	750	20%	21%
5	2023	1044	147	741	20%	14%
6	2024	1159	149	860	17%	13%

Sumber: Dinhub Kabupaten Demak (2025)

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa analisis indeks fatalitas (severity index) rerata dalam 5 tahun terakhir adalah 22%. Jumlah kecelakaan relatif berkurang di tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Sedangkan berdasarkan rasio fatalitas rerata 5 tahun adalah 22% yang berarti, bahwa dalam 5 tahun terakhir terdapat 22% korban kecelakaan yang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas.

Dalam menilai kondisi ekonomi, sosial, budaya dan keberagamaan, Kabupaten Demak menggunakan Indeks Harmoni Indonesia (Ihai). Skor Ihai mencerminkan keharmonisan masyarakat, kohesifitas sosial, dan dinamika masyarakat. Indikator ini baru mulai dilakukan penghitungannya pada awal tahun 2025 oleh Kemendagri, nilai Kabupaten Demak yaitu 6,95 dari skala 9 yanh masuk dalam kategori baik. Pada dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi budaya Kabupaten Demak mendapatkan kategori baik, sementara dimensi keberagaman dalam kondisi sangat baik. Hal ini mencerminkan kondisi sosial dan budaya yang relatif stabil dengan tingkat harmoni keagamaan yang tinggi.

2.1.4.3 Daerah yang Berdaya Saing

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

IDSD Kabupaten Demak pada tahun 2023 memiliki capaian 3,25 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 3,67. Capaian tertinggi pada IDSD Kabupaten Demak berada di pilar institusi di mana terjadi kenaikan pada tahun 2024 menjadi 4,89 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun terjadi kenaikan IDSD, namun terdapat beberapa pilar yang mengalami penurunan capaian di antaranya pilar pasar tenaga kerja menjadi sebesar 2,92; pilar sistem keuangan menjadi 2,04; dan pilar kapabilitas inovasi menjadi sebesar 1,95 sekaligus menjadi pilar dengan capaian terendah. Kondisi ini tentu menjadi perhatian pada pelaksanaan pembangunan ke depan mengingat daya saing daerah merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan akselerasi pembangunan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada optimalisasi kinerja urusan tenaga kerja, keuangan baik swasta maupun daerah hingga perencanaan (khususnya penelitian dan pengembangan).

Tabel II.58
Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Demak Tahun 2023-2024

Nilai Indeks	2023	2024
Pilar Institusi	4,39	4,89
Pilar Infrastruktur	2,00	3,56
Pilar Adopsi TIK	4,35	4,42
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	3,23	3,65
Pilar Kesehatan	4,27	4,22
Pilar Keterampilan	3,41	3,89
Pilar Pasar Produk	2,58	3,49
Pilar Pasar Tenaga Kerja	3,06	2,92
Pilar Sistem Keuangan	2,42	2,04
Pilar Ukuran Pasar	4,41	4,43
Pilar Dinamisme Bisnis	2,55	4,60
Pilar Kapabilitas Inovasi	2,27	1,95
Indeks Daya Saing Daerah	3,25	3,67

Sumber: BRIN (2025)

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan

setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Demak dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.59
Capaian Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 18 Tahun 2020)
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Pendidikan							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	103,202	97,914	92,252	92,94	87,95
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	103,406	92,408	99,53	98,518	99,668
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	105,558	97,723	96	98,29	99,538
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	81,5618	58,912	60,832	52,433	42,718
b) Kesehatan							
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	Rasio (per 1.000 penduduk)	0,06246	0,0816	0,752	0,848	0,9305
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	75	60	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	94,91
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	96,062	99,774	99,81	100	95,305
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	101,18

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	94,161	94,899	100	0	57,51
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	94,161	94,899	100	0	43,79
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	94,161	94,899	94,899	96,374	97,11
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	%	80,078	8s2,977	85,583	87,643	92,26
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	97,997	98,153	100	100	100
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	97,2399	98,48	88,25	89,369	81,48
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	114,385	100	47,688	52,271	50

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100
d) Perumahan Rakyat							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	0	100	100	100	0
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	90,683	90,683	36,05	48,746	100
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	25,027	27,074	1,294	1,49	0,6643
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	100	99,546	7,75	100	100
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	853.535	560.250	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	853.555	560.250	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15
f) Sosial							
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	76,571	98,315	100	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar							
a) Tenaga Kerja							
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75	75	77,778	90	75
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	51,932	52,071	38,329	34,84	49,924
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	54,624	49,239	37,908	38,604	39,811
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	68,928	72,588	72,708	85,138	92,647
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	%	81,71	82,627	82,599	82,626	82,754
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	96,405	34,024	17,513	27,487	27,658
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio (per 100.000 penduduk)	0	6,396	3,927	8,116	9,3555
c) Pangan							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	680,485	401,37	100	134,97	16,132
d) Pertanian							
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase penutupan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	95,266	0	0
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam	%	100	100	95,266	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	rangka penanaman modal.						
4	Tersedianya Tanah Obyek <i>Landreform</i> (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	0	100	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	0	100	0	0
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	0	100
e) Lingkungan Hidup							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Nilai atau Indeks	59,79	61,465	54,84	65,79	57,38
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	84,981	84,748	92,983	93,737	91,707
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	0	0	0	0
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
1	perekaman KTP elektronik	%	98,208	97,909	97,873	99,65	98,695
2	persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	22,257	44,953	43,038	57,868	59,91
3	kepemilikan akta kelahiran	%	95,72	96,664	98,012	98,3	98,653
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	77,725	63,83	41,176	30	57,143
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0,61	7,812	11,719	4,673	44,444
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Nilai	2,08	2	2,035	2,03	2,02
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	%	79,005	79,107	72,82	73,467	73,768
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	7,891	6,247	7,175	6,894	6,2346
i) Perhubungan							
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	Rasio	81	81	0,81	0,81	0,9
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	Rasio	0,3	0,19	0,21	0,22	0,38
j) Komunikasi dan Informatika							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara <i>online</i> dan terintegrasi	%	100	100	54,762	56,25	13,333
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	100	100	100	100	100
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	60,172	62,081	62,653	63,951	65,636
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	13,952	28,1	27,246	56,844	62,561
l) Penanaman Modal							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	%	-14,626	39,032	20,418	222,93	12,529
m) Kepemudaan dan Olahraga							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	26,0098	26,059	26,263	26,308	26,63
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	26,774	27,984	29,775	29,778	30
3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah	0	12	35	17	12
n) Statistik							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
o) Persandian							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	86,822
p) Kebudayaan							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	66,667
q) Perpustakaan							
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai atau Indeks	68,308	52,76	55,62	66,72	75,26
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai atau Indeks	64,4	62,56	16,2	10,67	64,88
r) Kearsipan							

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	79,06	85,06	90,41	91,13	91,65
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	75	81,67	81,83	83,33	83,33
Urusan Pilihan							
a) Kelautan dan Perikanan							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	49.464,07	49.760,92	112,63	108,49	102,85
b) Pariwisata							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-97,183	-92,857	33,333	4250	42,529
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-79,098	0,171	151,62	28,941	40,514
3	Tingkat hunian akomodasi	%	78,906	79,016	79,574	66,081	50,067
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	8,88	9,007	10,259	10,696	2,3664
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,13	0,221	0,73	0,745	1,2515
c) Pertanian							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	605,094	5.983,49	628,97	595,27	614,41
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-21,523	-10,553	-3,015	-14,162	-13,146
d) Kehutanan							
e) Energi dan Sumber Daya Mineral							
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0	0	0	0	0
f) Perdagangan							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan	%	69,697	100	92,398	97,802	103,19

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	61,491	46,15	50,43	83,734	60,403
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	78,285	93,061	94,352	110,76	133,22
g) Perindustrian							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	% (nilai maks 125%)	148,598	1,381	1,392	1,403	1,4132
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	100	95,97	98,8	131,31
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	0	100	0	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	100	0	100	0	100
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	95	95	95	125	125
h) Transmigrasi							
1	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	%	5	5		1	1
	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya						
	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan							
a) Perencanaan dan Keuangan							
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	8,991	10,946	7,759	7,641	7,614
2	Rasio PAD	%	1,657	1,611	19,861	21,022	21,999

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai atau level	3	2,95	3,034	3,014	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3	3	3,08	3,04	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	62,765	65,072	62,941	65,086	67,524
6	Opini Laporan Keuangan	Jumlah	5	5	7	7	8
b) Pengadaan							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	55,461	35,652	52,185	83,941	50,315
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	40,076	25,963	29,028	28,716	48,425
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	%	0	53,503	27,709	0,345	27,113
c) Kepegawaian							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	138,83	189,522	56,489	61,979	65,481
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	75,412	86,507	18,614	17,419	15,88
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	2,363	2,41	17,981	29,9	38,224
d) Manajemen Keuangan							
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0	2,12	1,539	2,808	0,6743
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0	11,177	5,667	10,028	22,797
3	Manajemen Aset	Jumlah	4	4	4	4	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	9,847	10,599	6,106	4,992	5,1238
e) Transparansi dan Partisipasi Publik							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	109,165	107,833	94,538	93,43	97,559

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100

Indikator Produktivitas pertanian per hektar per tahun pada tahun 2021 mencapai angka yang cukup berbeda dari tahun lainnya. Hal ini disebabkan rumus penghitungan yang berbeda, yaitu menggunakan kwintal. Sedangkan pada tahun lainnya menggunakan ton. Sehingga capaian dihasilkan memiliki angka yang jauh berbeda secara *time series*.

Data apaian Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota dan Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan sebelum tahun 2023, didapatkan dari BBWS Prov Jateng selaku lembaga yang memiliki kewenangan atas Wilayah Sungai (WS) di Kabupaten Demak untuk melengkapi data IKK. Sedangkan mulai tahun 2023, berdasarkan Pedoman LPPD Tahun 2023, dan hasil konsultasi dengan Pemprov Jawa Tengah, maupun sosialisasi dari Kemendagri, bahwa IKK yang tidak menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dapat diinput 0/1 dengan mengupload Surat Keterangan Nihil. Hal inilah yang melatarbelakangi capain 0 pada kedua rasio tersebut di tahun 2023 dan 2024.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM ditetapkan oleh pemerintah sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum utama SPM adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta peraturan menteri teknis yang mengatur pelaksanaan SPM pada masing-masing urusan. SPM dilaksanakan pada enam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

Tabel II.60
Capaian Kinerja SPM Kabupaten Demak
Tahun 2021-2024

No.	Bidang/ Jenis Pelayanan Dasar	Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
1	Pendidikan	83,96	84,49	59,23	67,57	
a.	Pendidikan Anak Usia Dini	97,91	89,19	79,04	86,41	Belum Tercapai
b.	Pendidikan Dasar	95,06	98,28	87,05	99,51	Belum Tercapai

No.	Bidang/ Jenis Pelayanan Dasar	Capaian				Keterangan
		2021	2022	2023	2024	
c.	Pendidikan Kesetaraan	58,91	66	11,59	16,78	Belum Tercapai
2	Kesehatan	99,84	99,99	100,00	100,00	
a.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	100	100	100	Tercapai
b.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	Tercapai
c.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,85	100	100	100	Tercapai
d.	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100	100	100	Tercapai
e.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100	100	100	Tercapai
f.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	99,8	99,85	100	100	Tercapai
g.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	99,88	100	100	100	Tercapai
h.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	98,64	100	100	100	Tercapai
i.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100	Tercapai
j.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100	100	100	100	Tercapai
k.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	100	100	100	Tercapai
l.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko HIV	100	100	100	100	Tercapai
3	Pekerjaan Umum	90,57	94,24	100,00	96,13	
a.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	82,98	88,47	100	92,26	Belum Tercapai
b.	Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik	98,15	100	100	100	Tercapai
4	Perumahan Rakyat	100	100	100	100	
a.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	Tercapai
b.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100	100	100	100	Tercapai
5	Trantibumlinmas	100	100	100	100	
a.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	Tercapai
b.	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	Tercapai
c.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	Tercapai
d.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	Tercapai
e.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	Tercapai
6	Sosial	91,51	100	100	100	
a.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	93,2	100	100	100	Tercapai
b.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	80,14	100	100	100	Tercapai
c.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	93,81	100	100	100	Tercapai
d.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	90,42	100	100	100	Tercapai
e.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100	100	100	100	Tercapai

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Demak, 2024 (diolah)

Tabel II.61

Capaian Kinerja Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	LPE	%	-0,23	2,62	5,25	5,01	5,06	BAPPELITBANGDA
2	LPE kategori Industri Pengolahan	%	-2,78	4,65	6,84	5,03	4,77	DINNAKERIND
3	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,49	-2,16	-0,51	-1,48	0,63	DINPERTAN PANGAN, DINLUTKAN
4	Persentase peningkatan PAD Sektor Pariwisata	%	N/A	77,51	240,21	198,42	8,96	DINPARTA
5	PDRB per Kapita	Juta Rupiah	22,61	22,8	24,73	26,62	28,3	BAPPELITBANGDA
6	Indeks Gini	Angka	0,275	0,283	0,3	0,309	0,314	BAPPELITBANGDA
7	Tingkat Kemiskinan	%	12,54	12,92	12,09	12,01	11,89	BAPPELITBANGDA
8	IPM	Angka	72,22	72,57	73,36	74,07	74,57	BAPPELITBANGDA
9	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Angka	90,9	90,9	91,3	91,17	91,25	DINSOS P2PA
10	Indeks Pendidikan	Angka	0,627	0,632	0,64	0,645	0,647	DINDIKBUD
11	Indeks Kesehatan	Angka	0,852	0,8532	0,854	0,855	0,858	DINKES
12	Indeks Pengeluaran	Angka	0,705	0,709	0,72	0,735	0,746	DINDAGKOP UKM
13	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,31	13,32	13,33	13,34	13,36	DINDIKBUD
14	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,71	7,86	8,1	8,27	8,28	DINDIKBUD
15	Angka Harapan Hidup	Tahun	75,4	75,4	75,52	75,6	75,79	DINKES
16	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah	Angka	84,86	83,1	86,36	87,23	88,48	SETDA
17	Persentase Angkatan Kerja yang Bekerja	%	92,69	94,72	93,89	94,62	95,25	DINNAKERIND
18	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,31	5,23	6,11	5,38	4,75	DINNAKERIND
B.	ASPEK PELAYANAN UMUM							

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
PENDIDIKAN								
1	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B	%	58,71	59,21	80,03	82,31	77,91	DINDIKBUD
KESEHATAN								
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	4,90	3,93	3,73	3,41	7,46	DINKES
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	57,59	98,16	67,3	63,88	48,50	DINKES
3	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan terakreditasi minimal Madya	%	93,10	93,10	96,55	100	100	DINKES
4	Persentase Desa Siaga aktif mandiri	%	17	45	61,04	83	100	DINKES
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase penduduk yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	89,04	90,08	92,79	93,82	96,41	DINPUTARU
2	Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi	%	89,04	90,08	92,79	93,82	96,13	DINPUTARU
3	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Angka	0,35	0,34	0,64	0,67	1,68	DINPUTARU
4	Rasio jaringan irigasi	Angka	9,75	10,48	11,24	11,96	13,07	DINPUTARU
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	80,71	86,31	89,03	90,12	90,12	DINPUTARU
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN								
1	Persentase kawasan permukiman layak huni	%	99,39	99,39	99,09	99,16	99,41	DINPERKIM
2	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	68,37	68,37	17,71	24,62	47,06	DINPERKIM
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penegakan Perda dan Perkada	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
2	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
3	Pertumbuhan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	%	15,79	18,18	31,82	45,45	68,18	BPBD
4	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana	%	26,19	30,95	34,52	38,1	44,05	BPBD
SOSIAL								
1	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	%	100	100	100	100	100	DINSOS P2PA
2	Persentase PPKS yang mandiri	%	n/a	0,26	2,45	1,54	1,67	DINSOS P2PA
3	Persentase Penurunan PPKS	%	8,27	8,44	8,82	8,93	9,15	DINSOS P2PA
B,2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							
TENAGA KERJA								
1	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMR	%	100	100	100	100	100	DINNAKERIND
2	Persentase pelaku usaha yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan	%	68,93	72,59	72,71	85,14	92,65	DINNAKERIND
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	81,71	82,63	82,69	82,63	82,75	DINNAKERIND
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	66,85	66,83	67,82	68,56	66,22	DINSOS P2PA
2	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Angka	69,36	69,36	69,36	69,36	69,36	DINSOS P2PA
3	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka	N/A	575,01	697,4	673,67	N/A	DINSOS P2PA
PANGAN								

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	92,3	92,4	87,8	95,8	94,4	DINPERTAN PANGAN
2	Persentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	%	-0,52	0,4	29,23	5,55	2,32	DINPERTAN PANGAN
PERTANAHAN								
1	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	%	82,23	N/A	92,13	94,74	96	DINPUTARU
LINGKUNGAN HIDUP								
1	Indeks Kualitas Udara	Angka	84,81	85,15	80,67	87,54	72,53	DINLH
2	Persentase penurunan pencemaran udara	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	DINLH
3	Indeks Kualitas Air	Angka	61,5	65,56	34,76	66,19	55,61	DINLH
4	Persentase penurunan pencemaran air permukaan	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	DINLH
5	Indeks Tutupan Lahan	Angka	39,75	40,63	41,52	24,88	32,39	DINLH
6	Rasio Luas Tutupan Lahan	Angka	18,34	18,75	18,42	11,04	14,37	DINLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Indeks Kualitas Pelayanan Pengurusan Dokumen Adminduk	Angka	88,08	88,52	89,4	90,3	90,53	DINDUKCAPIL
2	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	%	98,21	97,91	97,87	99,65	98,7	DINDUKCAPIL
3	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	%	77,52	88,35	86,64	99,57	99,66	DINDUKCAPIL
4	Persentase instansi yang menyepakati dan memanfaatkan data kependudukan	%	100	100	100	100	100	DINDUKCAPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Desa Mandiri	Angka	0,41	4,12	10,29	12,35	18,52	DINPERMADES P2KB
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka	2,08	2,08	2,03	2,03	2,02	DINPERMADES P2KB
2	Prevalensi peserta KB Aktif	Angka	79,01	79,12	72,82	73,47	73,77	DINPERMADES P2KB
PERHUBUNGAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Transportasi	Angka	85,2	87,72	88,25	90,47	91,75	DINHUB
2	Kinerja lalu lintas kabupaten	Angka	0,3	0,3	0,21	0,22	0,38	DINHUB
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Indeks SPBE	Angka	3,94	3	3,85	4,14	4,51	DINKOMINFO
2	Indeks Layanan SPBE	Angka	3,57	3,1	3,25	3,2	3,8	DINKOMINFO
3	Indeks tata kelola SPBE	Angka	3,94	3	3,85	4,14	4,51	DINKOMINFO
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Persentase UMKM yang Naik Skala Usaha	%	2,51	2,33	1,84	3,69	4,6	DINDAGKOP UKM
2	Persentase Peningkatan Koperasi berkualitas	%	0,87	0,86	1,99	2,79	3,52	DINDAGKOP UKM
3	Persentase Peningkatan Omset UKM	%	0,07	0,1	0,35	3,06	3,63	DINDAGKOP UKM
PENANAMAN MODAL								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Perizinan Penanaman Modal	Angka	85	85	88,28	90,95	91,02	DINPM PTSP
2	Rata - rata lama pengurusan perizinan berusaha	hari	3	3	3	3	1	DINPM PTSP
3	Jumlah realisasi proyek PMDN dan PMA	proyek	419	431	519	1.676	2.059	DINPM PTSP

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Persentase Peningkatan Investasi	%	0,22	0,03	0,2	2,23	0,23	DINPM PTSP
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti	Angka	0	28	47,69	47,81	48,31	DINPORA
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	26,01	26,04	26,26	26,3	26,63	DINPORA
3	Pertumbuhan wirausaha muda	%	12	12,5	13,79	15,5	15,12	DINPORA
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	26,77	27	29,77	29,77	30	DINPORA
5	Persentase peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	28	28,5	32,6	32,6	33	DINPORA
STATISTIK								
1	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	%	N/A	N/A	100	100	100	DINKOMINFO
PERSANDIAN								
1	Indeks Keamanan Informasi	Angka	N/A	1	2	2,5	3	DINKOMINFO
KEBUDAYAAN								
1	Persentase peningkatan pelestarian warisan budaya	%	1,49	0	20	40	55,56	DINDIKBUD
PERPUSTAKAAN								
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	66	67	16,2	50,8	64,88	DINPERPUSAR

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	64,4	64,8	55,62	66,72	75,26	DINPERPUSAR
KEARSIPAN								
1	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	Angka	85	77,8	85,05	77,56	82,38	DINPERPUSAR
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan arsip secara baku	%	88,1	88,2	100	90,24	100	DINPERPUSAR
B.3	Urusan Pemerintahan Pilihan							
KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	LPE Sub kategori Perikanan	%	5,45	4,63	7,45	5,24	5,66	DINLUTKAN
2	Peningkatan Omset UKM Pengolahan hasil perikanan	%	7	7,77	7,44	8,1	8,6	DINLUTKAN
3	Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	49.464	49.761	57.301	57.901	59.950	DINLUTKAN
PARIWISATA								
1	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	-72,1	77,51	240,21	198,42	8,96	DINPARTA
2	Pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	-79,1	0,17	151,62	28,95	40,51	DINPARTA
PERTANIAN								
1	LPE subkategori pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	%	2,06	1,2	-1,68	-2,56	0,643	DINPERTAN PANGAN
2	Persentase peningkatan rata-rata produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	%	1,6	1,06	14,21	2,94	4,19	DINPERTAN PANGAN
PERDAGANGAN								

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase harga bahan kebutuhan pokok yang terkendali	%	62,79	77,5	95,769	96,52	96,75	DINDAGKOP UKM
2	Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	%	1,1	-0,17	0,03291	0,15	0,23	DINDAGKOP UKM
INDUSTRI								
1	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)	%	1,24	1,38	1,39	1,4	1,41	DINNAKERIND
2	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang aktif	%	80	81,05	82,01	85,19	86,01	DINNAKERIND
TRANSMIGRASI								
1	Jumlah calon transmigran yang terdaftar	KK	5	5	13	7	7	DINNAKERIND
B.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							
SEKRETARIAT DAERAH								
1	Nilai LPPD	Angka	3,5087	3,5087	3,51	3,478	3,406	SETDA
2	Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang memiliki kategori nilai tinggi	%	67,97	67,99	70	70	75	SETDA
3	Persentase pelaksanaan urusan perekonomian dan pembangunan yang memiliki kategori nilai tinggi	%	46,14	46,15	48	50	60,38	SETDA
SEKRETARIAT DPRD								
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Angka	84	86	86,06	86,13	86,19	SET DPRD

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
B.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
PERENCANAAN								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Angka	75	80	75	78	87,5	BAPPELITBANGDA
2	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja daerah	%	100	100	100	100	100	BAPPELITBANGDA
KEUANGAN								
1	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKPAD
2	Derajat Otonomi Fiskal	Angka	16,47	17,25	19,82	21,02	22	BPKPAD
3	Persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100	100	BPKPAD
4	Persentase Perangkat Daerah yang Mampu Mengelola Aset Dengan Baik	%	100	100	100	100	100	BPKPAD
KEPEGAWAIAN								
1	Indeks kepuasan ASN terhadap layanan kepegawaian	Angka	88,36	88,31	89,19	89,64	90,58	BKPP
2	Indeks Profesionalitas ASN	Angka	74	74,99	75	90,17	83,08	BKPP
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase jabatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya	%	80	80	92	83,46	100	BKPP
2	Rasio pelanggaran disiplin ASN	Angka	0,86	0,85	0,38	0,38	0,77	BKPP
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	1731	30,5	56,18	35,19	55,67	BAPPELITBANGDA
2	Persentase komponen inovasi daerah yang mencapai target	%	20	40	50	60	70	BAPPELITBANGDA
B.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan							
INSPEKTORAT DAERAH								
1	Indeks Integritas	Angka	77,14	81,4	74,56	71,94	77,39	INSPEKTORAT DAERAH
2	Level Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3,08	3,04	3	INSPEKTORAT DAERAH
3	Level Maturitas SPIP	Angka	3,0375	2,9	3,043	3,014	3,02	INSPEKTORAT DAERAH
B.7	Unsur Kewilayahan							
KECAMATAN								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,55	83,98	83,88	84,01	84,07	KEC. MRANGGEN
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,72	83,17	83,12	94,84	94,94	KEC. KARANGAWEN
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,68	81,18	81,38	81,61	83,12	KEC. GUNTUR
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,75	84	88,9	88,69	90	KEC. SAYUNG
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,43	82	83,12	86,66	91,33	KEC. KARANGTENGAH
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79	83	84	85,03	86,05	KEC. WONOSALAM
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	79,78	80,12	81,03	82,36	83,2	KEC. DEMPET
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	80,79	80,94	83,62	83,77	84,56	KEC. GAJAH
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	84,82	89,5	86,75	87,89	85,75	KEC. KARANGANYAR
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	87,86	87,97	84,5	88,3	88,68	KEC. MIJEN
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,09	84	85,25	85,59	91	KEC. DEMAK
12	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,85	89	93,05	90,06	91,36	KEC. BONANG

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,53	82,5	84,4	85,9	88,57	KEC. WEDUNG
14	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	76,43	79,5	79	81,17	84,36	KEC. KEBONAGUNG
15	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,53	72,21	70,46	71,26	71,4	KEC. MRANGGEN
16	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,25	67,62	67,21	68,26	68,5	KEC. KARANGAWEN
17	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,25	67,62	68,51	69,21	69,51	KEC. GUNTUR
18	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,8	67,85	65,85	66,3	66,35	KEC. SAYUNG
19	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,27	74,27	73,95	75,5	75,6	KEC. KARANGTENGAH
20	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	68	69,52	66,95	66,6	67,5	KEC. WONOSALAM
21	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	64,26	65,48	67,51	67,65	67,7	KEC. DEMPET
22	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,55	69,62	70,46	71,55	71,5	KEC. GAJAH
23	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	67,61	67,82	67,71	68,81	68,9	KEC. KARANGANYAR
24	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,06	74,95	73,8	72,55	75,3	KEC. MIJEN
25	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	70,49	70,49	71,2	71,8	72	KEC. DEMAK
26	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	74,69	75,68	73,55	74,16	74,25	KEC. BONANG
27	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	72,45	72,45	72,55	73,36	73,45	KEC. WEDUNG
28	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	71,54	71,55	71,46	69,81	69,35	KEC. KEBONAGUNG
B.8	Unsur Pemerintahan Umum							
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Kasus konflik antar/intra umat beragama	kejadian	0	0	0	0	0	BAKESBANGPOL
2	Persentase Masyarakat yang paham terhadap politik	%	73,4	73,4	75,3	77,06	78,2	BAKESBANGPOL
3	Persentase Masyarakat yang paham terhadap Kesatuan Bangsa	%	78	78	80	82	83	BAKESBANGPOL

NO	Aspek/Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Realisasi					PD Penanggung Jawab
			2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
C.	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	64,99	66,62	69,94	77,72	86,58	SETDA
2	Nilai SAKIP Daerah	Angka	64,95	66,4	68,96	69,08	69,1	SETDA
3	Indeks Persepsi Korupsi	Angka	3,916	3,256	3,728	2,88	3,09	INSPEKTORAT DAERAH
4	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	67,8421	69,8288	71,6441	76,807	82,526	BAPPELITBANGDA
5	Persentase kejadian gangguan trantibum linmas yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	SATPOL PP
6	Angka Kejadian Konflik Sosial	kejadian	0	0	0	0	0	BAKESBANGPOL
7	Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB)	%	9,77	3,98	5,08	7,9	7,1	DPMPTSP
8	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri	%	0,01	0,04	0,02	0,05	0,23	DINDAGKOP UKM
9	Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan (PPP)	Rp. 000	10.128	10.248	10.698	11.166	11,591	DINDAGKOP UKM
10	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta/ orang	46,19	33,46	37,91	38,6	39,81	DINNAKERIND
11	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%	57,44	76,65	101,99	88	100,23	DINPUTARU
12	Indeks Desa Membangun	Angka	18,93	0,642	10,28	12,35	18,52	DINPERMADES P2KB
13	Ketaatan terhadap RTRW	%	61,9	61,95	62,08	62,25	62,41	DINPUTARU
14	Emisi GRK	Gg CO2eq	1.652,41	1640,73	1.715,86	1.688,43	1.470,37	DINLH
15	IKLH	Angka	59,79	59,81	54,84	65,79	57,38	DINLH
16	Indeks Risiko Bencana	Angka	105,77	105,21	103,88	97,71	91,76	BPBD

2.2 GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah dan ekonomi daerah memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Keuangan daerah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan sebaliknya, ekonomi daerah yang kuat dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan keuangan daerah menjadi sumber utama pendanaan bagi pembangunan daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku usaha, sehingga mendorong iklim investasi yang kondusif. Lebih jauh lagi keuangan daerah yang sehat dan stabil dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam menghadapi gejolak ekonomi global.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak *the Great Depression* 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan laporan *World Economic Outlook* yang dirilis oleh *International Monetary Fund* (IMF) pada Januari 2024, pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan sebesar 2,9% untuk tahun 2024, dan diproyeksikan akan tumbuh 3,2% pada tahun 2025. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2025 tumbuh 2,7 persen. Proyeksi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi global

akan tetap stabil, dengan kecepatan yang sama seperti pada tahun 2024, di tengah penurunan inflasi dan suku bunga secara bertahap.

Berbagai lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia dan DBS *Group Research*, memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sekitar 5,1% pada tahun 2025. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2025. Optimisme proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 didasarkan pada beberapa pilar utama, yaitu ketahanan ekonomi domestik yang didukung oleh konsumsi kuat dan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri khususnya di sektor strategis seperti infrastruktur dan energi terbarukan, reformasi kebijakan dan digitalisasi yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas, stabilitas sektor keuangan yang terjaga melalui kebijakan makroprudensial, serta kebijakan pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat seperti kenaikan upah minimum dan pertumbuhan upah riil. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun pemerintah tetap perlu mewaspadaikan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam lingkup lokal, ekonomi makro Kabupaten Demak menunjukkan kinerja yang positif dalam beberapa tahun terakhir yang terutama ditopang oleh sektor pertanian industri pengolahan dan sektor perdagangan. Di sisi yang lain Kabupaten Demak memiliki potensi ekonomi melalui pengembangan pariwisata, industri kreatif dan investasi. Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Saat ini Pemerintah Daerah Demak sedang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, seperti membangun infrastruktur yang lebih baik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan sektor-sektor unggulan, seperti pariwisata dan industri kreatif. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan perekonomian Kabupaten Demak dapat terus tumbuh dan berkembang sehingga kemudian dapat mendorong pendapatan daerah ke depan.

2.2.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai matrik

keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah (kabupaten/kota) dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar (khususnya provinsi dan nasional). Dalam konteks pemerintahan daerah (kabupaten/kota), sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.62
Skala Interval Otonomi Fiskal

No.	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Demak berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) terus mengalami tren positif yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik. Di tahun 2020 DOFD Kabupaten Demak mencapai 18,84% dan terus meningkat hingga mencapai 22% di tahun 2024. Konsistensi peningkatan DOFD tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya secara konsisten Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2020-2024. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Demak terus bergerak positif dari kategori kurang di tahun 2020 dan telah masuk kategori Sedang pada tahun 2024. Agar

tingkat kemandirian fiskal ke depan bisa terus meningkat maka Pemerintah Kabupaten Demak perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali sumber-sumber keuangan daerahnya khususnya mendorong tumbuhnya sektor pariwisata dan industri kreatif dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Demak periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.63
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	439.694.424.386	2.333.738.996.799	18,84
2	2021	445.010.135.309	2.365.244.759.658	18,81
3	2022	477.198.401.099	2.402.717.869.624	19,86
4	2023	508.055.346.278	2.416.786.383.470	21,02
5	2024	594.887.868.035	2.704.168.334.636	22
Rata-Rata		492.969.235.021	2.444.531.268.837	20,11

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Demak sebesar 22% dalam skala interval otonomi daerah masih dalam kategori sedang namun belum mandiri. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan pada Dana Transfer semakin berkurang sehingga Kabupaten Demak semakin mandiri. Momentum perubahan skema Bagi Hasil Pajak menjadi Opsen bisa menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan PAD Kabupaten Demak. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Demak dapat meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dalam optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta untuk optimalisasi pemungutan pajak daerah salah satunya dengan Mengintensifkan pemungutan pajak terhadap objek pajak yang sudah terdaftar, memperbaiki sistem informasi pajak dan retribusi untuk mempermudah pemungutan serta melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan dan juga Retribusi daerah

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana

publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Demak akan dilihat dari kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

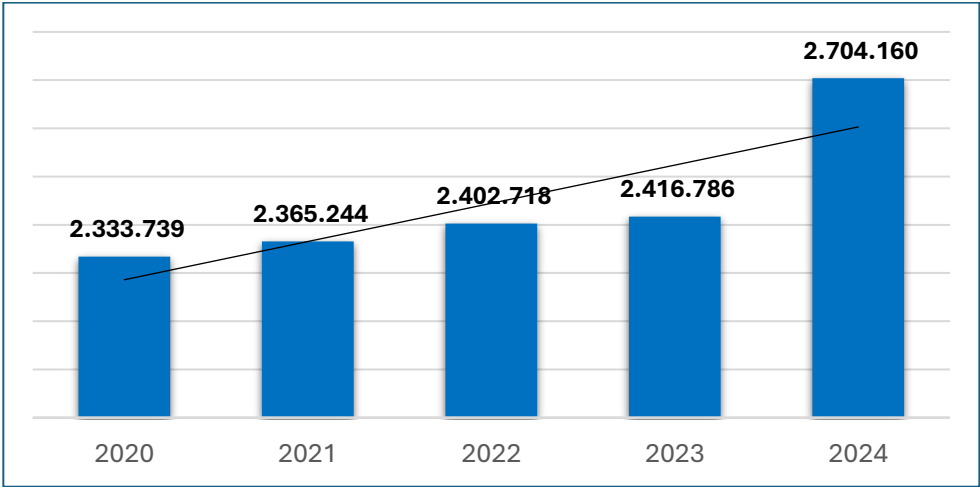
Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan pendapatan Kabupaten Demak terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 3,85% di mana pendapatan tahun 2020 mencapai

Rp2,333 triliun menjadi Rp2,704 triliun di tahun 2024 yang terutama didorong oleh meningkatnya pendapatan transfer dan PAD.

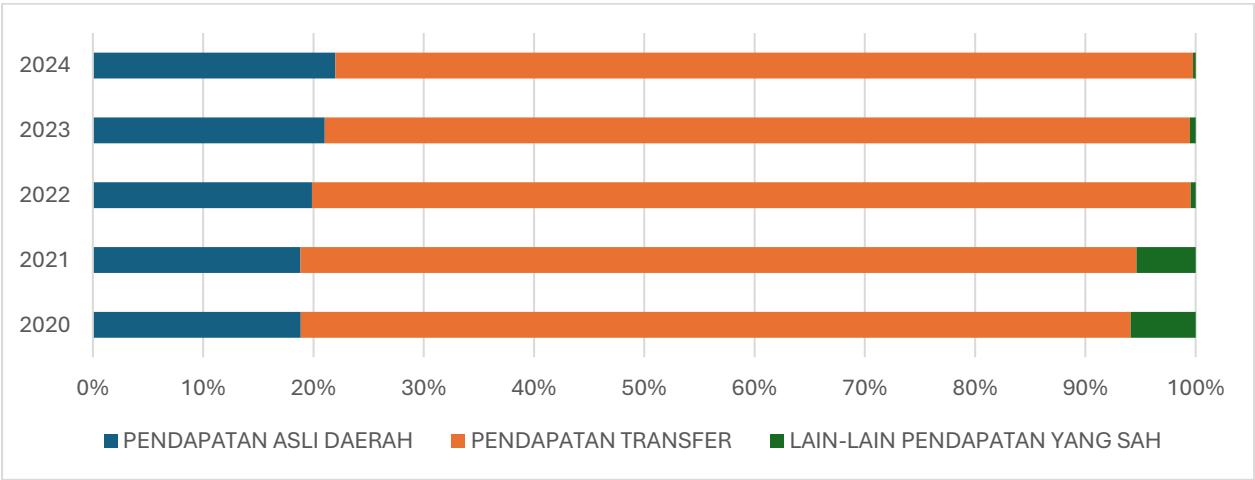
Gambar II.29
Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen pendapatan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), terlihat bahwa baik pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif cukup signifikan, secara berurutan sebesar 8% dan 4,7% per tahun. Sementara lain-lain pendapatan yang sah mengalami rata-rata kontraksi sebesar -33,78% dari Rp137,516 miliar menjadi hanya Rp6,426 miliar yang disebabkan turunnya sumber pendapatan hibah.

Gambar II.30
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan

menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak reklame, pajak air tanah dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yaitu PBJT Hotel, PBJT atas makanan dan minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT kesenian dan hiburan, dan PBJT parkir. Selain itu juga dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Perkembangan pajak daerah mengalami kenaikan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,05% dari Rp152,911 miliar (2020) menjadi Rp223,507 miliar (2024). Pertumbuhan pajak tersebut terutama didorong oleh Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ada beberapa tantangan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah yaitu masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak, masih banyak potensi sektor ekonomi yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, dan keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak. Untuk lebih mengoptimalkan PAD dari pajak daerah ke depan, selain mengatasi tantangan-tantangan yang ada, penegakan perda pajak dan retribusi serta optimalisasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

2) Retribusi Daerah

Dalam melakukan analisa tren perkembangan retribusi daerah kurun waktu 2020-2024 masih menggunakan regulasi lama sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 14 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dan Retribusi Menara Telekomunikasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi

Jasa Umum Pemerintah Daerah, bahwa Kabupaten Demak memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. Sementara berdasarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi daerah, yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupateb Demak nomor 16 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Perijinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).

Pendapatan retribusi di Kabupaten Demak mengalami tren meningkat cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,30% dari Rp27,263 miliar (2020) menjadi Rp40,980 miliar (2024). Untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

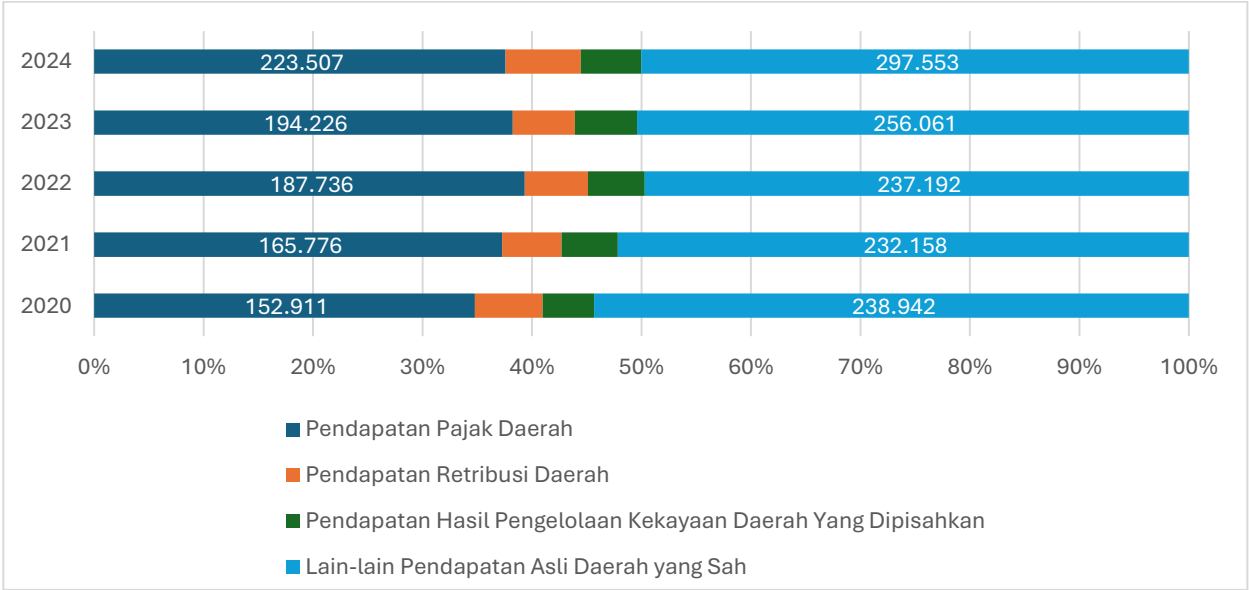
Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 12,44% dari Rp20,579 miliar (2020) menjadi Rp32,847 miliar (2024). Pertumbuhan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Demak pada lembaga keuangan, aneka usaha dan bidang air minum. BUMD yang memberikan deviden yaitu PT. LKM Demak Sejahtera, PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Demak, PT. BPR BKK Jawa Tengah, PT. Bank Jateng, PT. Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Jateng, PT. Demak Sarana Sehat, PT. Demak Aneka Wira Usaha (Anwusa), PT. Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah, dan Perumda Air Minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami tren positif yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,87% dari Rp238,942 miliar (2020) menjadi Rp297,553 miliar (2024). Tumbuhnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di antaranya didorong oleh Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Pendapatan BLUD.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

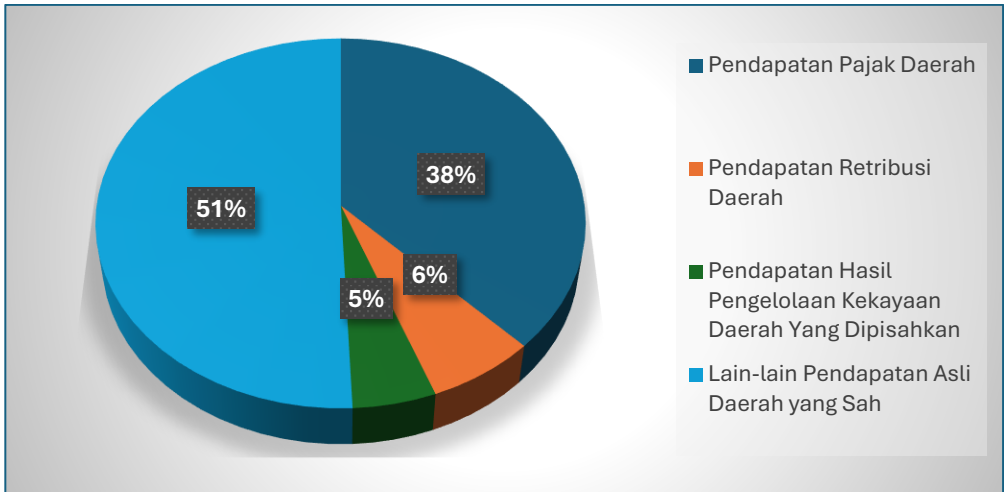
Gambar II.31
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Demak. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 51% per tahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 38% per tahun, berikutnya Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 6% per tahun, dan terakhir Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 5% per tahun. Oleh karena itu, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Gambar II.32
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)

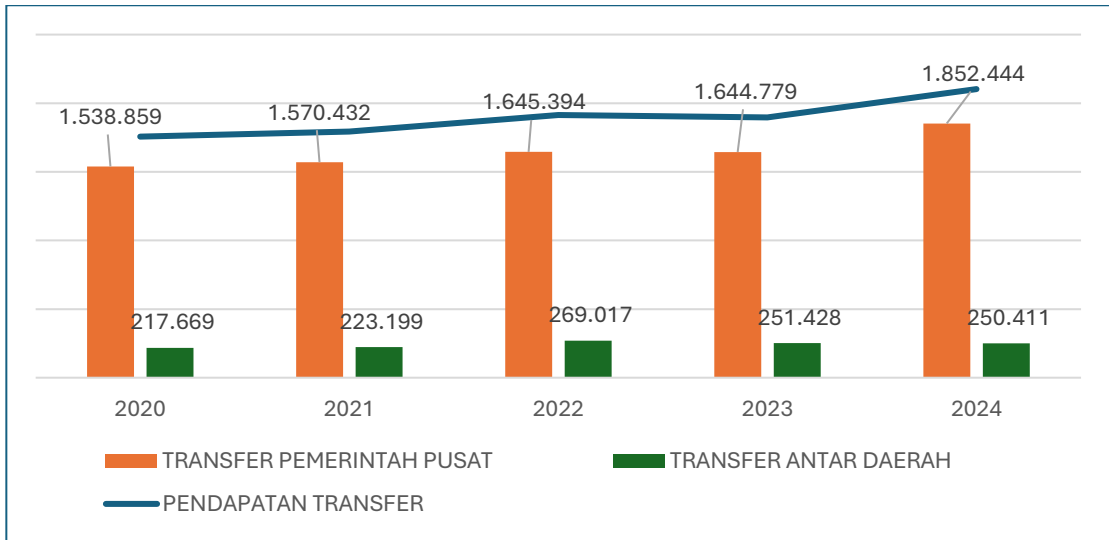


Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2024 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. transfer pemerintah pusat terdiri dari: dana perimbangan, dana insentif fiskal dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Gambar II.33
Komponen Pendapatan Transfer Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (juta)

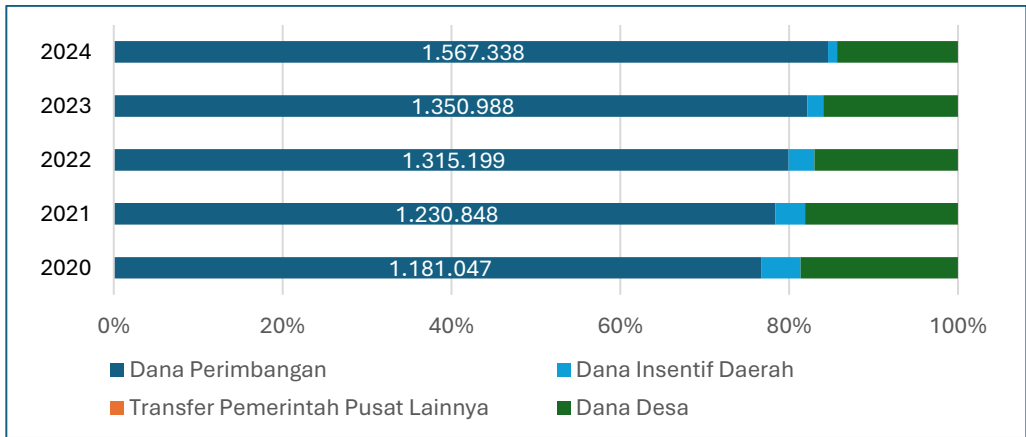


Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Demak mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,70% dari Rp1,756 triliun (2020) menjadi Rp2,102 triliun (2024). Pada tahun 2024, pendapatan transfer tertinggi dari komponen DAU, DAK, dan pendapatan transfer antar daerah dari bagi hasil. Jika dilihat rata-rata kontribusinya, maka 87,2% pendapatan transfer disumbang oleh transfer pemerintah pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan transfer pemerintah pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka rata-rata 80,4% disumbang oleh dana perimbangan sisanya dari dana insentif daerah dan dana desa.

Gambar II.34

Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)



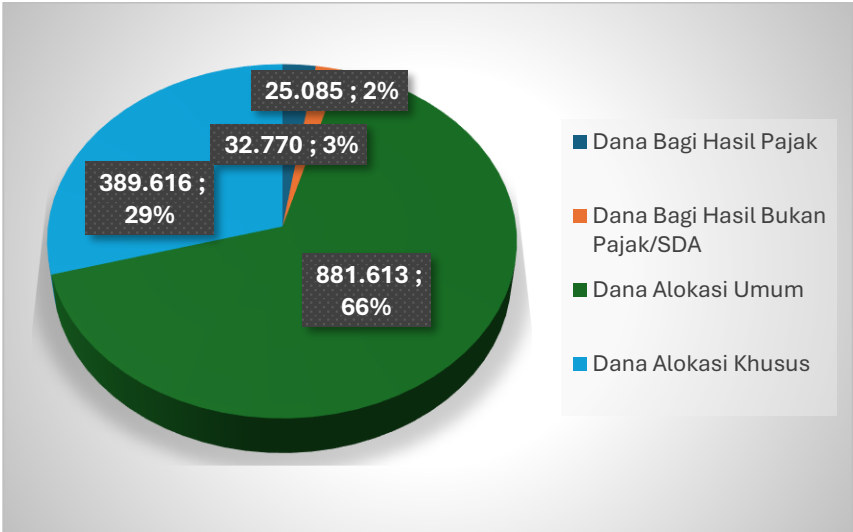
Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,45% dari Rp1,181 triliun di tahun 2020 menjadi Rp1,567 triliun di tahun 2024. Dari komponen pembentuk dana perimbangan, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA mengalami tren pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu sebesar 482,30% per tahun kecuali pada tahun 2023 yang mengalami penurunan. Sementara itu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami Peningkatan. DBH Pajak rata-rata meningkat 27,98% per tahun. Dana Alokasi Umum (DAU) rata-rata meningkat 2,90% per tahun dari Rp860,873 miliar (2019) menjadi Rp961,885 miliar (2024), DAK rata-rata meningkat sebesar 18,76% per tahun dari Rp277,020 miliar (2020) menjadi Rp540,791 miliar (2024).

Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 67% kemudian DAK sebesar 29%, DBH Pajak sebesar 3%, dan sisanya dari DBH Bukan Pajak/SDA sebesar 1%.

Gambar II.35

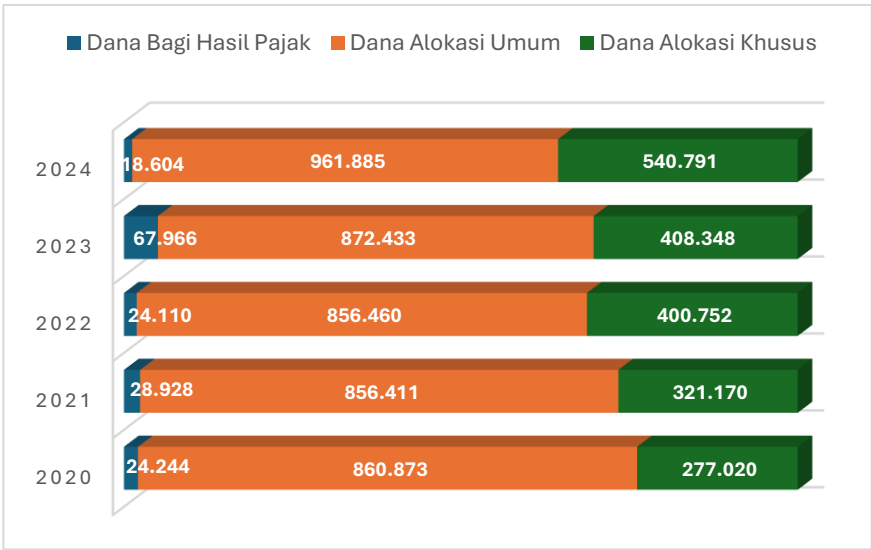
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Gambar II.36

Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (juta)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

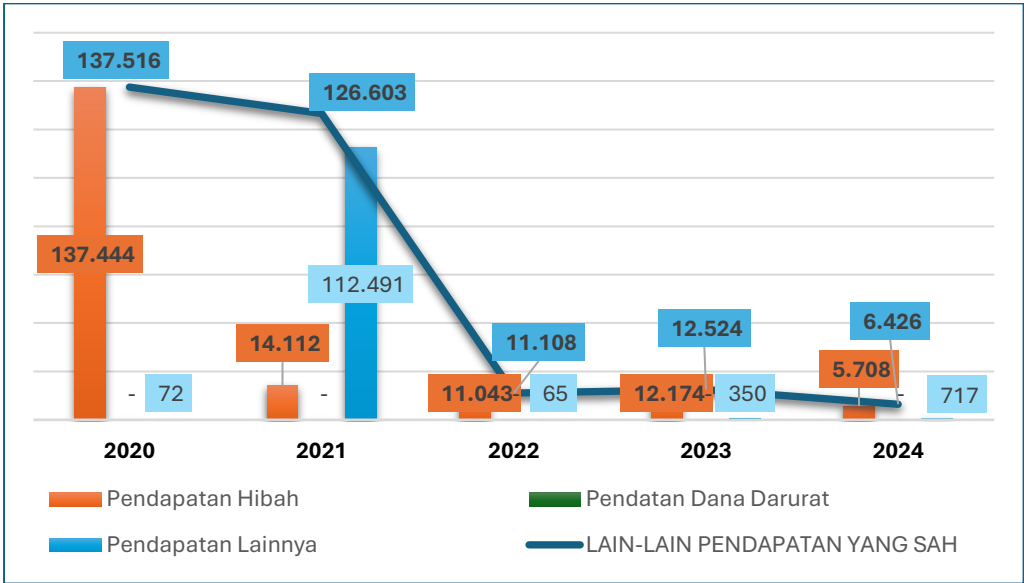
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan nilai yang menurun cukup signifikan dari Rp137,516 miliar (2020) menjadi hanya Rp6,426 miliar (2024) atau rata-rata menurun -33,78% per tahun. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2020 yang sebesar Rp137,516 miliar. Jika dilihat lebih detail dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagian besar

Sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun drastis dari Rp137,444 miliar (2020) menjadi Rp5,708 miliar (2024). Sementara sumber pendapatan lainnya meskipun trennya meningkat namun secara nominal nilainya tidak signifikan yaitu Rp72 juta (2019) menjadi Rp717 juta (2024). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pendapatan hibah merupakan penyumbang terbesar pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar II.37
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapat Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- a. Peningkatan Efisiensi: pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- b. Diversifikasi Pendapatan: upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan di luar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- c. Pembangunan Infrastruktur: investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- d. Pengelolaan Utang: manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.

- e. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
- f. Pengembangan Sektor Ekonomi: mendorong pertumbuhan sektor ekonomi yang potensial di daerah, seperti pariwisata, pertanian, atau industri lokal, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan penerimaan lainnya.
- g. Transparansi dan Akuntabilitas: memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.
- h. Kebijakan pendapatan daerah haruslah seimbang antara memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dan memperhatikan keadilan serta kepentingan masyarakat dalam penggunaan dan penyaluran pendapatan tersebut.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.64
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertum- buan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	2.333.739	2.365.244	2.402.718	2.416.786	2.704.160	3,85
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	439.694	445.010	477.198	508.055	594.880	8,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	152.911	165.776	187.736	194.226	223.507	10,05
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.263	24.230	27.533	28.944	40.972	12,30
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.579	22.845	24.738	28.825	32.847	12,44
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238.942	232.158	237.192	256.061	297.553	5,87
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.756.529	1.793.631	1.914.411	1.896.207	2.102.855	4,70
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.538.859	1.570.432	1.645.394	1.644.779	1.852.444	4,85
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.181.047	1.230.848	1.315.199	1.350.988	1.567.338	7,45
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	24.244	28.928	24.110	67.966	63.026	44,32
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	18.910	24.340	33.877	2.242	1.636	-13,13
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	860.873	856.411	856.460	872.433	961.885	2,90
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	277.020	321.170	400.752	408.348	540.791	18,76
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	70.723	55.120	50.226	31.244	20.070	-26,12

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertum- buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	287.089	284.463	279.969	262.546	265.035	-1,94
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	217.669	223.199	269.017	251.428	250.411	4,03
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.902	184.791	199.350	198.038	204.204	8,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	65.767	38.408	69.667	53.391	46.207	0,74
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	65.767	38.408	69.667	53.391	46.207	0,74
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	137.516	126.603	11.108	12.524	6.426	-33,78
1.3.1	Pendapatan Hibah	137.444	14.112	11.043	12.174	5.708	-38,59
1.3.2	Pendataan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	72	112.491	65	350	717	39156,56

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:

1) Belanja operasi

Merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3) Belanja tidak terduga

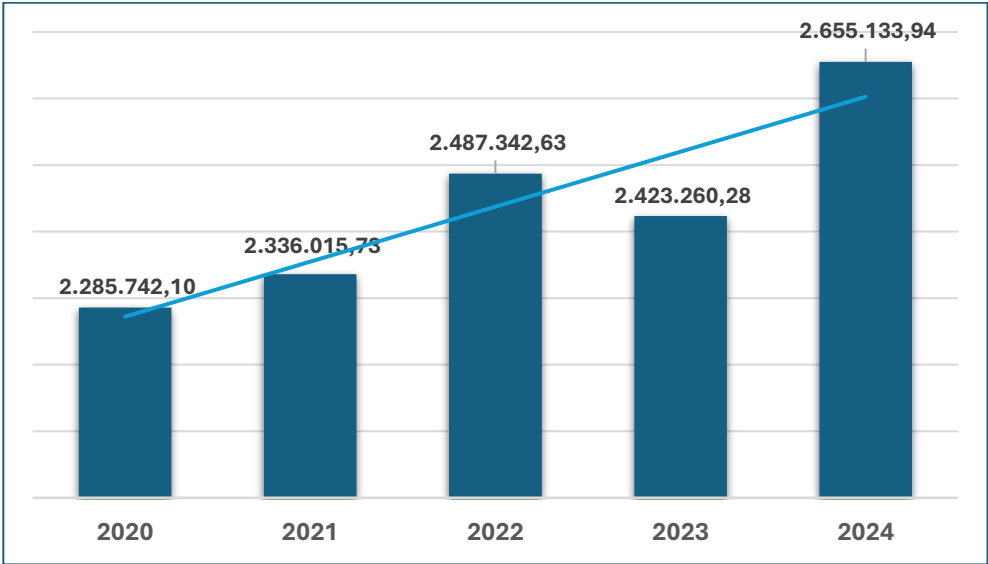
Merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja transfer

Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Demak dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024) dalam tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,92% per tahun. Fluktuasi belanja daerah terjadi di tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Daerah di tahun 2020 mencapai Rp2,285 triliun naik di tahun 2021 (Rp2,336 triliun) dan tahun 2022 menjadi sebesar Rp2,487 triliun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi Rp2,423 triliun dan meningkat kembali pada tahun 2024 mencapai Rp2,655 triliun. Adapun fluktuasi di tahun 2023 lebih disebabkan kurang terserapnya anggaran belanja daerah khususnya yang berbentuk belanja modal.

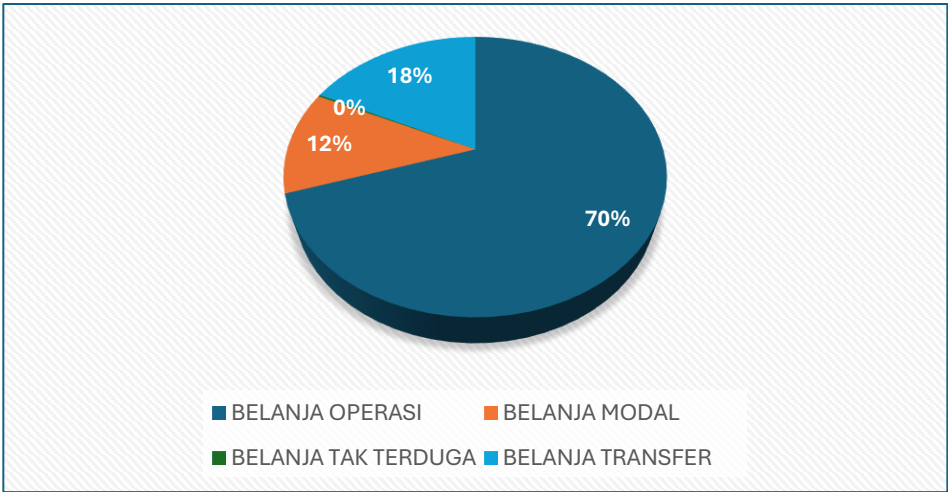
Gambar II.38
Perkembangan Belanja Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (juta)



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, hampir semua jenis belanja daerah mengalami tren meningkat, kecuali belanja tak terduga yang mengalami penurunan cukup drastis yaitu dari Rp24,913 miliar (2020) menjadi Rp0 (2024). Belanja yang mengalami tren meningkat yaitu Belanja Operasi sebesar 6,03%, Belanja Modal sebesar 0,54% dan Belanja Transfer sebesar 0,11%. Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 70% Belanja Daerah digunakan untuk belanja operasi, kemudian 12% digunakan untuk belanja modal, dan 18% digunakan untuk belanja transfer dan kurang dari 1% digunakan untuk belanja tidak terduga.

Gambar II.39
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

a. Belanja Operasi

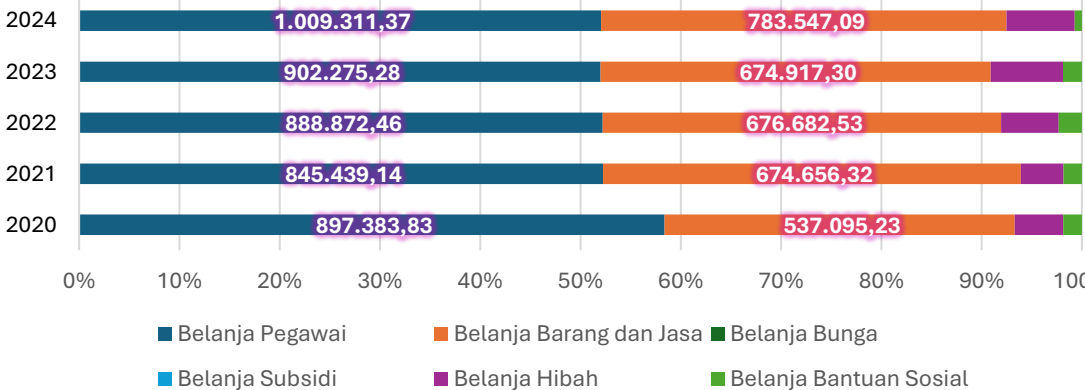
Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Demak telah tumbuh 6,03% per tahun dari Rp1,537 triliun (2020) menjadi Rp1,938 triliun (2024). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan

Gambar II.40

Tahun	Lainnya	Belanja pegawai	Belanja Barang dan Jasa
2020	6,69%	58,37%	34,94%
2021	6,09%	52,23%	41,68%
2022	8,05%	52,21%	39,74%
2023	9,10%	52,00%	38,90%
2024	7,52%	52,06%	40,42%

Meskipun secara proporsi belanja pegawai terus menurun, namun secara nominal nilainya terus mengalami peningkatan dari Rp897,383 miliar (2020) menjadi Rp.1,009 triliun (2024), peningkatan tersebut salah satunya karena bertambahnya CPNS dan PPPK. Berdasarkan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka belanja pegawai ditargetkan di tahun 2027 paling besar adalah 30%. Untuk itu kondisi peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian karena agar selain dapat memenuhi amanat undang-undang tersebut juga agar ke depan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambar II.41



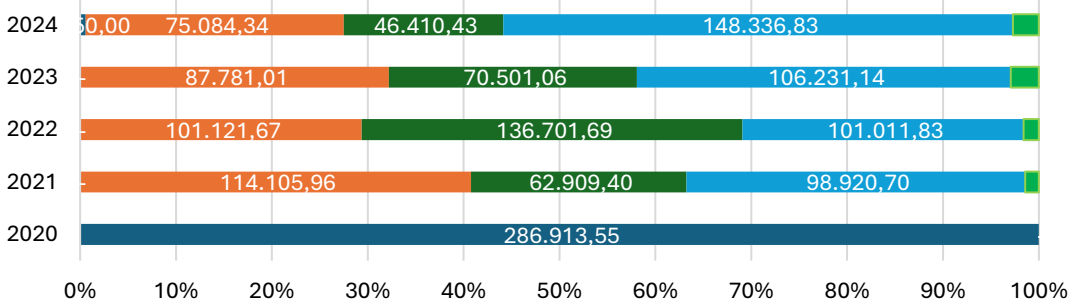
Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

b. Belanja Modal

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Demak mengalami tren naik 0,54% per tahun dari Rp286,913 miliar (2020) menjadi Rp279,183 miliar (2024). Belanja tanah hanya teralokasi di tahun 2020 dan 2024 dengan besaran secara berturut-turut adalah Rp286,913 miliar dan Rp1,650 miliar. Sedangkan belanja modal lainnya yang mengalami pertumbuhan dan mengalami penurunan yaitu Belanja Peralatan dan Mesin turun -13,83% per tahun, Belanja Bangunan dan Gedung turun cukup signifikan yaitu -41,30% per tahun, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan tumbuh 22,40% per tahun dan Belanja Aset Tetap Lainnya tumbuh 20,38% per tahun.

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah, struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

Gambar II.42



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

c. Belanja Tak Terduga

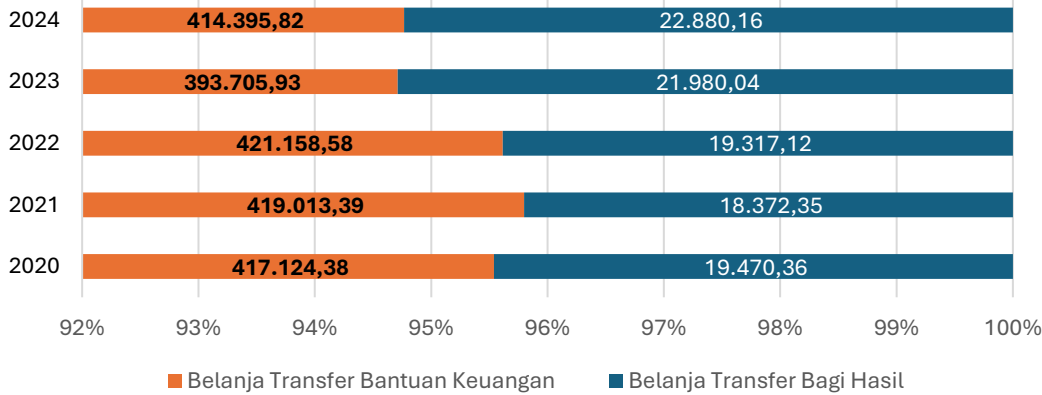
Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Demak hanya terjadi di tahun 2020 yang sebesar Rp24,913 miliar dan Rp2,49 juta di tahun 2023. Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

d. Belanja Transfer

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Demak relatif meningkat sekitar 0,11% per tahun dari Rp436,594 miliar (2020) menjadi Rp437,275 miliar (2024). Kenaikan tersebut didorong oleh relatif meningkatnya belanja bagi hasil yang tumbuh 4,35% per tahun dari Rp19,470 miliar (2020) menjadi Rp22,880 miliar (2024). Belanja transfer bantuan keuangan sedikit fluktuatif, mengalami sedikit penurunan sebesar -0,07% per tahun. Adapun belanja transfer bantuan keuangan terbesar terjadi pada tahun 2022 yang sebesar Rp421,158 miliar.

Jika dilihat dari proporsinya maka rata-rata lebih dari 95% alokasi belanja transfer adalah untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa, dan sisanya untuk belanja bagi hasil khususnya bagi hasil pajak.

Gambar II.43



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja hanya terjadi di tahun 2022 dan 2023 yang nilai defisitnya secara berturut-turut sebesar Rp84,624 miliar dan Rp6,473 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup SiLPA yang dapat digunakan di tahun 2022 dan 2023 yang secara berturut-turut sebesar Rp242,258 miliar dan 142,637 miliar. Adapun tahun 2020, 2021, dan 2024 terjadi surplus anggaran belanja.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir, maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. Beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk di antaranya

- 1) **Perencanaan Anggaran yang Cermat:** Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 4) **Pengelolaan Utang yang Bijaksana:** Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta

memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

- 5) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk meningkatkan anggaran belanja, meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
- 7) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan perkembangan belanja daerah Kabupaten Demak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.65

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertum- buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	BELANJA	2.285.742,10	2.336.015,73	2.487.342,63	2.423.260,28	2.655.133,94	3,92
2.1	BELANJA OPERASI	1.537.320,15	1.618.707,51	1.702.565,56	1.735.040,88	1.938.674,24	6,03
2.1.1	Belanja Pegawai	897.383,83	845.439,14	888.872,46	902.275,28	1.009.311,37	3,18
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	537.095,23	674.656,32	676.682,53	674.917,30	783.547,09	10,44
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	74.065,55	69.147,27	97.499,40	125.045,55	131.867,18	17,02
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.775,55	29.464,77	39.511,18	32.802,75	13.948,60	-9,49
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	286.913,55	279.922,49	344.301,37	272.530,94	279.183,72	0,54
2.2.1	Belanja Tanah	286.913,55	-	-	-	1.650,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	114.105,96	101.121,67	87.781,01	75.084,34	-13,83
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-	62.909,40	136.701,69	70.501,06	46.410,43	-41,30
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	98.920,70	101.011,83	106.231,14	148.336,83	22,40
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	3.986,41	5.466,17	8.017,73	7.543,18	20,38
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	158,93	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	24.913,66	-	-	2,49	-	

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertum- buhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	24.913,66	-	-	2,49	-	
2.4	BELANJA TRANSFER	436.594,73	437.385,73	440.475,70	415.685,97	437.275,97	0,11
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	19.470,36	18.372,35	19.317,12	21.980,04	22.880,16	4,35
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	19.470,36	15.291,09	16.577,61	18.901,65	22.880,16	5,50
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	3.081,26	2.739,51	3.078,40	-	-43,81
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	(0,07)
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	-0,07
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	47.996,90	29.228,28	(84.624,76)	(6.473,89)	49.026,25	-344,57

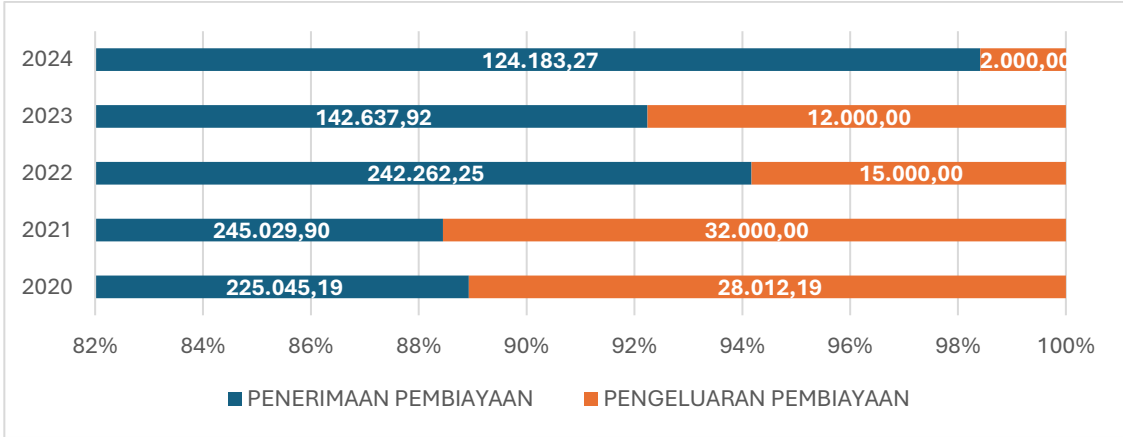
Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relatif mengalami fluktuasi penurunan -8,55% per tahun dari Rp197,033 miliar (2020) menjadi Rp122,183 miliar (2024). Menurunnya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA khususnya dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam, SiLPA dari tahun 2019-2022 relatif mengalami peningkatan dan mulai menurun signifikan di tahun 2023 dan 2024. Hal itu menunjukkan ada peningkatan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023 dan 2024. Sementara dari pos pengeluaran pembiayaan juga mengalami fluktuasi penurunan. Pengeluaran pembiayaan meningkat dari tahun 2020-2021 kemudian mulai menurun di tahun 2022 sampai 2024. Fluktuasi pengeluaran pembiayaan tersebut disebabkan oleh adanya penyertaan modal untuk meningkatkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Gambar II.44

Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Demak Tahun 2020-2024



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Demak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.66

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (Dalam Jutaan)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	PENDAPATAN	2.333.739,00	2.365.244,01	2.402.717,87	2.416.786,38	2.704.160,19	3,85
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	439.694,42	445.010,14	477.198,40	508.055,35	594.879,72	8,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	152.910,87	165.776,09	187.735,57	194.225,84	223.506,94	10,05
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	27.262,66	24.230,49	27.532,63	28.944,22	40.972,04	12,30
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.579,32	22.845,41	24.738,04	28.824,61	32.847,40	12,44
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	238.941,58	232.158,14	237.192,16	256.060,68	297.553,34	5,87
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.756.528,53	1.793.631,27	1.914.411,16	1.896.206,75	2.102.854,87	4,70
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.538.859,15	1.570.431,80	1.645.394,24	1.644.778,51	1.852.443,80	4,85
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.181.046,80	1.230.848,49	1.315.198,93	1.350.988,40	1.567.338,13	7,45
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	24.244,29	28.927,54	24.110,06	67.965,58	63.026,39	44,32
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	18.909,52	24.339,87	33.876,91	2.241,63	1.635,97	-13,13
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	860.873,47	856.411,41	856.459,97	872.433,48	961.884,93	2,90
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	277.019,53	321.169,67	400.751,99	408.347,73	540.790,85	18,76
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	70.722,86	55.119,93	50.226,20	31.244,23	20.070,25	-26,12
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	287.089,49	284.463,39	279.969,12	262.545,88	265.035,42	-1,94
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	217.669,38	223.199,47	269.016,92	251.428,24	250.411,07	4,03
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	151.902,44	184.791,23	199.350,33	198.037,62	204.204,25	8,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	65.766,93	38.408,24	69.666,59	53.390,62	46.206,82	0,74
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	65.766,93	38.408,24	69.666,59	53.390,62	46.206,82	0,74
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	137.516,05	126.602,60	11.108,31	12.524,29	6.425,60	-33,78
1.3.1	Pendapatan Hibah	137.444,07	14.112,04	11.043,31	12.174,14	5.708,11	-38,59
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	71,98	112.490,57	65,00	350,15	717,49	39156,56
2	BELANJA	2.285.742,10	2.336.015,73	2.487.342,63	2.423.260,28	2.655.133,94	3,92
2.1	BELANJA OPERASI	1.537.320,15	1.618.707,51	1.702.565,56	1.735.040,88	1.938.674,24	6,03
2.1.1	Belanja Pegawai	897.383,83	845.439,14	888.872,46	902.275,28	1.009.311,37	3,18
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	537.095,23	674.656,32	676.682,53	674.917,30	783.547,09	10,44
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	74.065,55	69.147,27	97.499,40	125.045,55	131.867,18	17,02
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	28.775,55	29.464,77	39.511,18	32.802,75	13.948,60	-9,49
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	286.913,55	279.922,49	344.301,37	272.530,94	279.183,72	0,54
2.2.1	Belanja Tanah	286.913,55	-	-	-	1.650,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-	114.105,96	101.121,67	87.781,01	75.084,34	-13,83
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-	62.909,40	136.701,69	70.501,06	46.410,43	-41,30
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	98.920,70	101.011,83	106.231,14	148.336,83	22,40
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	3.986,41	5.466,17	8.017,73	7.543,18	20,38
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	158,93	0,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	24.913,66	-	-	2,49	-	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	24.913,66	-	-	2,49	-	
2.4	BELANJA TRANSFER	436.594,73	437.385,73	440.475,70	415.685,97	437.275,97	0,11
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	19.470,36	18.372,35	19.317,12	21.980,04	22.880,16	4,35
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	19.470,36	15.291,09	16.577,61	18.901,65	22.880,16	5,50
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	3.081,26	2.739,51	3.078,40	-	-43,81

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	(0,07)
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	-0,07
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	47.996,90	29.228,28	(84.624,76)	(6.473,89)	49.026,25	-344,57
3	PEMBIAYAAN	197.033,00	213.029,90	227.262,25	130.637,92	122.183,27	-8,55
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	225.045,19	245.029,90	242.262,25	142.637,92	124.183,27	-11,58
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	225.039,22	245.029,90	242.258,94	142.637,49	124.164,03	-11,58
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,97	-	3,31	0,43	19,25	2146,87
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	-35,56
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	0,00
3.2.2	penyertaan modal daerah;	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	-35,56
3.2.3	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	197.033,00	213.029,90	227.262,25	130.637,92	122.183,27	-8,55

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2.2.2 Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Demak dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 0,67% per tahun dari Rp5,697 triliun (2020) menjadi Rp5,851 triliun (2024). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah investasi jangka panjang (8,01% per tahun), dan aset lainnya (10,27% per tahun). Sementara yang mengalami penurunan adalah aset lancar yang mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -5,57% per tahun dan aset tetap mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -0,84% per tahun. Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 87% nilai total aset yang ada berasal dari jenis aset tetap.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2020-2024 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut cukup berfluktuatif namun relatif mengalami tren

meningkat cukup signifikan sebesar 28,87% per tahun dari Rp16,183 miliar (2020) menjadi Rp44,631 miliar (2024). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang beban yang trennya juga relatif meningkat sebesar 34,35% per tahun dari Rp12,032 miliar (2020) menjadi Rp39.199 miliar (2024).

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Demak berfluktuasi dari tahun ke tahun, namun secara agregat sedikit mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,55% per tahun, pada tahun 2020 sebesar Rp5,680 Triliun menjadi Rp5,807 Triliun di tahun 2024. Ekuitas dari tahun 2020-2021 nilainya mengalami peningkatan, kemudian mulai menurun nilainya di tahun 2022 hingga 2024. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional di mana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan neraca Kabupaten Demak disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel II.67

Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	152.620.003.994	149.527.520.102	91.006.926.416	88.992.475.224	128.691.915.934	-4,17
Kas di Bendahara Penerimaan	5.410.000		-	49.963.543	8.148.534	10,78
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.725.533	9.192.000	-	122.131		-100,00
Kas di BLUD	83.004.122.827	105.572.114.569	49.362.311.832	34.183.817.019	41.040.045.644	-16,15
Kas di Bendahara FKTP						
Kas di Bendahara BOS	9.400.366.933	4.535.176.971	2.268.254.719	351.151.381	163.825.936	-63,67
Kas dana BOK Puskesmas				586.497.193	1.313.738.923	124,00
Kas Lainnya						
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek						
Piutang Pendapatan						
Piutang Pajak	33.732.350.335	38.125.386.605	40.057.188.808	41.446.749.542	51.798.598.825	11,32
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	(18.016.582.977)	(19.654.759.875)	(17.999.002.136)	(12.293.220.451)	(16.902.823.277)	-1,58
Piutang Retribusi	2.891.581.157	3.131.888.167	3.963.292.057	4.204.373.237	5.424.302.615	17,03
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	(1.856.407.165)	(2.260.738.857)	(2.640.988.767)	(3.684.713.323)	(4.458.370.073)	24,49
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	45.304.187.336	41.291.312.261	28.289.564.750	34.498.245.393	41.330.083.758	-2,27
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>	(8.358.677.625)	(10.031.100.020)	(8.334.914.974)	(13.884.400.399)	(15.934.100.617)	17,50
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	2.431.356.838				13.356.424.448	53,09
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>					(66.782.122)	
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	18.210.868.637	4.706.680.913	1.789.751.413	7.675.519.958		-100,00
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>				(38.377.600)		-100,00
Beban Dibayar Dimuka	350.346.115	318.983.348	239.428.322	166.417.227	92.193.804	-28,38
Persediaan	36.892.991.148	40.390.824.760	51.992.843.938	48.758.854.069	37.674.477.966	0,53
Jumlah Aset Lancar	356.613.643.085	355.662.480.944	239.994.656.377	231.013.474.144	283.531.680.298	-5,57
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	-	
Dana Bergulir	439.441.007	439.441.007				-100,00
<i>Penyisihan Investasi Jangka Panjang</i>	(439.441.007)	(439.441.007)				-100,00

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Jumlah Investasi Non Permanen	-	-	-	-	-	
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	279.056.874.262	340.918.859.827	357.985.963.322	375.396.489.085	379.725.078.100	8,01
Jumlah Investasi Permanen	279.056.874.262	340.918.859.827	357.985.963.322	375.396.489.085	379.725.078.100	8,01
Jumlah Investasi Jangka Panjang	279.056.874.262	340.918.859.827	357.985.963.322	375.396.489.085	379.725.078.100	8,01
ASET TETAP						
Tanah	1.468.257.140.565	1.658.719.429.887	1.654.245.759.088	1.634.013.271.381	1.643.348.018.201	2,86
Peralatan dan Mesin	652.310.417.193	759.003.789.718	847.012.418.267	927.337.762.884	998.769.393.492	11,24
Gedung dan Bangunan	1.455.291.130.814	1.516.087.048.343	1.656.458.725.735	1.506.624.737.910	1.572.125.561.474	1,95
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.961.603.402.995	3.083.935.667.433	3.194.214.215.497	3.258.945.627.713	3.422.321.246.729	3,68
Aset Tetap Lainnya	72.073.364.690	74.986.700.505	78.647.253.264	83.763.368.405	87.243.674.117	4,89
Konstruksi dalam Pengerjaan	20.559.868.450	20.978.591.350	60.725.284.770	24.753.471.310	12.524.217.020	-11,65
Akumulasi Penyusutan	(1.599.583.488.609)	(1.915.911.666.330)	(2.239.530.820.655)	(2.527.300.345.978)	(2.873.465.596.173)	15,77
Jumlah Aset Tetap	5.030.511.836.098	5.197.799.560.905	5.251.772.835.965	4.908.137.893.625	4.862.866.514.859	-0,84
PROPERTI INVESTASI						
Properti Investasi					322.203.815.720	
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi					(42.119.163.527)	
Jumlah Properti Investasi					280.084.652.193	
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Tagihan Penjualan Angsuran						
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			245.442.505	245.442.505	245.442.505	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	738.125.000	2.578.130.302	3.006.205.302	3.006.205.302	3.006.205.302	42,06
Aset Tak Berwujud	8.433.461.756	9.457.146.856,00	11.091.233.011	14.000.481.621	17.271.575.857	19,63
<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	(2.151.882.040)	(2.844.343.922)	(3.737.361.102)	(4.716.575.757)	(5.733.304.718)	27,76
Aset Lain-Lain	23.918.659.896	11.070.858.644	13.240.145.787	44.430.218.209	44.830.842.832	17,01
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</i>					(13.872.078.738)	
Jumlah Aset Lainnya	30.938.364.612	20.261.791.880	23.845.665.503	56.965.771.880	45.748.683.040	10,27
JUMLAH ASET	5.697.120.718.057	5.914.642.693.556	5.873.599.121.167	5.571.513.628.734	5.851.956.608.490	0,67
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1.725.533	17.385.066.000				-100,00
Pendapatan Diterima Dimuka	4.149.394.490	4.244.204.432	4.619.677.894	4.511.281.092	5.431.660.649	6,96
Utang Beban	12.032.199.224	13.383.051.597	18.595.065.222	25.959.176.166	39.199.222.781	34,35
Utang Jangka Pendek Lainnya					429.888	
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318	28,87
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-	-			
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318	28,87
EKUITAS						
EKUITAS						
Equitas	5.680.937.398.810	5.879.630.371.527	5.850.384.378.051	5.811.684.568.182	5.807.325.295.172	0,55
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	5.680.937.398.810	5.879.630.371.527	5.850.384.378.051	5.811.684.568.182	5.807.325.295.172	0,55
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5.697.120.718.057	5.914.642.693.556	5.873.599.121.167	5.842.155.025.440	5.851.956.608.490	0,67

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

4) **Rasio Keuangan**

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Demak periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Rasio Likuiditas**

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun di sini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Demak tahun 2020-2024 cukup berfluktuatif namun trennya semakin menurun dari nilai 22,04 (2020) menjadi 6,35 (2024). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2020 nilainya 22-23 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2024 nilai aset lancarnya 6-7 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2024. Dari nilai rasio lancar 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Demak memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi meskipun mengalami penurunan. Untuk itu yang perlu dijaga adalah membatasi jumlah kewajiban lancarnya agar membesar atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Demak Tahun 2020-2024.

Tabel II.68
Rasio Lancar Kabupaten Demak Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	356.613.643.085	355.662.480.944	239.994.656.377	231.013.474.144	283.531.680.298
KEWAJIBAN LANCAR	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318
RASIO LANCAR	22,04	10,16	10,34	7,58	6,35

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh hutang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Demak dari tahun 2020-2024 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,003 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2024 sebesar 0,008. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2020 di mana nilai kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,28% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2024 di mana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya hanya sekitar 0,77% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 nilainya jauh lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Demak cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih sangat baik.

Tabel II.69
Rasio Hutang Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318
EKUITAS	5.680.937.398.810	5.879.630.371.527	5.850.384.378.051	5.811.684.568.182	5.807.325.295.172
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,003	0,006	0,004	0,005	0,008

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh hutang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Demak dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif di mana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2024 dengan nilai rasio 0,0076 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2020 dengan nilai rasio 0,0028. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Demak tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Demak.

Tabel II.70
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Demak
Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	16.183.319.247	35.012.322.029	23.214.743.116	30.470.457.258	44.631.313.318
AKTIVA	5.697.120.718.057	5.914.642.693.556	5.873.599.121.167	5.571.513.628.734	5.851.956.608.490
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0028	0,0059	0,0040	0,0055	0,0076

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (fixed assets turn over)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Demak menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan

Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumber daya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2020-2024 memiliki tren sedikit berfluktuasi namun terus meningkat. Rasio tahun 2020 mencapai 0,087 dan terus meningkat hingga 0,122 di tahun 2024 hanya terjadi sedikit penurunan pada tahun 2021 yaitu 0,086. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Demak dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin membaik di mana pada tahun 2020 dari Rp5,030 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp439,694 miliar atau 8,74% dari nilai aset tetap dan pada tahun 2024 berkinerja lebih baik lagi di mana dengan memanfaatkan aset senilai Rp4,862 triliun mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp594,887 miliar atau 12,23% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap terhadap perolehan PAD masih sangat kecil. Oleh karena itu efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel II.71
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	439.694.424.386	445.010.135.309	477.198.401.099	508.055.346.278	594.887.868.035
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	5.030.511.836.098	5.197.799.560.905	5.251.772.835.965	4.908.137.893.625	4.862.866.514.859
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,087	0,086	0,091	0,104	0,122

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Demak dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami perkembangan positif dimana dari nilai rasio 0,077 di tahun 2020 menjadi 0,102 di tahun 2024. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2020 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 7,72% dari nilai total aset itu sendiri. Kinerja

pemanfaatan total aset di tahun 2024 semakin membaik hingga mampu menghasilkan 10,17% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin membaik namun ke depan masih perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
- b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
- c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.
- e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
- f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.
- g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.

- h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel II.72

Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Demak Tahun 2020 – 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	439.694.424.386	445.010.135.309	477.198.401.099	508.055.346.278	594.887.868.035
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	5.697.120.718.057	5.914.642.693.556	5.873.599.121.167	5.571.513.628.734	5.851.956.608.490
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,077	0,075	0,081	0,091	0,102

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2.2.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Demak 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

2.2.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan serta belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 37,01%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2020 yang mencapai 38,78% sedangkan capaian terakhir tahun 2024 sebesar 37,98%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangan proporsinya, belanja pegawai tidak pernah lebih dari 39%, sehingga dapat dikatakan belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu pemerintah daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya. Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Demak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.73
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	897.383,83	2.313.754,28	38,78%
2	2021	845.439,14	2.368.015,73	35,70%
3	2022	888.872,46	2.502.342,63	35,52%
4	2023	902.275,28	2.435.260,28	37,05%
5	2024	1.009.311,37	2.657.133,94	37,98%
Rata-Rata		908.656,42	2.455.301,37	37,01%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2020-2024 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,71% per tahun dari Rp1,489 triliun (2020) menjadi Rp1,594 triliun (2024). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dari Rp897,383 miliar (2020) menjadi Rp1,009 triliun (2024) dan belanja hibah dari Rp74,065 miliar (2020) menjadi Rp131,867 miliar (2024). Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar Rp2,437 triliun, maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 61,27%. Artinya masih ada ruang fiskal untuk belanja publik sekitar 38,73%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) **Evaluasi Kebutuhan Pegawai:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 2) **Optimalisasi Produktivitas:** Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 3) **Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru:** Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 4) **Peningkatan Efisiensi Administrasi:** Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 5) **Pengendalian Tunjangan dan Insentif:** Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan

kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

- 6) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.74

Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Demak Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	1.000.224,93	944.051,18	1.025.883,04	1.060.123,58	1.155.127,16	3,67
1.1	Belanja Pegawai	897.383,83	845.439,14	888.872,46	902.275,28	1.009.311,37	2,98
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	74.065,55	69.147,27	97.499,40	125.045,55	131.867,18	15,51
1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.775,55	29.464,77	39.511,18	32.802,75	13.948,60	-16,56
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Transfer	436.594,73	437.385,73	440.475,70	415.685,97	437.275,97	-0,01
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	19.470,36	18.372,35	19.317,12	21.980,04	22.880,16	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	417.124,38	419.013,39	421.158,58	393.705,93	414.395,82	-0,37
3	Belanja Tak Terduga	24.913,66	-	-	2,49	-	-100
4	Pengeluaran Pembiayaan	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	-48,31
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00	-48,31
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	1.489.745,51	1.413.436,92	1.481.358,74	1.487.812,04	1.594.403,13	1,71

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2.2.3.2 Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2021-2023 di mana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 2,77 miliar, Rp99,624 miliar dan Rp18,473 miliar. Sementara pada tahun 2020 dan 2024 terjadi surplus anggaran.

Tabel II.75
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Demak
Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.333.739,00	2.365.244,01	2.402.717,87	2.416.786,38	2.704.160,19
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	2.285.742,10	2.336.015,73	2.487.342,63	2.423.260,28	2.655.133,94
3	Pengeluaran Pembiayaan	28.012,19	32.000,00	15.000,00	12.000,00	2.000,00
	(Defisit Riil)	19.984,71	-2.771,72	-99.624,76	-18.473,89	47.026,25

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi di tahun 2021-2023 dapat ditutup semua oleh SiLPA pada tahun 2021-2023 yang secara berturut-turut sebesar Rp 245,029 miliar, Rp242,262 miliar dan Rp142,637 miliar. Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan.

Tabel II.76

Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Demak

Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	225.039,22	245.029,90	242.258,94	142.637,49	124.164,03
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5,97	-	3,31	0,43	19,25
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	225.045,19	245.029,90	242.262,25	142.637,92	124.183,27

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Demak dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Demak.

2.2.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah ke depan harus lebih mengedepankan asas efektivitas dan efisiensi.

Pendapatan daerah, terutama dari PAD dan transfer pusat, sering kali tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan, khususnya proyek infrastruktur strategis, revitalisasi kawasan, dan program layanan publik berskala besar. Sehingga memerlukan pembiayaan diluar APBD daerah maupun APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN. Untuk mengoptimalkan pendanaan pembangunan daerah di luar APBD, Pemerintah Kabupaten Demak dapat memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan alternatif. Salah satunya melalui Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu dana tanggung jawab sosial yang disalurkan oleh BUMN, BUMD, maupun perusahaan swasta. Dana ini

dapat digunakan untuk mendukung program sosial, pendidikan, lingkungan, dan infrastruktur dasar.

Selain itu, tersedia skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang memungkinkan kemitraan publik–swasta dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik. Skema ini dapat berbentuk konsesi, sewa guna, maupun bangun guna serah (BOT/BTO), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015.

Instrumen lain yang dapat dimanfaatkan adalah Dana Bergulir dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang berfungsi sebagai dana usaha untuk mendukung unit pelayanan publik seperti rumah sakit, UPT pertanian, dan lembaga pendidikan. Skema ini dapat dikembangkan menjadi pembiayaan mandiri dan efisien, misalnya melalui pembiayaan modal petani oleh UPT pertanian untuk penyediaan sarana produksi seperti pupuk.

Di samping itu, pemerintah daerah memiliki opsi untuk memperoleh pinjaman daerah yang digunakan dalam pembiayaan pengeluaran kas, pembangunan infrastruktur, pengelolaan portofolio utang daerah, maupun penerusan pinjaman dan penyertaan modal kepada BUMD. Dengan memadukan berbagai sumber pembiayaan tersebut, percepatan pembangunan daerah dapat tercapai tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

.Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2030.

2.2.4.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2030. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi,

tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.

- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
- 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
- 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
- 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
- 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2024 dan/atau target APBD tahun 2025 dan/atau RKPD 2026.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Demak masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Demak masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya. Langkah - langkah optimalisasi PAD untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Transfer agar Kabupaten Demak semakin mandiri sudah dilakukan melalui berbagai inovasi akselerasi peningkatan pendapatan

asli daerah termasuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. Dengan adanya arahan tentang sinergi pemungutan pajak daerah, pemerintah Kabupaten Demak saat ini tidak hanya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga telah melaksanakan sinergi tripartit pemungutan pajak antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Sinergitas dengan Pemerintah Provinsi dalam optimalisasi opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga dilakukan secara intensif dilakukan melalui strategi:

- Peran serta dalam program sengkuyung, Pendataan Informasi dan Tunggakan pajak serta sosialisasi pembayaran piutang pajak kendaraan bermotor
- Dukungan operasional berupa penyediaan mobil layanan, biaya operasional Pendataan tunggakan pajak
- Sosialisasi kebijakan – kebijakan yang berhubungan dengan PKB dan BBKBN secara massif ke masyarakat
- Dukungan lainnya berupa support ATK, media sosialisasi dan kebutuhan lainnya yang mendukung
- Sinergitas dengan pemerintah Provinsi dituangkan dalam Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Demak tahun 2025-2030 diproyeksikan hanya tumbuh $\pm 0,33\%$ per tahun dari Rp2,582 triliun (2025) menjadi Rp2,625 triliun (2030). Proyeksi ini cukup realistis karena pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh 3,85% per tahun. Untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka fokus pertumbuhan Pendapatan Daerah ini akan didongkrak oleh target tumbuhnya PAD beberapa komponen pendapatan transfer. Sementara beberapa sumber pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan sedikit menurun dari angka realisasi tahun 2025 dan dengan tingkat pertumbuhan 0% atau flat sama nilai tahun 2027 sampai tahun 2030.

Untuk PAD sendiri dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhan rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar 8% per tahun, maka proyeksi PAD tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 2,18\%$ per tahun dari Rp633,040 miliar (2025) menjadi Rp705,233 miliar (2030). Dari seluruh komponen sumber PAD ditargetkan tumbuh sebesar 2,12% per tahun untuk Pendapatan Pajak Daerah, 2,45% per tahun untuk Pendapatan Retribusi

Daerah, 1,83% per tahun untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan -4,78% per tahun untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Perhitungan proyeksi pendapatan dalam RPJMD Kabupaten Demak sudah mempertimbangkan penerimaan pajak dari opsen PKB dan opsen BBNKB. Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar 2,12% per tahun dari Rp283,397 miliar (2025) menjadi Rp314,800 miliar (2030), proyeksi ini sudah mempertimbangkan pada rata-rata realisasi pertumbuhan pajak daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh $\pm 10,05\%$ per tahun serta memperhitungkan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah yang selaras dengan perhitungan proyeksi yang diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya sehingga belanja daerah dapat berjalan dengan optimal. Adapun target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) **Penilaian Properti yang Akurat:** Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
- 2) **Peningkatan Kepatuhan:** Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) **Diversifikasi Sumber Pajak:** Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Demak. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) **Inisiatif Peningkatan Layanan:** Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 5) **Kemitraan Publik-Swasta:** Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.

- 6) **Peninjauan Kembali Insentif Pajak:** Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) **Evaluasi Kebijakan Pajak:** Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) **Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:** Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.
- 9) **Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak.** Bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sinergi ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan juga di turunkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 10) **Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah** berdasarkan penyusunan perundang-undangan yang disesuaikan dengan UU HKPD No.1 tahun 2022, diantaranya kegiatan penilaian obyek-obyek pajak, pendataan obyek-obyek pajak, optimalisasi penagihan piutang pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak, peningkatan kualitas pelayanan Publik sehingga bisa meningkatkan penerimaan dari retribusi Daerah, dan mengoptimalkan pengelolaan BUMD.

Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2025-2030 ditargetkan tumbuh $\pm 2,45\%$ per tahun dari Rp306,878 miliar (2025) menjadi Rp346,352 miliar (2030) sementara realisasi rata-rata pertumbuhan retribusi daerah 5 (lima) tahun terakhir tumbuh 12,30% per tahun dengan capaian tertinggi ada di tahun 2024 yang sebesar Rp40,972 miliar. Berikut ini strategi untuk memaksimalkan pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) **Analisis Potensi Sektor dan Layanan:** Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk

sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.

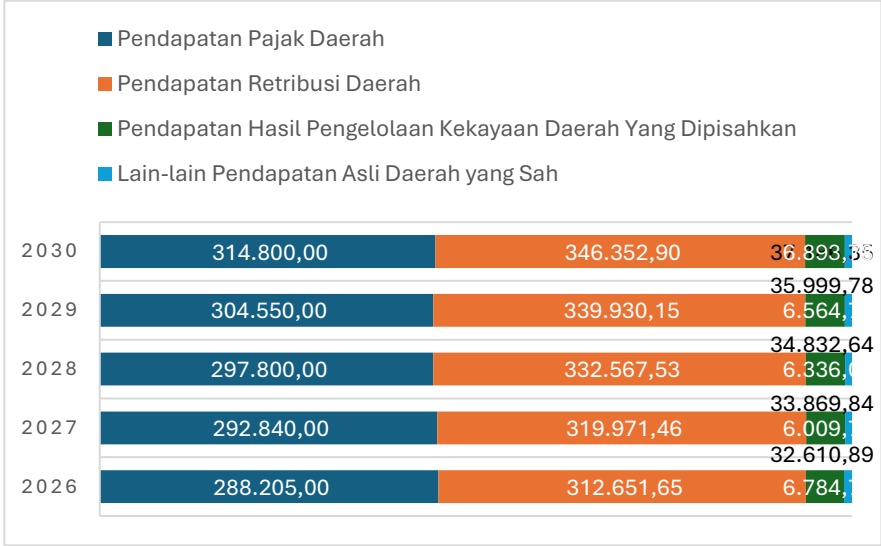
- 2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
- 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
- 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
- 7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
- 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
- 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025-2030 diproyeksikan tumbuh $\pm 1,83\%$ per tahun dari Rp33,959 miliar (2025) menjadi Rp37,186 miliar (2030). Target ini sudah mempertimbangkan pertumbuhan masa lalu yang rata-rata tumbuh $12,44\%$ per tahun. Untuk mencapai target Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:

- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
- 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
- 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
- 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
- 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
- 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2025-2030 ditargetkan turun -4,78% per tahun dari Rp8,805 miliar (2025) menjadi Rp6,893 miliar (2030).

Gambar II.45
Target Komposisi PAD Kabupaten Demak Tahun 2025-2030



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Demak masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer khususnya DAU yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Besaran pendapatan transfer tidak dapat diperkirakan. Dalam proyeksi pendapatan transfer, digunakan asumsi:

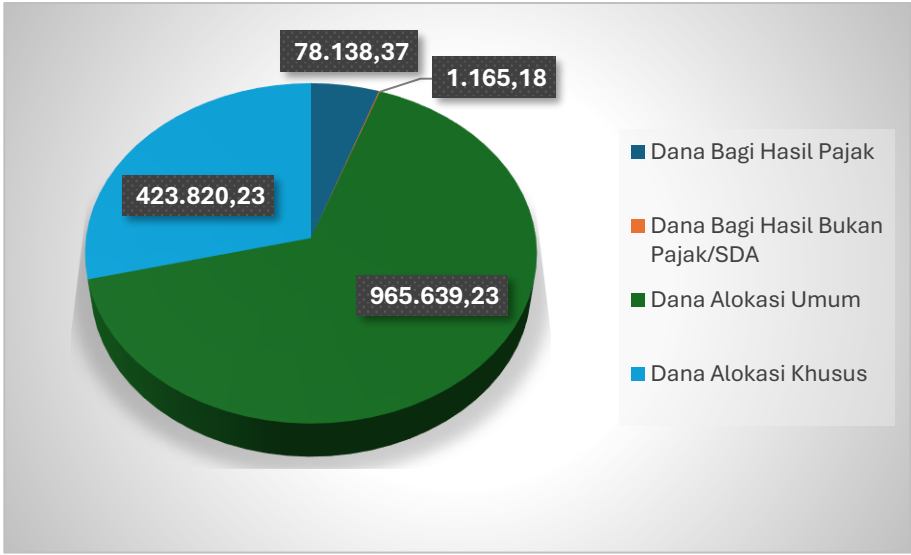
- DBH baik Pajak dan Non Pajak/SDA diproyeksikan tetap sebagaimana target APBD 2025
- DAU diproyeksikan sedikit ada kenaikan yaitu 0,04% per tahun
- DAK diproyeksikan sedikit ada kenaikan yaitu 0,13% per tahun
- Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal) diproyeksikan sedikit ada kenaikan yaitu 0,05% per tahun
- Dana Desa diproyeksikan tetap sebagaimana target APBD 2025
- Pendapatan Bagi Hasil diproyeksikan -2,64% per tahun
- Bantuan Keuangan Provinsi ditargetkan tetap sebagaimana target APBD 2025 untuk tahun 2026 yaitu sebesar Rp52,594 miliar sementara untuk tahun 2027 sampai 2030 diproyeksikan tetap sebesar Rp46,172 miliar.
- Pendapat Hibah tidak diproyeksikan

Komponen pendapatan transfer ditargetkan sedikit mengalami penurunan mencapai rata-rata -0,20% per tahun dari Rp1,939 triliun (2025) menjadi Rp1,919 triliun (2030). Proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan tumbuh 0,05% tiap tahun, sehingga Dana Perimbangan juga ditargetkan tumbuh 0,06% per tahun. Transfer antar daerah untuk bagi hasil pada 2024 sebesar Rp 204,204 miliar turun menjadi Rp141 miliar pada target

2025 dikarenakan adanya perubahan rekening dari bagi hasil PKB dan BBNKB menjadi Opsen sehingga pencatatan pendapatan tidak lagi masuk di dana transfer antar daerah. Proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sudah mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga Pembebasan pajak tersebut tidak berdampak pada realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah maupun opsen PKB dan BBNKB. Pada 2027-2029 target tetap di angka Rp169,545 Miliar karena proyeksi penerimaan tahun yang akan datang tidak bisa di prediksi sehingga memakai target tahun terakhir.

Dana Perimbangan ditargetkan sedikit mengalami pertumbuhan yaitu 0,06% per tahun dengan DBH Pajak dan DBH bukan Pajak/SDAditargetkan tumbuh 0% per tahun sedangkan DAU, dan DAK diproyeksikan sedikit mengalami pertumbuhan yaitu 0,04% (DAU) dan 0,13% (DAK). Pada sumber Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan sebesar Rp0 tiap tahun (2026-2030).

Gambar II.46
Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Demak
Tahun 2025-2030



Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)
Adapun perincian proyeksi pendapatan Kabupaten Demak tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.77

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam jutaan)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	3,85	0,33	2.582.164,68	2.567.187,25	2.572.494,56	2.591.339,75	2.606.848,16	2.625.036,52
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,00	2,18	633.040,86	640.252,28	652.691,07	671.536,27	687.044,68	705.233,03
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10,05	2,12	283.397,82	288.205,00	292.840,00	297.800,00	304.550,00	314.800,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,30	2,45	306.878,09	312.651,65	319.971,46	332.567,53	339.930,15	346.352,90
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,44	1,83	33.959,70	32.610,89	33.869,84	34.832,64	35.999,78	37.186,35
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,87	-4,78	8.805,25	6.784,74	6.009,77	6.336,09	6.564,75	6.893,78
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,70	-0,20	1.939.267,43	1.926.934,96	1.919.803,49	1.919.803,49	1.919.803,49	1.919.803,49
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4,85	0,05	1.745.673,16	1.750.221,77	1.750.258,35	1.750.258,35	1.750.258,35	1.750.258,35
1.2.1.1	Dana Perimbangan	7,45	0,06	1.468.763,02	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	27,98	0,00	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	482,30	0,00	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	2,90	0,04	965.639,23	967.489,72	967.489,72	967.489,72	967.489,72	967.489,72
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	18,76	0,13	423.820,23	426.518,35	426.518,35	426.518,35	426.518,35	426.518,35
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-26,12	0,05	14.887,11	14.887,11	14.923,70	14.923,70	14.923,70	14.923,70
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-1,94	0,00	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	4,03	-2,62	193.594,27	176.713,20	169.545,14	169.545,14	169.545,14	169.545,14
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	8,00	-2,64	141.000,27	124.119,20	123.372,90	123.372,90	123.372,90	123.372,90
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,74	-2,57	52.594,00	52.594,00	46.172,24	46.172,24	46.172,24	46.172,24

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,74	-2,57	52.594,00	52.594,00	46.172,24	46.172,24	46.172,24	46.172,24	
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-33,78	-100,00	9.856,38	-	-	-	-	-	
1.3.1	Pendapatan Hibah	-38,59	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Pendataan Dana Darurat	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	39156,56	-100,00	9.856,38	-	-	-	-	-	

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajiban. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Demak yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu:
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan

program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Demak

5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Demak akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Demak, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

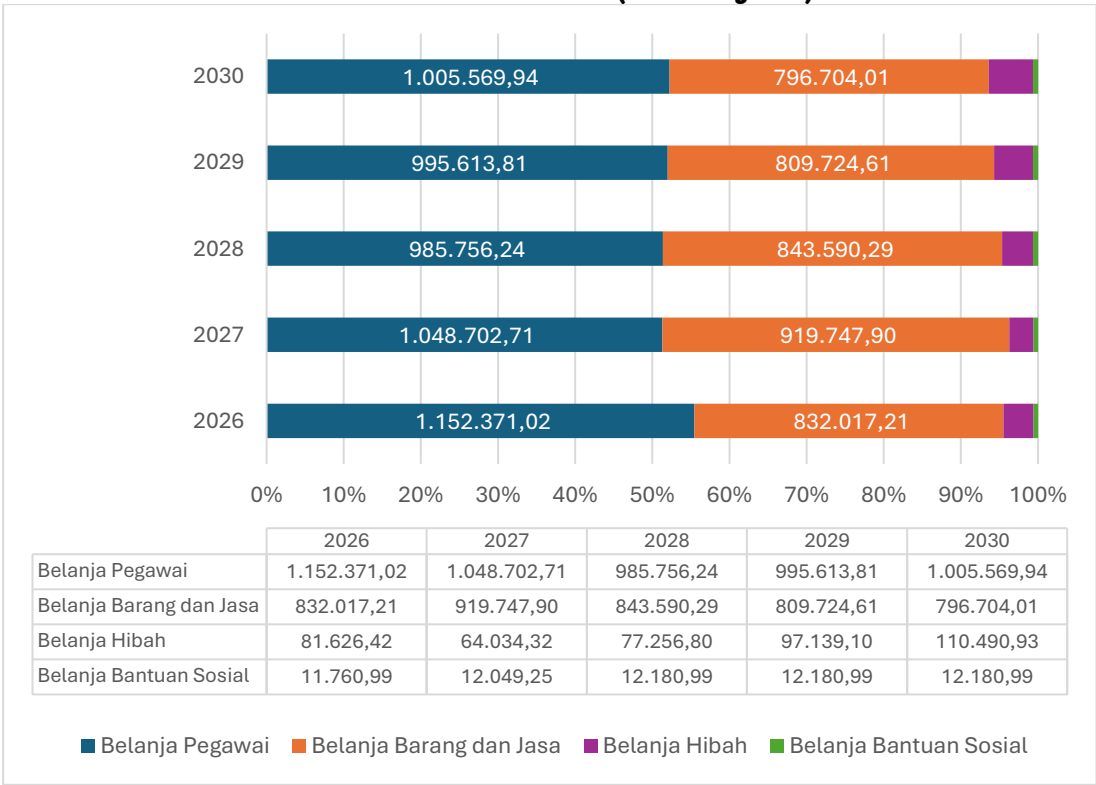
Belanja Daerah Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan sedikit mengalami penurunan dengan rata-rata penurunannya sebesar -0,32% per tahun dari Rp2,753 triliun (2025) menjadi Rp2,709 triliun (2030).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Untuk Belanja Operasi secara agregat juga ditekan/diturunkan bahkan lebih kecil dibandingkan target APBD tahun 2025. Adapun belanja operasi mulai tahun 2025 akan ditargetkan sedikit mengalami penurunan yaitu -1,38% per tahun dari Rp2,077 triliun (2025) menjadi Rp1,938 triliun (2030). Dalam komposisi Belanja Operasi, jenis belanja Hibah diproyeksikan cukup berfluktuasi menyesuaikan kondisi dan proyeksi kebutuhan hibah yaitu terjadi penurunan pada tahun 2026 (Rp64,034 miliar) dari tahun 2025 (Rp81,626 miliar) ini sebabkan karena belanja BOS belum dirinci ke dalam rekening hibah, menunggu kepastian TKD dari pusat, kemudian hibah pada tahun 2028 dan 2029 diproyeksikan meningkat cukup signifikan karena pada tahun 2028 sekitar 40% dari hibah akan diberikan kepada KPU dan Bawaslu dalam rangka persiapan Pilkada kemudian pada tahun 2029 sekitar 60% dari hibah akan diberikan KPU dan Bawaslu serta kepada Polres dan Kodim dalam rangka penyelenggaraan Pilkada yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2029, proyeksi ini berdasarkan realisasi hibah pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang juga melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pilkada. Belanja pegawai pada tahun 2026 diproyeksikan menurun terhadap belanja pegawai pada tahun 2025 karena selama ini jasa pelayanan BLUD diinput sebagai belanja pegawai untuk selanjutnya belanja jasa pelayanan BLUD akan dimasukan sebagai belanja jasa. Proyeksi belanja pegawai dari tahun 2027 sampai tahun 2030 akan mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan tersebut

untuk mengakomodasi kenaikan gaji berkala dan tambahan ASN dengan target peningkatan rata-rata sebesar $\pm 1\%$ per tahun dari Rp985,756 miliar (2027) menjadi Rp1,015 triliun (2030). Untuk bantuan sosial ditarget sedikit meningkat dari target APBD 2025 yaitu sebesar Rp11,760 miliar kemudian naik menjadi Rp12,049 miliar (2026) dan flat untuk tahun 2027 hingga 2030 yaitu sebesar Rp12,180 miliar. Untuk belanja Barang dan Jasa porsinya diturunkan dari pertumbuhan pada periode sebelumnya sebesar 10,44% menjadi -0,03% per tahun dibandingkan nilai target APBD tahun 2025 yaitu sebesar Rp832,017 miliar menjadi Rp830,595 miliar pada tahun 20230.

Gambar II.47
Target Belanja Operasi Kabupaten Demak
Tahun 2025-2030 (dalam juta)



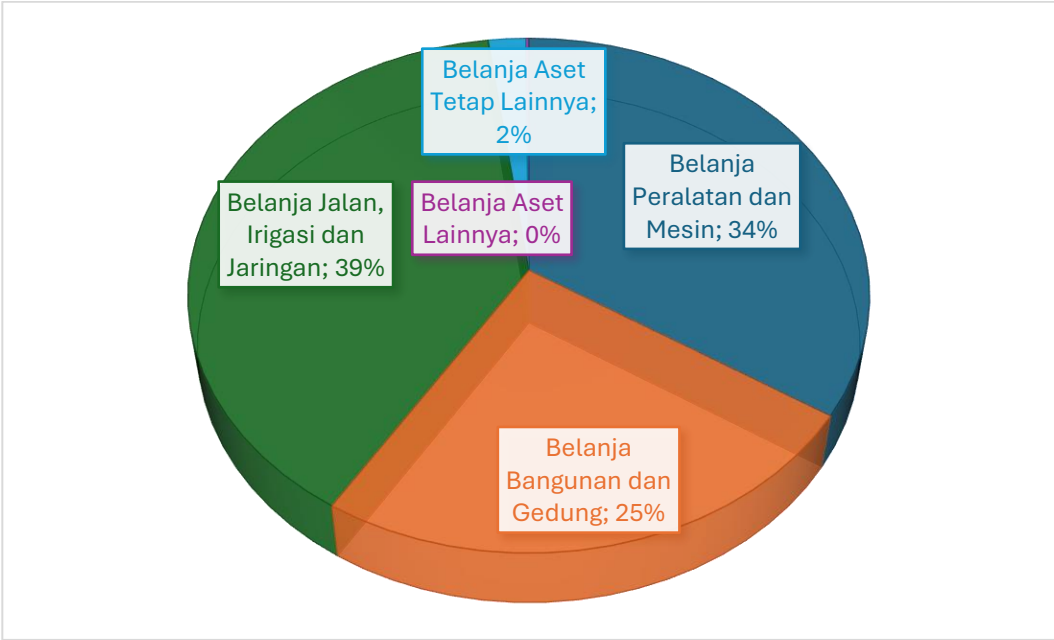
Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi belanja modal akan ditingkatkan dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 6,86\%$ per tahun dari Rp230,401 miliar (2025) menjadi Rp321,063 miliar (2030). Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan jalanan irigasi dan jaringan (39%), kemudian belanja peralatan dan mesin (34%), kemudian belanja bangunan dan Gedung (25%) dan sisanya belanja aset tetap lainnya (2%), sebagai catatan pada tahun 2028 diproyeksikan terjadi peningkatan belanja tanah yang akan digunakan dalam persiapan pembangunan RSUD baru/pengalihan kantor kecamatan/PKM yg selama ini menempati aset pemdes. Arah pembangunan jalan, irigasi dan jaringan difokuskan/diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunannya juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan

dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat/mengakselerasi proses produksi yang ada di masyarakat, harapannya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas wilayah secara bersamaan. Untuk belanja bangunan dan gedung diarahkan pada bangunan dan gedung pelayanan publik seperti perkantoran, fasilitas umum, dan sejenisnya.

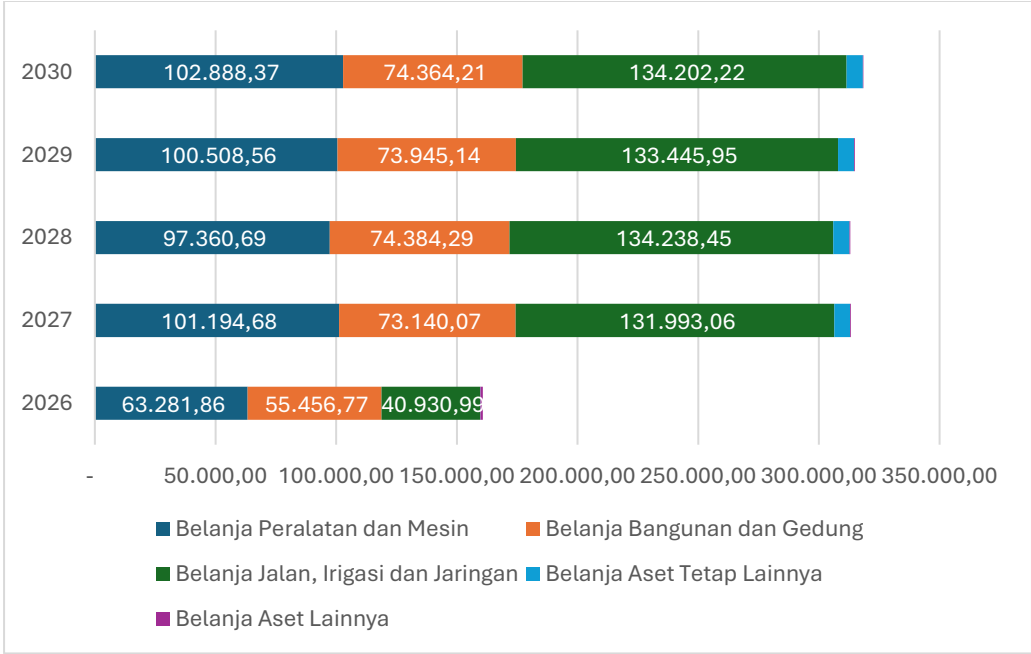
Secara rinci target tahunan komponen belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar II.48
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Demak Tahun 2025-2030



Sumber: Bapperida dan BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Gambar II.49
Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam juta)



Sumber: Bapperida dan BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Belanja Tak Terduga tahun 2006-2030 ditargetkan konstan sebagaimana target RKPD yaitu sebesar Rp5 miliar per tahun. Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana banjir yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

Untuk meningkatkan porsi belanja pembangunan, kebijakan target Belanja Transfer diproyeksikan tumbuh tidak terlalu besar yaitu hanya 0,09% per tahun berdasarkan target APBD 2025 yaitu dari Rp443,205 miliar (2025) menjadi Rp445,221 miliar (2030). Untuk proyeksi Transfer Bagi Hasil Pajak ditargetkan tumbuh sebesar 7,03% dari Rp22,415 miliar tahun 2025 menjadi Rp31,480 miliar tahun 2030. Transfer Bagi Hasil Retribusi ditargetkan turun sebesar -7,34% dari Rp4,448 miliar (2025) menjadi Rp3,038 miliar (2030).

Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya secara optimal untuk mendukung tercapainya target kinerja tahun 2030 melalui program pengelolaan pendapatan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan belanja mengenai optimalisasi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sudah dianggarkan lebih dari 0,75% dari penerimaan dan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak sebagaimana tercantum dalam PKS. Sedangkan belanja bagi hasil lainnya tidak ditargetkan. Untuk jenis belanja transfer selain belanja transfer bagi hasil yaitu belanja transfer bantuan keuangan ditargetkan sedikit menurun yaitu -0,27% per tahun dari Rp416,341 miliar(2025) menjadi Rp410,702 miliar (2030)

Dengan melihat semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat

sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.

- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) **Penggunaan Teknologi Informasi:** Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) **Kebijakan Penghematan Biaya:** Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
- 6) **Kolaborasi dan Konsolidasi:** Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
- 7) **Pengembangan Sumber Daya Manusia:** Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
- 8) **Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan:** Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Demak tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.78

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	BELANJA	3,92	-0,32	2.753.382,35	2.659.687,25	2.672.412,64	2.686.011,93	2.696.536,73	2.709.990,66
2.1	BELANJA OPERASI	6,03	-1,38	2.077.775,65	2.044.534,18	1.918.784,32	1.914.658,50	1.924.945,87	1.938.705,91
2.1.1	Belanja Pegawai	3,18	-2,49	1.152.371,02	1.048.702,71	985.756,24	995.613,81	1.005.569,94	1.015.625,64
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,44	-0,03	832.017,21	919.747,90	843.590,29	809.724,61	796.704,01	830.595,59
2.1.5	Belanja Hibah	17,02	-0,33	81.626,42	64.034,32	77.256,80	97.139,10	110.490,93	80.303,69
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-9,49	0,70	11.760,99	12.049,25	12.180,99	12.180,99	12.180,99	12.180,99
2.2	BELANJA MODAL	0,54	6,86	230.401,19	160.758,15	315.778,24	322.950,08	317.454,10	321.063,40
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	0,00	0,55	-	-	2.600,30	10.000,00	2.628,92	2.643,82
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-42,26	2,35	91.600,68	63.281,86	101.194,68	97.360,69	100.508,56	102.888,37
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-60,14	6,60	54.023,46	55.456,77	73.140,07	74.384,29	73.945,14	74.364,21
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-18,06	11,34	78.446,14	40.930,99	131.993,06	134.238,45	133.445,95	134.202,22
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-19,29	2,99	5.790,91	123,54	6.599,65	6.711,92	6.672,30	6.710,11
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	-13,96	540,00	965,00	250,47	254,73	253,22	254,66
2.3	BELANJA TAK TERDUGA		20,11	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-100,00	20,11	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.4	BELANJA TRANSFER	0,11	0,09	443.205,51	449.394,92	432.850,07	443.403,34	449.136,76	445.221,35
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4,35	5,14	26.863,71	31.712,55	32.147,71	32.700,98	33.434,40	34.518,99
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,94	7,03	22.415,69	28.905,00	29.284,00	29.780,00	30.455,00	31.480,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	-7,34	4.448,02	2.807,55	2.863,71	2.920,98	2.979,40	3.038,99
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-43,37	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	(0,07)	-0,27	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,37	415.702,37	410.702,37

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.4.2. 1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2. 2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2. 3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-0,07	-0,27	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,37	415.702,37	410.702,37
	SURPLUS / (DEFISIT)	-344,60	-13,08	(171.217,67)	(92.500,00)	(99.918,08)	(94.672,18)	(89.688,57)	(84.954,14)

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

3. **Proyeksi Pembiayaan**

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Demak tahun 2025-2030 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan netto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Demak tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.79

Proyeksi APBD Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam juta)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	PENDAPATAN	3,85	0,33	2.582.164,68	2.567.187,25	2.572.494,56	2.591.339,75	2.606.848,16	2.625.036,52
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8,00	2,18	633.040,86	640.252,28	652.691,07	671.536,27	687.044,68	705.233,03
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	10,05	2,12	283.397,82	288.205,00	292.840,00	297.800,00	304.550,00	314.800,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	12,30	2,45	306.878,09	312.651,65	319.971,46	332.567,53	339.930,15	346.352,90
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12,44	1,83	33.959,70	32.610,89	33.869,84	34.832,64	35.999,78	37.186,35
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,87	-4,78	8.805,25	6.784,74	6.009,77	6.336,09	6.564,75	6.893,78
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4,70	-0,20	1.939.267,43	1.926.934,96	1.919.803,49	1.919.803,49	1.919.803,49	1.919.803,49
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4,85	0,05	1.745.673,16	1.750.221,77	1.750.258,35	1.750.258,35	1.750.258,35	1.750.258,35
1.2.1.1	Dana Perimbangan	7,45	0,06	1.468.763,02	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62	1.473.311,62
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	27,98	0,00	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37	78.138,37
1.2.1.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	482,30	0,00	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18	1.165,18
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	2,90	0,04	965.639,23	967.489,72	967.489,72	967.489,72	967.489,72	967.489,72
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	18,76	0,13	423.820,23	426.518,35	426.518,35	426.518,35	426.518,35	426.518,35
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-26,12	0,05	14.887,11	14.887,11	14.923,70	14.923,70	14.923,70	14.923,70
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-1,94	0,00	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04	262.023,04
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	4,03	-2,62	193.594,27	176.713,20	169.545,14	169.545,14	169.545,14	169.545,14
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	8,00	-2,64	141.000,27	124.119,20	123.372,90	123.372,90	123.372,90	123.372,90

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,74	-2,57	52.594,00	52.594,00	46.172,24	46.172,24	46.172,24	46.172,24	
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,74	-2,57	52.594,00	52.594,00	46.172,24	46.172,24	46.172,24	46.172,24	
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-33,78	-100,00	9.856,38	-	-	-	-	-	
1.3.1	Pendapatan Hibah	-38,59	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.2	Pendataan Dana Darurat	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3	Pendapatan Lainnya	39156,56	-100,00	9.856,38	-	-	-	-	-	
2	BELANJA	3,92	-0,32	2.753.382,35	2.659.687,25	2.672.412,64	2.686.011,93	2.696.536,73	2.709.990,66	
2.1	BELANJA OPERASI	6,03	-1,38	2.077.775,65	2.044.534,18	1.918.784,32	1.914.658,50	1.924.945,87	1.938.705,91	
2.1.1	Belanja Pegawai	3,18	-2,49	1.152.371,02	1.048.702,71	985.756,24	995.613,81	1.005.569,94	1.015.625,64	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10,44	-0,03	832.017,21	919.747,90	843.590,29	809.724,61	796.704,01	830.595,59	
2.1.5	Belanja Hibah	17,02	-0,33	81.626,42	64.034,32	77.256,80	97.139,10	110.490,93	80.303,69	
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-9,49	0,70	11.760,99	12.049,25	12.180,99	12.180,99	12.180,99	12.180,99	
2.2	BELANJA MODAL	0,54	6,86	230.401,19	160.758,15	315.778,24	322.950,08	317.454,10	321.063,40	
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	0,00	0,55	-	-	2.600,30	10.000,00	2.628,92	2.643,82	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	-42,26	2,35	91.600,68	63.281,86	101.194,68	97.360,69	100.508,56	102.888,37	
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	-60,14	6,60	54.023,46	55.456,77	73.140,07	74.384,29	73.945,14	74.364,21	
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-18,06	11,34	78.446,14	40.930,99	131.993,06	134.238,45	133.445,95	134.202,22	
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-19,29	2,99	5.790,91	123,54	6.599,65	6.711,92	6.672,30	6.710,11	
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	0,00	-13,96	540,00	965,00	250,47	254,73	253,22	254,66	
2.3	BELANJA TAK TERDUGA		20,11	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	-100,00	20,11	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
2.4	BELANJA TRANSFER	0,11	0,09	443.205,51	449.394,92	432.850,07	443.403,34	449.136,76	445.221,35	

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4,35	5,14	26.863,71	31.712,55	32.147,71	32.700,98	33.434,40	34.518,99	
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,94	7,03	22.415,69	28.905,00	29.284,00	29.780,00	30.455,00	31.480,00	
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	-7,34	4.448,02	2.807,55	2.863,71	2.920,98	2.979,40	3.038,99	
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-43,37	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	(0,07)	-0,27	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,37	415.702,37	410.702,37	
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	-0,07	-0,27	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,37	415.702,37	410.702,37	
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-344,60	-13,08	(171.217,67)	(92.500,00)	(99.918,08)	(94.672,18)	(89.688,57)	(84.954,14)	
3	PEMBIAYAAN	-8,55	-13,08	171.217,67	92.500,00	99.918,08	94.672,18	89.688,57	84.954,14	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-11,58	-12,08	171.217,67	92.500,00	104.918,08	99.672,18	94.688,57	89.954,14	
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-11,58	-12,08	171.217,67	92.500,00	104.918,08	99.672,18	94.688,57	89.954,14	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	2146,87	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2020-2024 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	P-RKPD	Proyeksi					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-35,56	0,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	-35,56	0,00	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	-8,55	-13,08	171.217,67	92.500,00	99.918,08	94.672,18	89.688,57	84.954,14	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-4,33	0,00	-	-	-	0,00	-	-	

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)



4. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal ialah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos Belanja Daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas tahun 2026-2030 akan sedikit mengalami kenaikan dari Rp1,579 triliun (2025) menjadi Rp1,563 triliun (2030).

Adapun perincian proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Kabupaten Demak tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.80

Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian	P-RKPD 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja Operasi	1.245.758,44	1.124.786,27	1.075.194,03	1.104.933,89	1.128.241,86	1.108.110,32
1.1	Belanja Pegawai	1.152.371,02	1.048.702,71	985.756,24	995.613,81	1.005.569,94	1.015.625,64
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	81.626,42	64.034,32	77.256,80	97.139,10	110.490,93	80.303,69
1.5	Belanja Bantuan Sosial	11.760,99	12.049,25	12.180,99	12.180,99	12.180,99	12.180,99
2	Belanja Transfer	443.205,51	449.394,92	432.850,07	443.403,34	449.136,76	445.221,35
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	26.863,71	31.712,55	32.147,71	32.700,98	33.434,40	34.518,99
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	416.341,80	417.682,37	400.702,37	410.702,37	415.702,37	410.702,37
3	Belanja Tak Terduga	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	1.690.963,95	1.579.181,19	1.518.044,10	1.558.337,24	1.587.378,62	1.563.331,67

Sumber: BPKPAD Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kemendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kemendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD.

Hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah mengalami fluktuasi. Kemampuan belanja pembangunan dan/atau belanja publik untuk masyarakat di tahun 2025 sebesar Rp1,062 triliun kemudian naik pada tahun 2026 menjadi Rp1,080 triliun dan meningkat pada tahun 2027 menjadi Rp1,159 triliun kemudian menurun pada tahun 2028 menjadi Rp1,132 triliun dan tahun 2029 kembali menurun menjadi Rp1,114 triliun kemudian pada tahun 2030 kembali naik menjadi Rp1,151 triliun. Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektivitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektivitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD juga mengalami sedikit fluktuasi yaitu Rp2,308 triliun (2025), Rp2,205 triliun (2026), Rp2,234 triliun (2027), Rp2,237 triliun (2028), Rp2,242 triliun (2029), Rp2,259 triliun (2030).

Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

- a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.



- b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas di atas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.81

Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	P-RKPD 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	2.582.164,68	2.567.187,25	2.572.494,56	2.591.339,75	2.606.848,16	2.625.036,52
2.	Penerimaan Pembiayaan	171.217,67	92.500,00	104.918,08	99.672,18	94.688,57	89.954,14
	TOTAL PENERIMAAN						
	(Dikurangi):						
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.690.963,95	1.579.181,19	1.518.044,10	1.558.337,24	1.587.378,62	1.563.331,67
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	1.062.418,40	1.080.506,05	1.159.368,53	1.132.674,69	1.114.158,11	1.151.658,99

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Tabel II.82

Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2030 (dalam Jutaan)

No.	Uraian	P-RKPD 2025	Proyeksi				
			2026	2027	2028	2029	2030
1.	Pendapatan	2.582.164,68	2.567.187,25	2.572.494,56	2.591.339,75	2.606.848,16	2.625.036,52
2.	Penerimaan Pembiayaan	171.217,67	92.500,00	104.918,08	99.672,18	94.688,57	89.954,14
	TOTAL PENERIMAAN	2.753.382,35	2.659.687,25	2.677.412,64	2.691.011,93	2.701.536,73	2.714.990,66
	<u>(Dikurangi):</u>						
3	Belanja Transfer	443.205,51	449.394,92	432.850,07	443.403,34	449.136,76	445.221,35
4	Belanja Tak Terduga	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Kapasitas Riil Pagu OPD	2.308.176,84	2.205.292,33	2.234.562,56	2.237.608,58	2.242.399,97	2.259.769,31

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

Tabel II.83

Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Demak Tahun 2026-2030 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD					2030
		P-RKPD 2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	2.308.176,84	2.205.292,33	2.234.562,56	2.237.608,58	2.242.399,97	2.259.769,31
2	Prioritas I	1.283.807,96	1.226.583,59	1.242.863,70	1.244.557,89	1.247.222,86	1.256.883,69
3	Prioritas II	692.453,05	661.587,70	670.368,77	671.282,58	672.719,99	677.930,79
4	Prioritas III	331.915,83	317.121,04	321.330,10	321.768,11	322.457,11	324.954,83
	JUMLAH	2.308.176,84	2.205.292,33	2.234.562,56	2.237.608,58	2.242.399,97	2.259.769,31

Sumber: Bapperida Kabupaten Demak, 2025 (diolah)

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan *gap* antara rencana dan realisasi, dapat dikatakan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan dan isu perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan dan isu pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan identifikasi permasalahan yang tepat akan memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan arah kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindaklanjut permasalahan mampu mengatasi permasalahan dengan efektif dan efisien. Selain permasalahan pembangunan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Dengan memahami permasalahan yang serta dinamika dan gejolak pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Demak. Maka dalam mengidentifikasi isu perlu menelaah isu strategis Internasional, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah maka dalam merumuskan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi objektif daerah, terdapat 5 (lima) permasalahan pokok sebagai berikut:

Permasalahan utama dan permasalahan pokok pembangunan daerah Kabupaten Demak diuraikan sebagai berikut.

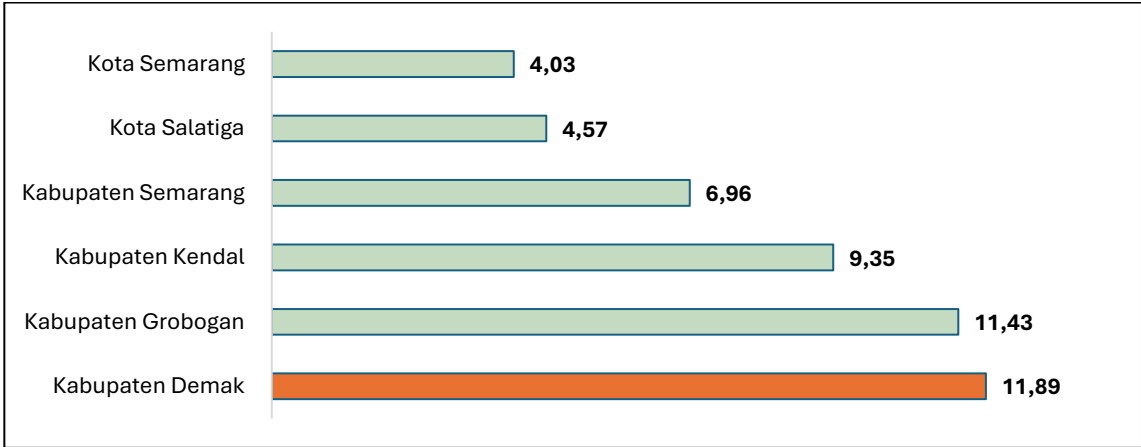
1. Tingginya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak

Tingkat kemiskinan yang tinggi masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan di Kabupaten Demak. Kemiskinan dapat dipicu

oleh berbagai faktor kompleks, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses ke lapangan kerja yang layak, infrastruktur yang kurang memadai, serta ketimpangan ekonomi antarwilayah. Meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, kenyataannya masih banyak warga Kabupaten Demak, terutama di daerah pedesaan, yang hidup di bawah garis kemiskinan. Faktor lain seperti rendahnya produktivitas sektor pertanian, keterbatasan akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta minimnya peluang kerja di sektor formal turut memperparah kondisi ini. Berdasarkan data tahun 2024, tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak tercatat sebesar 11,89%. Meskipun angka ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi angka tersebut masih cukup tinggi dan mencerminkan tantangan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Kedungsepur (Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan), tingkat kemiskinan Kabupaten Demak masih tergolong yang tertinggi. Berdasarkan data tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Demak sebesar 11,89% melampaui rata-rata wilayah Kedungsepur, menandakan adanya ketertinggalan dalam pengurangan angka kemiskinan dibandingkan daerah sekitar.

Gambar II.50
Persentase Penduduk Miskin Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak berhubungan erat dengan rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat Demak. Pada tahun 2024, pengeluaran per kapita masyarakat Demak tercatat sebesar Rp11,591 ribu/tahun atau Rp11,591,000/tahun, yang merupakan terendah kedua di wilayah Kedungsepur setelah Kabupaten Grobogan yang mencatat pengeluaran per kapita sebesar Rp11,548 ribu/tahun. Jika dibandingkan dengan Kota Semarang dan Kota Salatiga, pengeluaran per kapita masyarakat Demak

terpaut cukup jauh. Kota Semarang mencatat pengeluaran per kapita sebesar Rp16,990 ribu/tahun, sedangkan Kota Salatiga mencatat pengeluaran tertinggi di wilayah Kedungsepur, yaitu sebesar Rp17,096 ribu/tahun. Rendahnya pengeluaran per kapita ini mencerminkan daya beli masyarakat yang lemah dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, sehingga berkontribusi pada stagnasi kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Demak memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian dan perikanan, namun belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gambar II.51
Pengeluaran Per Kapita Masyarakat wilayah Kedungsepur
Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Masih rendahnya Tingkat pendapatan Masyarakat di Kabupaten Demak dapat disebabkan oleh masih rendahnya kualitas daya saing tenaga kerja yang dapat dilihat pada persentase penduduk bekerja menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan ditahun 2024 pada Tingkat SD ke bawah (36,43%) masih memiliki proporsi yang lebih besar daripada pekerja dengan pendidikan SMP (20,27%);SMA (23,88%); SMK (10,82%) dan Diploma/Universitas (8,60%). Hal ini menunjukkan penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah yaitu SMP ke bawah dengan persentase lebih dari 56 persen. Dengan tingkat pendidikan seperti ini, pada umumnya masyarakat Kabupaten Demak bekerja pada sektor pertanian karena pada umumnya sektor tersebut tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan tertentu.

Dengan permasalahan ini, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Demak memerlukan pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif, termasuk peningkatan akses lapangan kerja, pengembangan infrastruktur ekonomi dan sosial, serta pemberdayaan sektor pertanian dan UMKM guna

meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai juga menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

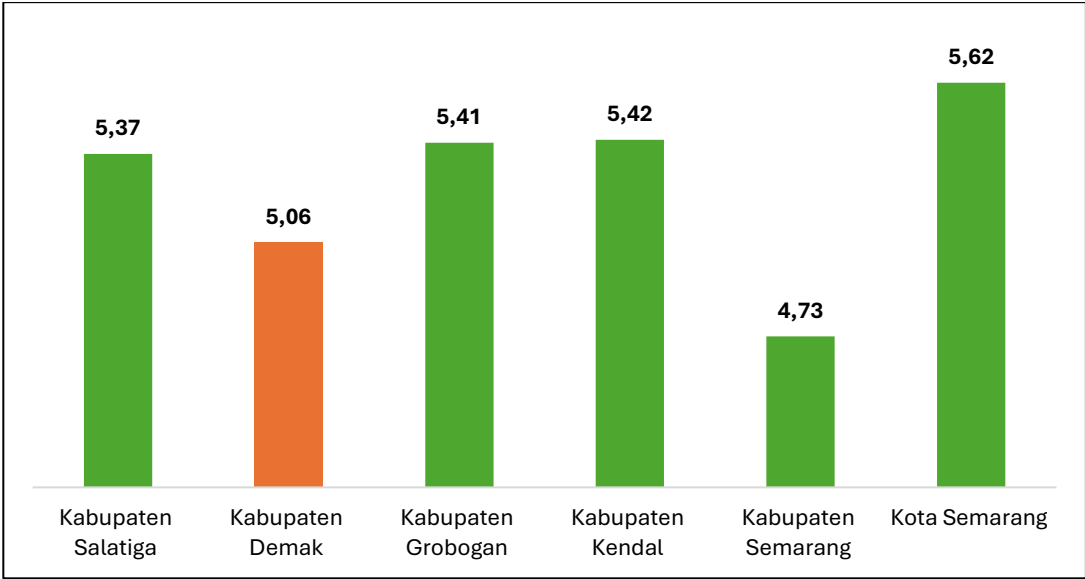
2. Rendahnya daya saing ekonomi daerah

Kabupaten Demak menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan daya saing ekonominya. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan letak geografis yang strategis, berbagai faktor seperti infrastruktur yang belum optimal, kualitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan, serta adopsi teknologi yang masih rendah menjadi penghambat utama. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah belum sepenuhnya berdaya saing akibat keterbatasan akses permodalan, pelatihan, dan pasar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi cenderung lambat dan kurang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Berdasarkan data laju pertumbuhan riil PDRB ADHK menunjukkan belum optimalnya ketahanan ekonomi yang produktif di Kabupaten Demak dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) yang mengalami penurunan di beberapa sektor lapangan usaha ditahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Sektor PDRB yang mengalami penurunan ditahun 2024 yaitu pada sektor pertambangan dan penggalan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor perdagangan besar dan eceran; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor informasi dan komunikasi; sektor *real estate*; dan sektor jasa lainnya. Jadi Sebagian besar beberapa lapangan usaha di Kabupaten Demak mengalami penurunan ditahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja pada beberapa sektor ekonomi. Fenomena ini menjadi perhatian penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Kemungkinan penyebab penurunan ini bersifat multifaktor, meliputi faktor internal daerah maupun eksternal. Secara internal, potensi penurunan produktivitas akibat perubahan iklim yang mempengaruhi sektor pertanian dan perikanan, kendala dalam rantai pasok dan distribusi, atau perubahan preferensi pasar lokal dapat menjadi pemicu. Sementara itu, faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global, perubahan kebijakan perdagangan, atau kondisi ekonomi nasional yang kurang kondusif juga dapat memberikan tekanan pada sektor-sektor tertentu di Kabupaten Demak.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi (Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE), Kabupaten Demak mencatat pertumbuhan sebesar 5,06% pada tahun 2024, angka ini lebih rendah dibandingkan Grobogan (5,41%), Kendal (5,42%), dan Kota Salatiga (5,37%). Dengan capaian ini menunjukkan adanya dinamika ekonomi yang cukup positif meskipun belum mampu menyamai capaian Kabupaten Semarang dan Kota Semarang yang cenderung lebih stabil dan tinggi.

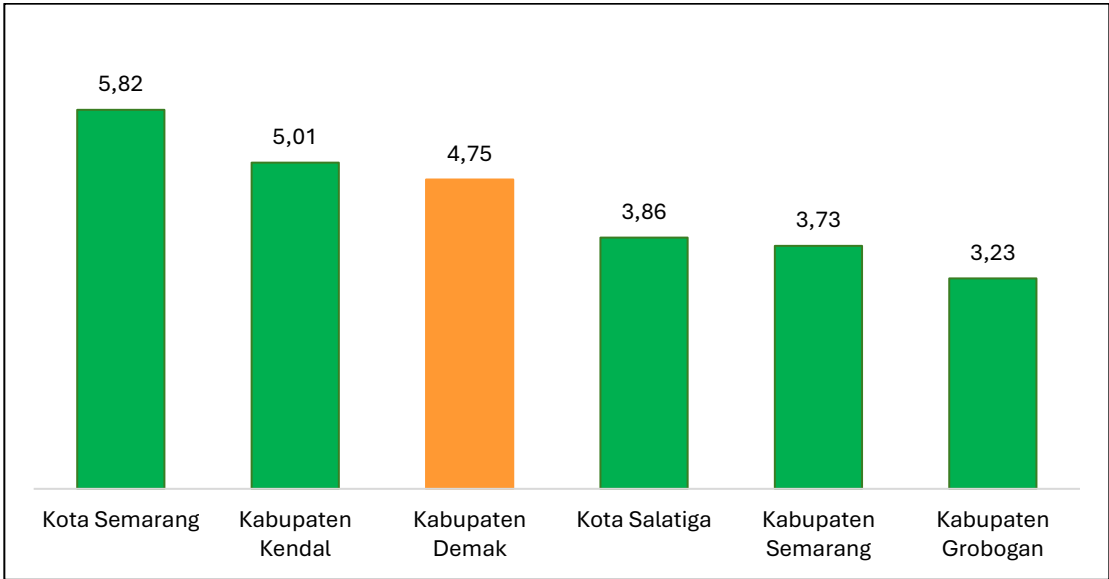
Gambar II.52
Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Demak juga masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 4,75%, lebih tinggi dari Kabupaten Grobogan (3,23%) dan Kabupaten Semarang (3,73%), namun masih lebih baik dibandingkan Kota Semarang (5,82%) dan Kabupaten Kendal (5,01%). Hal ini mencerminkan adanya ketidakselarasan antara ketersediaan lapangan kerja dan kemampuan penyerapan tenaga kerja yang masih terbatas, sehingga memperkuat urgensi peningkatan ketahanan ekonomi yang lebih produktif melalui pengembangan sektor unggulan dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Gambar II.53
Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Permasalahan rendahnya daya saing ini diperparah oleh regulasi dan birokrasi yang terkadang kurang efisien, menghambat investasi dan inovasi. Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap perubahan pasar dan iklim juga menjadi perhatian serius. Memahami permasalahan ini ke depannya perlu adanya upaya terintegrasi yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan. Peningkatan kualitas infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia yang kompeten, dukungan terhadap UMKM, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi kunci utama untuk mendongkrak daya saing ekonomi Kabupaten Demak.

3. **Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat**

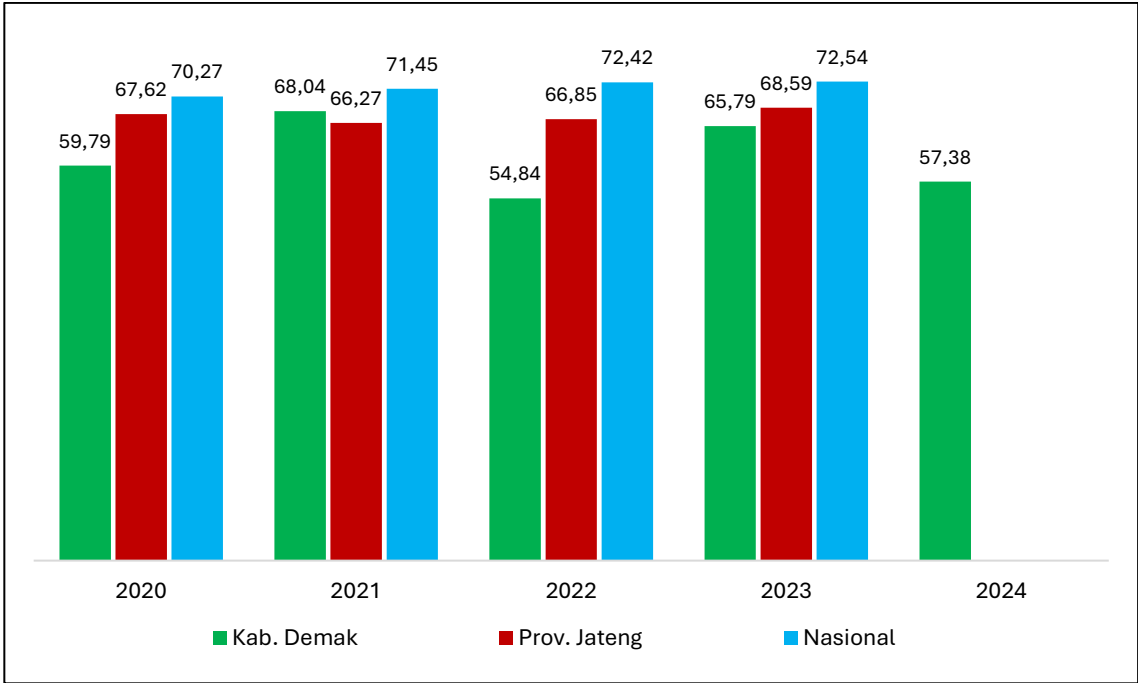
Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup merupakan masalah serius yang berdampak luas pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di banyak daerah, termasuk Kabupaten Demak, kerusakan lingkungan terutama disebabkan oleh tata guna lahan yang tidak berkelanjutan, polusi air dan udara, serta perubahan iklim. Dampak dari kerusakan lingkungan ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui penurunan kualitas air dan tanah, rusaknya habitat alami, serta peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Hal ini tidak hanya mengancam mata pencaharian petani dan nelayan, tetapi juga merugikan sektor pariwisata dan industri lainnya yang bergantung pada keberlangsungan lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, kerusakan lingkungan juga dapat mengakibatkan peningkatan biaya sosial ekonomi, seperti biaya kesehatan akibat polusi udara dan air, serta biaya

pemulihan dan rehabilitasi setelah bencana alam. Tingkat pengangguran juga bisa meningkat karena hilangnya sumber mata pencaharian tradisional, sementara penurunan produksi pertanian dapat mengancam ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penanganan kerusakan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, dengan mengadopsi praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan, melindungi ekosistem alami, serta memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan yang ketat. Dengan demikian, upaya-upaya tersebut tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat.

Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: indeks kualitas pencemaran air, indeks kualitas pencemaran udara, dan indeks tutupan lahan. Klasifikasi kualitas indeks lingkungan hidup berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup di antaranya: kondisi waspada berkisar <50, kondisi sangat kurang berkisar 50-58, kondisi kurang berkisar 58-66, kondisi cukup berkisar 66-72, kondisi baik berkisar 74-82, kondisi sangat baik berkisar 82-90, dan kondisi unggul berkisar lebih dari 90.

IKLH Kabupaten Demak masih berada pada kategori kurang dengan nilai capaian pada tahun 2024 sebesar 57,38. Dengan melihat capaian pada tahun 2023 (65,79) terlihat adanya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Demak. Hal ini terlihat juga pada penurunan yang terjadi pada beberapa komponen IKLH yang mengalami penurunan yaitu pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Gambar II.54
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Kerusakan lingkungan di Kabupaten Demak juga diindikasikan dari bertambahnya kejadian bencana yang dialami oleh Kabupaten Demak. Bencana yang sering dialami oleh Kabupaten Demak adalah bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan, di antaranya kekeringan, banjir, kebakaran lahan, tanah longsor, dan angin kencang/puting beliung. Kejadian kekeringan dan kebakaran menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya. Selain itu, bencana banjir masih menjadi ancaman tahunan di Kabupaten Demak.

Selain bencana di atas, fenomena alam yang menjadi perhatian khusus adalah banjir yang terjadi akibat naiknya permukaan air laut atau dikenal dengan istilah banjir rob. Kejadian rob dialami di hampir semua kabupaten/kota yang berada di pesisir pantai utara Jawa, termasuk Kabupaten Demak. Sampai dengan tahun 2021, garis pantai Kabupaten Demak yaitu 101,94 km, sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 102,03 km. Hal ini menunjukkan terjadinya penambahan panjang garis pantai yang diakibatkan oleh abrasi. Naiknya permukaan air laut ini menjadi masalah yang sangat kompleks. Beberapa hipotesis yang mengemuka yaitu adanya penurunan muka tanah (*land subsidence*) akibat pengambilan air tanah yang terus menerus, dan adanya perubahan iklim sehingga mengakibatkan permukaan air laut meningkat.

Perubahan iklim juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan kerusakan lingkungan. Salah satu penyebab perubahan iklim yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca. Faktor penyebab terjadi peningkatan

berasal dari limbah; *Agriculture, Forestry and Other Land Use* (AFOLU), *industrial process and production use* (IPPU), dan Energi. Penyumbang terbesar untuk emisi rumah kaca adalah AFOLU sebesar 44% dan Energi sebesar 49%. Pada tahun 2022 capaian Emisi Gas Rumah Kaca di Kabupaten Demak adalah sebesar 1.500,21 Gg CO₂ yang mengalami peningkatan sebesar 10,72% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh emisi dari sumber energi yang semakin bertambah.

4. Pemenuhan infrastruktur yang belum merata

Permasalahan infrastruktur yang belum merata ini memerlukan perhatian dan solusi yang komprehensif. Investasi yang lebih besar dan terarah pada pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal menjadi krusial. Selain itu, perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat akan memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur yang kurang berkualitas dan tidak memadai dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, akses terhadap layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Di Kabupaten Demak, terutama di daerah pedesaan, masih terdapat keterbatasan akses terhadap jalan yang baik dan air bersih. Hal ini tidak hanya membatasi mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, tetapi juga menghambat pengembangan sektor ekonomi lokal.

Selain itu, infrastruktur yang kurang berkualitas juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, baik melalui biaya operasional yang tinggi maupun kerugian produktivitas. Misalnya, jalan yang rusak dapat meningkatkan biaya transportasi barang dan mengurangi daya saing produk lokal di pasar regional. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan investasi yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan terkelola dengan baik. Hal ini termasuk pembangunan jalan yang baik, sistem irigasi yang efisien, yang dapat diandalkan. Dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pembangunan, diharapkan Kabupaten Demak dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur dasar di daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dasar masyarakat, mengingat posisi Kabupaten Demak yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah maka kebutuhan dasar masyarakatnya adalah air bersih

dan penataan wilayah. Penataan wilayah dibutuhkan untuk memudahkan akses dan mobilitas masyarakat.

Kondisi geografi wilayah Kabupaten Demak yang terletak di pesisir pantai utara menjadi tempat bermuaranya beberapa sungai besar seperti Kali Tuntang, Kali Wulan, dan Kali Jajar. Namun, kualitas dan kuantitas air permukaan menjadi persoalan, mengingat air sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Demak memiliki tingkat sedimentasi yang tinggi dengan keberlangsungan debit andalan rendah terutama pada saat musim kemarau. Sementara di wilayah pesisir pantai, kadar salinitas air yang tinggi akibat adanya rob maupun intrusi air laut ke darat mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air baku.

Air tanah dan air permukaan (sungai) menjadi sumber air baku andalan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan untuk air bersih di Kabupaten Demak. Tantangan menjadi bertambah mengingat wilayah Kabupaten Demak termasuk Zona Merah untuk pengambilan air tanah, sementara ketersediaan air sungai tidak kontinu. Di sisi lainnya, pemanfaatan air hujan (air permukaan) belum optimal karena di Kabupaten Demak belum ada bendungan, waduk, atau penampungan air lainnya yang memiliki kapasitas cukup untuk keperluan pemenuhan air baku.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Demak belum terpenuhi sepenuhnya. Jumlah warga yang terlayani kebutuhan pokok air minum sehari-hari pada tahun 2023 baru mencapai 85,58 persen kepala keluarga yang artinya masih terdapat 14,42 persen keluarga yang kebutuhan air bersihnya belum tercukupi. Kemudian pada tahun 2022 persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum dan sanitasi mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu dari 98,15 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,79 persen. Penurunan ini tentunya menjadi perhatian penuh mengingat kondisi geografis Kabupaten Demak yang memiliki dampak terhadap ketersediaan air baku. Pada aspek akses terkait penataan wilayah, posisi Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Jawa Tengah memerlukan perhatian khusus.

Salah satu masalah utama adalah rata-rata penurunan muka tanah yang mencapai -5,1694 cm per tahun hingga tahun 2022. Penurunan ini mengindikasikan bahwa masalah *land subsidence* atau amblesan tanah menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan sumber air dan stabilitas infrastruktur.

Penanganan masalah rob dan banjir juga menjadi kendala besar. Mahalnya biaya penanganan rob, keterbatasan anggaran, dan sulitnya relokasi warga yang terdampak, semakin menyulitkan upaya mitigasi. Kondisi ini menyebabkan penanganan banjir dan rob tidak dapat dilakukan secara optimal,

mengakibatkan banyak wilayah yang terus-menerus terendam air dan merusak infrastruktur.

Selain itu, Kabupaten Demak juga menghadapi masalah kawasan kumuh yang membutuhkan perhatian. Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangannya memiliki kewenangan penanganan kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 Ha. Sebagaimana Surat Keputusan Bupati Demak nomor 475.26/120 tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Demak bahwa luas wilayah kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten mencapai 6,380 Ha. Namun pada tahun 2023, baru 3,110 Ha yang berhasil ditangani.

Masalah infrastruktur jalan juga menjadi perhatian. Terjadi penurunan persentase proporsi jalan dalam kondisi mantap, yang disebabkan oleh penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten dari 426,510 km menjadi 925,403 km. Dengan perluasan jaringan jalan yang signifikan, banyak jalan yang belum mendapatkan perawatan yang memadai, sehingga kualitas infrastruktur jalan menurun. Hal ini juga dapat dilihat pada Panjang jalan menurut kondisi jalan kondisi rusak berat di Kabupaten Demak pada tahun 2024 sebanyak 844,68 Km dengan total Panjang jalan 909,58 Km. Hal ini mengindikasikan masih banyaknya proporsi jalan dengan kondisi rusak di Kabupaten Demak.

Selain jalan, pembangunan jembatan di Kabupaten Demak masih belum optimal, yang ditunjukkan adanya penurunan jumlah jembatan dalam kondisi baik. Berdasarkan data jembatan dalam kondisi baik ditahun 2021 sebanyak 168 unit menjadi 5 unit di tahun 2024. Beberapa capaian pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak juga masih belum optimal yang terlihat pada persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman ditahun 2024 masih mencapai 4,10 persen dan persentase rumah tangga dengan akses internet ditahun 2024 masih mencapai 84,96 persen yang artinya masih 15,04 persen rumah tangga yang belum terakses internet. Kemudian status persentase desa mandiri di Kabupaten Demak tergolong masih rendah dengan capaian 12,35 yang artinya desa mandiri di Kabupaten Demak masih di bawah 50% dari total jumlah desa. Selain itu terkait perumahan dan pemukiman pada indikator persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak ditahun 2023 masih mencapai 71,88 yang artinya masih adanya 29 persen, rumah tangga dengan akses hunian tidak layak.

Dengan permasalahan ini, ke depan perlu adanya kebijakan yang difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur secara berkelanjutan. Dengan adanya perbaikan dan pembangunan jalan serta jembatan yang menghubungkan wilayah produksi dengan pasar, pembangunan

dan pemeliharaan sistem pengendali banjir rob seperti tanggul dan polder, serta perluasan jaringan air bersih dan sanitasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan ramah lingkungan akan didorong, serta peningkatan koordinasi antar instansi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan kebijakan di Kabupaten Demak.

5. Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Demak

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dari Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak Tahun 2024 yang mencapai 85,9. Dengan capaian ini terlihat adanya peningkatan namun jika melihat lebih mendalam terdapat beberapa permasalahan yang terlihat dari belum optimalnya capaian SAKIP tahun 2024 sebesar 69,10 dengan kategori B. Kemudian pada Indeks Profesionalitas ASN yang mengalami penurunan dari 90,17 (2023) menjadi 83,08 ditahun 2024, pada indikator Indeks Persepsi Korupsi juga mengalami penurunan ditahun 2024. Selanjutnya pada indikator indeks integritas dan level maturitas SPIP yang mengalami penurunan.

Dengan beberapa indikasi permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa praktik-praktik birokrasi lama yang masih terjadi di antaranya inefisiensi tata laksana, pelayanan publik kurang responsif, dan tingkat inovasi yang masih rendah. Secara eksternal, tantangan birokrasi yaitu semakin banyaknya tuntutan masyarakat maupun instansi vertikal yang harus diselesaikan dengan cepat, sementara jumlah pegawai cenderung stagnan. Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Demak, diperlukan langkah strategis yang menitikberatkan pada penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan. Pemerintah daerah perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan *e-government* yang terintegrasi, memperbaiki mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, serta memperkuat partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Upaya perbaikan tata kelola ini juga harus diiringi dengan evaluasi kinerja secara berkala, pembenahan regulasi daerah, serta pembinaan berkelanjutan guna menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

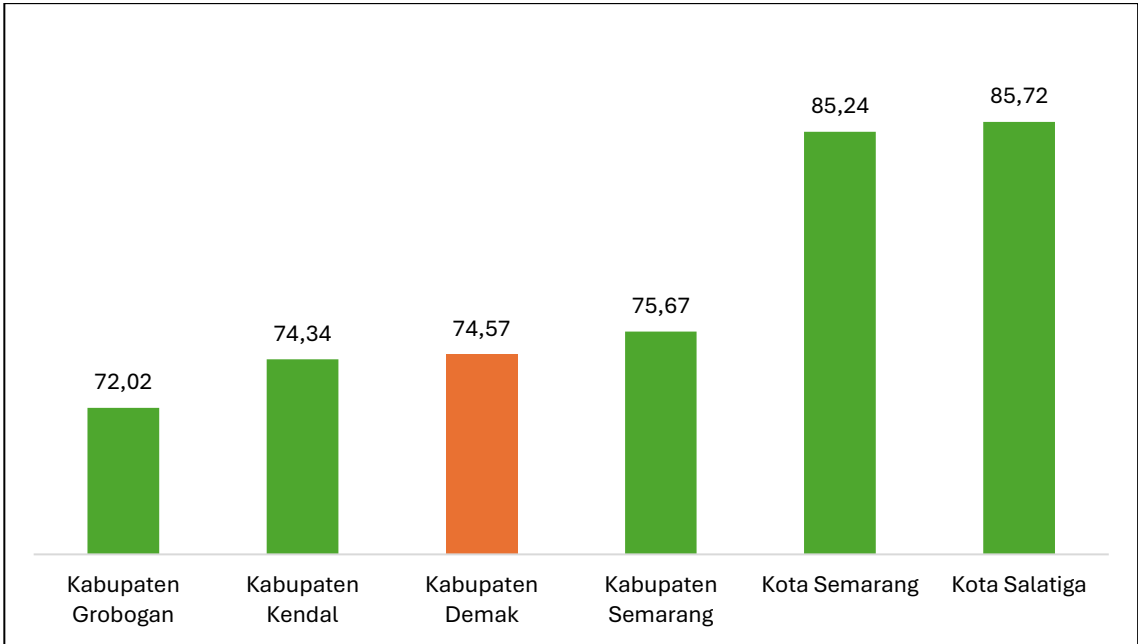
6. Masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia

Kabupaten Demak menghadapi tantangan signifikan dalam meningkatkan daya saing daerah yang salah satunya berakar pada kualitas sumber daya manusianya yang masih perlu ditingkatkan. Indikator seperti tingkat pendidikan, keterampilan kerja, dan kesehatan masyarakat secara umum menunjukkan adanya disparitas dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju. Situasi ini menghambat kemampuan Demak untuk menarik investasi berkualitas tinggi, mengembangkan industri berbasis pengetahuan, dan menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berdaya saing. Rendahnya penguasaan teknologi, minimnya inovasi, serta akses terbatas pada pelatihan dan pengembangan diri menjadi faktor-faktor yang berkontribusi pada kondisi ini, yang pada akhirnya memengaruhi produktivitas dan potensi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Di sektor pendidikan, tantangan seperti disparitas kualitas tenaga pendidik dan fasilitas belajar antar wilayah, terutama antara perkotaan dan perdesaan, masih menjadi isu krusial. Akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan, juga belum sepenuhnya merata, yang berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, di bidang kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Demak.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Demak. Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kualitas hidup masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun berdasarkan tiga komponen utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Berdasarkan data tahun 2024, IPM Kabupaten Demak tercatat sebesar 74,57. Angka ini berada di bawah Kabupaten Semarang (75,67), Kota Semarang (85,24), dan Kota Salatiga (85,72), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Grobogan (72,02) dan Kabupaten Kendal (74,34). Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Kabupaten Demak masih menghadapi tantangan dalam mencapai standar hidup yang layak dan daya saing regional.

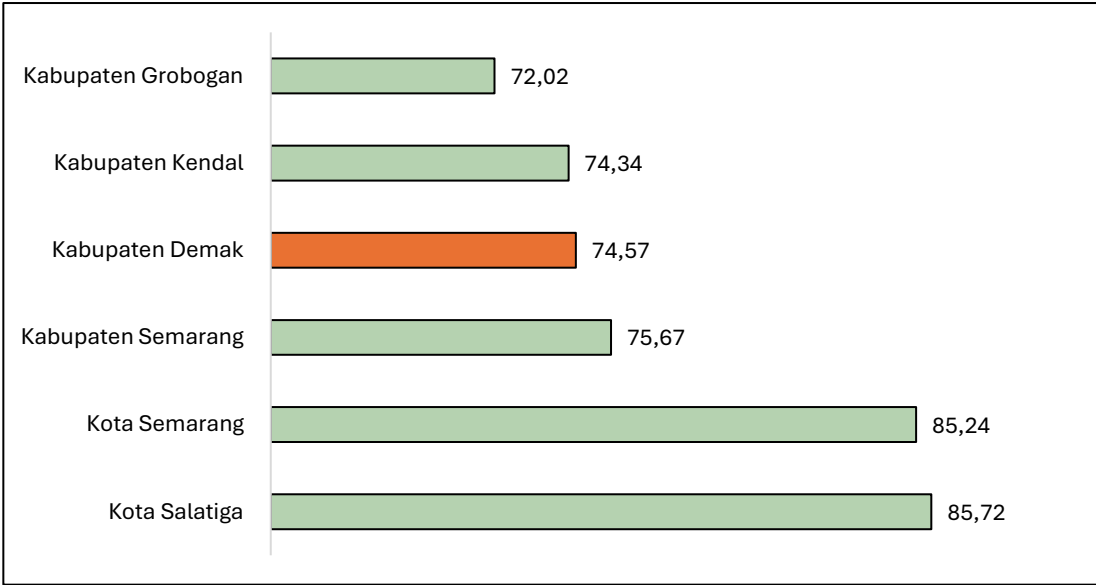
Gambar II.55
Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Tingkat kualitas hidup masyarakat juga tercermin dari angka harapan hidup sebagai salah satu elemen penyusun IPM. Pada tahun 2024, angka harapan hidup di Kabupaten Demak tercatat sebesar 74,57 tahun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Grobogan (72,02 tahun) dan Kabupaten Kendal (74,34 tahun), namun masih tertinggal dari Kabupaten Semarang (75,67 tahun), Kota Semarang (85,24 tahun), dan Kota Salatiga (85,72 tahun). Perbedaan yang cukup signifikan dengan daerah perkotaan seperti Kota Semarang dan Kota Salatiga mengindikasikan bahwa ketimpangan dalam akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas hidup masih menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi. Kemudian pada capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Demak masih mencapai 8,28 tahun yang artinya Masyarakat Kabupaten Demak sebagian besar rata-rata penduduk Demak telah menyelesaikan pendidikan dasar dan hampir menyelesaikan pendidikan menengah pertama. Angka ini memberikan mengenai potensi sumber daya manusia di Kabupaten Demak. Rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Namun, di sisi lain, masih terdapat sebagian penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMP, yang bisa menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dan daya saing di pasar kerja yang semakin kompetitif.

Gambar II.56
Angka Harapan Hidup Wilayah Kedungsepur Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2025)

Permasalahan kesehatan ini juga terlihat pada angka kematian balita yang meningkat ditahun 2023 dengan capaian 5,6 jika dibandingkan capaian ditahun 2022 sebesar 4,76. Kemudian pada Tingkat kematian karena tuberculosis ditahun 2023 meningkat hingga mencapai 3,40 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 1,2.

Permasalahan kualitas hidup layak ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Demak dibandingkan dengan wilayah Kedungsepur lainnya. Belum optimalnya akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan menjadi faktor yang memengaruhi capaian kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Demak memerlukan strategi yang terarah, termasuk peningkatan infrastruktur kesehatan, pemerataan akses pendidikan, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Permasalahan daerah di atas dikonstruksi dari permasalahan-permasalahan yang ada di bawahnya. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dijabarkan ke dalam tiap urusan yang kemudian akan diintervensi oleh Perangkat Daerah. Permasalahan pembangunan per urusan tersebut tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel II.84

Permasalahan Per Urusan Kabupaten Demak

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Pendidikan	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan masih belum optimal
	Kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal
	Tata kelola kelembagaan belum optimal
Kesehatan	Masih ditemukannya kasus <i>stunting</i> dan kekurangan gizi
	Kurangnya kesadaran masyarakat akan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	Belum optimalnya standardisasi dan jaminan pelayanan kesehatan keluarga, khususnya masyarakat miskin
	Belum optimalnya mutu serta sistem tata kelola kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya pemenuhan pelayanan publik terkait pekerjaan umum seperti air minum bersih, sanitasi, hingga drainase
	Belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur jalan
	Kurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan air baku dan irigasi
	Semakin tingginya permasalahan banjir rob
	Tingginya potensi limpasan air dan longsoran tanggul, khususnya pada musim hujan
	Tingginya alih fungsi lahan yang tidak sesuai RTRW
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Masih banyaknya rumah tidak layak huni
	Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
	Belum optimalnya penanganan pemukiman kumuh
	Masih adanya pelanggaran PERDA

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran dan banjir
Sosial	Pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang
	Belum menyeluruhnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	
Tenaga Kerja	Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
	Belum meratanya kualitas lapangan usaha
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
	Belum optimalnya pemenuhan hak anak
Pangan	Masih adanya daerah rawan pangan
	Konsumsi pangan belum beragam, bergizi seimbang dan aman
Pertanahan	Pengelolaan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Demak belum optimal
Lingkungan Hidup	Potensi kerusakan sebagai dampak aktivitas ekonomi meningkat
	Kualitas air dan tutupan lahan masih rendah
	Belum optimalnya pengelolaan sampah
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan registrasi terkait kondisi kependudukan
	Belum dimanfaatkannya data kependudukan secara optimal baik oleh pemerintahan maupun masyarakat luas



Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
	Belum optimalnya upaya kemandirian desa
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kurangnya akses dan pelayanan terkait KB
	Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga
Perhubungan	Menurunnya jumlah penumpang umum dan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi
	Terdapat titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas
	Belum optimalnya terminal tipe C untuk melayani penumpang
Komunikasi dan Informatika	Belum optimalnya layanan dan jangkauan jaringan telekomunikasi
	Aplikasi <i>e-government</i> belum optimal penggunaannya dan integrasi antar aplikasi
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Belum optimalnya keaktifan dan pemenuhan regulasi koperasi secara menyeluruh
	Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran koperasi dan UMKM
	Kualitas SDM pelaku koperasi dan UMKM masih rendah
Penanaman Modal Daerah	Belum optimalnya kondusivitas iklim investasi daerah
	Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha berbasis IT
	Belum optimalnya pengendalian/pengawasan penanaman modal
Kepemudaan dan Olahraga	Daya saing pemuda dalam perekonomian dan pembangunan belum optimal
	Masih minimnya prestasi keolahragaan, khususnya pada tingkat provinsi atau nasional

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
	Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
Statistik	Belum optimalnya penyediaan data yang valid dan tepat waktu
	Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Kabupaten Demak
Persandian	Belum optimalnya jaringan keamanan informasi
Kebudayaan	Pelestarian warisan budaya belum optimal
	Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan aktivitas seni budaya
Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
	Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Demak
Kearsipan	Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan
Urusan Pemerintahan Pilihan	
Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi sumber daya ikan dan pesisir
Pariwisata	Masih minimnya promosi pariwisata daerah
	Belum optimalnya pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata
	Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pada potensi produk unggulan daerah
Pertanian	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian
	Belum optimalnya pengolahan dan nilai tambah hasil pertanian
	Belum optimalnya rantai distribusi hasil pertanian
	Belum optimalnya mekanisasi pertanian dan peningkatan SDM pertanian
	Masih kurangnya ketersediaan lahan untuk pertanian

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
Perdagangan	Belum optimalnya pengelolaan pasar tradisional/pasar rakyat
	Belum optimalnya pengelolaan perdagangan berbasis ekspor
	Belum optimalnya sarana prasarana pengendalian harga dan barang kebutuhan pokok
Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah
	Masih kurangnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standardisasi, tersertifikasi dan ijin resmi
Transmigrasi	Kurangnya kuota transmigran dari pemerintah pusat
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	
Sekretariat Daerah	Belum optimalnya sinergitas kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah
	Belum optimalnya penataan organisasi dan tata kelola dalam menjawab tantangan regulasi pemerintah pusat dan tuntutan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Demak
Sekretariat DPRD	Belum optimalnya tata kelola kesekretariatan DPRD dalam meningkatkan capaian kinerja Anggota Dewan
Perencanaan Pembangunan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan
Keuangan Daerah	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
	Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi secara efektif dan efisien
Kepegawaian	Pengembangan karier ASN belum sepenuhnya menggunakan penilaian kinerja

Urusan Pemerintahan	Permasalahan
	Penempatan pegawai belum sesuai kompetensi dan kualifikasi ASN
	Belum optimalnya kualitas ASN, termasuk di dalamnya rasio ASN dengan kebutuhan yang belum ideal
Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kompetensi fungsional dan manajerial ASN Kabupaten Demak
Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan di Kabupaten Demak
	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan yang ada
Pengawasan	Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Demak
	Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
	Masih rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan
	Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan
	Belum optimalnya tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN di kecamatan
Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
	Belum optimalnya pendidikan politik yang baik di masyarakat

2.3.2.Isu Strategis

Isu-isu strategis mencakup berbagai urgensi dalam pembangunan daerah yang menjadi *early warning system* pada Tingkat global, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan

utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien. Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu global, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan memahami pentingnya isu-isu strategis, kita dapat memanfaatkan peluang dan meminimalkan risiko kegagalan, sehingga mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

2.3.2.1 Isu global

Isu strategis global merupakan dinamika internasional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, isu strategis global menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Demak. Sebagai daerah yang memiliki potensi besar untuk pengembangan industri, Kabupaten Demak perlu merespons isu-isu global seperti geopolitik dan geoekonomi, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi Industri 5.0, dan pergeseran budaya akibat teknologi informasi. Telaah isu strategis global berikut akan menjelaskan bagaimana dinamika global tersebut dapat memengaruhi pengembangan sektor industri di Kabupaten Demak:

Gambar II.57
Isu Global/Internasional yang Berdampak ke Kabupaten Demak



Sumber: RPJMN 2025-2029

1. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang terus berkembang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dan iklim investasi di Kabupaten

Demak. Ketegangan politik antarnegara, konflik regional, dan perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat berdampak langsung pada iklim investasi dan arus modal masuk ke sektor industri. Kabupaten Demak yang memiliki keunggulan geografis di jalur pantai utara Jawa (Pantura) memiliki potensi besar untuk menarik investasi industri, terutama dalam sektor pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan manufaktur. Selain itu, adanya pelabuhan di wilayah sekitar serta konektivitas jalan nasional yang melintasi Demak memberikan keunggulan dalam distribusi logistik dan akses pasar. Untuk memanfaatkan peluang ini, diperlukan kebijakan yang mendorong kemudahan investasi, penyediaan lahan industri, dan insentif bagi investor. Diversifikasi industri, termasuk pengembangan industri berbasis ekspor, juga menjadi strategi penting dalam menghadapi ketidakpastian pasar global akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi.

2. Dampak Perubahan Iklim Global

Perubahan iklim global menjadi tantangan signifikan bagi pengembangan sektor industri di Kabupaten Demak, terutama karena wilayah ini rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir rob dan intrusi air laut. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas produksi, merusak infrastruktur industri, dan meningkatkan biaya operasional perusahaan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan kawasan industri di Kabupaten Demak. Penerapan konsep *green industry* dengan pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah industri yang ramah lingkungan, dan optimalisasi penggunaan energi terbarukan menjadi strategi utama untuk meningkatkan ketahanan industri terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan peningkatan kapasitas sistem drainase kawasan industri juga menjadi prioritas dalam menjaga keberlangsungan aktivitas produksi.

3. Perkembangan Teknologi Industri 5.0

Revolusi Industri 5.0 yang ditandai dengan integrasi kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), big data, dan otomatisasi produksi membuka peluang besar bagi pengembangan industri di Kabupaten Demak. Adopsi teknologi dalam proses produksi dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing industri lokal. Kabupaten Demak memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi otomatisasi dalam proses pengolahan produk pertanian dan perikanan, pengembangan sistem logistik berbasis IoT, serta implementasi *smart manufacturing* di kawasan industri menjadi strategi utama

dalam menghadapi era Industri 5.0. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital di kalangan tenaga kerja industri. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur digital, pelatihan tenaga kerja industri berbasis teknologi, dan kerja sama dengan perguruan tinggi serta pelaku industri menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesiapan Kabupaten Demak menghadapi revolusi Industri 5.0.

4. Pergeseran Budaya akibat Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menyebabkan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat di Kabupaten Demak. Keterbukaan informasi dan arus globalisasi telah mendorong peningkatan permintaan terhadap produk-produk inovatif dan berbasis teknologi. Dalam konteks pengembangan sektor industri, pergeseran budaya ini membuka peluang bagi pengembangan industri kreatif dan industri berbasis teknologi di Kabupaten Demak. Pengembangan produk dengan nilai tambah tinggi, branding produk lokal berbasis digital, dan pemasaran melalui platform e-commerce menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing industri lokal. Namun, di sisi lain, pengaruh budaya asing juga berpotensi menyebabkan penurunan minat terhadap produk lokal dan tergerusnya identitas budaya dalam proses produksi. Oleh karena itu, penguatan identitas lokal dalam pengembangan produk industri dan promosi produk unggulan berbasis kearifan lokal menjadi strategi penting untuk menghadapi pergeseran budaya akibat teknologi informasi.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Keselarasan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2025–2029 merupakan langkah krusial untuk memastikan visi, misi, dan program pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan kebijakan yang ada di tingkat nasional dan provinsi. Dokumen ini akan menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pembangunan yang mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang akan dijalankan dalam tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Sebagai bagian dari upaya tersebut, telah dilakukan kajian mendalam terhadap Rancangan RPJMN 2025–2029, yang mencakup isu-isu penting, visi, misi, dan arah pembangunan. Dalam rancangan tersebut, terdapat enam isu utama yang menjadi fokus pembangunan wilayah Jawa, yang akan menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Demak.

Gambar II.58
Isu RPJMN 2025-2029 Wilayah Jawa



Sumber: RPJMN 2025-2029, diolah (2025)

1. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Perubahan struktur kelas masyarakat di wilayah Jawa, termasuk di Kabupaten Demak, dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan perubahan pola konsumsi. Peningkatan pendapatan masyarakat dan pergeseran dari sektor tradisional ke sektor industri dan jasa memunculkan kebutuhan baru dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pemerataan ekonomi. Kabupaten Demak perlu merespons perubahan ini dengan memperkuat akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, dan menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal.

2. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas yang masih rendah menjadi tantangan utama dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Demak. Faktor seperti kurangnya inovasi, keterbatasan teknologi, dan minimnya keterampilan tenaga kerja menjadi penyebab utama. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi industri, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha menjadi strategi penting untuk mendorong produktivitas.

3. Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif

Ketidakpastian ekonomi global dan nasional menuntut Kabupaten Demak untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Peningkatan daya saing sektor industri, diversifikasi ekonomi, dan penguatan sektor UMKM akan menjadi

kunci dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, penguatan investasi dan kerja sama antar daerah juga menjadi faktor penting untuk memperkuat daya saing ekonomi Kabupaten Demak.

4. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Demak perlu meningkatkan efektivitas birokrasi, memperkuat pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan, dan mempercepat proses perizinan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Digitalisasi layanan publik juga menjadi strategi utama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

5. Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia

Pengembangan potensi sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam mendukung transformasi ekonomi dan pengembangan sektor industri di Kabupaten Demak. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui program kewirausahaan dan pengembangan UMKM akan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kabupaten Demak termasuk dalam wilayah prioritas pengembangan kawasan industri dan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan wilayah metropolitan Semarang (WM Semarang) dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus. Kebijakan kewilayahan ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas, memperkuat daya saing industri, dan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel II.85
Highlight Indikasi Intervensi RPJMN
terhadap Kabupaten Demak

Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi
WM Semarang dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus	- Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak - Pembangunan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban - Pembangunan TPST Regional Semarang–Demak

Sumber: RPJMN 2025-2029

Sebagai bagian dari kawasan strategis industri di Jawa Tengah, Kabupaten Demak memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan sektor industri dan konektivitas di tingkat regional. Pembangunan infrastruktur seperti Jalan Tol Semarang–Demak dan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban diharapkan dapat mempercepat arus distribusi barang dan jasa, meningkatkan daya saing industri lokal, serta menarik investasi baru di sektor manufaktur dan perdagangan. Selain itu, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Semarang–Demak akan memperkuat pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menciptakan ekosistem industri yang bersih dan ramah lingkungan. Dengan pengembangan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi, Kabupaten Demak berpotensi menjadi pusat industri yang berdaya saing tinggi di wilayah Jawa Tengah, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Visi RPJMN 2025-2029, yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" mencerminkan komitmen nasional untuk mewujudkan kemajuan Indonesia dalam rangka mencapai puncak kejayaan pada tahun 2045. Untuk mencapai visi tersebut, misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita dituangkan dalam bentuk Prioritas Nasional yang menjadi landasan utama dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini berfungsi sebagai tujuan strategis dan sasaran pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029, yang mencakup berbagai sektor penting seperti pembangunan sumber daya manusia, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dengan mengacu pada Prioritas Nasional tersebut, Kabupaten Demak dapat menyusun program pembangunan yang terarah, berbasis pada kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan tujuan besar pembangunan nasional. Dengan 8 asta cita sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
 6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
 7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
 8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat bergama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
- RPJMN menyebutkan terdapat 17 program prioritas sebagai berikut:
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
 5. Pemberantasan kemiskinan
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

➤ Adapun terdapat 8 *quick wins* sebagai berikut:

1. Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap Kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh) TNI/Polri dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi RPJMN 2025-2029, "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045," melalui kontribusinya dalam Asta Cita, program prioritas, dan *quick wins*. Dengan potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif, Kabupaten Demak dapat mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan penguatan kewirausahaan lokal, sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan. Pemanfaatan sektor agromaritim serta hilirisasi perikanan dapat meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat infrastruktur desa dan penyediaan rumah murah yang bersanitasi baik. Melalui program-program prioritas dan *quick wins*, seperti penyediaan makanan bergizi sehat, pengembangan sekolah unggul, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung generasi milenial, Kabupaten Demak dapat berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah, Kabupaten Demak memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan di tingkat provinsi. Sebagai salah satu daerah dengan potensi industri yang besar dan didukung oleh konektivitas yang terus berkembang, Kabupaten Demak diharapkan mampu berkontribusi dalam menjawab isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Jawa Tengah. Berikut penjabaran isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah:

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan Kabupaten Demak. Sebagai bagian dari Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (KSD-K), Demak memiliki potensi besar untuk menarik investasi di sektor industri dan manufaktur. Pengembangan infrastruktur strategis seperti pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak dan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban akan mempercepat arus distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat daya saing industri lokal. Selain itu, penguatan sektor pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi modern juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Demak.

2. Penurunan tingkat kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak dapat dicapai melalui pengembangan sektor ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan konektivitas melalui pembangunan tol akan membuka peluang ekonomi baru, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan industri. Selain itu, pengembangan UMKM dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian dan perikanan akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Dengan memperkuat akses terhadap pendidikan, pelatihan kerja, dan modal usaha, masyarakat Demak diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.

3. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Kabupaten Demak memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan di Jawa Tengah, terutama sebagai penghasil padi, hasil laut, dan komoditas hortikultura. Modernisasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi irigasi, pengelolaan lahan yang ramah lingkungan, dan penguatan rantai distribusi akan meningkatkan produktivitas pertanian di Demak. Selain

itu, pengembangan sistem perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan juga akan memperkuat ketahanan pangan daerah. Upaya ini akan memastikan ketersediaan bahan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat Demak dan sekitarnya.

4. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Peningkatan kualitas prasarana dan sarana di Kabupaten Demak menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak dan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban akan memperkuat konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke kawasan industri dan pariwisata. Di sisi lain, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Semarang–Demak akan menjadi solusi dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sekaligus mendukung kebersihan dan kenyamanan lingkungan di Demak.

5. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Kabupaten Demak menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan menghadapi risiko bencana, terutama banjir dan rob akibat perubahan iklim dan penurunan muka tanah. Upaya mitigasi bencana melalui pembangunan tanggul laut, penguatan sistem drainase, dan rehabilitasi mangrove menjadi langkah strategis dalam melindungi wilayah pesisir dari ancaman abrasi dan banjir rob. Pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan dan penerapan konsep pembangunan hijau juga diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mendukung ketahanan ekologi di Demak.

6. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Peningkatan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Demak menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang produktif dan berdaya saing. Penguatan sektor pendidikan melalui penyediaan fasilitas sekolah yang memadai, peningkatan kualitas guru, dan pengembangan pendidikan vokasi akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja. Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan penyediaan fasilitas publik yang memadai akan mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera.

7. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat

Kabupaten Demak memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang menjadi karakter dan identitas masyarakat. Tradisi keagamaan seperti Grebeg Besar dan potensi wisata religi di Masjid Agung Demak menjadi daya tarik utama dalam

memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pelestarian seni, tradisi lokal, dan pengembangan desa wisata berbasis budaya akan memperkuat identitas masyarakat Demak, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Dukungan terhadap komunitas budaya dan generasi muda dalam melestarikan tradisi juga menjadi bagian penting dalam menjaga jati diri masyarakat Demak.

8. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis di Kabupaten Demak menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-governance) akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan serta mempercepat pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan penguatan sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan profesional di Kabupaten Demak.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 atau RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pengejawantahan dari visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2025-2030 yang tertuang dalam Blue Print Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Penjabaran visi dan misi daerah berdasarkan pada filosofi cita-cita Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah untuk “NGOPENI. NGLAKONI. Dengan landasan filosofis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2029 adalah:

“JAWA TENGAH SEBAGAI PROVINSI MAJU YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Jawa Tengah maju dan berkelanjutan akan terwujud dilandasi dengan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis guna mendukung perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, dalam rangka mencapai kondisi sosial Masyarakat yang lebih baik ditunjukkan dengan terwujudnya sumber daya manusia Jawa Tengah berdaya saing dan berkarakter. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025- 2029 berdasarkan logframe tersebut diukur dengan indikator kinerja pembangunan daerah yaitu sebagai berikut:

Gambar II.59

Logframe Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029



Visi RPJMD Jawa Tengah 2025–2029, yaitu "Jawa Tengah sebagai Provinsi Maju yang Berkelanjutan untuk Menuju Indonesia Emas 2045," menegaskan komitmen dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berfokus pada kemajuan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Adapun misi RPJMD Jawa Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Layanan Dasar yang Inklusif untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mandiri, Kompetitif dan Berwawasan Global;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Perkotaan dan Pedesaan Berbasis Sektor Unggulan yang Inovatif, Mandiri dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Kolaboratif dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas;
4. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jawa Tengah yang merata dan berkeadilan, melalui perencanaan tata ruang yang responsif;
5. Menjaga Stabilitas dan Kondusivitas Daerah dengan pendekatan budaya lokal, serta menjamin kebebasan warga dalam menjalankan ibadah, perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia yang berkeadilan;
6. Menjaga iklim Investasi yang kondusif dan kolaboratif untuk membuka kesempatan kerja dan berusaha seluas-luasnya bagi warga Jawa Tengah. Serta Mengembangkan pembiayaan Pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.

Kabupaten Demak memiliki peranan strategis dalam mendukung pencapaian visi tersebut, terutama sebagai bagian dari kawasan pengembangan industri dan pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan wilayah metropolitan Semarang (WM Semarang) dan Kawasan Pengembangan Industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (KSD-K). Dalam aspek sosial, Demak berperan dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan, yang berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan ketahanan ekonomi daerah. Demak juga memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata religi dan budaya, terutama melalui keberadaan Masjid Agung Demak yang menjadi ikon sejarah dan pusat kegiatan keagamaan di Jawa Tengah. Dengan memperkuat sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang, Kabupaten Demak diharapkan mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan Jawa Tengah sebagai provinsi maju yang berkelanjutan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

2. Telaah RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045

Memahami bahwa pelaksanaan pembangunan jangka panjang dilakukan melalui pembangunan jangka menengah, maka perlu dalam penyusunan RPMJD memperhatikan poin-poin urgensi dan kebijakan yang tertuang pada dokumen RPJPD. Berikut beberapa hal dalam RPJPD yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

a. Permasalahan Pembangunan Daerah dalam dokumen RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat
2. Meningkatnya Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Belum Optimalnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar
4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
5. Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

b. Isu Strategis Kabupaten Demak dalam dokumen RPJPD adalah sebagai berikut:

- A. Aspek Geografi dan Demografi
 1. Pemenuhan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Air
 2. Bencana Rob dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 3. Pergeseran Demografi Masyarakat
- B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 4. Kemiskinan dan Kesempatan Kerja
 5. Kemandirian Pangan menuju Hilirisasi Industri yang Berkelanjutan
 6. Kemandirian Desa sebagai Basis Pemberdayaan Masyarakat
- C. Aspek Daya Saing Daerah
 7. Peningkatan Potensi Investasi Daerah Berbasis Komoditas Unggulan Lokal
 8. Penataan Wilayah dan Pemenuhan Kualitas Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas yang Inklusif dan Berkelanjutan
 9. Penguatan Daya Saing Wisata yang Berbasis Kearifan Lokal/Budaya, Ekonomi Kreatif, dan Sektor Unggulan Daerah

10. Penciptaan dan Pemanfaatan Teknologi
 11. Sumber Daya Manusia yang Berakhlak
 12. Transisi Epidemiologi
- D. Aspek Pelayanan Umum
13. Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif dan Dinamis

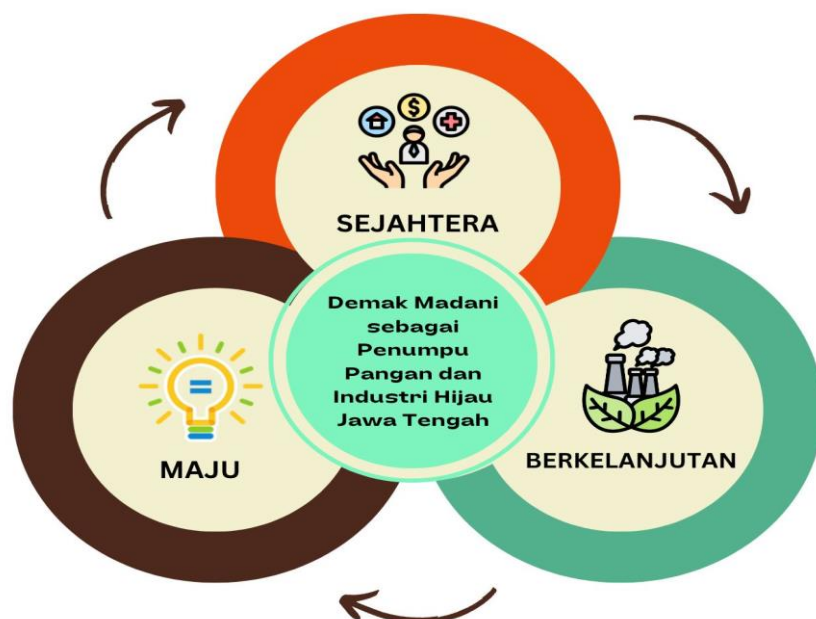
c. Visi RPJPD Kabupaten Demak

Dalam RPJPD Kabupaten Demak, visi dan misi pembangunan jangka panjang dengan menghimpun aspirasi dari masyarakat yang telah dibahas di dalam berbagai forum pembahasan dan telah disepakati, rumusan visi RPJPD Kabupaten Demak 2025-2045 adalah sebagai berikut:

“Demak Madani sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”

Kalimat visi yang telah dirumuskan ini menunjukkan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Demak dalam satu tema khusus yaitu Demak Madani sebagai penumpu pangan dan industri hijau Jawa Tengah dengan tiga pokok visi yaitu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Keterkaitan antar pokok visi di atas dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini:

Gambar II.60.
Keterkaitan Antar Pokok Visi RPJPD Kabupaten Demak
Tahun 2025-2045



Untuk dapat menjelaskan dengan lebih komprehensif, berikut adalah penjelasan atas tema khusus dan pokok visi RPJPD Kabupaten Demak,

Tema Khusus: Demak sebagai Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah

Madani dapat diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang cerdas, sehat dan berperadaban dengan kondisi ekonomi yang kuat berlandaskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya daerah. Pokok visi ini juga

didasarkan kepada kondisi Kabupaten Demak yang mengedepankan kemampuan lokal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada seluruh aspek kehidupan. Basis nilai ini akan tetap dipertahankan dengan membangun masyarakat yang cerdas berlandaskan nilai moral dan integritas yang kuat.

Kemudian terkait dengan tema khusus yang mendukung Demak Madani yaitu Penumpu Pangan dan Industri Hijau Jawa Tengah dapat dipahami sebagai inisiatif yang bertujuan untuk mengembangkan sektor industri yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, terutama dalam konteks produksi pangan. Tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti pertanian organik atau penggunaan energi terbarukan dalam proses produksi. Dalam konteks Demak Madani, Pusat Industri Hijau dan Pangan akan menjadi target utama masyarakat Demak dalam pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sehingga dapat menyokong ketahanan pangan dan industri hijau di Jawa Tengah.

1. Maju

Maju adalah kondisi di mana kondisi masyarakat Kabupaten Demak telah mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kehidupan. Keunggulan ini mencakup seluruh aspek yang berkomplementasi dengan kondisi wilayah yang aman secara sosial dan pemerintahan yang tangguh dan andal. Dengan demikian, pokok visi ini akan diarahkan kepada pembangunan Kabupaten Demak yang modern, inovatif, dan memiliki tingkat daya saing sumber daya manusia yang tinggi, sembari tetap secara sinergis mempertahankan identitas serta nilai-nilai lokal.

2. Sejahtera

Masyarakat Demak di masa depan akan menjadi masyarakat yang sejahtera perekonomiannya ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang diiringi dengan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Kesejahteraan ekonomi tersebut diwujudkan dalam perekonomian yang terus tumbuh, berdaya saing, inovatif, mandiri, dan dipastikan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak. Kesejahteraan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan.

3. Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi seimbang dengan pembangunan sosial, kelestarian lingkungan hidup dan tangguh bencana. Pada masa-masa mendatang, pembangunan di Kabupaten Demak harus mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan. Berkelanjutan dimaknai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seimbang dengan

pembangunan sosial tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Kabupaten Demak memiliki ancaman rob yang cukup serius di kawasan pesisir. Pembangunan berkelanjutan juga akan diarahkan pada pembangunan yang memperhatikan mitigasi bencana sehingga terwujud kondisi lingkungan dan masyarakat yang tangguh bencana.

d. Misi

Dalam rangka mencapai visi RPJPD maka perlu adanya misi sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Demak yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berketahanan Sosial Budaya
2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan
3. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Masyarakat yang Inklusif
4. Mewujudkan Transformasi Sosial yang Berkeadilan
5. Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Berbasis Ketahanan Ekologi dan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan

e. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan bagian pelaksanaan RPJPD pada tahap I. Sesuai yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Demak, pada tahap I pembangunan Kabupaten Demak memiliki tema pembangunan, **“Penguatan Fondasi Transformasi”** dengan beberapa arah kebijakan sebagai berikut.

- 1) Pemenuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan
- 2) Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat
- 3) Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik
- 4) Inisiasi penerapan ekonomi hijau serta penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi untuk mendorong peningkatan produktivitas
- 5) Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif
- 6) Pemenuhan infrastruktur penanggulangan rob dan bencana

Sementara itu, sasaran pokok yang akan dicapai pada RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 yaitu:

- 1) Terwujudnya sumber daya manusia yang cerdas dan sehat
- 2) Meningkatnya aspek kebudayaan dalam pengembangan daya saing dan ketahanan sosial budaya masyarakat
- 3) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Responsif dan Adaptif
- 4) Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Ekonomi Unggulan Daerah
- 5) Meningkatnya pendapatan masyarakat

- 6) Menurunnya Angka Kemiskinan Diiringi Pemerataan Kesejahteraan
- 7) Terwujudnya Pembangunan yang Ramah Lingkungan dan Mengarusutamakan Pembangunan Berkelanjutan
- 8) Terbangunnya Infrastruktur Dasar, Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas
- 9) Terciptanya kondisi lingkungan dan masyarakat yang tangguh bencana

3. Telaah KLHS RPJMD Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil analisis indikator TPB di Kabupaten Demak menunjukkan bahwa sebanyak 21 indikator atau sebesar 15% TPB dalam status (SBT), yaitu indikator TPB sudah dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum tercapai. Kemudian sebanyak 67 indikator atau sebesar 46% indikator berstatus (SST) yang berarti bahwa indikator TPB sudah dilaksanakan dalam RPJMD dan sudah tercapai. Sementara itu, sebanyak 37 indikator atau sebesar 25% indikator menunjukkan bahwa tidak/belum ada data terkait indikator tersebut (TAD). Indikator TPB yang belum dilaksanakan dalam RPJMD dan sudah maupun belum mencapai target nasional (TBC) sebesar 14% atau sebanyak 21 indikator. Dengan data capaian yang ada, terdapat isu strategis dan rekomendasi kebijakan yang harus diimplementasikan dalam dokumen RPJMD dengan penjabaran sebagai berikut.

- a) Isu Pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku belum tercukupi, dengan rekomendasi peningkatan akses kepada layanan air minum dan air baku yang berkelanjutan dengan rekomendasi berupa peningkatan kapasitas pelayanan air minum layak dan berkelanjutan terhadap rumah tangga, peningkatan kapasitas air permukaan melalui pembangunan embung dan waduk sebagai sumber air baku yang didukung instalasi pengolah air, meningkatkan infrastruktur penyediaan air minum, dan melakukan kegiatan pergiliran tanam agar air untuk kegiatan pertanian tetap tercukupi dan tidak mengganggu kebutuhan air untuk rumah tangga
- b) Isu Masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia, dengan rekomendasi Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan rekomendasi berupa pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dalam pendidikan dan kesehatan, pemantapan peran dan fungsi agama sebagai landasan etika dan moral dalam pembangunan, meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia > 15 tahun, sosialisasi anti kekerasan terutama pada anak dan remaja, meningkatkan pemerataan mutu pendidikan (sarana, prasarana, tenaga pendidik, kurikulum), mengembangkan pendidikan dan budaya untuk meningkatkan kesetaraan

gender, meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan, meningkatkan upaya pengendalian pernikahan dini, peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan akses pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan disertai pembebasan biaya pendidikan bagi jenjang pendidikan dasar.

- c) Isu Masih rendahnya kualitas kesehatan Masyarakat, dengan rekomendasi meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera, meningkatkan upaya preventif munculnya pola penyakit baru dengan pendekatan baru yang inovatif, meningkatkan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kapasitas pelayanan sanitasi layak dan berkelanjutan terhadap rumah tangga, menurunkan angka kurang gizi pada balita, pengembangan sistem layanan kesehatan dan meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan, menurunkan malnutrisi pada anak di bawah umur lima tahun, mencegah dan menurunkan kasus kematian akibat keracunan, meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, sosialisasi budaya stop buang air besar sembarangan, melakukan pengadaan jamban sehat, dan penurunan jumlah desa/kelurahan dengan budaya BABS, peningkatan sosialisasi dan peningkatan fasilitas untuk cuci tangan dengan sabun dan air, peningkatan pelayanan pengelolaan lumpur tinja pada rumah tangga di Kabupaten Demak, dan Sanitasi Total Berbasis Peningkatan Masyarakat (STBM) pada desa/kelurahan.
- d) Isu Kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana dengan rekomendasi meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Demak dengan perencanaan jalur dan lokasi evakuasi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak bencana dengan pemberian sosialisasi, serta upaya lainnya, melakukan penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai baseline indikator dalam pengelolaan risiko bencana yang *diupdate* secara berkala, melakukan penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana sesuai karakteristik bencana yang terjadi di Kabupaten Demak, meningkatkan pengelolaan air permukaan dalam hal perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan untuk mitigasi bencana kekeringan, meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS, melakukan pembangunan sistem peringatan dini bencana yang terjadi di Kabupaten Demak terutama banjir serta melaksanakan pelatihan, simulasi, dan uji sistem serta prosedur peringatan dini bencana secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana di Kabupaten Demak, penguatan kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan untuk memperkuat mitigasi bencana di Kabupaten Demak,

- memperketat perizinan dan mengawasi kegiatan pertambangan di Kabupaten Demak, memperketat pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah berlaku, penyusunan masterplan jangka panjang untuk penanganan banjir dan banjir rob di daerah Sayung Kabupaten Demak, meningkatkan koordinasi dan integrasi pengelolaan das antar sektor dan antar wilayah sekitar Kabupaten Demak, memperhatikan penggunaan air untuk kegiatan pertanian dan memperbaiki pola tanam yang boros air untuk mencapai daya dukung air yang optimal, dan mendukung keberadaan kawasan strategis agrikultur Jragung-Tuntangsarang-Lusi dan Juwana dan Kawasan Perkotaan Metropolitan Semarang dalam setiap dokumen perencanaan dan kebijakan terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta kebencanaan.
- e) Isu Tingkat kemiskinan yang masih tinggi, dengan rekomendasi Meningkatkan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek, melakukan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Demak, meningkatkan kontribusi tenaga kerja lokal pada sektor industri manufaktur di Kabupaten Demak, meningkatkan kapasitas ketahanan keluarga terutama masyarakat miskin, pengembangan penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan sektor produktivitas sentra ekonomi kemasyarakatan, mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan skill, keterampilan, dan kemandirian untuk berusaha, mempermudah izin dan memfasilitasi kegiatan UMKM termasuk pembentukan UMKM baru di Kabupaten Demak, mengupayakan pembelanjaan pemerintah yang terfokus pada pengusaha lokal dan badan usaha dalam Kabupaten Demak, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dan nelayan dalam hal IPTEK.

Selain isu, KLHS RPJMD juga merekomendasikan kebijakan sebagai berikut :

Tabel II.86
Rekomendasi Arah Kebijakan

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rekomendasi
Pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku belum tercukupi	Peningkatan akses kepada layanan air minum dan air baku yang berkelanjutan	• Peningkatan kapasitas pelayanan air minum layak dan berkelanjutan terhadap rumah tangga • Peningkatan kapasitas air permukaan melalui Pembangunan embung dan waduk sebagai sumber air baku yang didukungInstalasi Pengolah Air • Meningkatkan infrastruktur penyediaan air minum

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rekomendasi
		Melakukan kegiatan pergiliran tanam agar air untuk kegiatan pertanian tetap tercukupi dan tidak mengganggu kebutuhan air untuk rumah tangga
Masih Rendahnya Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)	- Pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar dalam pendidikan dan kesehatan - Pemantapan peran dan fungsi agama sebagai landasan etika dan moral dalam pembangunan - Meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia > 15 tahun - Sosialisasi anti kekerasan terutama pada anak dan remaja - Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan (sarana, prasarana, tenaga pendidik, kurikulum) - Mengembangkan Pendidikan dan budaya untuk meningkatkan kesetaraan gender - Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan - Meningkatkan upaya pengendalian pernikahan dini - Peningkatan pelayanan pendidikan dengan memberikan akses pendidikan yang terjangkau bagi semua kalangan disertai pembebasan biaya pendidikan bagi jenjang pendidikan dasar
Masih Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Demak	- Meningkatkan edukasi dan partisipasi Masyarakat untuk mewujudkan kehidupan sehat dan Sejahtera - Meningkatkan upaya preventif munculnya pola penyakit baru dengan pendekatan baru yang inovatif - Meningkatkan pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat - Peningkatan kapasitas pelayanan sanitasi layak danberkelanjutan terhadap rumah tangga - Menurunkan angka kurang gizi pada balita - Pengembangan sistem layanan kesehatan dan meningkatkan infrastruktur pelayanan kesehatan - Menurunkan malnutrisi pada anak di bawah umur lima tahun - Mencegah dan menurunkan kasus kematian akibat keracunan - Meningkatkan ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas - Sosialisasi budaya stop buang air besar sembarangan, melakukan pengadaan jamban sehat, dan penurunan jumlah desa/kelurahan dengan budaya BABS

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rekomendasi
		• Peningkatan sosialisasi dan peningkatan fasilitas untuk cuci tangan dengan sabun dan air • Peningkatan pelayanan pengelolaan lumpur tinja pada rumah tangga di Kabupaten Demak • Sanitasi Total Berbasis Peningkatan Masyarakat (STBM) padadesa/kelurahan
Kerusakan lingkungan hidup dan risiko bencana	Pengurangan risiko bencana dan kerusakan lingkungan hidup	• Meningkatkan mitigasi bencana di Kabupaten Demak dengan perencanaan jalur dan lokasi evakuasi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak bencana dengan pemberian sosialisasi, serta upaya lainnya. • Melakukan penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) sebagai baseline indikator dalam pengelolaan risiko bencana yang diupdate secara berkala • Melakukan penyusunan dokumen strategi pengurangan risiko bencana sesuai karakteristik bencana yang terjadi di Kabupaten Demak • Meningkatkan pengelolaan air permukaan dalam hal perlindungan, pemanfaatan, dan pemeliharaan untuk mitigasi bencana kekeringan • Meningkatkan pengembangan sistem pengelolaan dan pemantauan area hulu DAS • Melakukan pembangunan sistem peringatan dini bencana yang terjadi di Kabupaten Demak terutama banjir serta melaksanakan pelatihan, simulasi, dan uji sistem serta prosedur peringatan dini bencana secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana di Kabupaten Demak. • Penguatan kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan untuk memperkuat mitigasi bencana di Kabupaten Demak. • Memperketat perizinan dan mengawasi kegiatan pertambangan di Kabupaten Demak • Memperketat pengawasan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan tata ruang yang telah berlaku • Penyusunan masterplan jangka panjang untuk penanganan banjir dan banjir rob di daerah Sayung Kabupaten Demak • Meningkatkan koordinasi dan integrasi pengelolaan DAS antar sektor dan antar wilayah sekitar Kabupaten Demak • Memperhatikan penggunaan air untuk kegiatan pertanian dan memperbaiki pola tanam yang boros air untuk mencapai daya dukung air yang optimal • Mendukung keberadaan Kawasan Strategis Agrikultur Jragung-TuntangSarang-Lusi dan Juwana dan Kawasan Perkotaan Metropolitan Semarang dalam setiap dokumen perencanaan dan kebijakan terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup serta kebencanaan
Tingkat Kemiskinan	Penurunan angka	• Meningkatkan besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Isu Strategis	Arah Kebijakan	Rekomendasi
yang Masih Tinggi	kemiskinan menjadi 5%	• Melakukan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal di Kabupaten Demak • Meningkatkan kontribusi tenaga kerja lokal pada sektor industri manufaktur di Kabupaten Demak • Meningkatkan kapasitas ketahanan keluarga terutama masyarakat miskin • Pengembangan penguatan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan sektor produktifitas sentra ekonomi kemasyarakatan • Mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat terkait dengan peningkatan skill , keterampilan, dan kemandirian untuk berusaha. • Mempermudah izin dan memfasilitasi kegiatan UMKM termasuk pembentukan UMKM baru di Kabupaten Demak • Mengupayakan pembelanjaan pemerintah yang tefokus pada pengusaha lokal dan badan usaha dalam Kabupaten Demak • Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani dan nelayan dalam hal IPTEK

Sumber : Dokumen KLHS

4. Telaah RTRW Kabupaten Demak

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kabupaten Demak tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak RTRW Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak tahun 2011-2031, maka, tujuan RTRW Kabupaten Demak adalah:

“Mewujudkan ruang wilayah Daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan”

Apabila merujuk pada tujuan RTRW Kabupaten Demak dalam Perda No. 6 tahun 2011 fokus utama pengembangan wilayah Kabupaten Demak tertuju pada sektor Pertanian dan Sektor Perikanan yang didukung oleh Perdagangan dan Jasa dan Industri. Namun, mengacu pada Perda Nomor 1 tahun 2020, maka tujuan pengembangan wilayah difokuskan pada sektor pertanian dan sektor industri sebagai komponen mendasar yang didukung oleh sektor perdagangan, jasa dan pariwisata.

Tabel II.87
Perbandingan Antara Tujuan RTRW

	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RANCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031	PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011-2031
TUJUAN PENATAAN RUANG	Mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan perikanan yang unggul didukung sektor perdagangan dan jasa, industri, usaha mikro kecil menengah, dan pariwisata	Mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan, jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Dari kerangka di atas, dapat dipahami bahwa fokus penataan ruang hingga tahun 2031 mendatang adalah pengembangan wilayah yang terfokus pada sektor pertanian dan juga sektor industri. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan penting bagi penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029 di mana aspek penataan ruang perlu menjadi bagian integral agar sektor kewilayahan dapat menjadi pengungkit arah pembangunan Kabupaten Demak.

Dalam hal penelaahan terhadap RTRW, terdapat tiga aspek mendasar yang perlu digarisbawahi, yaitu struktur tata ruang, pola ruang dan kawasan strategis. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

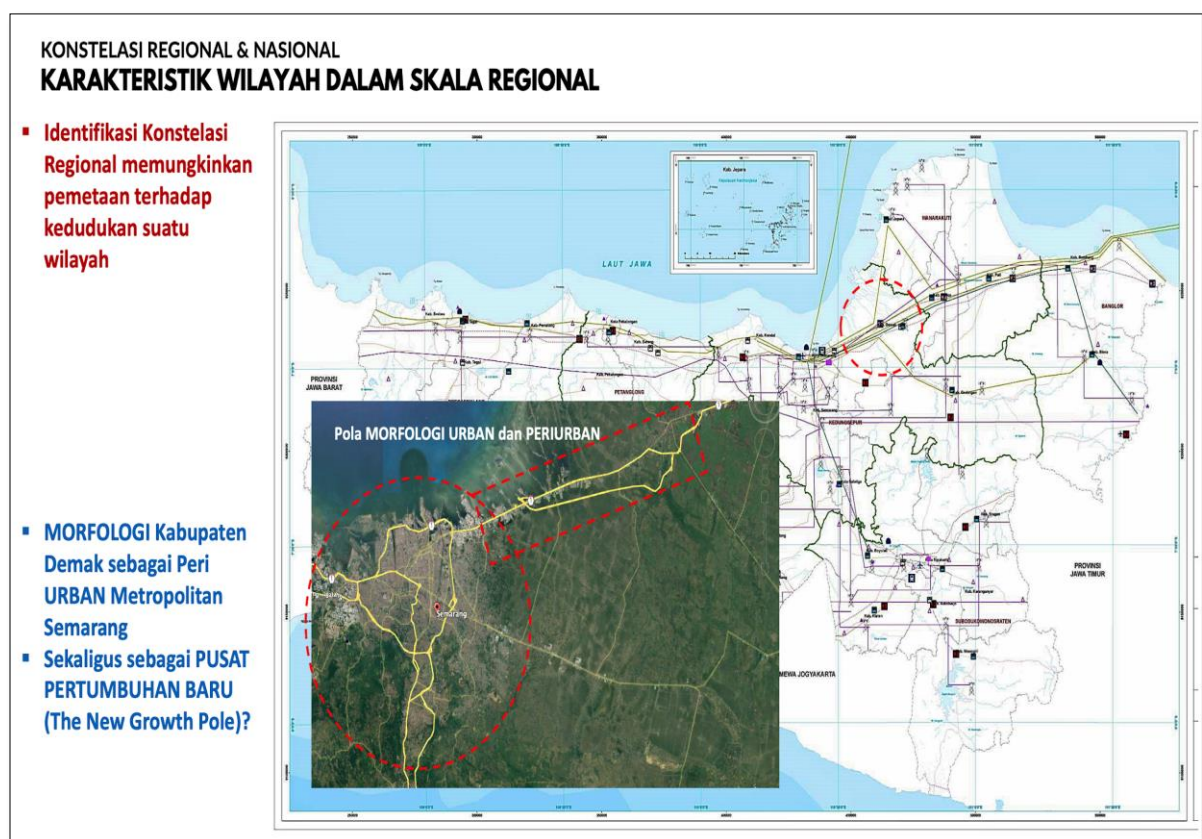
Kawasan strategis terdiri atas kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi. Dan Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala daerah.

Secara struktur ruang, Kabupaten Demak digambarkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang berada dalam aglomerasi Regional Kedungsepur. Adapun hierarki struktur ruang Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. PKN merupakan bagian dari kawasan perkotaan Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi (Kedungsepur) berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Demak dan Kecamatan Mranggen.

Kabupaten Demak berada pada koridor yang menghubungkan langsung dengan Kota Semarang di wilayah bagian barat. Meskipun dari sisi perkembangan perkotaan, Kabupaten Demak lebih condong sebagai periurban, namun potensi kesinambungan secara morfologis memungkinkan adanya potensi interaksi aktivitas antar kedua wilayah tersebut.

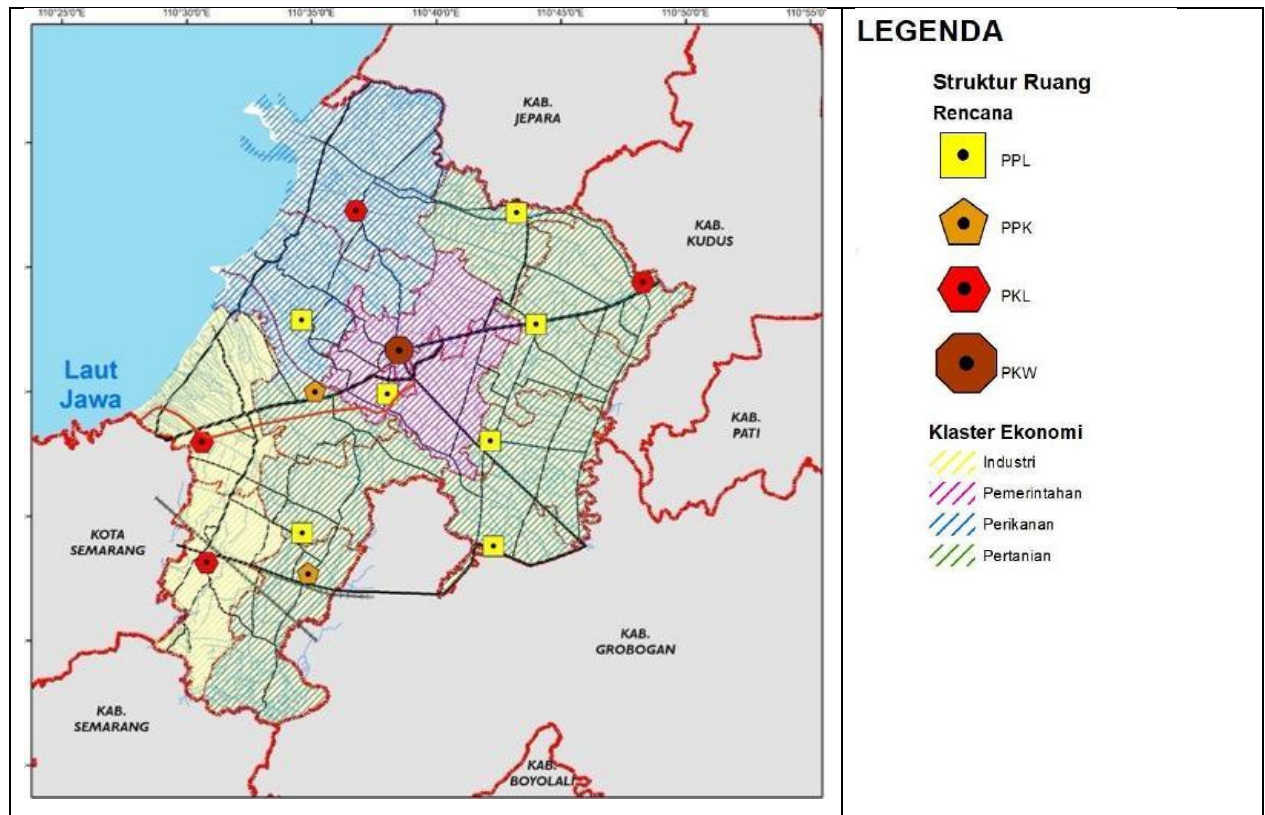
Gambar II.61
Konstelasi/Kedudukan Kabupaten Demak sebagai PKN



2. PKL meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Demak; dan
 - b) Kawasan Perkotaan Mranggen.
3. PPK, meliputi:
 - a) Kawasan Perkotaan Gajah;
 - b) Kawasan Perkotaan Dempet;
 - c) Kawasan Perkotaan Guntur;
 - d) Kawasan Perkotaan Sayung;
 - e) Kawasan Perkotaan Karangtengah;

- f) Kawasan Perkotaan Bonang;
- g) Kawasan Perkotaan Wedung;
- h) Kawasan Perkotaan Karangawen;
- i) Kawasan Perkotaan Wonosalam;
- j) Kawasan Perkotaan Karanganyar;
- k) Kawasan Perkotaan Mijen; dan
- l) Kawasan Perkotaan Kebonagung.

Gambar II.62
Ilustrasi Struktur Ruang Kabupaten Demak



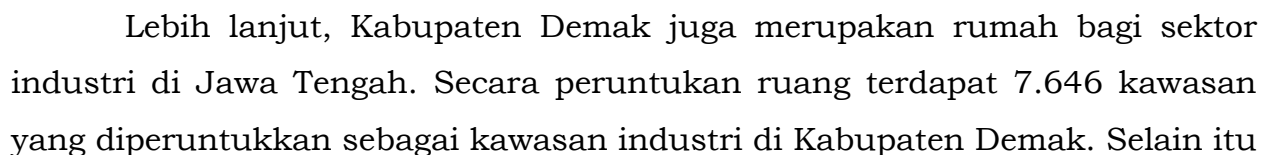
Selanjutnya, dari sisi Pola Ruang yang merupakan wadah bagi terselenggaranya tujuan pengembangan wilayah dan implementasi dari struktur ruang wilayah. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Gambar II.63



Pola Ruang Kabupaten Demak selanjutnya tersusun atas alokasi pola ruang permukiman perdesaan (7 persen) dan perkotaan. (5 persen). Hal ini juga turut menandai adanya fenomena *urban sprawl* (pertumbuhan kota yang tidak terpadu, tersebar tidak merata) di Kabupaten Demak sehingga berpengaruh terhadap efisiensi sarana dan prasarana.

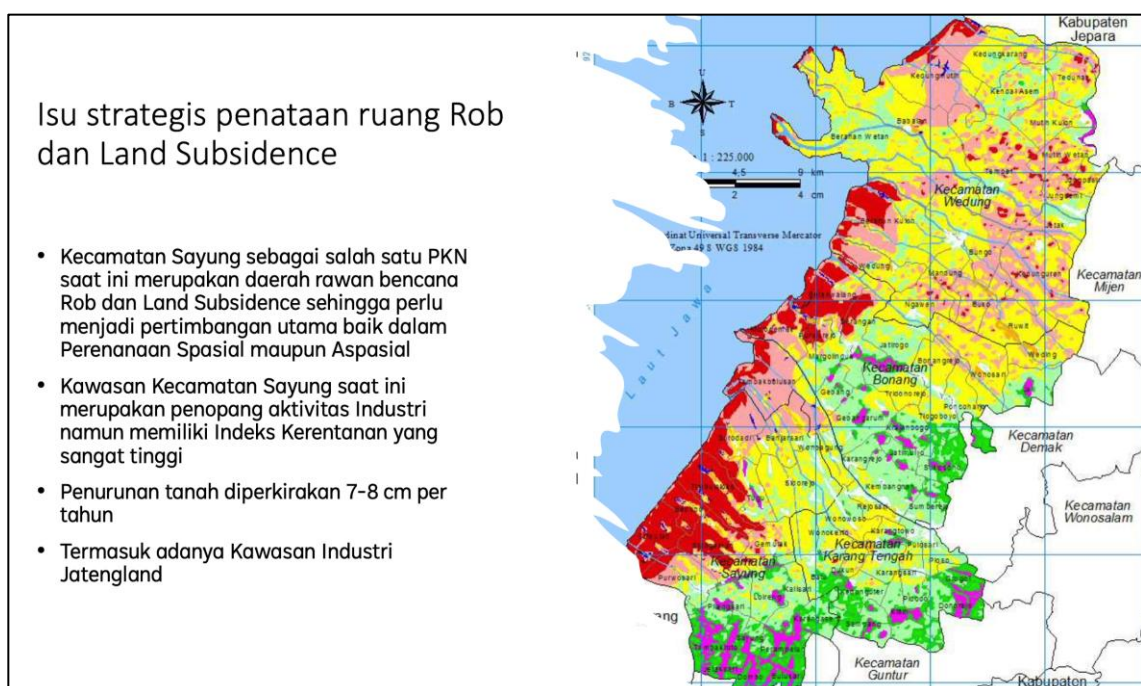
Gambar II.64



saat ini juga terdapat Kawasan Industri Sayung (PT. Jatengland) dengan luas mencapai 300 Ha.

Isu penting dari sisi penataan ruang Kabupaten Demak adalah kondisi geografis Kabupaten Demak yang merupakan salah satu wilayah pesisir yang terletak di utara Jawa. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang dan berada pada koridor ekonomi Pulau Jawa menyebabkan perkembangan wilayah ini sangat cepat. Penambahan lahan terbangun ini memberikan beban tambahan pada tanah, padahal kondisi tanah pada wilayah ini adalah tanah yang masih muda. Tanah seperti ini masih belum terkonsolidasi dengan baik sehingga penambahan beban di atasnya menyebabkan terjadinya pemampatan. Selain itu, keberadaan kawasan permukiman dan industri juga menyebabkan meningkatnya aktivitas pemompaan air tanah, terutama pada kawasan industri dikarenakan kebutuhan airnya yang cukup banyak. Adanya beban di atas tanah dan rongga tanah akibat pengambilan air tanah kemudian memicu terjadinya fenomena penurunan muka tanah. Penurunan tanah di wilayah pesisir ini menyebabkan meningkatnya tinggi genangan akibat banjir pasang. Peningkatan permukaan air laut di Kabupaten Demak hingga tahun 2010 mencapai rata-rata 3,2 mm per tahunnya sejak 1993. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan tergenangnya lahan basah dan lahan rendah, erosi pantai, intrusi air tanah sehingga menimbulkan genangan banjir rob yang telah menyebabkan dampak negatif yang besar karena menghambat aktivitas ekonomi yang ada di Kabupaten Demak.

Gambar II.65
Isu Terkait Bencana Rob dan *Land Subsidence*



Oleh karenanya, dalam konteks integrasi antara rencana tata ruang wilayah dan RPJMD, Isu bencana pesisir perlu diangkat, sehingga tercermin dalam salah satu misi ataupun program prioritas (sehingga dapat mengungkit efek lainnya. Isu strategis mengenai infrastruktur *mitigative* atas permasalahan yang terjadi di Kabupaten Demak perlu menjadi program utama dengan skema pembiayaan APBN karena lintas wilayah. Pada saat tanggul terbangun maka dapat memicu aktivitas industri, industri kelautan, dan kawasan terbangun lainnya. Diharapkan bahwa pengembangan di Kabupaten Demak juga mengedepankan *Infill Development*: membangun pada daerah yang aman dan tidak menggusur (terutama perumahan) dalam konteks pesisir.

Selain hal di atas, hasil kajian sektoral sebelumnya menunjukkan bahwa *Urban Sprawl* kota Demak sudah mencapai 7 km, perlu kota satelit pendukung dengan tematik masing-masing misalnya kota pendidikan di sisi barat Sport Center, dan kota jasa dan logistik di selatan mendekati terminal. Lahan tersisa di dalam radius <5 km dari inti kota terbatas, sebaiknya untuk alokasi perumahan skala menengah dan besar, sehingga kota tetap harmoni dan menyumbang pendapatan yang tinggi. Dengan adanya *exit tol* di radius 3 km, akan semakin mempercepat naiknya kebutuhan pembangunan perumahan di Kota Demak.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu. RTRW menjadi dasar bagi pengembangan wilayah dan penataan ruang yang berkelanjutan. Dalam dokumen RTRW juga merumuskan program yang sudah dijabarkan di masing-masing periode. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Demak adalah mewujudkan ruang wilayah daerah berbasis sektor pertanian dan industri yang unggul didukung sektor perdagangan jasa dan pariwisata berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam mendukung tujuan penataan ruang wilayah dirumuskan matriks indikasi program utama Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Tabel II.88
Indikasi Program RTRW PJM ke 4 Tahun 2026-2031

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
C	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG			
I	Perwujudan Pusat Kegiatan			
	a. Perwujudan sistem perkotaan dilakukan melalui program :			
	1. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Nasional			
	2. Program Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung	APBD	Dinas PUTARU
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan		APBD	- Bappeda Litbang

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	Lingkungan			- Dinas PUTARU
	- Penyusunan peraturan zonasi	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung	APBD	Dinas PUTARU
	- Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung	APBD	Dinas PUTARU
	- Pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya	- Kawasan Perkotaan Demak - Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung	APBD	Dinas PUTARU
	3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan	- IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	- Penyusunan peraturan zonasi	- IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	- Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	- IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	- Pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan dan pusat belanja	- IKK Gajah - IKK Dempet - IKK Guntur - IKK Sayung - IKK Karangtengah - IKK Bonang - IKK Dempet - IKK Gajah - IKK Karanganyar - IKK Mijen - IKK Kebonagung	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
	b. Perwujudan sistem perdesaan dilakukan melalui program: 1. Penyusunan perencanaan pembangunan kawasan perdesaan Pengembangan pusat pelayanan perdesaan	Seluruh Kabupaten	APBD	- Bappeda Litbang - Dinas PUTARU
II	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi			
2.1	Sistem Jaringan Transportasi Jalan			
	a. Program pengembangan sistem prasarana jalan			
	3. Peningkatan jalan kabupaten	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	4. Pengembangan dan peningkatan jalan lingkungan	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	di seluruh wilayah Kabupaten			
	5. Pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	b. Pengembangan prasarana angkutan umum:			
	3. Peningkatan terminal tipe C	- Kawasan Perkotaan Mranggen - Kawasan Perkotaan Wedung - Ibukota Kecamatan Wonosalam - Ibukota Kecamatan Gajah - Ibukota Kecamatan Karanganyar - Ibukota Kecamatan Mijen - Ibukota Kecamatan Bonang - Ibukota Kecamatan Sayung - Ibukota Kecamatan Karangtengah - Ibukota Kecamatan Guntur - Ibukota Kecamatan Dempet - Ibukota Kecamatan Karangawen - Ibukota Kecamatan Kebonagung	APBD	Dinas Perhubungan
	4. Pengembangan terminal angkutan barang	Kecamatan Sayung	APBD	Dinas Perhubungan
	c. Pengembangan sarana angkutan umum			
	1. Studi kelayakan sistem angkutan		APBD	Dinas Perhubungan
	2. Penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai		APBD	Dinas Perhubungan
	3. Penataan ulang dan pengembangan fungsi terminal serta fungsi pelayanan terminal		APBD	Dinas Perhubungan
2.2	Sistem Jaringan Transportasi Kereta Api			
	1. Peningkatan jalur perlintasan kereta api	- jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya; - jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya; - pengembangan kereta api regional Semarang – Kudus - Pati – Juwana – Rembang - Lasem – Jatirogo – Bojonegoro; dan pengembangan jaringan kereta api perkotaan Kedungsepur - Jalur Khusus	APBN Swasta	- Kementerian Perhubungan - Swasta
2.3	Sistem Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan			
	- Pembangunan dan peningkatan dermaga	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Perhubungan - Dinas pariwisata - Dinas Kelautan dan Perikanan
2.4	Jaringan Transportasi Laut			
	- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Perhubungan - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Peningkatan Pelabuhan Perikanan	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif	Seluruh Kabupaten	APBN APBD	- Kementerian ESDM - Dinas PUTARU
	- Pengaturan pembangunan SPBU dan SPBE	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU
V	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air			
	- Peningkatan pengelolaan DAS	DAS Jratun Seluna		
	- Normalisasi sungai dan saluran irigasi	Seluruh sungai dan 15 D.I	APBN APBD Prov APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
	- Pembangunan dan		APBN APBD Prov	- Kementerian PUPR - Dinas

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi	15 D.I	APBD	PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
	- Pembangunan embung	Kecamatan Karangawen Kecamatan Guntur Kecamatan Dempet Kecamatan Mijen Kecamatan Karanganyar Kecamatan Bonang Kecamatan Wedung	APBN APBD Prov APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
	- Pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam	Kecamatan Sayung Kecamatan Karangtengah Kecamatan Demak Kecamatan Bonang Kecamatan Wedung	APBD	- - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penetapan kawasan imbuhan air tanah untuk menjadi kawasan lindung	Seluruh Kabupaten	APBD	- - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penyusunan daya tampung sungai dan air permukaan	Seluruh Kabupaten	APBD	- - Dinas Lingkungan Hidup
	- Monitoring dan pengawasan terhadap buangan limbah industri dan rumah tangga untuk memastikan daya tampung sungai dalam status baik	Seluruh Kabupaten	APBD	- - - Dinas Lingkungan Hidup
VI	Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya			
	a. Sistem Persampahan			
	- Peningkatan dan pengembangan TPA	Seluruh Kabupaten	APBN APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Peningkatan dan pengembangan TPS dan/atau TPST	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Program pengelolaan sampah 3R	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Studi kelayakan manajemen pengelolaan sampah terpadu	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Kajian teknologi pemanfaatan energi dari sampah TPA	Seluruh Kabupaten	APBD	- - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pembangunan instalasi energi dari sampah di tingkat TPA	Seluruh Kabupaten	APBD	- - Dinas Lingkungan Hidup
	b. Sistem Jaringan Air Minum			
	- Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR)	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - PDAM
	- Pengembangan jaringan distribusi utama;	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - PDAM
	- Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas PUTARU - PDAM
	- Pembangunan reservoir	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD	- Dinas PUTARU - PDAM
	c. Sistem Jaringan Air Limbah			
	- Pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri	Kecamatan Sayung Kecamatan Karangtengah Kecamatan Mijen Kecamatan Mranggen Kecamatan Karangawen Ibukota Kecamatan Gajah Ibukota Kecamatan Karanganyar Ibukota Kecamatan Mijen Ibukota Kecamatan Bonang Ibukota Kecamatan Sayung Ibukota Kecamatan	APBD Swasta	- - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Swasta

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
		Karangtengah - Ibukota Kecamatan Guntur - Ibukota Kecamatan Dempet - Ibukota Kecamatan Karangawen - Ibukota Kecamatan Kebonagung		
	- Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat (sanitas) dan rumah tangga perkotaan	Seluruh Kawasan IKK	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	d. Sistem Jaringan Drainase			
	- Penyusunan masterplan drainase	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	- Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	- Normalisasi peningkatan saluran primer dan sekunder	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	- Normalisasi saluran sungai	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU
	- Memantapkan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan	Seluruh Kawasan Perkotaan	APBD	- Dinas PUTARU
	e. Sistem Evakuasi Bencana			
	- Pengembangan jalur evakuasi bencana	- Kecamatan Mranggen - Kecamatan Guntur - Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang - Kecamatan Wedung - Kecamatan Demak - Kecamatan Wonosalam - Kecamatan Karangawen - Kecamatan Karanganyar	APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
	- Pengembangan ruang evakuasi bencana		APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
D	PERWUJUDAN POLA RUANG			
I	Perwujudan Kawasan Lindung			
	a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	- Kecamatan Karangawen - Kecamatan Mranggen		
	- Pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	b. Kawasan perlindungan setempat	Seluruh kecamatan yang berada di kawasan perlindungan setempat		
	1. Arahan perlindungan sempadan sungai dan saluran dilakukan melalui program			
	- Penetapan sempadan sungai dan irigasi di kawasan perkotaan dan perdesaan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai dan irigasi		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penertiban bangunan diatas saluran irigasi		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Satpol PP

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	- Penghijauan		APBD	- - Dinas PUTARU - - Dinas Lingkungan Hidup
	2. Arahan perlindungan sempadan pantai dilakukan melalui program	- Kecamatan Sayung - Kecamatan Karangtengah - Kecamatan Bonang - Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Penetapan batas sempadan pantai		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengelolaan kawasan tanah timbul		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Penetapan batas kawasan pasang surut		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Penghijauan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	3. Arahan perlindungan sempadan embung			
	- Penetapan batas sempadan embung		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penertiban pemanfaatan ruang di sekitar embung		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengelolaan embung		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	4. Arahan perlindungan terhadap ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penetapan ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Pengelolaan ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	- Penertiban bangunan di sekitar ruang terbuka hijau		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup
	c. Perwujudan RTH			
	- Pengembangan taman lingkungan		APBD	- Dinas PUTARU
	- Pengembangan jalur hijau jalan dan pulau jalan		APBD	- Dinas PUTARU
	- Pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perkim Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	- Penghijauan makam		APBD	Dinas PUTARU
	- Pengembangan sabuk hijau untuk memisahkan antar kawasan yang rawan konflik fungsi		APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	d. Kawasan Ekosistem Mangrove			
	Arahan perlindungan kawasan ekosistem mangrove dilakukan melalui program :			
	- Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya		APBD	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	- Percepatan reboisasi kawasan cagar alam yang telah rusak		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan & Perikanan
	e. Kawasan Cagar Budaya			
	Arahan perlindungan cagar	Masjid Agung Demak		

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program	▪ Makam Sunan Kalijaga Kadilangu ▪ Cagar budaya lainnya yang ditetapkan Bupati		
	- Pelestarian bangunan cagar budaya		APBD	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
	- Penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga		APBD	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Dinas Pariwisata
	f. Kawasan Bencana Alam			
	1. Arahkan perlindungan kawasan rawan gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui program			
	- Pembangunan tanggul penahan abrasi	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Wedung	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Penghijauan tepi pantai		APBD	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas kelautan dan Perikanan
	2. Arahkan perlindungan kawasan rawan banjir dilakukan melalui program			
	- Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	▪ Kecamatan Mranggen ▪ Kecamatan Guntur ▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Mijen ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Kebonagung ▪ Kecamatan Dempet ▪ Kecamatan Gajah ▪ Kecamatan Wedung ▪ Kecamatan Demak ▪ Kecamatan Wonosalam ▪ Kecamatan Karangawen	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Pengembangan jalur ruang evakuasi		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan banjir		APBD	- BPBD
	3. Arahkan perlindungan kawasan rawan kekeringan dilakukan melalui program			
	- Pembangunan sumur dalam	▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Demak ▪ Kecamatan Dempet ▪ Kecamatan Gajah ▪ Kecamatan Guntur ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangawen ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Kebonagung ▪ Kecamatan Mijen ▪ Kecamatan Mranggen ▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Wedung ▪ Kecamatan Wonosalam	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Pengembangan bangunan penyimpan air		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	- Pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air		APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
				PUSDATARU Prov. Jawa tengah - Dinas PUTARU - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD
	4. Arahkan perlindungan kawasan rawan angin topan dilakukan melalui program			
	- Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya	▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Demak ▪ Kecamatan Dempet ▪ Kecamatan Gajah ▪ Kecamatan Guntur ▪ Kecamatan Karanganyar ▪ Kecamatan Karangawen ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Kebonagung ▪ Kecamatan Mijen ▪ Kecamatan Mranggen ▪ Kecamatan Sayung	APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
	- Pengembangan jalur ruang evakuasi		APBD	- Dinas PUTARU - BPBD
	- Melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat di kawasan rawan angin topan	▪ Kecamatan Wedung ▪ Kecamatan Wonosalam	APBD	- BPBD
	g. Kawasan Lindung Geologi			
	- Pengendalian kegiatan yang dapat menghalangi meresapnya air hujan ke kawasan resapan air tanah	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas PUTARU
	- Pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan plasma nutfah	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	- Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
II	Perwujudan Kawasan Budidaya			
	a. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi			
	1. Penetapan kawasan dan strategi penanganan Kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya	▪ Kecamatan Karangawen ▪ Kecamatan Mranggen	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	2. Pemberian bantuan bibit tanaman tahunan pada lahan yang berkelerengan 25-40% yang dikuasai masyarakat;	▪ Kecamatan Karangawen ▪ Kecamatan Mranggen	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	b. Perwujudan Kawasan Pertanian			
	1. Penetapan Kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;	Seluruh Kabupaten	APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	2. Pengembangan tanaman semusim produktif di kawasan pertanian hortikultura	Seluruh Kabupaten	APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	3. Peningkatan produksi tanaman perkebunan dan buah-buahan	Seluruh Kabupaten	APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	4. Pengembangan peternakan unggas, ternak kecil dan ternak besar	Seluruh Kabupaten	APBD Provinsi APBD	- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pertanian dan Pangan
	c. Perwujudan Kawasan Perikanan			
	1. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi penetapan zona penangkapan ikan		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2. Peningkatan tempat sandar perahu dan fasilitas TPI	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Bonang ▪ Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas Perhubungan - Dinas Kelautan dan Perikanan
	3. Pengembangan produksi perikanan tambak		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	5. Peningkatan budidaya		APBD	Dinas Kelautan dan

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	pengelolaan ikan air tawar			Perikanan
	6. Pengembangan UMKM pengolah hasil perikanan		APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Perwujudan Kawasan Pertambangan			
	e. Perwujudan Kawasan Industri			
	1. Mengarahkan kegiatan industri ke Kawasan industri	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
	2. Pengembangan industri berbasis pertanian (agroindustri)	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Pertanian dan Pangan
	3. Penetapan daya dukung dan tamping lingkungan hidup pada setiap Kawasan industri	Seluruh Kabupaten	APBD	- Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Lingkungan Hidup
	4. Penyediaan prasarana dan sarana Kawasan industri (termasuk penyediaan air untuk kepentingan industri)	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	5. Peningkatan kualitas SDM lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja	Seluruh Kabupaten	APBD	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	f. Perwujudan Kawasan Pariwisata			
	1. Pengembangan atraksi wisata	Kecamatan yang memiliki kawasan wisata	APBD	Dinas Pariwisata
	2. Pengembangan pusat informasi wisata	Kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kawasan wisata	APBD	- - Dinas Pariwisata kabupaten Demak
	4. Pengembangan destinasi wisata alam berbasis konservasi pada Kawasan lindung yang memiliki potensi wisata	Kecamatan yang memiliki potensi pengembangan kawasan wisata	APBD	Dinas Pariwisata
	g. Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan			
	1. Penyediaan Sarana dan prasarana permukiman perkotaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	2. Pembangunan dan pengembangan rumah susun	Kecamatan Tertentu	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	3. Mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	4. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan perkotaan	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	h. Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan			
	1. Mengembangkan Kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan tempat usaha pertanian.	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
	2. Pengembangan Kawasan perdesaan melalui: ➤ pembentukan PPL; dan pengembangan keterkaitan sosial ekonomi antara PPL dengan wilayah pelayanannya	Seluruh Kabupaten	APBD	- Bappeda Litbang
	3. Penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan Kawasan perdesaan berada di Kompleks Pelabuhan Morodemak	Seluruh Kabupaten	APBN APBD Provinsi APBD	- Kementerian PUPR - Dinas Perakim Prov. Jawa Tengah - Dinas PUTARU - Dinas Perkim
E	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS			

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
	a. Perwujudan Kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer yang melewati Kecamatan Sayung – Kecamatan Karangtengah – Kecamatan Demak - Kecamatan Gajah – Kecamatan Karanganyar:			
	- Pengaturan pengembangan pengendalian pemanfaatan ruang;	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Demak ▪ Kecamatan Gajah ▪ Kecamatan Karanganyar	APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang
	- Penyediaan fasilitas dan prasarana perkotaan		APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang
	- Pengembangan sektor ekonomi perkotaan baik formal dan informal dalam satu kesatuan pengembangan		APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang
	- Peningkatan pengelolaan kawasan peruntukan industri		APBD	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	b. Perwujudan Kawasan wisata pantai Surodadi berada di Kecamatan Sayung			
	- Pembangunan sarana tambat perahu/kapal	Kecamatan Sayung	APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengembangan kegiatan wisata bahari		APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pembangunan sarana pendukung wisata utama		APBD	- Dinas PUTARU - Bappeda Litbang - Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Perwujudan Kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak berada di Kecamatan Bonang			
	- Peningkatan akses menuju kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak dari sedimentasi		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Peningkatan fasilitas dan prasarana ke pelabuhan; dan		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Peningkatan sarana wisata di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak		APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Pariwisata - Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kawasan rawan abrasi dan rob pantai berada di Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, dan Kecamatan Bonang			
	- Pembangunan sarana penahan gelombang	▪ Kecamatan Sayung ▪ Kecamatan Karangtengah ▪ Kecamatan Bonang	APBD	- Dinas PUTARU - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Penghijauan kawasan pantai		APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Rehabilitasi tanah-tanah bekas terkena abrasi		APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kawasan rawan sedimentasi dan tanah timbul berada di Kecamatan Wedung			
	- Pendataan lokasi dan luas tanah timbul	Kecamatan Wedung	APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengelolaan tanah timbul bersama masyarakat		APBD	- Dinas PUTARU - DLH - Dinas Kelautan dan Perikanan

2.3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Demak

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai permasalahan pembangunan, kemudian isu baik internasional, nasional maupun regional/daerah dapat diidentifikasi isu strategis untuk Kabupaten Demak yang di sajikan pada tabel dan dijabarkan masing-masing isu sebagai berikut:

Tabel II.89
Tabel Identifikasi Isu Strategis Kabupaten Demak

PERMASALAHAN	ISU KLHS DEMAK	ISU NASIONAL	ISU PROVINSI JATENG	ISU STRATEGIS DEMAK
Tingginya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak	Tingkat kemiskinan yang masih tinggi	Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Penurunan tingkat kemiskinan	Kemiskinan dan kesempatan kerja
Rendahnya daya saing ekonomi daerah		Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Peningkatan nilai ekonomi sektor unggulan daerah
			Ketahanan pangan yang berkelanjutan	Penumpu pangan di jawa tengah
		Rendahnya Produktivitas		
Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat	Kerusakan lingkungan hidup dan resiko bencana	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana	Kerusakan lingkungan Hidup
				Penanganan Rob dan bencana
Pemenuhan infrastruktur yang belum merata	Pemenuhan kebutuhan air minum dan air baku belum tercukupi	Resiliensi dan Prospek Perekonomian yang Positif	Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan Kualitas Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan
Belum optimalnya implementasi Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Demak		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata kelola pemerintahan yang dinamis	Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis
Masih rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia	Masih rendahnya daya saing dan	Potensi Sumber Daya Manusia dan Modal Manusia	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing

PERMASALAHAN	ISU KLHS DEMAK	ISU NASIONAL	ISU PROVINSI JATENG	ISU STRATEGIS DEMAK
	kualitas sumber daya manusia Masih rendahnya kualitas kesehatan Masyarakat		Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat	

Berdasarkan identifikasi isu strategis yang tertuang diatas, berikut penjelasan dan penjabarannya.

1) Sumber Daya Manusia yang Berdaya saing

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung percepatan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Demak. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, transformasi digital, serta dinamika pasar kerja yang terus berkembang, Pemerintah Kabupaten Demak menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas dan kapasitas SDM. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan formal maupun nonformal, pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar, serta pengembangan kompetensi melalui sertifikasi profesi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan institusi pendidikan terus diperkuat guna menciptakan sinergi dalam mencetak tenaga kerja yang adaptif, inovatif, serta memiliki etos kerja dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman.

Di samping penguatan aspek teknis dan keahlian, pembangunan SDM di Kabupaten Demak juga diarahkan untuk membentuk karakter yang unggul melalui penanaman nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan semangat kewirausahaan. Hal ini menjadi fondasi dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya kompeten secara individu, tetapi juga mampu berkontribusi secara kolektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Program-program pemberdayaan pemuda, peningkatan peran perempuan dalam dunia kerja, serta penguatan peran komunitas lokal menjadi bagian integral dalam strategi peningkatan daya saing SDM. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang terintegrasi, Kabupaten Demak optimis mampu mencetak SDM unggul yang menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2) Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis

Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis di Kabupaten Demak merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Demak menyadari bahwa tata kelola pemerintahan yang

efektif tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi semata, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, dinamika sosial, dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai langkah strategis telah ditempuh, mulai dari penyederhanaan proses birokrasi, digitalisasi layanan publik, hingga peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat guna menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan terpercaya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Demak juga berkomitmen membangun kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari tata kelola yang inklusif dan adaptif. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, pemerintah daerah berupaya menciptakan ekosistem pembangunan yang saling memperkuat. Dinamika tata kelola ini diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi pembangunan daerah, pemanfaatan data terintegrasi untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*), serta penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Demak diharapkan mampu menjadi daerah yang tangguh dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin prima dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Peningkatan nilai ekonomi sektor unggulan daerah

Peningkatan nilai ekonomi sektor unggulan daerah di Kabupaten Demak merupakan salah satu poin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Demak memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, yang secara historis telah menjadi pilar perekonomian daerah. Pemerintah daerah berupaya mengakselerasi nilai tambah dari sektor-sektor ini melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas, serta penguatan kapasitas kelembagaan pelaku usaha. Dalam sektor pertanian misalnya, dilakukan optimalisasi lahan melalui penerapan teknologi pertanian presisi dan penyediaan infrastruktur irigasi yang memadai. Sementara itu, sektor perikanan diperkuat melalui pengembangan budidaya perikanan air tawar dan pesisir, serta modernisasi sarana distribusi hasil tangkap agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dengan kualitas yang terjaga.

Lebih lanjut, dalam upaya memperkuat daya saing sektor unggulan, Pemerintah Kabupaten Demak juga mendorong integrasi hulu-hilir melalui pengembangan kawasan industri berbasis potensi lokal dan dukungan

ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas inkubasi bisnis, kemitraan dengan sektor swasta, serta perluasan akses pembiayaan produktif. Selain itu, pelatihan vokasional dan pendampingan berkelanjutan bagi pelaku usaha lokal turut menjadi fokus agar sumber daya manusia dapat bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, membuka lapangan kerja baru, serta menciptakan struktur ekonomi yang lebih kokoh dan adaptif terhadap dinamika global. Dengan demikian, peningkatan nilai ekonomi sektor unggulan tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Demak secara menyeluruh.

4) Penumpu pangan di Jawa Tengah

Kabupaten Demak memiliki peran strategis sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Letaknya yang berada di wilayah pesisir utara dengan bentang alam berupa dataran rendah yang subur menjadikan Demak sangat potensial dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan. Luas lahan sawah yang mencapai puluhan ribu hektare menjadi modal utama dalam menghasilkan komoditas strategis seperti padi dan jagung dalam jumlah yang signifikan. Dengan produktivitas padi yang tinggi dan sistem irigasi teknis yang relatif baik, Demak secara konsisten menjadi salah satu kontributor terbesar produksi beras di Jawa Tengah. Ketersediaan tenaga kerja pertanian yang melimpah dan budaya agraris yang kuat turut memperkuat posisi Kabupaten Demak sebagai daerah lumbung pangan yang andal dan berkelanjutan.

Selain potensi lahannya, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah dalam bentuk program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta peningkatan kapasitas petani telah mempercepat transformasi sektor pangan di Demak. Upaya ini didukung oleh penguatan infrastruktur pertanian seperti jalan usaha tani, gudang penyimpanan hasil panen, serta jaringan distribusi yang efisien menuju pasar regional maupun nasional. Tidak hanya fokus pada produksi, Pemerintah Kabupaten Demak juga mendorong hilirisasi produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan berbasis pangan lokal, yang pada gilirannya meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani. Strategi hilirisasi tersebut akan difokuskan pada peningkatan industri pengolahan pangan dengan memperhatikan kualitas, diversifikasi produk, pemasaran, kerjasama dan juga implementasi teknologi.

Dengan posisi geografis yang strategis, komitmen pemerintah daerah, dan sinergi antar pemangku kepentingan, Kabupaten Demak terus memperkuat perannya sebagai penunpu utama ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

5) Inisiasi Ekonomi hijau

Kabupaten Demak, sebagai salah satu daerah pesisir yang kaya akan sumber daya alam dan potensi pertanian, mulai menunjukkan komitmen kuat dalam menginisiasi pendekatan Ekonomi Hijau sebagai arah pembangunan masa depan yang berkelanjutan. Langkah ini ditandai dengan integrasi prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam berbagai sektor pembangunan, terutama sektor pertanian, perikanan, dan energi. Pemerintah Kabupaten Demak menyadari bahwa pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hanya akan menciptakan kerentanan jangka panjang, baik terhadap perubahan iklim, bencana alam, maupun menurunnya produktivitas lahan. Oleh karena itu, melalui pengembangan pertanian organik, pengelolaan kawasan pesisir berbasis ekosistem, serta pemanfaatan energi terbarukan, Demak mulai menggeser paradigma pembangunan dari eksploitasi menuju optimalisasi berkelanjutan yang menjunjung nilai konservasi.

Inisiasi Ekonomi Hijau di Kabupaten Demak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, serta lembaga pendidikan dan riset. Kolaborasi lintas sektor ini mendorong terciptanya inovasi lokal yang adaptif terhadap tantangan lingkungan, seperti teknologi irigasi hemat air, budi daya ikan ramah lingkungan, hingga pengolahan sampah menjadi energi atau kompos. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai fondasi utama. Dengan mengedepankan pendekatan holistik dan inklusif, Kabupaten Demak diharapkan mampu menjadi percontohan bagi daerah lain dalam mengimplementasikan Ekonomi Hijau, sekaligus memperkuat ketahanan wilayah terhadap tekanan ekologis maupun sosial di masa mendatang.

Sebagai bagian integral dari inisiasi Ekonomi Hijau, Kabupaten Demak juga mulai memperkuat upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara terpadu dan berbasis potensi lokal. Penurunan emisi ini dilakukan melalui serangkaian langkah yang saling terkait, seperti penerapan praktik pertanian rendah emisi, pengurangan penggunaan bahan bakar fosil melalui pemanfaatan energi surya dan biogas, serta rehabilitasi kawasan mangrove yang berperan sebagai penyerap karbon alami di wilayah pesisir. Selain itu, pengelolaan

sampah berbasis masyarakat dan peningkatan efisiensi energi pada sektor rumah tangga dan industri kecil turut mendukung tercapainya target pengurangan emisi. Integrasi strategi ini tidak hanya mendukung komitmen nasional terhadap Perjanjian Paris, tetapi juga memperkuat daya adaptif Demak terhadap risiko perubahan iklim, khususnya banjir rob dan abrasi yang semakin meningkat. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam penurunan emisi GRK menjadi bukti nyata bahwa transformasi menuju pembangunan rendah karbon di Demak berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6) Pemenuhan Kualitas Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi kunci dalam memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Demak. Sebagai bagian dari wilayah strategis di Jawa Tengah, Demak mendapatkan keuntungan dari pembangunan infrastruktur utama seperti Jalan Tol Semarang–Demak dan Jalan Tol Demak–Kudus–Pati–Rembang–Tuban yang memperkuat konektivitas antarwilayah dan mempercepat distribusi barang dan jasa. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan sarana transportasi umum di tingkat kabupaten dan desa juga terus diupayakan untuk memastikan akses yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok disabilitas dan masyarakat di daerah terpencil.

Selain pengembangan infrastruktur transportasi, pembangunan sistem drainase, penyediaan air bersih, dan fasilitas sanitasi yang layak juga menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Demak terus berupaya meningkatkan pengelolaan tata ruang dan memperkuat regulasi terkait pembangunan infrastruktur untuk memastikan bahwa pengembangan wilayah berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Dengan pengembangan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan, Kabupaten Demak diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) Kemiskinan dan Kesempatan Kerja

Pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja menjadi tantangan utama dalam pembangunan Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak terus mendorong pengembangan sektor ekonomi lokal, termasuk sektor pertanian, perikanan, dan industri pengolahan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Program padat karya dan pemberdayaan masyarakat berbasis desa terus diperluas untuk memberikan kesempatan kerja bagi kelompok rentan dan

masyarakat miskin. Selain itu, pengembangan keterampilan melalui pelatihan kerja, bimbingan usaha, dan dukungan modal usaha menjadi strategi utama dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.

Pemerintah Kabupaten Demak juga memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk memperluas akses pembiayaan dan mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Peningkatan kesempatan kerja di sektor formal dan informal diharapkan dapat menekan angka pengangguran dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak. Dengan strategi tersebut, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Demak.

8) Kerusakan lingkungan Hidup

Kabupaten Demak, yang secara geografis terletak di kawasan pesisir utara Provinsi Jawa Tengah, tengah menghadapi persoalan serius terkait kerusakan lingkungan hidup yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Salah satu isu utama yang mencuat adalah abrasi pantai yang terjadi secara masif, terutama di wilayah pesisir utara seperti Kecamatan Sayung dan Wedung. Fenomena ini telah menggerus daratan hingga puluhan meter setiap tahunnya, menyebabkan hilangnya lahan pertanian, pemukiman, serta infrastruktur publik. Abrasi diperparah oleh degradasi ekosistem mangrove yang seharusnya berfungsi sebagai benteng alami terhadap gelombang laut. Selain itu, aktivitas penambangan pasir ilegal dan alih fungsi lahan secara tidak terkendali turut mempercepat proses kerusakan lingkungan. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi yang berkelanjutan dari pihak terkait.

Di sisi lain, pencemaran lingkungan akibat limbah domestik dan industri juga semakin mengancam kualitas hidup masyarakat Demak. Sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini, seperti Sungai Dombo dan Sungai Tuntang, mengalami penurunan kualitas air akibat pembuangan limbah rumah tangga serta limbah dari sentra industri kecil yang tidak memiliki instalasi pengolahan limbah yang memadai. Hal ini menyebabkan terganggunya ekosistem air, matinya biota sungai, serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan masyarakat. Kerusakan lingkungan ini tidak hanya berdampak pada sektor ekologi, tetapi juga mengancam keberlanjutan sosial dan ekonomi, terutama bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam

merumuskan kebijakan perlindungan lingkungan yang bersifat inklusif dan berorientasi jangka panjang.

9) Penanganan Rob dan bencana

Penanganan rob dan bencana di Kabupaten Demak menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah, mengingat wilayah ini termasuk dalam kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim dan kenaikan muka air laut. Rob yang terjadi secara berkala telah mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat, merusak infrastruktur, serta mengancam keberlanjutan kawasan permukiman dan pertanian. Pemerintah Kabupaten Demak, melalui koordinasi lintas sektor dengan instansi vertikal dan pemerintah provinsi, telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi, seperti pembangunan tanggul laut, rehabilitasi dan peninggian jalan yang terdampak, serta revitalisasi drainase kawasan rawan banjir. Selain itu, pendekatan berbasis ekosistem juga terus digalakkan, salah satunya melalui penanaman mangrove di sepanjang garis pantai sebagai upaya perlindungan alami yang berkelanjutan.

Dalam aspek penanggulangan bencana secara umum, Kabupaten Demak telah mengintegrasikan kebijakan pengurangan risiko bencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun tahunan. Penanggulangan bencana daerah berperan penting dalam membangun sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan, serta memperkuat jejaring kemitraan dengan lembaga kemanusiaan dan komunitas lokal. Pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan teknologi informasi untuk pemantauan kondisi cuaca dan air pasang, serta memperkuat sistem logistik bencana guna mempercepat respon saat terjadi keadaan darurat.

Sebagai pelengkap dari strategi tersebut, upaya penyelamatan ekosistem pesisir dari ancaman bencana hidrometeorologi menjadi langkah yang tak terpisahkan. Pemerintah Kabupaten Demak mendorong rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak, seperti pemulihan hutan mangrove, pemanfaatan sabuk hijau alami, serta pengendalian alih fungsi lahan yang tidak ramah lingkungan. Pendekatan ini dipadukan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian dan adaptasi berbasis ekosistem, sehingga tercipta ketahanan lingkungan yang mendukung perlindungan jangka panjang dari dampak banjir rob, abrasi, dan badai tropis. Dengan demikian, Demak terus berupaya membangun ketangguhan wilayah secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, sosial, maupun ekologis.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

Kabupaten Demak sebagai salah satu daerah di Pesisir Utara Pulau Jawa memiliki berbagai permasalahan dan isu strategis. Untuk menjawab hal tersebut, dibutuhkan suatu upaya terarah dan terukur yang dituangkan dalam visi dan misi pembangunan daerah. Visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025–2029 merupakan kerangka strategis untuk mengelola dan memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Demak.

Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam keberlangsungan pembangunan bagi daerah di sekitarnya yang terintegrasi dalam wilayah KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi). Dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah, termasuk potensi pertanian, perikanan, dan pariwisata yang memberikan landasan kuat dalam mendukung pembangunan daerah menjadi peluang bagi Kabupaten Demak untuk mengoptimalkan pemerataan kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Selanjutnya dalam mengupayakan pencapaian visi dan misi maka dirumuskan tujuan dan sasaran untuk memperkuat dan mempertajam apa yang ingin dicapai dalam waktu jangka menengah. Melalui pendekatan ini, RPJMD berperan sebagai peta jalan yang dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

3.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Visi merupakan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, di mana visi dalam RPJMD merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yaitu dr. Hj. Eisti’annah, S.E. dan Muhammad Badruddin, M.Pd.

Visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

“DEMAK SEMAKIN BERMARTABAT, MAJU, DAN SEJAHTERA”

Dalam visi ini terkandung tiga rumusan pokok visi yakni “*Bermartabat, Maju, Sejahtera*”. Kata *Semakin* merupakan penekanan untuk menjadi lebih baik dari kondisi yang telah diwujudkan Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya.

Ketiga rumusan pokok visi merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun filosofi dan penjabaran makna pokok visi RPJMD Kabupaten Demak dijelaskan sebagai berikut.

1. **Bermartabat**, mencerminkan upaya membangun Kabupaten Demak yang dihormati dan dihargai, baik oleh masyarakatnya sendiri maupun oleh daerah lain. Martabat tersebut tercermin dalam kualitas hidup warga, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap nilai-nilai budaya dan agama. Bermartabat juga berarti menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, integritas, dan kehormatan dalam seluruh aspek kehidupan.
2. **Maju**, menandakan adanya pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Kemajuan ini meliputi penerapan teknologi, peningkatan kualitas infrastruktur dan ekonomi, serta pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata.
3. **Sejahtera**, menekankan tercapainya kesejahteraan sosial yang adil, merata, dan berkelanjutan. Seluruh lapisan masyarakat berhak memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi, serta dapat menikmati lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan layak.

Misi adalah langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu menggambarkan secara jelas visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dengan memerhatikan visi serta mempertimbangkan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka misi pembangunan sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak

Misi ini dilaksanakan terutama untuk mewujudkan pokok visi “Semakin Bermartabat”. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang berdaya saing dimaknai dengan kualitas yang sehat, cerdas, produktivitas tinggi, dan berwawasan luas. Sumber daya manusia yang berakhlak diwujudkan melalui pembangunan kualitas karakter manusia yang religius dan berbudaya.

MISI 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas

Perwujudan masyarakat yang “Semakin Bermartabat” diupayakan pula melalui keteladanan kepemimpinan dan penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas akan melahirkan kepercayaan

publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pembangunan.

MISI 3: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal

Pokok visi “Semakin Maju” yang ditandai dengan peningkatan daya saing daerah, tidak terlepas dari peningkatan daya saing ekonomi. Dalam menguatkan perekonomian daerah, perlu didorong pemanfaatan potensi-potensi lokal sebagai motor penggerak perekonomian. Potensi lokal seperti pertanian, perikanan, industri, UMKM, dan pariwisata perlu diberikan dukungan teknologi, sarana produksi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelolanya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya tidak mengorbankan aspek sosial dan lingkungan sehingga dalam pelaksanaannya harus tetap menjaga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

“Semakin Maju” dalam hal perekonomian harus ditopang dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas. Kemajuan harus dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Demak tanpa ada yang tertinggal. Akses terhadap infrastruktur berkualitas tidak hanya bermakna merata secara kewilayahan tetapi juga merata secara kelas sosial dan ekonomi.

MISI 5: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan pokok visi “Semakin Sejahtera”, diperlukan penguatan ketahanan sosial dan lingkungan. Ketahanan sosial mencakup perlindungan kesejahteraan sosial terutama kepada golongan marginal, ketahanan pangan, ketahanan keluarga dan kemandirian desa. Sejahtera harus dapat dinikmati dalam kondisi lingkungan yang aman, nyaman, layak, dan berkelanjutan. Keamanan lingkungan diperoleh dengan menjaga kondusivitas wilayah, menjaga nilai-nilai toleransi dan kebangsaan. Lingkungan yang nyaman, layak, dan berkelanjutan diperoleh dengan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Penyusunan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak bukan hanya dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Demak semata, namun juga sebagai langkah strategis yang mendukung pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena itu, 5 misi pembangunan Kabupaten Demak diselaraskan dengan 8 misi pembangunan nasional yang dikenal dengan asti cita dan misi RPJMD provinsi Jawa tengah. Keselarasan misi

Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar III.1
Keselarasan misi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional



TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun yang selaras dengan RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan: (1) kalimat kondisi; (2) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; (3) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; (4) bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan *ultimate outcome*; dan (5) menurunkan kinerja sampai diperoleh program prioritas.

Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 maka dirumuskan tujuan dan indikator beserta target sebagai berikut:

Tabel III.1

Rumusan Tujuan dan Indikator Tujuan RPJMD Tahun 2025-2030

VISI: DEMAK SEMAKIN BERMARTABAT, MAJU, DAN SEJAHTERA						
POKOK VISI	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET PEMBANGUNAN	
					2025	2030
Mewujudkan Demak “Semakin Bermartabat”	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak	Tujuan 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	75,42	79,21
	Misi 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas	Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola pemerintah yang adaptif dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	87,00	89,50
			Indeks Integritas Nasional	Angka	78,00	80,95
Mewujudkan Demak “Semakin Maju”	Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal	Tujuan 3: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,85-5,32	5,10-6,00
	Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan 4: Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	Angka	85,44	89,72
Mewujudkan Demak “Semakin Sejahtera”	Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Tujuan 5: Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman	Tingkat kemiskinan	Angka	11,64-10,39	8,40-7,79
			Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,50	7,00
			Kontribusi Penurunan emisi GRK Kumulatif	Ton Co2eq	1.399.991	4.408.439,5

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kabupaten Demak dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Merujuk dari berbagai penjelasan di atas dan berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah maka sasaran beserta indikator pada tiap tujuan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter

Membangun Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter merupakan tujuan utama dari pembangunan Kabupaten Demak untuk mewujudkan Demak yang semakin bermartabat. Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia dan akan dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat; dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – Rata Lama Sekolah (RLS).

Sasaran 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dengan indikator Usia Harapan Hidup.

Sasaran 3 Meningkatnya pemajuan kebudayaan; dengan indikator Nilai Kinerja Kebudayaan.

2. Tujuan kedua, Memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas

Visi Pembangunan daerah akan semakin mudah dicapai dengan memperkuat tata kelola pemerintahan. Perkembangan yang semakin cepat membutuhkan birokrasi pemerintahan yang adaptif dan berintegritas untuk memaksimalkan potensi daerah. Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Integritas Nasional. Tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 4 Meningkatnya pengendalian internal pemerintah; dengan indikator Level Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sasaran 5 Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis digital; dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Sasaran 7 Meningkatnya kinerja aparatur; dengan indikator Indeks Sistem Merit.

3. Tujuan ketiga, Meningkatnya perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Perekonomian daerah yang mandiri merupakan modal untuk mempercepat pembangunan. Hal ini sesuai dengan visi Kabupaten Demak Semakin Maju sehingga Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen untuk mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur

melalui Indikator Pertumbuhan Ekonomi. Dalam rangka memaksimalkan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 8 Meningkatnya sektor unggulan daerah yang berkelanjutan; dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum).

Sasaran 9 Meningkatnya investasi daerah; dengan indikator Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Sasaran 10 Meningkatnya pendapatan masyarakat; dengan indikator PDRB per Kapita.

4. Tujuan keempat, Mewujudkan infrastruktur berkualitas, inklusif dan berkelanjutan

Visi pembangunan Demak Semakin Maju didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menopang dinamika sosial dan perekonomian masyarakat Kabupaten Demak secara inklusif dan optimal. Tujuan ini diukur melalui Indikator Indeks Layanan Infrastruktur Daerah. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 11 Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata; dengan indikator Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah.

5. Tujuan kelima, Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman

Visi Demak Semakin Sejahtera memiliki arti memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat didukung dengan pengentasan kemiskinan serta pembangunan lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyaman digambarkan dengan lingkungan yang kondusif serta tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim. Tujuan ini diukur melalui Indikator Indeks Gini, Indeks Harmoni Indonesia, dan Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Demak, tujuan ini dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

Sasaran 12 Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas; dengan indikator Tingkat Kemiskinan;

Sasaran 13 Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang; dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).



- Sasaran 14** Meningkatnya kondusivitas wilayah; dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) yang Dapat Diselesaikan dan Angka Kejadian Konflik Sosial.
- Sasaran 15** Meningkatnya kemandirian desa; dengan indikator Indeks Desa.
- Sasaran 16** Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.
- Sasaran 17** Menurunnya dampak risiko bencana; dengan indikator Indeks Risiko Bencana;

Dengan rumusan tujuan, sasaran dan indikator di atas maka keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran beserta targetnya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.2
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2030

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PEMBANGUNAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: DEMAK SEMAKIN BERMARTABAT, MAJU, DAN SEJAHTERA MISI 1: MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MISI 2: MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERINTEGRITAS MISI 3: MENGEMBANGKAN EKONOMI DAERAH YANG BERKELANJUTAN DAN BERBASIS POTENSI LOKAL	Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,57	75,42	75,94	76,60	77,54	78,72	79,21
		Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,36	14,00	14,17	14,27	14,37	14,47	14,57
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,28	8,34	8,48	8,78	9,28	9,91	10,04
		Sasaran 2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,79	75,91	76,08	76,3	76,59	77,11	77,43
			Sasaran 3 Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Nilai Kinerja Kebudayaan	Angka	39,08	39,61	40,49	41,37	42,25	43,13
	Tujuan 2. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang adaptif dan berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,58	87,00	87,50	88,80	89,00	89,30	89,50
			Indeks Integritas Nasional	Angka	77,39	78,00	78,58	79,17	79,76	80,36	80,95
		Sasaran 4 Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Angka	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22	3,27	3,32

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PEMBANGUNAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 4: MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MISI 5: MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN		Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,48	88,60	88,65	88,70	88,75	88,80	88,85
			Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,47	4,52	4,60	4,63	4,65	4,70	4,75
		Sasaran 6 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Angka	69,10	69,20	70,00	70,30	70,50	70,70	71,00
			Nilai IPKD	Angka	82,53	82,60	82,70	82,80	82,90	83,00	83,10
		Sasaran 7 Meningkatnya Kinerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Angka	0,705	0,708	0,713	0,738	0,775	0,810	0,825
	Tujuan 3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	4,85-5,32	5,10-6,00	5,10-7,10	5,10-7,80	5,10-8,08	5,10-8,21
		Sasaran 8 Meningkatnya sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum)	%	3,72	3,76	3,80	3,86	3,91	3,99	4,07
		Sasaran 9 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto)	%	7,10	7,11	7,12	7,13	7,14	7,15	7,16

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PEMBANGUNAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 10 Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	Juta Rp/ Tahun	28,30	29,58-29,99	31,77-32,45	34,11-35,10	36,63-37,97	39,34-41,08	42,57-44,77
	Tujuan 4. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan		Indeks Layanan Infrastruktur daerah	Angka	86,92	85,44	86,73	87,48	88,23	88,98	89,72
		Sasaran 11 Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata	Indeks kinerja infrastruktur daerah	Angka	34,83	36,54	39,59	41,96	43,34	46,05	46,76
	Tujuan 5. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman		Tingkat Kemiskinan	%	11,89	11,64-10,39	11,38-10,04	10,56-9,35	9,74-8,83	8,92-8,31	8,40-7,79
			Indeks Harmoni Indonesia	Angka	NA	6,95	6,98	7,00	7,02	7,04	7,07
			Kontribusi Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton Co2eq	102.345,16	1.399.991	2.001.681	2.603.370	3.205.060	3.806.750	4.408.440
		Sasaran 12 Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas	Indeks Gini	Angka	0,314	0,264-0,292	0,299-0,307	0,297-0,306	0,296-0,305	0,294-0,304	0,293-0,303
		Sasaran 13 Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,32	65,08-65,11	65,85-65,90	66,61-66,68	67,38-67,47	68,14-68,26	68,91-69,04

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE	TARGET PEMBANGUNAN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Sasaran 14 Meningkatnya konduktivitas wilayah	Angka Kejadian Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
			Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
		Sasaran 15 Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	Angka	0,7458	0,7533	0,7608	0,7684	0,7761	0,7838	0,7917
		Sasaran 16 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	56,26	72,60	72,64	72,69	72,73	72,78	72,82
		Sasaran 17 Menurunnya dampak risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Angka	91,76	89,03- 87,77	87,90- 86,11	86,76- 84,45	85,63- 82,79	84,49- 81,13	83,36- 79,47



Memahami bahwa Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki indikator tujuan dan sasaran jangka menengah yang harus didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Maka hal ini menjadi elemen krusial dalam mencapai target pembangunan yang terintegrasi dan efektif. RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang menjadi pedoman utama bagi seluruh sektor pembangunan di tingkat daerah. Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD diturunkan secara spesifik ke dalam rencana pembangunan perangkat daerah agar setiap Perangkat Daerah (PD) memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Hal ini menciptakan kesinambungan antara kebijakan strategis daerah dan implementasinya di tingkat teknis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang terukur. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap sasaran perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Indikator kinerja di tingkat perangkat daerah harus selaras dengan indikator RPJMD agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan berjalan terarah dan terukur.

Tabel III.3
Hubungan Tujuan dan Sasaran Daerah dengan
Perangkat Daerah Kabupaten Demak

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Demak Semakin Bermartabat	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan Institusional	Skor Kemampuan Literasi SD, Skor Kemampuan Numerasi SD, Skor Kemampuan Literasi SMP, Skor Kemampuan Numerasi SMP	Terwujudnya Aksesibilitas Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7-12 tahun, APM usia 13-15 tahun,	DINDIKBUD
						Meningkatnya Mutu Pembelajaran	Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B		
					Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	DINPORA
						Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti	Meningkatnya prestasi olah raga	Jumlah perolehan medali di tingkat provinsi, nasional, dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti	



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Meningkatkan budaya literasi di masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya peran perpustakaan daerah dalam mewujudkan budaya gemar membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	DINPERPUSAR
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Menurunnya angka kematian dan kesakitan	1. Angka Kematian Bayi (AKB), 2. Jumlah Kasus Kematian Ibu, 3. Prevalensi <i>Stunting</i> , 4. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) 5. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	DINKESDA
			Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Nilai Kinerja Kebudayaan	Memajukan kebudayaan daerah	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Melestarikan kebudayaan daerah	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	DINDIKBUD



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Meningkatkan Pengendalian Internal Pemerintah	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	INSPEKTORAT DAERAH
							Meningkatnya Kualitas Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola layanan digital	Indeks SPBE/Indeks Digitalisasi Pemerintah	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	DINKOMINFO
							Meningkatnya kualitas layanan sistem elektronik	Indeks Tata Kelola SPBE	
					Meningkatkan inovasi daerah	Kapabilitas inovasi	Menguatnya iklim inovasi	Indeks <i>Innovation Government Award</i>	BAPPERIDA
					Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Pelayanan Publik PD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	DINDUKCAPIL
							Meningkatnya kualitas layanan administrasi catatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	
					Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik PD	Meningkatnya responsivitas pelayanan publik	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	KECAMATAN



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Meningkatkan tata kelola kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya tata kelola kearsipan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai pengawasan kearsipan >80	DINPERPUSAR
					Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan bencana kebakaran	Persentase ketepatan Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) penanganan kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran	Tingkat tindak lanjut pengaduan laporan kejadian kebakaran	SATPOL PP
					Meningkatkan kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Pelayanan Publik Set DPRD	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	SET DPRD
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	SAKIP, IPKD	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	BAPPERIDA
							Meningkatnya pemanfaatan hasil riset	Persentase pemanfaatan hasil riset untuk perencanaan	



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Terpenuhinya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	BPKPAD
								Persentase penatausahaan keuangan sesuai regulasi	
								Laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	
								Indeks Pengelolaan Aset Daerah	
							Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat otonomi fiskal	
					Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Rata-rata capaian IKU Perangkat Daerah urusan pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	SETDA

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Meningkatnya kualitas kebijakan perekonomian	Rata-rata capaian IKU Perangkat Daerah urusan perekonomian	
							Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi umum	Rata-rata capaian IKU Perangkat Daerah urusan administrasi umum	
			Meningkatnya Kinerja Aparatur	Indeks Sistem Merit	Meningkatkan Kompetensi Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	Meningkatnya kualitas Aparatur	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	BKPSDM
							Meningkatnya pengembangan karier aparatur	Persentase ASN yang sesuai dengan kompetensinya	



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Demak Semakin Maju	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum)	Meningkatkan perekonomian sektor pertanian	Pertumbuhan Ekonomi Subkategori Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Jasa Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan	Rata-rata pertumbuhan Produksi komoditas strategis Pertanian, Rata-rata pertumbuhan produksi komoditas strategis Perkebunan, Rata-rata pertumbuhan produksi komoditas strategis Peternakan	DINPERTAN PANGAN
					Meningkatkan perekonomian sektor perikanan	Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	DINLUTKAN
							Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan	
					Meningkatkan perekonomian sektor perdagangan,	Pertumbuhan Ekonomi Kategori perdagangan	Meningkatnya perekonomian sektor perdagangan	Kontribusi kategori perdagangan dalam PDRB	DINDAGKOP UMKM



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					koperasi, dan UMKM		Meningkatnya perekonomian sektor koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	
							Meningkatnya perekonomian sektor UMKM	Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM	
					Meningkatkan perekonomian sektor industri	Pertumbuhan Ekonomi Kategori industri	Meningkatnya Industri Kecil Menengah (IKM)	Pertumbuhan Jumlah IKM	DINNAKERIND
					Meningkatkan perekonomian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah	Rata-rata pengeluaran wisatawan	DINPARTA
							Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	
			Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan PMTB	Meningkatkan investasi daerah	Pertumbuhan PMTB	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	DPMPTSP
							Meningkatnya pelayanan kemudahan investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perizinan Penanaman Modal	
			Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	Mengurangi pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja	Rasio kesempatan kerja	DINNAKERIND



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
					Meningkatkan penghidupan yang layak bagi pekerja	Persentase pelaku usaha yang menerapkan UMK	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	
	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur daerah	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata	indeks kinerja infrastruktur daerah	Meningkatkan pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase penurunan kawasan permukiman kumuh	DINPERKIM
							Meningkatnya pertumbuhan rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak	Persentase peningkatan jumlah rumah layak huni	
					Meningkatkan kualitas layanan jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan kewenangan kabupaten	Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	DINPUTARU
					Meningkatkan kualitas layanan Sumber Daya Air	Indeks kinerja sumber daya air	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks kinerja sistem irigasi Kewenangan Kabupaten	DINPUTARU
								Luas wilayah rawan banjir yang tertangani	
							Meningkatnya daya tampung drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman	
								Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum	
					Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	DINPUTARU
							Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	Rasio bangunan berizin	
							Meningkatnya kualitas pengembangan jasa konstruksi	Persentase partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan	
					Meningkatkan konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas angkutan jalan	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Kinerja lalu lintas kabupaten	DINHUB

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
Demak Semakin Sejahtera	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman	Tingkat kemiskinan, Indeks harmoni indonesia, Kontribusi Penurunan emisi GRK Kumulatif	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas	Indeks gini	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang Mandiri Memenuhi Kebutuhan Dasarnya	Meningkatnya Layanan PPKS	Persentase PPKS yang Terakses Layanan Sosial Dasar	DINSOS P2PA
					Meningkatkan ketahanan Pangan	Indeks ketahanan pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan berkualitas	Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	DINPERTAN PANGAN
			Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang	Indeks Pembangunan Keluarga	Meningkatkan pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	DINSOS P2PA
							Meningkatkan Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IKG)	DINSOS P2PA
					Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menjaga Angka Kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	DINPERMADES P2KB
			Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Keluarga berisiko stunting					



Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
			Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum (trantibum) yang dapat diselesaikan	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan Ketenteraman Ketertiban Umum (trantibum) yang dapat diselesaikan	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	SATPOL PP
				Angka Kejadian Konflik Sosial	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap toleransi, pendidikan politik, dan wawasan kebangsaan	Angka Kejadian Konflik Sosial	Menguatnya Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Politik dan Ketahanan Bangsa	Jumlah kasus konflik SARA	BAKESBANGPOL
			Meningkatnya kemandirian desa	Indeks desa	Mewujudkan keberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya pemberdayaan desa	Persentase desa yang naik status	DINPERMADES P2KB
							Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	Persentase perkembangan bumdes	
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan	DLH

Pokok Visi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan Renstra	Indikator Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Perangkat Daerah Penanggung jawab
							Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	DLH
							Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	Penurunan GRK pendukung ekonomi (energi, industri dan pertanian)	DLH
			Menurunnya dampak risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan ketangguhan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Meningkatnya ketangguhan bencana sampai level desa	Peningkatan desa tangguh bencana	BPBD

3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan dalam RPJMD menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Strategi yang matang memungkinkan identifikasi prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah, sementara arah kebijakan menjadi panduan normatif yang memastikan seluruh program pembangunan selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai sinergi antar-sektor, efisiensi alokasi sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

3.2.1 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi memegang peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan. Strategi dirancang untuk menjembatani antara misi yang bersifat jangka panjang dengan kebijakan dan program konkret yang dapat diimplementasikan, sehingga setiap langkah pembangunan berjalan terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Dalam RPJPD Kabupaten Demak Tahun 2025-2045, fokus pembangunan periode RPJMD Tahun 2025-2029 adalah penguatan fondasi transformasi. Hal ini dilakukan melalui pemenuhan pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas sosial budaya masyarakat, Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik, Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru serta penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi untuk mendorong peningkatan produktivitas, Pemenuhan infrastruktur dan ketaatan penataan ruang wilayah dalam penanggulangan rob dan bencana, serta Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif. Strategi yang dapat disusun dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut.

Tabel III. 4

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Demak 2025-2030

Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter	1. Pemenuhan pelayanan pendidikan a. Pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi b. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan c. Fasilitasi pengembangan pondok pesantren meliputi pendidikan, dakwah & pemberdayaan masyarakat d. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan e. Penguatan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan dan budaya lokal, pengembangan talenta dan karakter
		2. Peningkatan kualitas pemuda dan keolahragaan daerah a. Pemberdayaan pemuda melalui penguatan kapasitas, kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan b. peningkatan partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang c. Peningkatan dukungan prestasi atlet daerah menuju kancah nasional dan internasional dan pembudayaan olahraga kepada masyarakat
		3. Pemenuhan pelayanan kesehatan a. Perluasan upaya promotif-preventif melalui imunisasi dan deteksi dini, peningkatan literasi kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat, dan peningkatan kesehatan lingkungan b. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan c. Pengendalian penyakit tidak menular serta percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan d. Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan permasalahan gizi e. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas f. Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan

Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		4. Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan pemajuan budaya daerah a. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil b. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat c. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat d. Peningkatan budaya literasi di masyarakat
MISI 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	1. Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi a. Penguatan budaya, iklim, dan karakter ilmiah b. peningkatan kerja sama riset dan inovasi dengan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah lainnya, dan media c. Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi. d. Penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan literasi, keahlian, dan kompetensi digital e. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) f. Penguatan keamanan siber
		2. Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik a. Penguatan kelembagaan yang efektif b. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan manajemen risiko c. Penguatan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko d. Akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien

Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		e. Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, terintegrasi, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (<i>open government</i>) f. Penguatan layanan kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar dalam penyusunan rumusan kebijakan kependudukan g. Pelaksanaan reforma agraria yang berkualitas h. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah i. Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan pembudayaan anti korupsi di masyarakat j. Peningkatan kualitas digitalisasi manajemen kearsipan dan arsiparis yang berkompeten k. Peningkatan kualitas kebijakan berbasis Satu Data Indonesia l. Penguatan Layanan Adminduk yang Responsif, Inklusif, dan Berkualitas m. Peningkatan Integrasi Data dan Pemanfaatan Data Kependudukan
MISI 3: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru a. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon termasuk dalam praktik pertanian, perikanan dan industri b. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau dan biru c. Inisiasi penerapan ekonomi sirkuler dengan penekanan pada efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan limbah dan emisi gas rumah kaca, perluasan kebijakan menuju 10 R (<i>refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, and recover</i>) 2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja a. Penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri b. Penguatan sistem perlindungan tenaga kerja c. Penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri

Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		3. Peningkatan produktivitas potensi lokal daerah dan penguatan posisi global a. Penguatan riset dan inovasi di semua sektor pembangunan untuk meningkatkan produktivitas b. Penguatan <i>branding</i> daerah sebagai penumpu pangan dan industri hijau c. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan d. Peningkatan mutu dan daya saing produk sektor unggulan e. Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif f. Peningkatan infrastruktur dasar berusaha g. Penguatan pengendalian inflasi daerah h. Peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMD i. Pembangunan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata j. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan k. Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan l. Akselerasi perwujudan Koperasi Desa untuk peningkatan ekonomi kerakyatan m. Peningkatan kelas UMKM melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM n. Pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan <i>halal value chain</i>

Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	1. Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah a. Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah b. Pemenuhan pelayanan transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah c. Percepatan penyediaan dan pemerataan kawasan permukiman dan rumah hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah d. Penguatan penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat e. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi f. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air g. Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang
MISI 5: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman	1. Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan bantuan sosial, perluasan penyediaan jaminan sosial, pemberian subsidi layanan dasar, bantuan pendidikan, dan menjaga stabilitas harga b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui penguatan usaha mikro dan kecil, perluasan akses permodalan, serta peningkatan kesempatan kerja, kapabilitas SDM, dan produktivitas sektor unggulan, yang didukung oleh keterbukaan informasi dan kebijakan investasi guna mendorong penanaman modal, membuka lapangan kerja, dan menurunkan pengangguran, khususnya bagi penduduk miskin c. Pengurangan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dasar khususnya bagi kelompok penduduk rentan, menumbuhkan pusat perekonomian baru, mengurangi risiko



Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		bencana, pemanfaatan satu data kemiskinan, keterbukaan informasi mengenai akses modal dan kesempatan kerja, pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan
		2. Penguatan ketahanan pangan a. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan b. Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan
		3. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif a. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal b. Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak c. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		4. Perwujudan kondusivitas wilayah a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas b. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		5. Penguatan peran desa dalam pembangunan daerah a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa b. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa c. Penguatan kerja sama antar desa sebagai upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi
		6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup a. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup c. peningkatan keindahan wilayah dengan memperhatikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan d. Pendekatan pertanian rendah karbon dan adaptif terhadap Perubahan Iklim untuk sektor pertanian (pengurangan emisi GRK dari kegiatan pertanian), seperti Peningkatan Cadangan Karbon

Misi	Tujuan	Strategi dan Arah Kebijakan
		Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH4 dari Lahan Sawah – <i>System Of Rice Intensification</i> (SRI), Penurunan Emisi CH4 dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH4 dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi;
		7. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim a. Penguatan mitigasi struktural dan non struktural dalam rangka adaptasi perubahan iklim dan membentuk masyarakat yang tangguh bencana b. Peningkatan upaya perlindungan pesisir dan mitigasi penurunan tanah
		8. Penanganan rob dengan pendekatan <i>incremental planning</i>

3.2.1.1 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Demak 2025-2029

Pencapaian misi pembangunan daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas dan fokus pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada setiap misi pembangunan daerah Kabupaten Demak dijabarkan sebagai berikut:

MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan berakhlak adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pelayanan Pendidikan

Pemenuhan pelayanan pendidikan merupakan langkah strategis utama dalam mendukung misi “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia” bagi pembangunan Kabupaten Demak. Pendidikan yang merata, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman menjadi fondasi dalam mencetak generasi yang cerdas, terampil, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah Kabupaten Demak menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan jangka menengah dan panjang, dengan memastikan bahwa setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah. Selain itu, pelayanan pendidikan yang berkualitas juga diiringi dengan pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidikan. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan wajib belajar 13 tahun melalui perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
- b. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
- c. Fasilitasi pengembangan pondok pesantren meliputi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat
- d. Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.
- e. Penguatan kurikulum pendidikan yang berbasis kearifan dan budaya lokal, pengembangan talenta dan karakter

2. Peningkatan kualitas pemuda dan keolahragaan daerah

Pemuda adalah aset penting dalam pembangunan daerah. Dengan membina dan mengembangkan potensi pemuda secara sistematis, Kabupaten Demak dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara fisik, berkarakter, dan memiliki jiwa kompetitif yang sehat. Pemkab Demak memprioritaskan pembangunan dan revitalisasi sarana-prasarana olahraga, pembinaan atlet melalui klub dan sekolah olahraga, serta penyelenggaraan event olahraga daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat sekaligus menjaring bibit atlet berprestasi.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan pemuda melalui penguatan kapasitas, kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan
- b. Peningkatan partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang
- c. Peningkatan dukungan prestasi atlet daerah menuju kancah nasional dan internasional dan pembudayaan olahraga kepada masyarakat

3. Pemenuhan pelayanan kesehatan

“Kesehatan” yang baik adalah prasyarat utama bagi setiap individu untuk menjalankan aktivitas sosialnya, termasuk untuk mengakses pendidikan maupun bekerja. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Perluasan upaya promotif-preventif melalui imunisasi dan deteksi dini, peningkatan literasi kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat, dan peningkatan kesehatan lingkungan
- b. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
- c. Pengendalian penyakit tidak menular serta percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
- d. Percepatan penuntasan *stunting* dan permasalahan gizi
- e. Pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas
- f. Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan

4. Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan pemajuan budaya daerah

Pemajuan budaya daerah merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Demak untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Demak. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kearifan budaya

lokal di tengah pembangunan yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Pembangunan yang selaras dengan pelestarian dan pengembangan budaya daerah tidak hanya memperkuat identitas masyarakat, tetapi juga menumbuhkan karakter, etika, dan rasa kebanggaan terhadap warisan lokal. Budaya menjadi bagian penting dalam membentuk SDM yang berintegritas, berdaya saing, dan memiliki jati diri yang kokoh di tengah arus globalisasi.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil
- b. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat
- c. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat
- d. Peningkatan budaya literasi di masyarakat

MISI 2: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Berintegritas

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut pemerintah untuk terus melakukan riset, inovasi, dan digitalisasi sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi merupakan langkah strategis penting dalam mewujudkan misi *“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas”* di Kabupaten Demak. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas memerlukan landasan kebijakan yang berbasis data dengan didukung inovasi pelayanan publik, serta penerapan teknologi digital yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan budaya, iklim, dan karakter ilmiah
- b. Peningkatan kerja sama riset dan inovasi dengan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah lainnya, dan media
- c. Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi
- d. Penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan literasi, keahlian, dan kompetensi digital

- e. Penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
 - f. Penguatan keamanan siber
2. Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik

Reformasi birokrasi untuk mewujudkan lembaga pemerintahan yang efektif selalu menjadi isu yang harus diselesaikan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang optimal. Peningkatan efektivitas kelembagaan dilakukan melalui penataan struktur organisasi perangkat daerah yang selaras dengan kebutuhan pembangunan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penyusunan regulasi yang jelas, operasional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini juga harus didukung dengan peningkatan kompetensi dan kualitas ASN sebagai motor/ penggerak birokrasi pemerintahan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan kelembagaan yang efektif
- b. Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan manajemen risiko
- c. Penguatan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko
- d. Akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien
- e. Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, terintegrasi, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*)
- f. Penguatan layanan kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar dalam penyusunan rumusan kebijakan kependudukan
- g. Pelaksanaan reforma agraria yang berkualitas
- h. Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah serta peningkatan kualitas belanja daerah
- i. Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan pembudayaan anti korupsi di masyarakat
- j. Peningkatan kualitas digitalisasi manajemen kearsipan dan arsiparis yang berkompeten
- k. Peningkatan kualitas kebijakan berbasis Satu Data Indonesia
- l. Penguatan Layanan Adminduk yang Responsif, Inklusif, dan Berkualitas
- m. Peningkatan Integrasi Data dan Pemanfaatan Data Kependudukan

MISI 3: Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal adalah sebagai berikut:

1. Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru

Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru merupakan langkah strategis untuk mewujudkan misi “Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal” dalam rangka mencapai visi “Demak yang semakin maju”. Ekonomi hijau menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya daratan secara berkelanjutan, seperti pertanian, kehutanan, dan energi terbarukan, sedangkan ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan potensi kelautan dan perairan, termasuk perikanan, pariwisata bahari, serta perlindungan ekosistem pesisir. Melalui inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru yang terintegrasi, Kabupaten Demak diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon termasuk dalam praktik pertanian, perikanan dan industri
- b. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau dan biru
- c. Inisiasi penerapan ekonomi sirkuler dengan penekanan pada efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan limbah dan emisi gas rumah kaca, perluasan kebijakan menuju 10 R (*refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, and recover*)

2. Peningkatan produktivitas tenaga kerja

Produktivitas tenaga kerja yang tinggi menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi yang kompetitif. Pemerintah Kabupaten Demak memprioritaskan program pelatihan vokasi, sertifikasi profesi, dan pendampingan kewirausahaan bagi angkatan kerja, khususnya generasi muda. Selain itu, penguatan kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi langkah penting untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pasar. Melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja yang terencana dan berkesinambungan, diharapkan tercipta SDM yang mampu mengelola potensi lokal secara optimal, menghasilkan produk dan layanan berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:



- a. Penguatan pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri
- b. Penguatan sistem perlindungan tenaga kerja
- c. Penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri

3. Peningkatan produktivitas potensi lokal daerah dan penguatan posisi global

Kabupaten Demak memiliki berbagai potensi lokal yang dapat ditingkatkan produktivitasnya khususnya di bidang pertanian, perikanan, industri pengolahan, maupun pariwisata. Dengan keunggulan berbagai potensi tersebut yang dipadukan dengan budaya yang ada di Kabupaten Demak diharapkan dapat memperkuat daya saing Kabupaten Demak di kancah global. Strategi ini diarahkan pada peningkatan produktivitas melalui modernisasi proses produksi, penggunaan teknologi tepat guna, penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha. Selain itu, pemasaran produk lokal akan diperluas melalui pemanfaatan platform digital, promosi terpadu, dan pengembangan jejaring kemitraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui strategi ini, potensi lokal tidak hanya menjadi penggerak utama ekonomi daerah, tetapi juga mampu menembus pasar global.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan riset dan inovasi di semua sektor pembangunan untuk meningkatkan produktivitas
- b. Penguatan *branding* daerah sebagai penunjang pangan dan industri hijau
- c. Peningkatan kontribusi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan perdagangan
- d. Peningkatan mutu dan daya saing produk sektor unggulan
- e. Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif
- f. Peningkatan infrastruktur dasar berusaha
- g. Penguatan pengendalian inflasi daerah
- h. Peningkatan produktivitas dan efisiensi BUMD
- i. Pembangunan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata
- j. Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan
- k. Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan
- l. Akselerasi perwujudan Koperasi Desa untuk peningkatan ekonomi kerakyatan



- m. Peningkatan kelas UMKM melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM
- n. Pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan *halal value chain*

MISI 4: Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat adalah sebagai berikut:

A. Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah

Infrastruktur yang memadai, didukung sistem pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan serta tata ruang yang tertib, menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang terencana, merata, dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas publik, serta infrastruktur pendukung sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dengan penerapan strategi ini, Kabupaten Demak diharapkan mampu menciptakan infrastruktur yang tidak hanya memperlancar konektivitas dan distribusi ekonomi, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Langkah ini akan memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjadi pilar utama bagi terwujudnya “Demak semakin maju”.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah
- b. Pemenuhan pelayanan transportasi umum untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah
- c. Percepatan penyediaan dan pemerataan kawasan permukiman dan rumah hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah
- d. Penguatan penyediaan sarana sanitasi aman bagi masyarakat
- e. Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi
- f. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air
- g. Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang

MISI 5: Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam rangka Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif berarti sistem perlindungan yang mampu merespons cepat perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, termasuk menghadapi risiko bencana alam, krisis ekonomi, maupun guncangan sosial, sehingga masyarakat tetap terlindungi hak-hak sosialnya. Strategi ini mencakup penguatan basis data terpadu kesejahteraan sosial untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, pengembangan program bantuan sosial yang fleksibel terhadap kondisi darurat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui peningkatan bantuan sosial, perluasan penyediaan jaminan sosial, pemberian subsidi layanan dasar, bantuan pendidikan, dan menjaga stabilitas harga
- b. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui penguatan usaha mikro dan kecil, perluasan akses permodalan, serta peningkatan kesempatan kerja, kapabilitas SDM, dan produktivitas sektor unggulan, yang didukung oleh keterbukaan informasi dan kebijakan investasi guna mendorong penanaman modal, membuka lapangan kerja, dan menurunkan pengangguran, khususnya bagi penduduk miskin
- c. Pengurangan wilayah kantong kemiskinan serta sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dasar khususnya bagi kelompok penduduk rentan, menumbuhkan pusat perekonomian baru, mengurangi risiko bencana, pemanfaatan satu data kemiskinan, keterbukaan informasi mengenai akses modal dan kesempatan kerja, pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan

2. Penguatan ketahanan pangan

Ketahanan pangan tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial, meningkatkan kualitas kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dengan

strategi penguatan ketahanan pangan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Demak memiliki akses yang berkelanjutan terhadap pangan yang berkualitas. Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan
- b. Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan

3. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif

Keluarga yang berkualitas dan sejahtera menjadi wadah utama pembentukan karakter, pendidikan, dan nilai-nilai sosial. Kesetaraan gender memastikan setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang setara untuk berperan dalam pembangunan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
- b. Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- c. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

4. Perwujudan kondusivitas wilayah

Kondusivitas wilayah mencakup terciptanya stabilitas keamanan, ketertiban, dan harmoni sosial yang menjadi prasyarat bagi kelancaran pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Wilayah yang aman dan tertib akan mendorong partisipasi aktif masyarakat serta mampu menarik investasi di suatu daerah. Pemerintah Kabupaten Demak juga mendorong peningkatan kesadaran hukum, pendidikan kebangsaan, dan pelibatan generasi muda dalam kegiatan positif yang memperkuat rasa persatuan.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
- b. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

5. Penguatan peran desa dalam pembangunan daerah

Desa memiliki potensi sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi yang bila dikelola secara optimal akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Melalui penguatan peran desa, pembangunan Kabupaten Demak akan lebih merata dan inklusif.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:



- a. Peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat
- b. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa
- c. Penguatan kerja sama antar desa sebagai upaya pemerataan pertumbuhan

6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi salah satu langkah strategis yang esensial dalam menjalankan misi “*Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan*” untuk mewujudkan visi “*Demak semakin sejahtera*”. Lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan ekonomi, dan ketahanan sosial daerah. Strategi ini diarahkan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pelestarian ekosistem pesisir dan darat, serta pengelolaan sumber daya alam secara bijak. Upaya seperti rehabilitasi lahan kritis, penguatan pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R), peningkatan ruang terbuka hijau, dan normalisasi daerah aliran sungai menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Demak.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sampah terintegrasi hulu hilir dan berbasis masyarakat
- b. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
- c. Peningkatan keindahan wilayah dengan memperhatikan pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan
- d. Pendekatan pertanian rendah karbon dan adaptif terhadap Perubahan Iklim untuk sektor pertanian (pengurangan emisi GRK dari kegiatan pertanian), seperti Peningkatan Cadangan Karbon Tanah Melalui Penggunaan Pupuk Organik Sebagai Dampak Penggunaan UPPO, Penggunaan Pupuk Organik, Sistem Pemupukan Berimbang, Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah – *System of Rice Intensification* (SRI), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Penurunan Emisi CH₄ dari Lahan Sawah - Penggunaan Varietas Rendah Emisi.

7. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Kabupaten Demak memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai ancaman bencana, seperti banjir, rob, abrasi pantai, serta dampak perubahan iklim yang mempengaruhi pola curah hujan dan produktivitas pertanian. Strategi peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi langkah strategis penting dalam mendukung misi “Memperkuat

Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan” demi mewujudkan pokok visi “Demak semakin sejahtera”.

Pendekatan ini diarahkan pada penguatan kapasitas pemerintah daerah, desa, dan masyarakat dalam mitigasi serta adaptasi terhadap risiko bencana. Langkah yang diambil meliputi pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi, peningkatan kualitas infrastruktur tahan bencana, rehabilitasi ekosistem seperti hutan mangrove untuk meredam gelombang, serta penataan tata ruang yang berbasis mitigasi risiko. Selain itu, edukasi publik dan pelatihan kesiapsiagaan bencana digencarkan agar masyarakat memiliki kemampuan adaptif, tangguh, dan cepat pulih pascabencana.

Strategi ini memiliki keselarasan dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan mitigasi struktural dan non struktural dalam rangka adaptasi perubahan iklim dan membentuk masyarakat yang tangguh bencana
 - b. Peningkatan upaya perlindungan pesisir dan mitigasi penurunan tanah
8. Penanganan rob dengan pendekatan *incremental planning*
- Penanganan rob di Kabupaten Demak dengan pendekatan *incremental planning* menjadi langkah strategis yang krusial dalam mewujudkan misi “Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan” serta pokok visi “Demak semakin sejahtera”. Rob yang terus melanda wilayah pesisir Demak tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada degradasi lingkungan, kerusakan infrastruktur, dan penurunan kualitas hidup. Pendekatan *incremental planning* diterapkan dengan perencanaan bertahap yang realistis, adaptif, dan berkesinambungan.

3.2.2 Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2025-2029

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Demak tahun 2026-2030 akan semakin optimal dengan didukung oleh arah kebijakan yang akan dijabarkan menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan tahunan ini akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan setiap tahun untuk penentuan tema dan prioritas daerah setiap tahunnya. Arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya dirumuskan dengan memperhatikan tujuan dan sasaran, strategi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel III. 5

Tema RPJMD Tahap I

Tema RPJMD Tahap I				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi	Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha	Sinkronisasi, integrasi, dan penyelarasan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan industri dengan nasional dan provinsi	Penguatan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata	penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi
Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dan perikanan serta daya saing produk pertanian dan perikanan	Penguatan koperasi sebagai konsolidator UMKM	Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan	Penanganan rob skala kawasan yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik
Penyediaan sarana pertanian dan perikanan yang modern dan ramah lingkungan	Pengembangan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata	Penguatan integrasi rantai pasok antar industri	Penanganan rob skala <i>neighbourhood</i>	Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru
Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan	Mendorong pariwisata berkelanjutan serta <i>multiplier effect</i>	Penerapan prinsip-prinsip industri hijau	Pengembangan kawasan rob	peningkatan produktivitas tenaga kerja
Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan	Peningkatan kualitas event dan destinasi wisata dengan perbaikan sarana prasarana dan pemenuhan konektivitas antar destinasi wisata	Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang		peningkatan produktivitas potensi lokal daerah dan penguatan posisi global
Pengembangan petani dan nelayan muda agar terjadi regenerasi secara berkelanjutan	Pengembangan dan penguatan jejaring komunitas kreatif	Penguatan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat desa		Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah
Pengembangan urban farming	Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan			Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif

Tema RPJMD Tahap I				
Tema Tahap I Tahun 2026	Tema Tahap II Tahun 2027	Tema Tahap III Tahun 2028	Tema Tahap IV Tahun 2029	Tema Tahap V Tahun 2030
Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya	Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya			penguatan ketahanan pangan
pengendalian dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif			Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif
Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan	Pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan halal <i>value chain</i>			Perwujudan kondusivitas wilayah
Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan				Penguatan peran desa dalam pembangunan daerah
Pencegahan pemborosan pangan (<i>food loss and waste</i>)				Peningkatan kualitas lingkungan hidup
Peningkatan kinerja sistem irigasi				Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air				

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025-2029 dijabarkan sebagai berikut:

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Menguatkan posisi Demak sebagai Penumpu Pangan Jawa Tengah”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan

- b. Penerapan praktik pertanian rendah karbon melalui integrasi program prioritas penurunan emisi GRK dalam program peningkatan produksi pangan
- c. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi hulu-hilir
- d. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi untuk ekspor
- e. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi
- f. Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dan perikanan serta daya saing produk pertanian dan perikanan
- g. Penyediaan sarana pertanian dan perikanan yang modern dan ramah lingkungan
- h. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan
- i. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan perikanan
- j. Pengembangan petani dan nelayan muda agar terjadi regenerasi secara berkelanjutan
- k. Pengembangan *urban farming*
- l. Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya
- m. pengendalian dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
- n. Pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan
- o. Penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan
- p. Pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*)
- q. Peningkatan kinerja sistem irigasi
- r. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan peningkatan manajemen penggunaan air

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2027

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Menguatkan sektor unggulan daerah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Penguatan daya saing produk unggulan daerah berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan



- b. Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung perekonomian
- c. Penguatan IKM dan UMKM berbasis potensi lokal
- d. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia terutama yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, UMKM, industri dan pariwisata
- e. Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha
- f. Penguatan koperasi sebagai konsolidator UMKM
- g. Pengembangan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata
- h. Mendorong pariwisata berkelanjutan serta *multiplier effect*
- i. Peningkatan kualitas *event* dan destinasi wisata dengan perbaikan sarana prasarana dan pemenuhan konektivitas antar destinasi wisata
- j. Pengembangan dan penguatan jejaring komunitas kreatif
- k. Pengembangan pertanian dan perikanan yang ramah lingkungan
- l. Korporasi pertanian dan perikanan melalui perluasan kelembagaan ekonomi petani/nelayan yang berbadan hukum dan sinergis dengan pembiayaan dan badan usaha lainnya
- m. Mendorong investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif
- n. Pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan *halal value chain*

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2028

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2028 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Inisiasi ekonomi hijau untuk mendukung ekonomi berkelanjutan”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Penguatan aksi pembangunan rendah karbon
- b. Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
- c. Peningkatan ekonomi sirkular dengan penekanan pada efisiensi sumber daya, pengurangan timbulan limbah dan emisi gas rumah kaca, perluasan kebijakan menuju 10 R (*refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, repair, refurbish, remanufacture, repurpose, recover*)
- d. Akselerasi tata kelola persampahan meliputi aspek regulasi kelembagaan, pendanaan serta pengelolaan sampah di hulu dan hilir
- e. Sinkronisasi, integrasi, dan penyelarasan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan industri dengan nasional dan provinsi
- f. Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan
- g. Penguatan integrasi rantai pasok antar industri
- h. Penerapan prinsip-prinsip industri hijau



- i. Penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang
- j. Penguatan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat desa

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2029

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2029 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Meningkatkan daya saing daerah menuju Demak bermartabat, maju, dan sejahtera”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Penguatan riset dan inovasi di semua sektor pembangunan untuk meningkatkan produktivitas
- b. Penguatan branding daerah sebagai penumpu pangan dan industri hijau
- c. Peningkatan mutu dan daya saing produk sektor unggulan.
- d. Hilirisasi industri
- e. Penguatan citra dan karakter kota untuk meningkatkan daya tarik pariwisata
- f. Penanganan rob skala kawasan yang melibatkan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
- g. Penanganan rob skala *neighbourhood*
- h. Pengembangan kawasan rob

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2030

Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2030 diarahkan dengan tema pembangunan daerah **“Perwujudan Demak Semakin Bermartabat, Maju, dan Sejahtera”** dengan prioritas daerah meliputi:

- a. Pemenuhan pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan kualitas pemuda
- c. Pemenuhan pelayanan kesehatan
- d. Pemenuhan pembangunan daerah yang memperhatikan pemajuan budaya daerah
- e. penguatan riset, inovasi, dan digitalisasi
- f. Kelembagaan dan regulasi tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik
- g. Inisiasi penerapan ekonomi hijau dan biru
- h. peningkatan produktivitas tenaga kerja
- i. peningkatan produktivitas potensi lokal daerah dan penguatan posisi global
- j. Pemenuhan infrastruktur, penguatan ketahanan air dan ketaatan penataan ruang wilayah
- k. Pemenuhan perlindungan sosial yang adaptif
- l. penguatan ketahanan pangan



- m. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat yang inklusif
- n. Perwujudan kondusivitas wilayah
- o. Penguatan peran desa dalam pembangunan daerah
- p. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- q. Peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

3.2.3 Program–Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

a. Program Prioritas Pembangunan Daerah Penerjemahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati

Program prioritas pembangunan daerah sebagai penerjemahan kinerja dari visi-misi Bupati-Wakil Bupati merupakan rangkaian program yang diturunkan kinerjanya dari visi-misi dan tujuan-sasaran daerah menjadi program perangkat daerah. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.6

Pemetaan Program Prioritas Kabupaten Demak Periode 2025-2029

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah (HLS) 2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan Institusional	1. Skor Kemampuan Literasi SD 2. Skor Kemampuan Numerasi SD 3. Skor Kemampuan Literasi SMP 4. Skor Kemampuan Numerasi SMP	Terwujudnya Aksesibilitas Pendidikan	1. Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7-12 tahun 2. Angka Partisipasi Murni (APM) usia 13-15 tahun	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	1. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 2. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar 3. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama 4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
							Meningkatnya Mutu Pembelajaran				Persentase Sekolah yang Terakreditasi minimal B		Meningkatnya kapasitas dan daya saing tenaga pendidik dan kependidikan	Proporsi Bersertifikat Profesi	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
													Meningkatnya kurikulum berbasis karakter	Persentase muatan lokal yang telah memiliki silabus dan kurikulum	
											Meningkatkan Kualitas Pemuda dan Prestasi Olahraga		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						sosial kemasyarakatan			Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi pramuka aktif	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
						Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi, nasional dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti	Meningkatnya prestasi olah raga	Jumlah perolehan medali di tingkat provinsi, nasional, dan internasional terhadap nomor kejuaraan yang diikuti	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase jumlah atlet berprestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya peran perpustakaan daerah dalam mewujudkan budaya gemar membaca masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Rasio kunjungan masyarakat ke perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
									Meningkatnya ketersediaan koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Menurunnya kematian dan kesakitan	1. Angka Kematian Bayi (AKB), 2. Jumlah Kasus Kematian Ibu, 3. Prevalensi Stunting, 4. Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM) 5. Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	1. Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan urusan Pengendalian Penyakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN DAERAH
										Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan urusan Kesehatan Masyarakat		DINAS KESEHATAN DAERAH
										Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna		DINAS KESEHATAN DAERAH
										Cakupan kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)		DINAS KESEHATAN DAERAH

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										Prevalensi Wasting		DINAS KESEHATAN DAERAH
										Prevalensi Hipertensi		DINAS KESEHATAN DAERAH
										Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis		DINAS KESEHATAN DAERAH
										Persentase Depresi yang mendapatkan Layanan		DINAS KESEHATAN DAERAH
									Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan fasilitas	Persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAERAH
									Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN DAERAH
									Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam promosi Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN DAERAH
			meningkatnya pemajuan kebudayaan	Nilai Kinerja Kebudayaan	memajukan kebudayaan daerah	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	melestarikan kebudayaan daerah	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Meningkatnya tata kelola museum	Persentase peningkatan kunjungan museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
									Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERINTEGRITAS	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Integritas Nasional	Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Meningkatnya pengendalian internal pemerintah	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Meningkatnya efektivitas pengendalian korupsi	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Manajemen Risiko	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT DAERAH
							Meningkatnya Kualitas Kapabilitas APIP	Level kapabilitas APIP	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Tindaklanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran sebelumnya	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan berbasis digital	Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan tata kelola layanan digital	Indeks SPBE/Indeks Digitalisasi Pemerintah	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi publik	Indeks PPID	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
									Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Satu Data	Indeks SDI	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
							Meningkatnya kualitas layanan sistem elektronik	Indeks Tata Kelola SPBE	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Layanan SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
									Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
					Meningkatkan inovasi daerah	Kapabilitas inovasi	Menguatnya iklim inovasi	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan Peningkatan minat masyarakat yang berinovasi	Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang Dimanfaatkan, Peningkatan minat masyarakat yang berinovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
					Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Pelayanan Publik PD	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	Meningkatnya tata kelola data kependudukan	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
							Meningkatnya kualitas layanan administrasi catatan sipil	Persentase penduduk yang memiliki akta catatan sipil	Meningkatnya tata kelola data pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
					Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik PD	Meningkatnya responsivitas pelayanan publik	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN
									Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
									Meningkatnya keamanan wilayah	Cakupan keamanan wilayah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
									Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
									Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa yang tertib administrasi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB
							Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN
					mengikuti tujuan PD paling dominan	mengikuti indikator tujuan PD paling dominan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di perangkat daerah	Indeks Pelayanan Publik PD Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SEMUA OPD
					Meningkatkan tata kelola kearsipan	Nilai Pengawasan Kearsipan	Meningkatnya tata kelola kearsipan perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai pengawasan kearsipan >80	Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi pengolahan arsip digital	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
									Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
					Meningkatkan kualitas pelayanan penanganan bencana kebakaran	Persentase ketepatan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) penanganan kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran	Tingkat tindak lanjut pengaduan lapor kejadian kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULAN GAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
									Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
					Meningkatkan kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Pelayanan Publik Set DPRD	Meningkatnya kualitas layanan Sekretariat DPRD	Persentase agenda DPRD yang terselesaikan tepat waktu	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase penetapan Ranperda Tahun n	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
								Indeks Kepuasan Anggota DPRD atas Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase penyelenggaran pengawasan pemerintahan		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
			Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	SAKIP IPKD	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan PD	Terpenuhinya keselarasan RKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
									Terpenuhinya keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan PD	Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
										Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia					
									Meningkatnya pemanfaatan hasil riset	Persentase pemanfaatan hasil riset untuk perencanaan	Terlaksananya riset sesuai rencana induk riset	Persentase riset yang dilaksanakan sesuai rencana induk riset	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGA N DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
											Tersusunnya hasil riset yang menjadi rekomendasi kebijakan	Persentase hasil riset yang menjadi rekomendasi kebijakan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH		
									Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	Terpenuhinya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	Terpenuhinya keselarasan proses perencanaan dan penganggaran	Skor kesesuaian pagu program dokumen perencanaan dan penganggaran	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
								Persentase penatausahaan keuangan sesuai regulasi				Terpenuhinya penatausahaan dan pertanggung-jawaban keuangan yang baik	Persentase tata kelola keuangan pemerintahan daerah sesuai kaidah perundangan		
								Laporan keuangan sesuai SAP				Terselesaikannya laporan keuangan SKPD sesuai SAP	Persentase laporan SKPD yang telah diselesaikan sesuai SAP		
					Meningkatnya pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya barang milik daerah yang dimanfaatkan	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB							
							Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat otonomi fiskal	Meningkatnya realisasi PAD	Deviasi realisasi PAD terhadap target PAD dalam APBD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								
							Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase fasilitasi kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan dan kerjasama daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH						
											Indeks Reformasi Hukum		SEKRETARIAT DAERAH						
											Indeks Kualitas Kebijakan		SEKRETARIAT DAERAH						
										Nilai Aksi HAM Daerah									
										Persentase fasilitasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat									
										Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan urusan perekonomian	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH			
														Persentase fasilitasi kebijakan urusan SDA		SEKRETARIAT DAERAH			
														Persentase kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang difasilitasi		SEKRETARIAT DAERAH			
														Nilai SAKIP Setda		SEKRETARIAT DAERAH			
														Tingkat kematangan UKPBJ		SEKRETARIAT DAERAH			
							Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah daerah	IKM Daerah Indeks Pelayanan Pembangunan Setda	Meningkatnya kualitas pelayanan lingkup setda	Indeks Kepuasan Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	SEKRETARIAT DAERAH							
										Persentase kegiatan pimpinan yang terfasilitasi		SEKRETARIAT DAERAH							
									Meningkatnya kematangan organisasi	Nilai Kematangan Organisasi		SEKRETARIAT DAERAH							
									Meningkatnya kualitas kinerja PD	Persentase PD dengan nilai AKIP Memuaskan		SEKRETARIAT DAERAH							
									Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Persentase UPP yang memiliki nilai Baik		SEKRETARIAT DAERAH							

VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | III-61

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian	Persentase Kelompok Tani yang Dibina	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINPERTAN PANGAN
					Meningkatkan perekonomian sektor perikanan	Pertumbuhan Ekonomi Sub Kategori Perikanan	Meningkatnya produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
									Meningkatnya kepatuhan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
							Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan produksi pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Produksi pengolahan hasil perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
					Meningkatkan perekonomian sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi Kategori perdagangan	Meningkatnya perekonomian sektor perdagangan	Kontribusi kategori perdagangan dalam PDRB	Meningkatnya kemudahan perizinan bagi sarana distribusi perdagangan	Persentase Toko Swalayan yang direkomendasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINDAGKOP
									Meningkatnya sarana distribusi perdagangan	Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan dalam kondisi baik	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINDAGKOP
									Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Disparitas harga	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINDAGKOP
									Meningkatnya pertumbuhan ekspor perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor luar negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINDAGKOP
									Meningkatnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINDAGKOP

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah Mengikuti Sosialisasi Produk Legal Dalam Negeri	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINDAGKOP
							Meningkatnya perekonomian sektor koperasi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINDAGKOP
							Meningkatnya perekonomian sektor UMKM	Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM	Meningkatnya jumlah UMKM	Pertumbuhan UMKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINDAGKOP
									Meningkatnya UMKM yang naik kelas	Persentase Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil (%)	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINDAGKOP
					Meningkatkan perekonomian sektor industri	Pertumbuhan Ekonomi Kategori industri	Meningkatnya Industri Kecil Menengah (IKM)	Pertumbuhan jumlah IKM	Tersedianya dokumen perencanaan industri	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINDAGKOP
									Meningkatnya Pemantauan Perkembangan Industri	Rasio jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DINNAKERIND
									Tersedianya Informasi Perkembangan Industri	Persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINNAKERIND
					Meningkatkan perekonomian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Meningkatnya daya tarik pariwisata daerah	Rata-rata pengeluaran wisatawan	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara; Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara;	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS PARIWISATA
									Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persentase kegiatan kalender event yang dipromosikan ke luar daerah	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang Bersertifikat	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA
							Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	Meningkatnya pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dibina	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS PARIWISATA
			Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan PMTB	Meningkatkan investasi	Pertumbuhan PMTB	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN	Meningkatnya iklim investasi	Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA (miliar)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
									Meningkatnya jumlah investasi	Pertumbuhan jumlah investasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
									Adanya Pendampingan kepatuhan LKPM	Persentase perusahaan yang telah dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
									Tersedianya data investasi daerah	Persentase data investasi daerah yang dipublikasikan	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
							Meningkatnya pelayanan kemudahan investasi	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya kemudahan perizinan	Rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DPMPTSP
			meningkatkan pendapatan masyarakat	PDRB per kapita	mengurangi pengangguran	tingkat pengangguran terbuka	Meningkatnya kesempatan kerja	rasio kesempatan kerja	tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja mikro dan makro	persentase ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja mikro dan makro	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINNAKERIND
									meningkatkan penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINNAKERIND

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
									meningkatkan layanan transmigrasi	jumlah calon transmigran yang terdaftar (KK)	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINNAKERIND
									meningkatnya kompetensi pencari kerja	persentase pencari kerja yang diberi pelatihan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINNAKERIND
									meningkatnya kompetensi tenaga kerja	persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINNAKERIND
									Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINNAKERIND
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	Indeks Layanan Infrastruktur daerah	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata	indeks kinerja infrastruktur daerah	Meningkatkan pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	penurunan kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses Rumah Layak Huni.	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Tersedianya perumahan rumah layak huni dan terjangkau bagi korban bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi korban bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
									Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
						Persentase Panjang Jalan Kondisi Mantap	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan	Persentase Panjang Jalan Kondisi Baik	Meningkatnya penyelenggaraan jalan	Panjang Jalan dalam Kondisi mantap (KM)	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					meningkatkan kualitas layanan Sumber Daya Air	Persentase capaian kinerja pengelolaan sumber daya air	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Air	Indeks kinerja sistem irigasi Kewenangan Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Luas wilayah rawan banjir yang tertangani	Meningkatnya sarana prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik	Persentase sarana prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Meningkatnya daya tampung drainase	persentase drainase dalam kondisi baik	Meningkatnya kinerja drainase perkotaan	Persentase drainase perkotaan yang tertangani	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Meningkatnya pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat	Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (IUP)	Meningkatnya layanan air limbah	Persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
								Persentase rumah tangga yang terlayani akses air minum layak	Meningkatnya layanan akses air minum perpipaan	persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (PDAM dan Non PDAM)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Indeks penyelenggaraan penataan ruang	Meningkatnya kepatuhan penataan ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Meningkatnya penatagunaan tanah aset pemkab	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
									Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi reforma agraria	Persentase pelaksanaan rencana aksi gugus tugas reforma agraria	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Meningkatnya kualitas penataan bangunan gedung	rasio bangunan berizin	Meningkatnya kepatuhan bangunan gedung	Rasio kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kabupaten	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
							Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungannya		Luas Kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA		
							meningkatnya kualitas pengembangan jasa konstruksi	Persentase partisipasi tenaga kerja konstruksi dalam pembangunan	Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
					Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Rasio konektivitas angkutan jalan	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	Kinerja lalu lintas kabupaten	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten (IUP)	PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN
MEMPERKUAT KETAHANAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Aman dan Nyaman	Indeks Gini,	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas	Tingkat Kemiskinan	Meningkatnya Kemandirian PPKS	Persentase PPKS yang mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya	meningkatnya layanan PPKS	Persentase PPKS yang Terakses Layanan Sosial Dasar	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	cakupan penduduk miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	persentase PSKS yang diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Meningkatnya rehabilitasi sosial PPKS	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Meningkatnya pemulihan sosial dan perlindungan korban bencana	Persentase korban bencana yang pulih fungsi sosialnya	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					Meningkatkan ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan dan berkualitas	PPH ketersediaan PPH Konsumsi Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan		Persentase taman makam pahlawan yang dikelola dengan baik	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan Strategis (Ton)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
									Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	jumlah infrastruktur kemandirian pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
									meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar dari bahan pangan yang diuji	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
									menurunnya daerah rawan pangan	Persentase desa rawan pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
					Indeks Harmoni Indonesia	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, pelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Meningkatnya kualitas dan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	PROGRAM PENGARUS	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							meningkatkan pembangunan gender	Indeks Pembangunan Gender	efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
									Meningkatnya peran kelembagaan peningkatan kualitas keluarga	persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
					Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menjaga Angka Kelahiran	Total Fertility Rate	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR);	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
										Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)		
									meningkatnya pelaksanaan pembangunan kependudukan	Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (ASFR 15 - 19 tahun)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
									meningkatnya kualitas keluarga	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok ketahanan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Meningkatnya kondusivitas wilayah	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Meningkatnya ketertiban dan ketenteraman kehidupan bermasyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkara	Persentase penegakan perda dan perkara	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
				Angka Kejadian Konflik Sosial	Meningkatkan stabilitas sosial pada kehidupan masyarakat	Angka Kejadian Konflik Sosial	Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Demokrasi	Persentase konflik sosial yang dapat dicegah	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									Meningkatnya pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									Meningkatnya kewaspadaan terhadap konflik sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang teridentifikasi	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
									Meningkatnya kesadaran berpolitik yang baik	rasio masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB					
			Meningkatnya kemandirian desa	indeks desa	mewujudkan keberdayaan desa	Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya pemberdayaan desa	Persentase desa yang naik status	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
							meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa	persentase perkembangan Bumdes	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT,DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
									Meningkatnya kerja sama desa	Peningkatan Jumlah Kerja sama Desa yang difasilitasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
							Kontribusi Penurunan emisi GRK kumulatif (Ton Co2eq)	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan	Meningkatnya pengendalian dan pemantauan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	persentase penurunan frekuensi kejadian pencemaran Lingkungan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
														Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya pengembangan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP												
		meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan	Persentase sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
				Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						DINAS LINGKUNGAN HIDUP					

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN RENSTRA	SASARAN KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	kontribusi penurunan GRK kumulatif pendukung ekonomi (energi, industri dan pertanian)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
									Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Menurunnya dampak risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	Meningkatkan ketangguhan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	meningkatnya ketangguhan bencana sampai level desa	peningkatan desa tangguh bencana	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
									Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat Bencana		
									Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		

b. Program Prioritas Daerah Penerjemahan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati

Program Prioritas pembangunan RPJMD 2025-2029 memuat Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati. Program Prioritas diterjemahkan menjadi beberapa Kegiatan Prioritas dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Keterkaitan Program Prioritas dengan isu strategis, misi dan tujuan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.7
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak 2025-2029

ISU STRATEGIS	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PENANGGUNG JAWAB
Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter	Demak Cerdas dan Berkarakter		
				Peningkatan kapasitas guru	Dindikbud
				Penyediaan akses internet bagi sekolah;	Dindikbud
				Pengembangan sekolah unggulan di setiap kecamatan;	Dindikbud
				Beasiswa untuk siswa berprestasi dan dari keluarga kurang mampu;	Dindikbud
				Pengembangan kurikulum berbasis karakter;	Dindikbud
				Pelatihan vokasional dan teknis bagi angkatan kerja;	Dinnakerind
				Pengembangan inkubasi inovasi dan teknologi tepat guna;	Dinpermades P2KB, Bapperida
				Pemberdayaan organisasi pemuda dan perempuan.	Dinpora, Dinsos P2PA
			Demak Religius		
				Tambahan kesejahteraan bagi guru Madin/TPQ/Ponpes;	Bag. Kesra SETDA
				Santri Creative Festival;	Bag. Kesra SETDA
				Bantuan tempat ibadah/organisasi keagamaan/lembaga keagamaan;	Bag. Kesra SETDA
				Beasiswa penghapal Alqur'an;	Bag. Kesra SETDA
				Fasilitasi Forum Ulama-Umaro';	Bag. Kesra SETDA, Kecamatan
				Dukungan kegiatan majlis akbar dan keagamaan	Bag. Kesra SETDA
Penguatan tata kelola pemerintahan yang dinamis	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berintegritas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berintegritas	Demak Smart Governance		
				Digitalisasi birokrasi;	Dinkominfo
				Penguatan meritokrasi ASN: "Memimpin tanpa menekan";	BKPSDM

ISU STRATEGIS	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	PENANGGUNG JAWAB
				Layanan Keliling Pemerintah;	Bag. Pemerintahan SETDA
				Smart Village;	Dinpermades P2KB
				Sinergitas otonomi desa	Dinpermades P2KB
Peningkatan nilai ekonomi sektor unggulan daerah;	Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan dan Berbasis Potensi Lokal	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Demak Produktif dan Mandiri		
Penumpu pangan di Jawa Tengah;				Bantuan stimulan produksi dan pemasaran bagi petani, nelayan, UMKM dan PKL;	Dipertan, Dinlutkan, Dinnakerind, Dindagkop UMKM
Inisiasi Ekonomi hijau				Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;	Dinparta
				Peningkatan investasi	DPM PTSP
Pemenuhan Kualitas Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan Infrastruktur Berkualitas yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan	Demak Mantap		
				Pembangunan infrastruktur penumpu pangan;	Dinputaru, Dinperkim, Dipertan Pangan, Dinlutkan
				Rehabilitasi dan penataan jalan kabupaten terintegrasi;	Dinputaru, Dinhub, DLH
				Pengembangan fasilitas kesehatan;	Dinkes, RSUD
				Pengembangan fasilitas pendidikan;	Dindikbud
				Pengembangan fasilitas olahraga;	Dinpora
				Pengembangan pasar tradisional;	Dindagkop UKM
				Penataan kawasan perkotaan dan penerangan jalan utama	Dinputaru, Dinhub, DLH, Dinperkim, DLH
Kemiskinan dan Kesempatan Kerja;	Memperkuat Ketahanan Sosial dan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan	Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman	Demak Tangguh dan Lestari		
Kerusakan lingkungan Hidup;				Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar;	Dinsos P2PA
Penanganan Rob dan bencana				Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan;	Dinsos P2PA
				Pengelolaan sampah terpadu;	DLH
				Mitigasi dan penanggulangan banjir, rob dan kekeringan;	BPBD, Dinputaru
				Rehabilitasi kawasan pesisir;	DLH
				Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DLH

c. Program Prioritas Daerah Kolaborasi dengan Dunia Usaha

Selain Program Prioritas di atas, terdapat Rencana Program Prioritas di Kabupaten Demak yang akan dikolaborasikan dengan dunia usaha melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Program-program tersebut adalah:

No	Bidang	Program Prioritas
1	Pendidikan	• Peningkatan sarana prasarana pendidikan/rehabilitasi sekolah • Bantuan perlengkapan sekolah • Bantuan biaya pendidikan bagi anak yang kurang mampu di lingkungan sekitar perusahaan
2	Kesehatan	• Jamban sehat • Program JKN dalam mendukung pencapaian UHC
3	Olahraga	• Bantuan sarana prasarana olah raga • Bantuan pelaksanaan kegiatan keolahragaan
4	Sosial Keagamaan	• Bantuan sosial kepada masyarakat sekitar perusahaan • Bantuan sosial bagi korban bencana • Program JKN dan JKM bagi pekerja rentan • Bantuan penyelenggaraan kegiatan keagamaan • Rehabilitasi RTLH • Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana
5	Perekonomian Rakyat, UKM, dan Koperasi	• Bantuan modal bagi UMKM
6	Lingkungan	• Pembuatan RTH • Pemeliharaan Taman Kota • Penyediaan sarana prasarana kebersihan lingkungan • Pembuatan saluran air/sanitasi • PJU di sekitar jalan pantura
7	Lain-lain	• Perayaan HUT RI di lingkungan kecamatan dan kabupaten

3.2.4 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan kewilayahan merupakan pendekatan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang digunakan sebagai pedoman pemanfaatan potensi ruang, pemerataan pembangunan, dan peningkatan konektivitas antar wilayah. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menciptakan struktur wilayah yang lebih seimbang, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mempercepat pertumbuhan kawasan-kawasan strategis melalui pengelolaan ruang yang berkeadilan dan berkelanjutan. Arah kebijakan kewilayahan disusun dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, keterkaitan antar kawasan, serta potensi dan permasalahan yang spesifik di setiap wilayah. Kebijakan kewilayahan juga mengintegrasikan aspek potensi kewilayahan untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dalam pengembangan kewilayahan, Kabupaten Demak mengacu pada dokumen RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Potensi kewilayahan per kecamatan.

A. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMN 2025-2029

Pembangunan daerah Kabupaten Demak turut mendukung Asta Cita 2025-2029 sebagai bentuk keselarasan pembangunan Kabupaten Demak dengan pembangunan nasional. Bentuk dukungan Kabupaten Demak terhadap Asta Cita adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Dukungan Kabupaten Demak terhadap Program Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Bakesbangpol
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinkominfo
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinpertan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinpertan Pangan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinpertan Pangan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinpertan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinpertan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinpertan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinpertan Pangan
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinpertan Pangan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinpertan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinlutkan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinlutkan
		Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinlutkan

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinlutkan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinputaru
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinputaru
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinputaru
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinputaru
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	DLH
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinputaru
		Program Penataan Bangunan Gedung	Dinputaru
		Program Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungannya	Dinputaru
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinputaru
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinnakerind
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinnakerind
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinnakerind
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dindagkop UKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Dindagkop UKM
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparta
		Program Pemasaran Pariwisata	Dinparta

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinparta
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dindikbud
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dindikbud
		Program Pengembangan Kurikulum	Dindikbud
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinperpusar
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinperpusar
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinkes
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinpermades P2KB
		Program Pengendalian Penduduk	Dinpermades P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinpermades P2KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Dinsos P2PA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinsos P2PA
		Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinsos P2PA
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Dinsos P2PA
		Program Perlindungan Perempuan	Dinsos P2PA
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinsos P2PA
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinpora
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Dinpora
		Program Riset dan Inovasi Daerah	Bapperida
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bapperida
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinnakerind
		Program Hubungan Industrial	Dinnakerind
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinpora
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinnakerind
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinnakerind

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinnakerind
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Dindagkop UKM
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dindagkop UKM
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinsos P2PA
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinsos P2PA
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinsos P2PA
		Program Penanganan Bencana	Dinsos P2PA
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinsos P2PA
		Program Penatagunaan Tanah	Dinputaru
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dinputaru
		Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Dindukcapil
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Dinkominfo
		Program Kawasan Permukiman	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinperkim
		Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinputaru
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		Program Penataan Desa	Dinpermades P2KB

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinpermades P2KB
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Dinpermades P2KB
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinpermades P2KB
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat Daerah
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua PD
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Setda
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Set DPRD
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinkominfo
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bapperida
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bapperida
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKPAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKPAD
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dindagkop UKM
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dindikbud

NO	PRIORITAS NASIONAL	DUKUNGAN PROGRAM KABUPATEN	PD PELAKSANA
	Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Program Pengelolaan Permuseuman	Dindikbud
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dindikbud
		Program Pengelolaan Arsip	Dinperpusar
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinperpusar
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Bakesbangpol
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Bakesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bakesbangpol
		Program Penanggulangan Bencana	BPBD

Selain Asta Cita, terdapat pula 8 Program Hasil Terbaik Cepat Presiden-Wapres Prabowo-Gibran yang perlu diselaraskan dengan perencanaan daerah. Dukungan Kabupaten Demak terhadap delapan program tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.9
Program Hasil Terbaik Cepat Nasional Tahun 2025 dan Dukungan Kabupaten Demak

No	Program Hasil Terbaik Cepat	Dukungan Kabupaten Demak	Pelaksana
1	Memberikan Makan Bergizi Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita	- Dukungan koordinatif pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi; - Memastikan ketersediaan dan keamanan bahan baku; - Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita - Pemberian Tablet Tambah Darah untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui	DINDIKBUD, DINPERTAN PANGAN, DINKESDA, DINPERMADES P2KB
2	Menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Menuntaskan Kasus TBC dan Membangun Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	- Cek Kesehatan Gratis di semua Puskesmas dan sekolah - Kerja sama dengan APINDO untuk Cek Kesehatan Gratis di Perusahaan - Pelaksanaan kegiatan promotif, preventif dan kuratif TBC; - Penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas	DINKESDA
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional	- Penyediaan prasarana dan sarana pertanian (JUT, JITUT, dam parit, sumur dangkal, alsintan, bibit/benih berkualitas dan pupuk)	DINPERTAN PANGAN

No	Program Hasil Terbaik Cepat	Dukungan Kabupaten Demak	Pelaksana
		– Pembinaan pengelola lumbung pangan; – Pemberian bantuan stimulan gabah kepada lumbung pangan	
4	Membangun sekolah unggul dan revitalisasi sekolah	– Pengembangan sekolah unggulan setiap kecamatan – rehabilitasi sekolah/madrasah – penyediaan akses internet bagi sekolah	DINDIKBUD, DINKOMINFO, DINPUTARU
5	Melanjutkan dan menambah program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	– Beasiswa Demak Pintar – Beasiswa Penghafal Al Quran – Penambahan kepesertaan BPJS tenaga kerja rentan	DINDIKBUD, SETDA, DINSOS P2PA, DINNAKERIND
6	Menaikkan gaji ASN, (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI	– Tambahan kesejahteraan bagi guru madin/TPQ/Ponpes; – Pemberian tambahan penghasilan kepada ASN	SETDA, BKPSDM, BPKPAD
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	– memenuhi alokasi ADD dan memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa – rehabilitasi RTLH – Penyediaan rumah untuk korban bencana dan terdampak rob	DINPERMADES P2KB, BPKPAD, DINPERKIM
8	Optimalisasi penerimaan negara	– optimalisasi opsen pajak	BPKPAD

Terdapat arahan dari Surat Edaran Bersama Nomor 100.2.4/3207/SJ dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Program Strategis Nasional Tahun 2025–2029 pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah untuk mengakomodasi Program Strategis Nasional (PSN) ke dalam dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dukungan Pemerintah Kabupaten Demak terhadap arahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel III.3
Dukungan Kabupaten Demak terhadap Program Strategis Nasional

ARAHAN PELAKSANAAN PROGRAM STRATEGIS NASIONAL		DUKUNGAN DAERAH	
Program Strategis Nasional	Proyek/Kegiatan	Program (Nomenklatur)	OPD
Penanggulangan Kemiskinan	Optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinsos P2PA
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinsos P2PA
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SETDA
	Sekolah rakyat	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINDIKBUD
	Pembangunan 3 juta rumah	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINPERKIM

Sumber: Diolah, 2025

VISI, MISI, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH | III-83

Gambar III.2.
Peta Pengembangan Wilayah Jawa Tengah



Sumber: RPJMN 2025-2029, Lampiran IV

Kabupaten Demak mendapatkan highlight intervensi oleh Pemerintah Pusat sebagai berikut:

A. Pengembangan Kawasan Industri

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Demak dapat didukung dengan highlight indikasi intervensi sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan ToI Semarang-Demak
2. Pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban
3. Pembangunan TPST Regional Semarang-Demak
4. Perencanaan dan persiapan pembangunan Kereta Api Cepat (HST) Jakarta-Surabaya
5. Pengembangan koridor industri Kendal-Semarang-Kudus (sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki).
6. Pengembangan kawasan sentra produksi dan/atau industri garam
7. Pembangunan tanggul pantai/laut Kendal-Semarang-Demak dan pengembangan kawasan pesisir Semarang-Demak
8. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta produktivitas tenaga kerja melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja

B. Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi:

Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi di Kabupaten Demak dapat didukung dengan highlight indikasi intervensi sebagai berikut:

1. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat pada D.I Jragung
2. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah
3. Peningkatan daya guna lahan pertanian
4. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani
5. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
6. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan pada DAS Jragung
7. Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau
8. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar.
9. Pengembangan pusat/ laboratorium riset pertanian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *highlight* intervensi oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Kabupaten Demak akan memberikan dukungan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.10
Dukungan Program Kabupaten Demak terhadap RPJMN 2025-2029

No	Highlight Intervensi	Dukungan Program Nomenklatur	OPD Pelaksana	Lokus
1	Pembangunan Jalan Tol Sema-rang-Demak	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kec. Sayung, Kec. Karangtengah
2	Pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang-Tuban	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kec. Wonosalam, Kec. Demak, Kec. Gajah
3	Pembangunan TPST Regional Semarang-Demak	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	Kec. Wedung
4	Pengembangan koridor industri Kendal-Semarang-Demak-Kudus (sektor industri prioritas: industri kimia, industri mesin dan perlengkapan, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki)	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian	Kec. Sayung

No	Highlight Intervensi	Dukungan Program Nomenklatur	OPD Pelaksana	Lokus
5	Pengembangan kawasan sentra produksi dan atau industri garam di Demak	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Kec. Wedung
6	Pembangunan tanggul pantai/laut Kendal-Semarang-Demak dan pengembangan kawasan pesisir Semarang-Demak	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kec. Bonang, Kec. Sayung, Kec. Guntur, Kec. Karangtengah, Kec. Kebonagung
7	Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat antara lain D.I Jragung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kec. Karangawen
8	Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada area tangkapan air (catchment area) di wilayah DAS Jragung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kec. Karangawen
9	Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Jragung	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kec. Karangawen
10	Pembangunan Bendungan Dolog	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Kec. Mranggen

B. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMD Provinsi 2025-2029

Pengembangan wilayah Kabupaten Demak bukan hanya diselaraskan dengan pembangunan nasional, namun juga diselaraskan dengan pembangunan di tingkat provinsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengamanatkan 35 program yang didelegasikan pada seluruh kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Bentuk dukungan Kabupaten Demak terhadap program delegasi Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel III.11
Dukungan Program Pembangunan Kabupaten Demak terhadap Program Delegasi Provinsi 2025-2029

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Lokus penyelenggaraan pelatihan UMKM/ wirausaha	Kecamatan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan,	Penyelenggaraan pelatihan UMKM bagi wirausaha muda pemula,	Dinpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemenuhan sarana prasarana oleh raga di kecamatan.	Dinpora

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pembangunan RTH di kecamatan.	DLH
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Dinperkim
		Program Pengembangan Perumahan	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi korban bencana alam	Dinperkim
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembuatan <i>Sport center</i> mini dan peningkatan <i>Sport center</i> sesuai standar nasional	Dinpora
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pelaksanaan Workshop Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK serta Bimbingan Teknis dengan Pemerintah Desa sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi	Inspektorat Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemberian materi antikorupsi berbasis ISO 37001 dalam orientasi P3K dan Latsar CPNS sebagai upaya penguatan integritas dan pencegahan tindak pidana korupsi	BKPSDM
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Dinkesda
			Penyediaan layanan Pos Kesehatan Desa	Dinkesda
			Pengadaan Puskesmas Keliling Roda 2 dan Roda 4 di Puskesmas untuk mempermudah akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Demak	Dinkesda
			Pelaksanaan Program <i>Spelling</i> (Spesialis Keliling)	Dinkesda
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pelatihan dan pembinaan Budidaya Ikan Nila di Tambak dan bantuan bibit serta pakan ikan nila	Dinlutkan
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerja sama dengan Pihak Sekolah Swasta	-	-	bukan kewenangan kabupaten
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Program Perlindungan Khusus Anak	Konsolidasi Pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan Disabilitas	Dinsos P2PA
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Pembinaan dan penambahan Desa Wisata	Dinparta

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Fasilitasi pendaftaran badan hukum BUMDES untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan legalitas produk.	Dinpermades P2KB
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Program Penanganan Bencana	- Pemberian Pelatihan bagi masyarakat dan pembentukan Tim Reaksi Cepat Bencana Kabupaten - Peningkatan kapasitas relawan	BPBD
11	Cek Kesehatan Gratis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Kesehatan Masyarakat	Pelaksanaan Koordinasi, monitoring dan Evaluasi program CKG	Dinkesda
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Penyediaan layanan Kesehatan di puskesmas pembantu selama 5 hari dalam seminggu yang didukung oleh 1 Perawat, 1 Bidan dan 2 Kader untuk Dokter Umum terjadwal 1 minggu sekali	Dinkesda
13	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kompetensi ASN melalui pendidikan dan bimbingan teknis untuk menciptakan <i>good clear government</i>	BKPSDM
		Program Kepegawaian Daerah	Pelaksanaan <i>Assesment</i> ASN untuk meningkatkan profesionalitas dan kualitas ASN	BKPSDM
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pemberian bantuan hukum bagi guru, penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat miskin sebagai upaya mewujudkan ketahanan sosial dan pemenuhan hak dasar	Bagian Hukum Setda
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pemberian pendidikan dan latihan Teknis bagi Guru	BKPSDM
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Penyusunan Rencana Induk LLAJ dan Masterplan Kelengkapan Jalan	Dinhub
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten (kelengkapan jalan dan PJU)	Dinhub
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberian perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan termasuk pemberian BPJS ketenagakerjaan	Dinsos
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Forum Ulama-Umaro'	Bagian Kesra
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri	Program Pemberdayaan UMKM	Sosialisasi, Pendampingan, dan Fasilitasi Sertifikasi Halal	Dindagkop UKM bekerja sama dengan LPPOM MUI

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
	Rumah Tangga) secara Gratis		Peningkatan Kualitas Produk UMKM melalui Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)	Dindagkop UKM
			Sosialisasi dan Fasilitasi HAKI	Dindagkop UKM
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman	Pemeriksaan sampel P-IRT, pendampingan pemenuhan tindakan perbaikan, Monev CAPA dengan pelaku usaha P-IRT, dan Penyuluhan Keamanan Pangan P-IRT	Dinkesda
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan serta pemberian pelatihan dan sertifikasi juru sembelih halal untuk menciptakan rantai produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab	Dinpertan Pangan
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan <i>go international</i> , Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk meningkatkan kualitas desa di Kabupaten Demak	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Penyelenggaraan <i>training water rescue</i> sebagai upaya mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana banjir dan rob	BPBD
		Program Penanggulangan Bencana	Penambahan jumlah Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Demak	BPBD
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembentukan Unit Pengolah Pupuk Organik untuk memanfaatkan limbah ternak, termasuk pembuatan biogas	Dinpertan Pangan
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Program Penyuluhan Pertanian	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan ketahanan pangan	Dinpertan Pangan
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelatihan pengelola desa wisata untuk meningkatkan dan memasarkan potensi desa wisata	Dinparta
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Program Pengembangan UMKM	Pendampingan UMKM	Dindagkop UKM
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Inisiasi penyusunan rencana aksi ekonomi hijau	DLH
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan RTH Kabupaten Demak	DLH

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk Ormas, tokoh masyarakat dan pelajar	Bakesbangpol
			Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui safari upacara pimpinan daerah	Bakesbangpol
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Forum Ulama-Umaro	Bagian Kesra Setda
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	penyelenggaraan Fasilitasi Forum Ulama-Umaro Kabupaten untuk memberikan pandangan dan saran terhadap pelaksanaan Pembangunan yang lebih optimal	Bagian Kesra Setda
			Kegiatan Halaqah untuk menanamkan nilai agama pada kehidupan masyarakat Kabupaten Demak	Bagian Kesra Setda
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Pelaksanaan Fasilitasi Forum Ulama-Umaro di Kecamatan untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama di lingkup Kecamatan	Bakesbangpol
			Pemberian hibah FKUB	Bakesbangpol
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Pemberian hibah FPK untuk kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bagi etnis minoritas	Bakesbangpol
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan operasional kader Posyandu	Dinpermades P2KB
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kompetensi kader posyandu	Dinkesda
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan Senam bersama lansia tingkat kabupaten untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran lansia	Dinkesda
			Seminar Kesehatan Lansia	Dinkesda
			Pembinaan Teknis dan Penguatan Puskesmas Santun Lansia dan Perawatan Jangka Panjang Lansia	Dinkesda
			Pemberdayaan Lansia di kelompok organisasi	Dinkesda
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Pengiriman Calon Wirausaha Muda	Dinpora
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Penguatan Keuangan Dan Pengembangan Usaha	Dindagkop UKM
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Peningkatan Kelembagaan & SDM Koperasi	Dindagkop UKM

NO	PROGRAM DELEGASI	PROGRAM NOMENKLATUR	DUKUNGAN KABUPATEN	OPD
			Peningkatan Inovasi Dan Teknologi Koperasi Desa/Kelurahan	Dindagkop UKM
			Pelatihan Akuntansi	Dindagkop UKM
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih yang berprestasi di tingkat Daerah dan Provinsi	Dinpora
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Program Pengelolaan Pendidikan	inisiasi pembentukan sekolah inklusif yang memberikan kesetaraan hak pada seluruh siswa di setiap kecamatan	Dindikbud
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pemasangan <i>Early Warning System</i> untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana	BPBD

Selain itu, kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah terkait implementasi episentrum pertumbuhan ekonomi baru di WP Kedungsepur yang didukung oleh Pemerintah Kabupaten Demak, di antaranya:

1. Pengembangan Kawasan Industri Kendal – Demak – Semarang (Tekstil, Daging, Jamu, dan Pengolahan Ikan)

- a. Mendorong peningkatan investasi dan ekosistem industri antar Kawasan Industri di Kota Semarang, Demak dan Semarang, Kawasan Industri Kendal (KIK) dan KI Seafer;
- b. Penguatan kolaborasi perizinan dan penanaman modal dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha;
- c. Menyiapkan sistem Pendidikan menengah untuk menciptakan kesesuaian Pendidikan Pra-Kerja melalui membangun *link and match* SMK/SMA sederajat dengan dunia industri;
- d. Mendorong percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang Demak dan inisiasi proses rencana penyiapan rencana pembangunan Jalan Tol Demak-Kudus-Pati-Rembang- Perbatasan Jawa Timur;
- e. Mendorong integrasi antarmoda kereta api (peningkatan efisiensi logistik);
- f. Peningkatan kondisi dan kinerja serta optimalisasi Terminal Tipe B sebagai simpul perekonomian pada Terminal Penggaron (simpul integrasi Trans Jateng, Trans Semarang dan *Feeder* Trans Semarang) serta mendorong revitalisasi Terminal Tipe C yang dilalui koridor angkutan umum aglomerasi perkotaan;
- g. Pengembangan sentra industri hijau;
- h. Pengembangan ekspor produk unggulan;
- i. Pendampingan dan fasilitasi sertifikasi SNI dan merek.



2. Peningkatan produksi dan hilirisasi sektor pertanian (komoditas unggulan: padi, jagung, bawang merah, tanaman perkebunan, susu, kedelai, garam dan perikanan tangkap)
 - a. Peningkatan produksi pertanian, melalui:
 - 1) Fasilitasi sarana prasarana pada daerah potensi produksi pertanian; penyediaan benih/bibit berkualitas; penjaminan kualitas pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT); dan pengembangan ternak lokal berbasis potensi melahirkan bibit ternak khas Jawa; korporasi pertanian; pemanfaatan urban farming; pencegahan alih fungsi lahan pertanian; pengembangan pelabuhan perikanan; bantuan sarana prasarana penangkapan ikan dan garam; serta pengelolaan kawasan konservasi;
 - 2) Fasilitasi sarana prasarana pada daerah potensi produksi pertanian;
 - 3) Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi);
 - 4) Mendorong rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada DI Glapan, DI Sedadi, DI Klambu, DI Jragung, DI Dumpil, DI Sidorejo, DI Gemblong;
 - b. Hilirisasi pertanian, melalui:
 - 1) Penggunaan teknologi dalam pengolahan pertanian berbasis inovasi dan kolaborasi, fasilitasi pelatihan pengolahan produk pertanian; Pemasaran dan *branding* produk; penjaminan keamanan pangan produk hewan melalui sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) unit usaha produk hewan;
 - 2) fasilitasi diversifikasi, kemasan, dan jejaring pemasaran produk olahan ikan, serta pengembangan pojok UMKM hasil olahan ikan;
 - 3) Peningkatan promosi produk industri agro melalui fasilitasi pameran.

C. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Berdasarkan RTRW Kabupaten Demak

• Kebijakan Kewilayahan Per Kecamatan

Kebijakan kewilayahan per kecamatan di Kabupaten Demak merupakan salah satu instrumen strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara spesifik dan terarah untuk masing-masing kecamatan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengarahkan pengembangan wilayah secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keselarasan antara kepentingan lokal dan kepentingan daerah secara umum.

Dalam penyusunannya, kebijakan kewilayahan mempertimbangkan berbagai aspek yang meliputi potensi sumber daya alam dan manusia, permasalahan



pembangunan yang dihadapi, karakteristik fisik dan sosial wilayah, serta peran dan fungsi strategis masing-masing kecamatan dalam struktur ruang Kabupaten Demak. Hal ini mencakup penguatan pusat-pusat pertumbuhan, konektivitas antarwilayah, pengelolaan kawasan rawan bencana, serta pelestarian kawasan lindung dan budidaya.

1. Kecamatan Sayung

Kecamatan Sayung merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Demak yang terletak di 6°56'31.4" - 6°57'08.2" Lintang Selatan dan 110°29'26.4" - 110°31'33.2" Bujur Timur. Wilayah Kecamatan ini terdiri atas 20 Desa di mana Desa yang paling luas adalah Desa Bedono sebesar 7,39 km² dan Desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Dombo sebesar 1,32 km².

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Struktur ruang terbentuk melalui sistem pusat-pusat permukiman dan jaringan prasarana wilayah yang saling terhubung dan membentuk suatu tatanan hierarkis. Hierarki struktur ruang ditetapkan untuk mendukung pola distribusi kegiatan sosial, ekonomi, dan pelayanan secara efisien dan merata. Hierarki ini mengacu pada tingkat pelayanan, jangkauan pengaruh, serta fungsi strategis masing-masing wilayah.

Berdasarkan Rencana Struktur Ruang Kabupaten Demak, Kecamatan Sayung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu pusat permukiman yang memiliki peran strategis dalam melayani kegiatan berskala internasional, nasional, maupun antarprovinsi. Penetapan ini didasarkan pada posisi geografis Kecamatan Sayung yang berada pada koridor strategis antara Semarang dan kawasan Pantura Timur, serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan potensi ekonomi yang berkembang pesat, khususnya di sektor industri, logistik, dan perdagangan.

Sebagai PKN, Kecamatan Sayung diorientasikan untuk menjadi simpul utama dalam jaringan struktur ruang Kabupaten Demak, sekaligus berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah. Fungsi PKN yang disandang Sayung juga mengharuskan adanya dukungan pengembangan infrastruktur berskala makro, penyediaan kawasan industri terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem transportasi dan logistik yang menghubungkan kawasan ini dengan pusat-pusat pertumbuhan regional lainnya. Dalam konteks kebijakan penataan ruang, status Kecamatan Sayung sebagai PKN memiliki implikasi penting terhadap penataan fungsi lahan, alokasi investasi strategis, serta perlunya sinergi lintas sektor dan lintas wilayah guna memastikan terwujudnya keterpaduan pembangunan yang mendukung daya saing wilayah Kabupaten Demak dalam skala nasional dan global.



Selain ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kecamatan Sayung juga memiliki peran penting dalam struktur pelayanan wilayah di Kabupaten Demak sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Kecamatan Sayung menyediakan pelayanan sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar yang menjangkau skala kecamatan dan beberapa desa sekitarnya. Fungsi ini tercermin dalam keberadaan fasilitas pendidikan menengah, layanan kesehatan tingkat kecamatan, pasar induk, serta pusat administrasi pemerintahan kecamatan yang melayani kebutuhan lintas desa. Lebih lanjut, Kecamatan Sayung juga memuat beberapa titik fungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yaitu pusat-pusat aktivitas yang melayani kebutuhan masyarakat dalam lingkup antar-desa. Fungsi ini diwujudkan melalui penyediaan sekolah dasar, layanan kesehatan primer, pasar lingkungan, serta sarana sosial-keagamaan di tingkat komunitas. Ketiga peran tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Sayung memiliki posisi strategis yang berlapis dalam struktur ruang Kabupaten Demak, yang harus dikelola secara terpadu dan berkelanjutan agar dapat mengoptimalkan fungsi ruangnya di berbagai skala pelayanan, mulai dari lokal hingga nasional.

B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis adalah bagian dari perencanaan tata ruang yang memberikan arah pengembangan secara lebih rinci pada kawasan yang dinilai memiliki nilai strategis, baik pada skala nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Kecamatan Sayung ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak karena memiliki posisi geografis, fungsi ekonomi, serta potensi pengembangan yang signifikan bagi skala kabupaten, regional, hingga nasional. Penetapan ini juga sejalan dengan status Sayung sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang menjadi simpul penting dalam jaringan logistik dan industri di koridor Pantura Jawa Tengah.

Di dalam dokumen RTRW Kabupaten Demak, diamanatkan bahwa dalam hal penetapan kawasan strategis, Kecamatan Sayung masuk ke dalam Kawasan Strategis Daerah yang meliputi:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - a. kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer

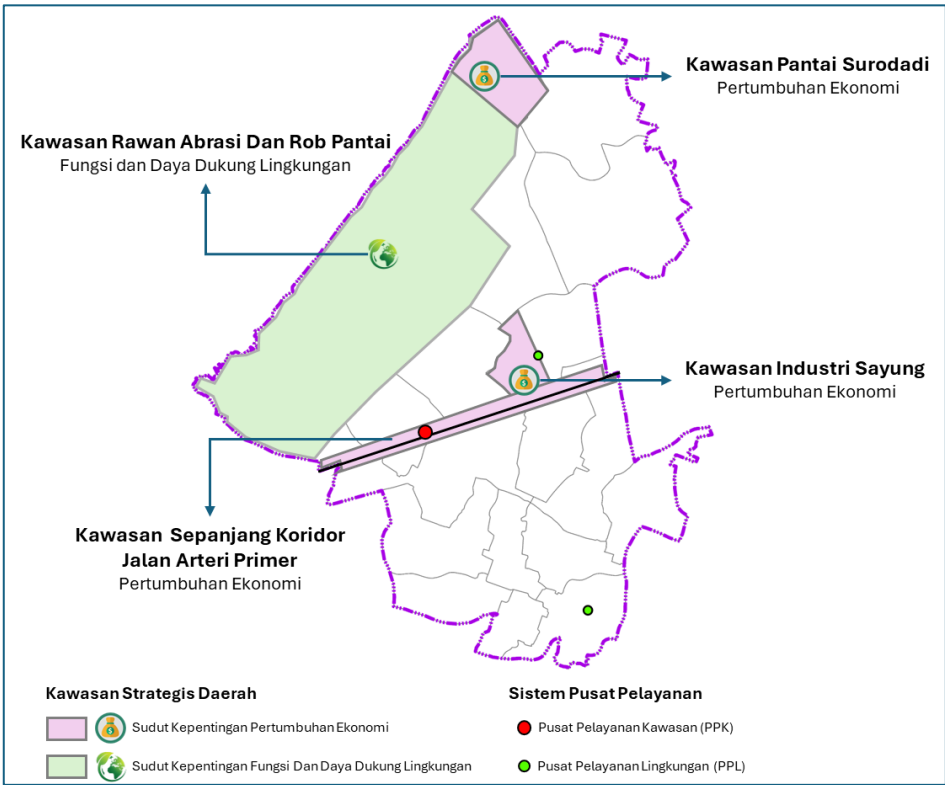
Kawasan ini dinilai strategis karena mendekati akses utama menuju Kota Semarang, menjadikannya titik potensial untuk pengembangan industri, logistik, dan perdagangan. Pemanfaatan kawasan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

- b. kawasan industri terpadu Sayung

- c. kawasan wisata Pantai Surodadi
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yang berupa kawasan rawan abrasi dan rob pantai

Sebagian besar wilayah pesisir Kecamatan Sayung ditandai sebagai kawasan yang difokuskan untuk penanganan abrasi dan rob. Hal ini mencerminkan urgensi pembangunan infrastruktur pengendali abrasi, penguatan tanggul laut, serta upaya konservasi mangrove dan pemulihan ekosistem pesisir untuk menjaga keberlanjutan wilayah pesisir Sayung.

Gambar III.3.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Sayung



2. Kecamatan Karangtengah

Karangtengah sebagai salah satu kecamatan di kabupaten Demak terletak pada 6°51'42,4"-6°56'44" LS dan 110°30'48"-110°38'22,5"BT. Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Demak, kecamatan Wonosalam dan kecamatan Bonang, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Guntur, serta sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Sayung.

Kecamatan Karangtengah memiliki luas 51,54 km². Kecamatan Karangtengah memiliki 17 desa dengan Desa Batu yang memiliki wilayah terluas, yaitu sebesar 11,06 km². Sedangkan desa yang luasnya paling kecil adalah Desa Karangtowo sebesar 2,81 km².

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan hierarki struktur ruang adalah urutan tingkatan pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana dalam suatu wilayah, yang disusun berdasarkan

skala pelayanan, cakupan wilayah pengaruh, dan peran strategisnya dalam mendukung sistem ruang wilayah.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Karangtengah memiliki kedudukan kawasan strategis. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Karangtengah ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yang artinya wilayah ini memiliki peran penting dalam melayani kegiatan berskala nasional, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam lingkup yang lebih luas, bahkan lintas daerah. Lebih lanjut, Kecamatan Karangtengah juga mengemban fungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu pusat kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat pada skala kecamatan atau beberapa desa di sekitarnya. Selain itu, wilayah ini juga memiliki peran sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang lebih bersifat lokal dan melayani kebutuhan dasar antar desa. Fungsi PPL ini terkonsentrasi di Desa Karangsari dan Desa Pulosari, yang menjadi simpul pelayanan dan aktivitas masyarakat di tingkat lingkungan.

Dengan kombinasi peran sebagai PKN, PPK, dan PPL, Kecamatan Karangtengah memainkan peran ganda dalam mendukung keterpaduan pembangunan wilayah, baik dari skala nasional hingga lokal. Kedudukan ini menuntut adanya pengelolaan ruang yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mendukung optimalisasi fungsi-fungsi tersebut.

B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis merupakan salah satu elemen penting dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang menetapkan wilayah-wilayah tertentu dengan nilai kepentingan tinggi dan pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Suatu kawasan dikategorikan sebagai strategis apabila keberadaannya memiliki dampak besar terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, kawasan strategis diprioritaskan untuk mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaan dan pengembangannya.

Dalam konteks perencanaan ruang di Kabupaten Demak, Kecamatan Karangtengah merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis dan masuk ke dalam dua kategori perencanaan kawasan strategis, yakni:

a. Rencana Kawasan Strategis Nasional

Kecamatan Karangtengah termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) melalui keterlibatannya dalam kawasan aglomerasi Kedungsepur (Kendal – Demak – Ungaran – Salatiga – Semarang – Purwodadi). Kawasan ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan kawasan perkotaan dan konektivitas antarwilayah di Jawa Tengah. Dalam kerangka ini,

Karangtengah memiliki peran penting dalam mendukung integrasi ekonomi regional, pengembangan infrastruktur metropolitan, serta peningkatan pelayanan publik lintas kabupaten/kota.

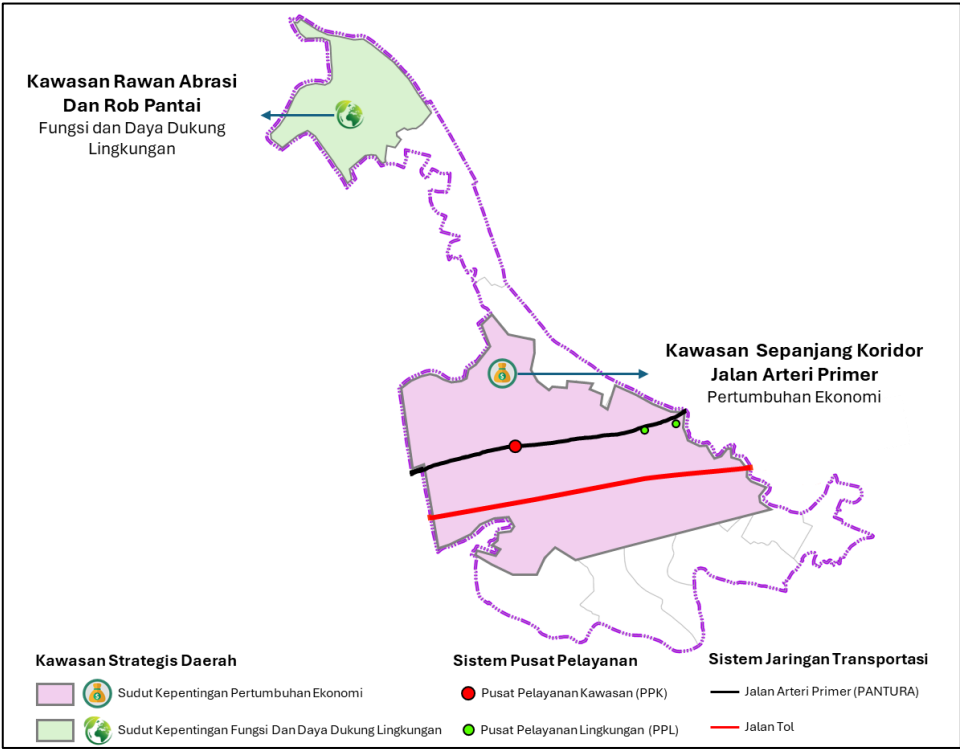
b. Rencana Kawasan Strategis Daerah

Dalam lingkup Kabupaten Demak, Kecamatan Karangtengah ditetapkan sebagai bagian dari dengan dua fokus utama, yaitu:

- Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
Wilayah ini termasuk dalam koridor pengembangan ekonomi yang berada di sepanjang jalur jalan arteri primer, yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di wilayah Demak dan sekitarnya. Arah pengembangan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, serta aktivitas ekonomi lainnya yang bersifat lintas wilayah. Pengembangan difokuskan pada:
 - Kawasan industri, pergudangan, dan logistik.
 - Pusat perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan jaringan jalan utama.
 - Peningkatan aksesibilitas kawasan menuju kota-kota di sekitarnya.
- Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

Kecamatan Karangtengah juga ditetapkan sebagai kawasan strategis lingkungan karena menghadapi tekanan ekologis berupa kerawanan abrasi dan rob pantai. Oleh karena itu, kawasan ini memerlukan pengelolaan ruang yang berwawasan lingkungan, termasuk penguatan sistem perlindungan pesisir, pemanfaatan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta pelestarian ekosistem pesisir sebagai bagian dari strategi mitigasi dan adaptasi bencana.

Gambar III.4.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Karangtengah



3. Kecamatan Demak

Kecamatan Demak, secara geografis terletak di bagian selatan Kabupaten Demak yaitu di 6°51'42.4" - 6°56'44" Lintang Selatan dan 110°30'48" - 110°38'22.5" Bujur Timur. Kecamatan Demak memiliki luas 61,56 km² atau 6,81% dari luas wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Demak memiliki 19 desa dengan desa yang paling luas adalah Desa Turirejo sebesar 6,28 km² dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Kelurahan Singorejo sebesar 0,87 km².

Kecamatan Demak di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Bonang, Kecamatan Wedung, dan Kecamatan Mijen, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gajah dan Kecamatan Karanganyar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan Hierarki Struktur Ruang merujuk pada tingkatan atau jenjang pusat-pusat kegiatan dalam sistem struktur ruang suatu wilayah, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hierarki ini menggambarkan hubungan fungsional antara pusat-pusat permukiman, pusat pelayanan, dan jaringan infrastruktur yang saling mendukung dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah secara merata dan terpadu. Dengan kata lain, hierarki struktur ruang menentukan bagaimana suatu kawasan berperan dan berfungsi dalam sistem ruang yang lebih luas, baik sebagai pusat pertumbuhan utama, pendukung, maupun penghubung.

Dalam tatanan hierarki struktur ruang Kabupaten Demak, wilayah Kecamatan Demak memiliki kedudukan sebagai:

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Kecamatan Demak ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional, yang memiliki fungsi untuk melayani aktivitas berskala nasional hingga internasional, serta menjadi bagian dari kawasan aglomerasi metropolitan Kedungsepur. Fungsi ini mencakup pelayanan dalam bidang pemerintahan, perdagangan, transportasi, serta pusat pelayanan sosial dan ekonomi berskala besar. Kedudukannya sebagai PKN menjadikan Kecamatan Demak sebagai simpul strategis dalam sistem jaringan kota di Jawa Tengah, yang mendukung pertumbuhan wilayah lintas kabupaten bahkan provinsi.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Selain sebagai PKN, Kecamatan Demak juga berperan sebagai Pusat Kegiatan Lokal, yakni pusat kegiatan yang memberikan pelayanan dalam lingkup kabupaten atau beberapa kecamatan sekitarnya. Fungsi ini lebih menekankan pada penyediaan pelayanan dasar seperti pasar rakyat, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menetapkan wilayah tertentu yang memiliki arti penting dan prioritas tinggi dalam pembangunan karena pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kawasan strategis dipilih dan direncanakan secara khusus karena perannya yang vital terhadap keberlangsungan pembangunan wilayah secara keseluruhan, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Penetapan kawasan strategis biasanya didasarkan pada kriteria tertentu, seperti potensi pertumbuhan ekonomi yang tinggi (misalnya kawasan industri, pelabuhan, atau pariwisata unggulan), keberadaan aset lingkungan yang harus dilindungi (seperti kawasan konservasi dan daerah resapan air), nilai historis dan budaya yang signifikan (misalnya kawasan cagar budaya), atau sensitivitas terhadap bencana (seperti kawasan rawan longsor dan banjir). Setiap kawasan strategis direncanakan dengan pendekatan yang terpadu, lintas sektor, dan berbasis spasial, agar fungsi strategis yang dimiliki dapat dimaksimalkan secara optimal dan berkelanjutan.

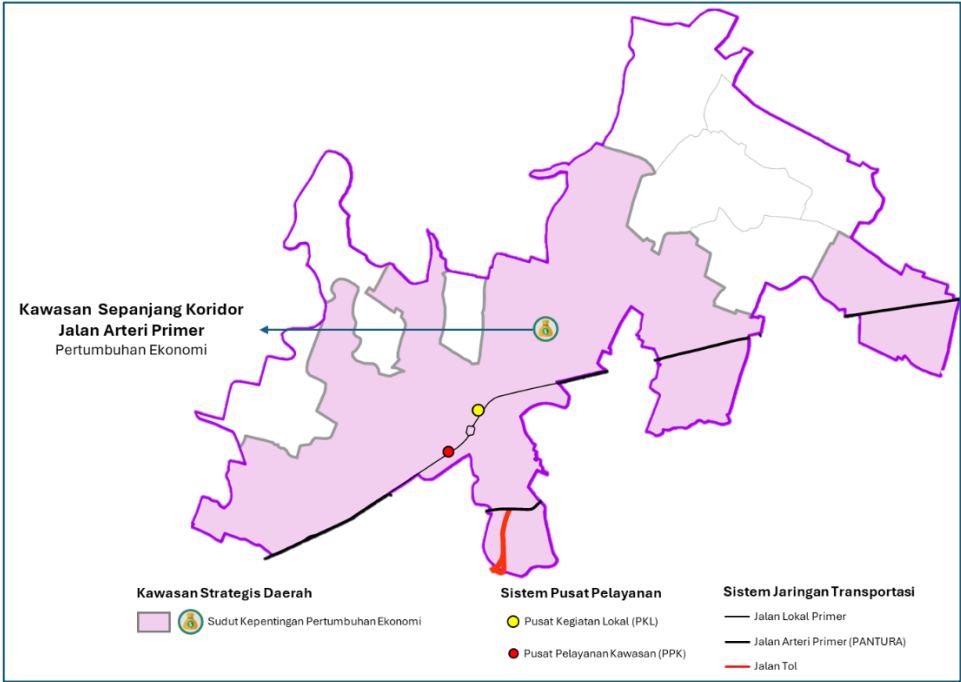
Di wilayah Kecamatan Demak, perencanaan pengembangan kawasan strategis mencakup dua tingkatan, yaitu kawasan strategis tingkat provinsi dan kawasan strategis tingkat daerah. Pada skala provinsi, terdapat Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki nilai penting dari aspek sosial dan budaya, yakni Kawasan Masjid Agung Demak, yang menjadi simbol warisan sejarah dan pusat aktivitas keagamaan.

Sementara itu, Kawasan Strategis Daerah ditetapkan berdasarkan pertimbangan pertumbuhan ekonomi, yang berlokasi di sepanjang koridor jalan arteri primer. Kawasan ini melintasi sebagian besar wilayah Kecamatan Demak dan ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan sektor ekonomi, khususnya perdagangan dan jasa.

Pengembangan kawasan ini diarahkan pada:

- a. Penyediaan ruang usaha dan pusat perdagangan modern.
- b. Pengembangan kawasan layanan publik, perkantoran, dan fasilitas pendukung ekonomi.
- c. Revitalisasi kawasan pusat kota dan penguatan sektor informal.

Gambar III.5.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Demak



Jalur-jalur yang melewati wilayah Kecamatan Demak memperkuat peran wilayah ini sebagai simpul konektivitas utama antara kawasan pesisir selatan, pusat kota Demak, hingga koridor ekonomi timur dan barat kabupaten. Integrasi jaringan transportasi ini menjadi krusial dalam menggerakkan aktivitas ekonomi dan mempermudah distribusi hasil produksi perikanan maupun perdagangan lainnya.

4. Kecamatan Mranggen

Kecamatan Mranggen merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Demak dengan luas wilayah sebesar 72,22 km². Kecamatan Mranggen memiliki 19 desa dengan desa yang paling luas adalah Desa Sumberejo sebesar 8,89 km² dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Brumbung sebesar 1,68 km².

Kecamatan Mranggen berbatasan langsung dengan Kecamatan Sayung di sebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Karangawen, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan hierarki struktur ruang merujuk pada susunan tingkatan pusat-pusat kegiatan dan jaringan prasarana dalam sistem tata ruang suatu wilayah. Hierarki ini menentukan peran fungsional masing-masing wilayah berdasarkan skala pelayanan, jangkauan pengaruh, serta kontribusinya terhadap sistem ruang secara keseluruhan — baik dalam lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Secara prinsip, hierarki struktur ruang bertujuan untuk:

- Mengarahkan pemerataan pembangunan antarkawasan.

- Meningkatkan efisiensi distribusi pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.
- Memperkuat konektivitas antar pusat kegiatan dan simpul transportasi.

Dalam konteks Rencana Struktur Ruang Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen memegang peranan strategis yang cukup signifikan dalam sistem pengembangan wilayah. Kedudukan wilayah ini tercermin dalam dua level hierarki struktur ruang, yaitu sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan sekaligus sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Kecamatan Mranggen ditetapkan sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional, yaitu pusat kegiatan yang melayani aktivitas berskala internasional, nasional, atau lintas provinsi. Hal ini sejalan dengan posisi Kecamatan Mranggen yang termasuk dalam wilayah aglomerasi metropolitan Kedungsepur (Kendal-Demak-Ungaran-Salatiga-Purwodadi), sebuah kawasan strategis nasional yang berperan penting dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan kawasan perkotaan di Jawa Tengah bagian tengah.

Peran Mranggen sebagai PKN memperkuat posisinya sebagai:

Simpul jaringan transportasi regional, dengan kedekatannya ke Kota Semarang dan akses ke jalur utama nasional.

- Wilayah penyangga kegiatan ekonomi metropolitan, yang potensial untuk pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, dan logistik.
- Wilayah penghubung antar kabupaten/kota, yang mendukung integrasi kegiatan antarsektor lintas daerah.

b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Selain sebagai PKN, Kecamatan Mranggen juga diklasifikasikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal, yang memiliki fungsi untuk melayani aktivitas masyarakat dalam lingkup kabupaten atau beberapa kecamatan di sekitarnya. Sebagai PKL, Mranggen menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dasar, seperti:

- Pusat perdagangan lokal (pasar rakyat, pusat grosir, dan layanan UMKM).
- Fasilitas pendidikan dan kesehatan skala kabupaten.
- Sarana transportasi dan perhubungan lokal.

5. Kecamatan Gajah

Kecamatan Gajah merupakan salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Demak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Kecamatan Gajah memiliki luas 47,84 km². Kecamatan Gajah memiliki 18 desa dengan desa yang paling luas adalah Desa Kedondong sebesar 4,57 km² dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Mojosimo sebesar 1,69 km².

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Hierarki struktur ruang adalah sistem pengorganisasian ruang berdasarkan tingkatannya dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Hierarki ini menunjukkan susunan pusat-pusat kegiatan dari skala kecil hingga besar, yang saling terhubung melalui jaringan transportasi dan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan amanat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Gajah ditetapkan memiliki fungsi strategis dalam struktur ruang perkotaan Kabupaten. Kecamatan ini menempati posisi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu pusat kegiatan yang dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam cakupan skala kecamatan maupun beberapa desa di sekitarnya. Selain itu, Kecamatan Gajah juga berperan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni pusat pelayanan dengan jangkauan yang lebih kecil, yaitu antar desa, yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setempat.

Penetapan Kecamatan Gajah sebagai PPK dan PPL menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki potensi dan kapasitas untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai simpul pelayanan publik, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas sosial-ekonomi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pengembangan infrastruktur, aksesibilitas, dan fasilitas umum di Kecamatan Gajah perlu diarahkan sesuai dengan peran tersebut agar mampu menjalankan fungsi strategisnya secara optimal dalam sistem struktur ruang Kabupaten Demak.

B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis adalah bagian dari rencana tata ruang yang menetapkan wilayah-wilayah tertentu yang memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan wilayah, pemerataan pembangunan, kelestarian lingkungan, atau keamanan dan pertahanan. Kawasan ini ditetapkan karena karakteristik, potensi, atau perannya yang strategis baik dalam lingkup nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam konteks RTRW Kabupaten Demak, Kecamatan Gajah telah ditetapkan sebagai bagian dari Rencana Kawasan Strategis Daerah, khususnya sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan ini didasarkan pada letak geografis Kecamatan Gajah yang dilalui oleh koridor jalan arteri primer, yakni Jalur Pantura Jawa, yang merupakan salah satu jalur transportasi dan distribusi barang utama di Pulau Jawa.

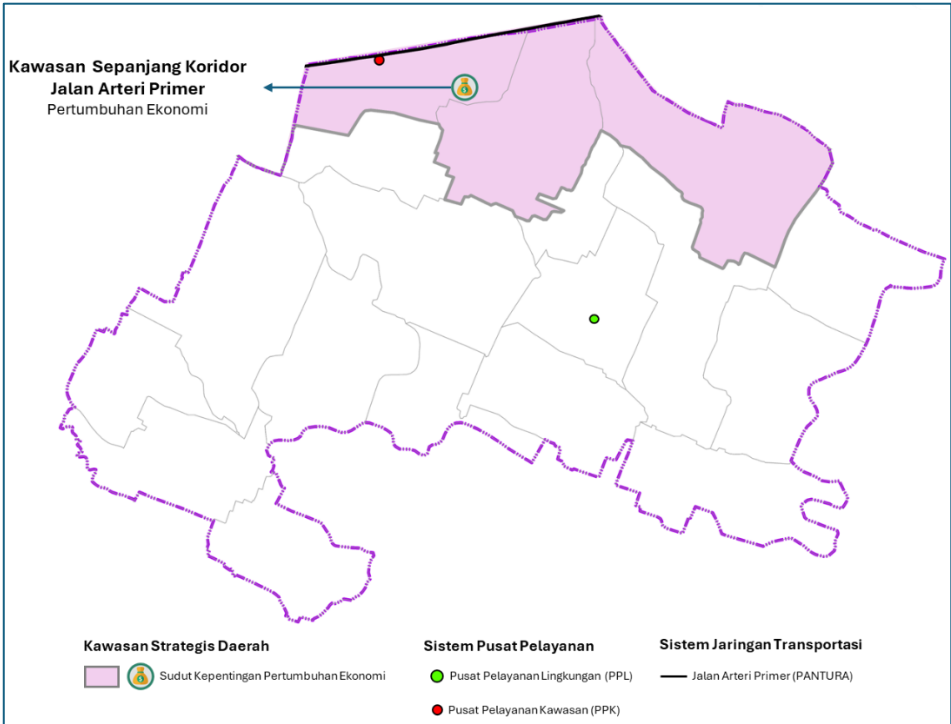
Kawasan ini memiliki potensi besar sebagai simpul kegiatan ekonomi yang dapat mendorong tumbuhnya perdagangan, jasa, serta sektor industri berskala kecil dan menengah. Oleh karena itu, pengembangan Kecamatan Gajah diarahkan

pada penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, peningkatan aksesibilitas wilayah, serta penciptaan ruang-ruang usaha yang kondusif untuk pertumbuhan sektor informal maupun formal.

Penetapan Kecamatan Gajah dalam kawasan strategis ini bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan konektivitas antarwilayah di sepanjang jalur Pantura,
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal,
- c. Menyebarkan pusat-pusat kegiatan ekonomi secara lebih merata,
- d. Serta mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif berbasis potensi wilayah.

Gambar III.6.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Gajah



6. Kecamatan Dempet

Kecamatan Dempet merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Luas kecamatan ini adalah 61,62 km² yang terbagi menjadi 16 wilayah desa dengan desa terluas adalah Desa Kunir (5,66 km²) dan Desa Botosengon (1,59 km²). Secara geografis, Kecamatan Dempet terletak di 6°54'56" hingga 7°1'8" Lintang Selatan dan 110°41'19" hingga 110°47'11" Bujur Timur. Kecamatan Dempet juga merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain yaitu Kabupaten Grobogan. Batas administrasi Kecamatan Dempet adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gajah
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Kebonagung
- Sebelah Barat : Kecamatan Wonosalam



A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Hierarki struktur ruang perkotaan merupakan sistem pengorganisasian wilayah berdasarkan tingkat pelayanan dan peran fungsionalnya terhadap kawasan sekitarnya. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keterpaduan pembangunan antarwilayah, efisiensi pelayanan publik, serta distribusi aktivitas sosial dan ekonomi secara merata. Kedudukan dalam hierarki struktur ruang ditentukan oleh seberapa luas cakupan pelayanan dan intensitas aktivitas yang terjadi di suatu wilayah.

Dalam konteks Kabupaten Demak, Kecamatan Dempet memiliki kedudukan penting dalam struktur ruang, yakni sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai PPK, Kecamatan Dempet memiliki tanggung jawab untuk melayani kegiatan skala kawasan yang mencakup beberapa desa di sekitarnya. Fungsinya meliputi penyediaan fasilitas pendidikan menengah, layanan kesehatan tingkat kecamatan, pasar tradisional berskala besar, serta fasilitas perkantoran dan layanan pemerintahan yang menunjang aktivitas masyarakat lintas desa.

Sementara itu, sebagai PPL, Kecamatan Dempet juga memiliki peran untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat di tingkat antar desa. Ini mencakup penyediaan fasilitas layanan primer seperti pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar, fasilitas ibadah, dan ruang publik komunitas. Fungsi ganda sebagai PPK dan PPL menjadikan Kecamatan Dempet sebagai simpul pelayanan yang strategis, yang dapat mendorong pertumbuhan kawasan sekitar sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Dengan peran tersebut, pengembangan Kecamatan Dempet diarahkan untuk memperkuat kapasitas pelayanannya, meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, serta memperluas fungsi-fungsi ekonomi lokal yang mampu menstimulasi pertumbuhan wilayah secara merata dan berkelanjutan.

7. Kecamatan Guntur

Kecamatan Guntur merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Secara geografis, Kecamatan Guntur terletak di antara 110°32'50" hingga 110°40'29" Bujur Timur dan 6°56'2" hingga 7°1'21" Lintang Selatan. Kecamatan Guntur memiliki luas wilayah sebesar 57,52 km² yang terbagi menjadi 20 wilayah desa dengan desa yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Desa Temuroso sebesar 5,22 km² dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Sarirejo sebesar 1,46 km².

Batas administrasi Kecamatan Guntur adalah sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Karangtengah, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wonosalam, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangawen dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sayung.



A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan dalam hierarki struktur ruang perkotaan merupakan representasi dari tingkat peran dan fungsi suatu wilayah dalam mendukung kegiatan sosial, ekonomi, serta pelayanan publik di sekitarnya. Hierarki ini disusun secara berjenjang, mulai dari skala lokal hingga regional, untuk memastikan pemerataan pembangunan dan efisiensi pengelolaan ruang. Dalam sistem ini, wilayah diklasifikasikan ke dalam beberapa pusat pelayanan, seperti Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), hingga Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Nasional tergantung pada luas cakupan pelayanan dan intensitas kegiatan yang berlangsung.

Kecamatan Guntur menempati posisi strategis dalam hierarki struktur ruang perkotaan di Kabupaten Demak, dengan kedudukan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai PPK, Kecamatan Guntur berperan menyediakan layanan dan mendukung aktivitas sosial-ekonomi dalam cakupan wilayah yang lebih luas, yaitu meliputi skala kecamatan atau beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini mencerminkan pentingnya Kecamatan Guntur sebagai simpul pelayanan yang menopang pertumbuhan kawasan, baik dari aspek mobilitas, ekonomi, maupun infrastruktur dasar.

Sementara itu, dalam kapasitasnya sebagai PPL, Kecamatan Guntur juga memiliki tanggung jawab melayani kegiatan dengan skala antar desa. Peran ini menjadikan Kecamatan Guntur sebagai titik sentral dalam mendistribusikan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan fasilitas penunjang ekonomi, bagi desa-desa di sekitarnya. Kedudukan ganda sebagai PPK dan PPL menunjukkan bahwa Kecamatan Guntur memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong integrasi antarwilayah dan pemerataan pembangunan, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan lokal yang mendukung perwujudan tata ruang yang efektif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Demak.

8. Kecamatan Bonang

Secara geografis, Kecamatan Bonang terletak di antara 6°47'40" hingga 6°54'42" Lintang Selatan dan 110°31'18" hingga 110°39'55" Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Bonang adalah 83,24 km² atau sebesar 9,28% dari luas wilayah Kabupaten Demak. Wilayah Kecamatan Bonang terbagi atas 21 desa di mana desa dengan wilayah terluas adalah Desa Purworejo yaitu seluas 7,41 km² dan desa dengan luas wilayah terkecil yaitu Desa Margolinduk dengan luas wilayah sebesar 0,95 km². Secara administrasi, Kecamatan Bonang berbatasan langsung dengan Kecamatan Wedung di bagian utara, Kecamatan Demak di



bagian timur, Kecamatan Karang Tengah di bagian selatan dan Laut Jawa di bagian barat.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Hierarki struktur ruang adalah sistem pengelompokan wilayah berdasarkan peran, fungsi, dan tingkat pelayanannya terhadap kawasan sekitarnya. Konsep ini berfungsi untuk menciptakan keterpaduan pengembangan wilayah, efisiensi pelayanan publik, serta distribusi aktivitas sosial, ekonomi, dan infrastruktur secara merata. Penetapan kedudukan dalam hierarki ini mempertimbangkan luas cakupan layanan dan intensitas kegiatan yang berlangsung di suatu wilayah, baik pada tingkat lokal maupun regional.

Dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang diklasifikasikan sebagai salah satu wilayah dengan peran ganda dalam sistem struktur ruang, yakni sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

a. Kecamatan Bonang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Sebagai PPK, Kecamatan Bonang memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung penyediaan layanan skala kawasan yang mencakup sejumlah desa di sekitarnya. Fungsi ini mencakup pelayanan administrasi pemerintahan, kegiatan ekonomi skala menengah, fasilitas kesehatan tingkat kecamatan, lembaga pendidikan menengah, serta pusat distribusi barang dan jasa. Kedudukan Bonang sebagai PPK menjadikannya simpul pertumbuhan lokal yang strategis dan aksesibilitasnya terhadap pusat-pusat ekonomi lainnya di Kabupaten Demak. Dengan intensitas kegiatan yang cukup tinggi dan jaringan infrastruktur yang relatif memadai, Kecamatan Bonang memainkan peran penting dalam menopang dinamika sosial dan ekonomi di wilayah utara Kabupaten Demak.

b. Kecamatan Bonang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Selain berfungsi sebagai PPK, Kecamatan Bonang juga ditetapkan sebagai PPL, yaitu pusat pelayanan dengan cakupan yang lebih terbatas pada skala antar desa. Dalam konteks ini, Kecamatan Bonang menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dasar, fasilitas kesehatan tingkat desa/puskesmas pembantu, serta pelayanan administratif untuk kebutuhan masyarakat setempat. Fungsi PPL ini secara spesifik terkonsentrasi di dua desa utama, yaitu Desa Gebang dan Desa Bonangrejo, yang masing-masing memiliki potensi strategis dan dukungan infrastruktur untuk menyelenggarakan layanan kepada desa-desa di sekitarnya.

Kedua desa tersebut memiliki fasilitas dan jaringan yang relatif lebih lengkap dibanding desa lainnya di Kecamatan Bonang, menjadikannya sebagai titik pelayanan primer dalam lingkup lokal. Hal ini didukung pula oleh konektivitas



jalan, kedekatan dengan area permukiman padat, serta potensi ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan kecil-menengah, dan jasa.

Kedudukan ganda sebagai PPK dan PPL mencerminkan tingginya intensitas kegiatan serta potensi wilayah yang dimiliki Kecamatan Bonang, yang perlu terus dikembangkan secara terintegrasi melalui penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas, serta penguatan fungsi-fungsi pelayanan publik dan ekonomi wilayah.

B. Rencana Kawasan Strategis

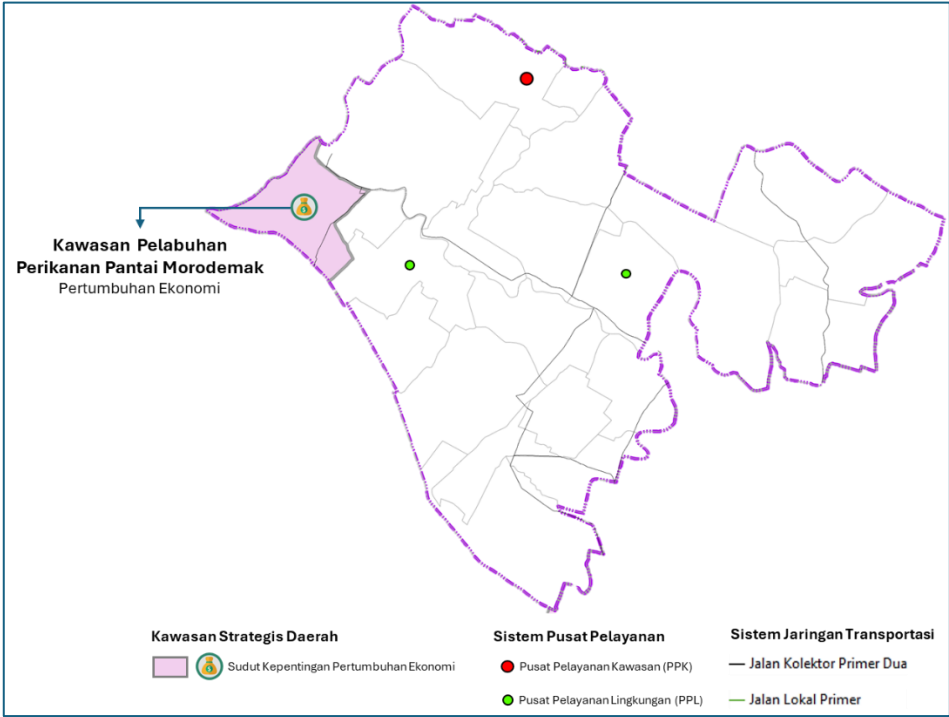
Rencana Kawasan Strategis adalah bagian dari rencana tata ruang yang mengarahkan pembangunan di kawasan tertentu yang memiliki kepentingan strategis bagi daerah atau negara, misalnya karena berpotensi menggerakkan ekonomi, memiliki nilai penting untuk kelestarian lingkungan, atau berada di wilayah perbatasan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang ditetapkan sebagai bagian dari Rencana Kawasan Strategis Daerah, terutama dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Penetapan Kecamatan Bonang sebagai kawasan strategis lingkungan didasarkan pada kondisi eksisting kawasan yang tergolong rawan terhadap bencana abrasi pantai dan genangan rob yang terjadi secara periodik. Fenomena tersebut telah berdampak signifikan terhadap penurunan kualitas lingkungan, hilangnya lahan produktif, serta meningkatnya kerentanan sosial ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, perubahan garis pantai yang cukup masif juga mengancam keberlangsungan infrastruktur dan permukiman di wilayah pesisir Bonang.

Dalam konteks perencanaan wilayah dan penataan ruang, keberadaan kawasan yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana lingkungan perlu mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu, pengembangan Kecamatan Bonang sebagai kawasan strategis daerah diarahkan tidak hanya untuk mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga untuk mendorong pengelolaan ruang yang adaptif terhadap perubahan iklim serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Pendekatan yang digunakan mencakup konservasi wilayah pesisir, penguatan infrastruktur hijau, dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dalam menghadapi risiko bencana.

Gambar III.7.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Bonang



9. Kecamatan Karangawen

Kecamatan Karangawen merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Demak. Kecamatan ini terletak di 7°0'24" hingga 7°8'23" Lintang Selatan dan 110°30'36" hingga 110°37'10" Bujur Timur dengan luas wilayah sebesar 77,5 km². Wilayah Kecamatan Karangawen terbagi menjadi 12 desa dengan Desa Jragung menjadi desa dengan wilayah terbesar yaitu 27,12 km².

Secara administratif, Kecamatan Karanganyar memiliki batas wilayah dengan Kecamatan Guntur di sebelah utara, Kabupaten Grobogan di sebelah timur, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, serta Kecamatan Mranggen di sebelah barat.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kedudukan hierarki struktur ruang mengacu pada tingkatan peran dan fungsi suatu wilayah dalam sistem struktur ruang, baik pada skala lokal, regional, maupun nasional. Konsep ini menjadi instrumen penting dalam perencanaan tata ruang karena menggambarkan pola interaksi antarwilayah serta kontribusi masing-masing wilayah terhadap pengembangan kawasan secara menyeluruh.

Dalam konteks Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Karangawen menempati posisi strategis sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Fungsi PPK di wilayah ini diarahkan untuk melayani kegiatan berskala kecamatan maupun beberapa desa di sekitarnya, mencerminkan perannya sebagai simpul pelayanan dan distribusi bagi wilayah sekitarnya. Sementara itu, fungsi PPL yang berlokasi



di Desa Tlogorejo berperan dalam melayani kegiatan berskala antar desa, terutama dalam mendukung akses terhadap pelayanan dasar serta kegiatan ekonomi lokal. Penetapan Kecamatan Karangawen dalam dua tingkatan hierarki ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi dan peran penting dalam mendukung sistem jaringan pelayanan di Kabupaten Demak, khususnya dalam mengintegrasikan pembangunan antarwilayah melalui pendekatan spasial yang efisien dan berkelanjutan.

10. Kecamatan Wonosalam

Secara geografis, Kecamatan Wonosalam terletak di antara 6°52'4" hingga 6°58'23" Lintang Selatan dan 110°35'34" hingga 110°43'22" Bujur Timur. Kecamatan Wonosalam berbatasan langsung dengan Kecamatan Demak di bagian utara, Kecamatan Gajah dan Dempet di bagian timur, Kecamatan Kebonagung di bagian selatan dan Kecamatan Karang Tengah di bagian barat.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Dalam kerangka penataan ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Wonosalam menempati posisi strategis dalam sistem hierarki struktur ruang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus memiliki beberapa titik sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Kedudukan ini memberikan gambaran bahwa Wonosalam tidak hanya berperan sebagai pusat administrasi kecamatan, tetapi juga menjadi simpul utama dalam distribusi pelayanan publik dan pengembangan wilayah.

a. Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Sebagai PPK, Kecamatan Wonosalam memiliki tanggung jawab dan peran dalam menyelenggarakan pelayanan yang menjangkau skala kecamatan hingga beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini mencakup:

- Pelayanan administrasi pemerintahan, seperti kantor kecamatan, kepolisian, dan unit layanan publik lainnya.
- Pusat kegiatan ekonomi, termasuk pasar tradisional, fasilitas perdagangan, dan kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Fasilitas sosial dan pendidikan, seperti sekolah menengah, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), tempat ibadah, dan ruang publik

b. Sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Selain sebagai PPK, Kecamatan Wonosalam juga memiliki peran sebagai PPL yang berkonsentrasi di Desa Kendaldoyong dan Desa Trengguli. Kedua desa tersebut ditetapkan sebagai PPL karena memiliki potensi dan kapasitas dalam menyediakan layanan dasar kepada wilayah di sekitarnya. Fungsi PPL mencakup:

- Penyediaan fasilitas pendidikan dasar dan kesehatan tingkat pertama.
- Aktivitas ekonomi lokal berbasis komunitas desa dan pertanian.
- Fasilitas pelayanan keagamaan, sosial, dan sarana olahraga.



- Peran dalam penguatan ketahanan wilayah perdesaan dan konektivitas antar wilayah dalam kecamatan.

Dengan kedudukan ganda sebagai PPK dan PPL, Kecamatan Wonosalam memainkan peran penting dalam sistem struktur ruang Kabupaten Demak. Peran ini diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan wilayah dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

B. Rencana Kawasan Strategis

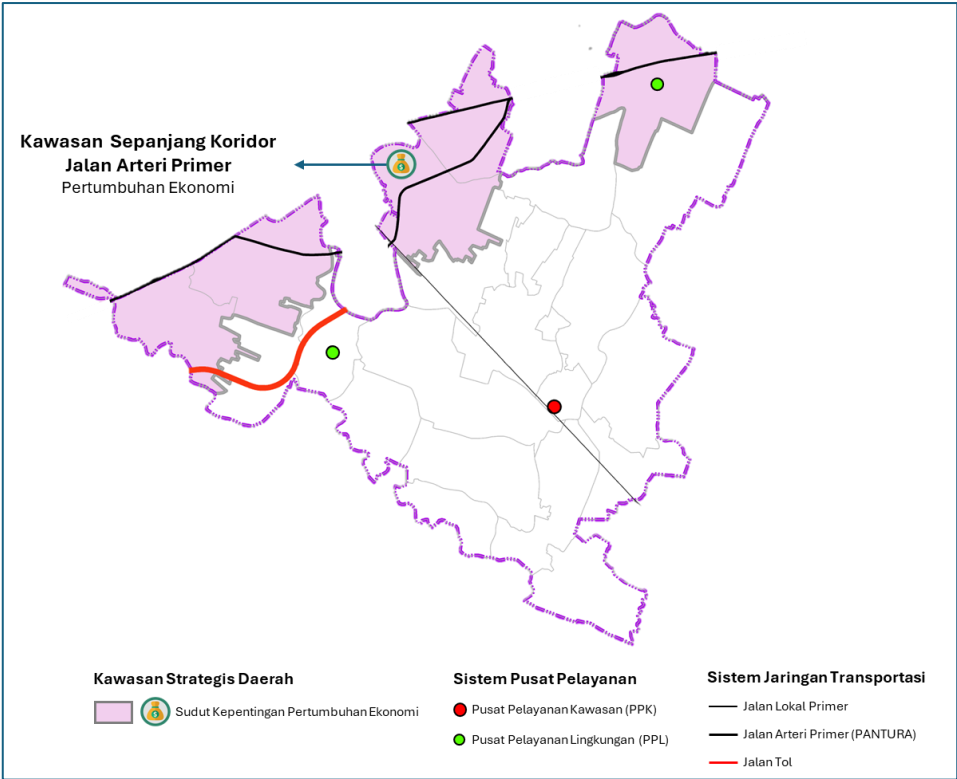
Dalam konteks perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Wonosalam ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Daerah yang memiliki arti penting dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi. Penetapan ini didasarkan pada posisi geografis Kecamatan Wonosalam yang sangat strategis, yaitu berada pada koridor jalan arteri primer yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Demak dengan wilayah eksternal seperti Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Kabupaten Grobogan. Koridor jalan ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi utama, tetapi juga sebagai poros pertumbuhan ekonomi yang mampu memicu peningkatan aktivitas masyarakat, investasi, dan konektivitas antarwilayah.

Sebagai kawasan strategis dari aspek ekonomi, Kecamatan Wonosalam diarahkan untuk menjadi lokus pengembangan sektor perdagangan, jasa, industri kecil-menengah, dan permukiman terencana. Ruang sepanjang koridor jalan arteri primer memiliki karakteristik khas sebagai ruang tumbuhnya pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal maupun regional, dengan keberadaan pasar tradisional, fasilitas logistik, dan jaringan pelayanan dasar yang terus berkembang. Selain itu, kawasan ini juga menjadi titik simpul distribusi barang dan mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga sangat potensial untuk pengembangan klaster ekonomi lokal, kawasan transit perdagangan, serta sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi desa.

Arah kebijakan pengembangan kawasan strategis ini ditujukan untuk mendorong transformasi ekonomi wilayah secara bertahap namun terstruktur. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian khusus dalam bentuk dukungan kebijakan, insentif pengembangan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di sepanjang jalur strategis ini. Hal ini dapat mencakup penguatan jaringan jalan, penyediaan fasilitas umum dan sosial, serta regulasi pemanfaatan ruang yang mengarahkan pertumbuhan secara terkendali. Pengembangan kawasan strategis ini juga perlu didukung dengan konservasi lingkungan dan pengendalian pemanfaatan ruang, agar tetap selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat.

Kawasan strategis Kecamatan Wonosalam tidak hanya berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi pembangunan wilayah Kabupaten Demak secara menyeluruh. Dengan memperkuat peranannya dalam sistem struktur ruang regional, kawasan ini diharapkan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, akses pasar, dan peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian, Rencana Kawasan Strategis Kecamatan Wonosalam merupakan salah satu pilar penting dalam pencapaian pembangunan wilayah yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

Gambar III.8.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Wonosalam



11. Kecamatan Karanganyar

Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu dari 14 kecamatan yang membentuk wilayah administrasi Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki letak geografis yang cukup strategis, yaitu berada pada kisaran koordinat antara 110°42'53" hingga 110°50'19" Bujur Timur dan 6°47'28" hingga 6°53'53" Lintang Selatan. Posisi ini menempatkan Kecamatan Karanganyar di bagian timur Kabupaten Demak, dengan akses langsung ke wilayah kabupaten tetangga dan jaringan transportasi regional. Dari sisi batas administratif, Kecamatan Karanganyar berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Kecamatan Gajah di selatan, serta berbatasan dengan Kecamatan Mijen di bagian barat.



A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Dalam sistem struktur ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Karanganyar memiliki peran penting sebagai salah satu simpul pelayanan wilayah yang mendukung pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah secara berjenjang. Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Karanganyar ditetapkan dalam hierarki struktur perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan sekaligus sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Penetapan ini menegaskan fungsi ganda wilayah ini dalam melayani kegiatan masyarakat pada skala yang lebih luas, baik di tingkat kecamatan maupun antar desa.

Sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Kecamatan Karanganyar memiliki peran strategis dalam memberikan layanan dan aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat dari beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini mencakup penyediaan layanan pendidikan menengah, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan menengah, pusat pemerintahan kecamatan, fasilitas perdagangan, dan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan dan transportasi. Keberadaan PPK ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pelayanan antarwilayah serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah hinterland-nya. Sementara itu, sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), Kecamatan Karanganyar, yang pusat konsentrasinya berada di Desa Cangkring, berfungsi untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat pada skala antar desa. Desa Cangkring dipandang strategis karena letaknya yang relatif sentral terhadap wilayah-wilayah desa lain di Kecamatan Karanganyar, serta memiliki potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung fungsi pelayanan tersebut. Di tingkat PPL, pelayanan yang disediakan lebih bersifat lokal, seperti pendidikan dasar, posyandu, pasar desa, serta layanan administrasi dan ekonomi berbasis komunitas.

Penempatan Desa Cangkring sebagai simpul pelayanan lingkungan memberikan dampak positif terhadap mobilitas penduduk dan pertumbuhan ekonomi lokal. Desa ini berkembang sebagai kawasan dengan konsentrasi aktivitas penduduk yang lebih tinggi dibanding desa-desa lain, yang ditandai dengan adanya pusat perdagangan kecil, sentra UMKM, serta aktivitas sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, Desa Cangkring memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi pusat pelayanan terpadu berbasis desa yang mendukung struktur perkotaan Kecamatan Karanganyar secara keseluruhan.

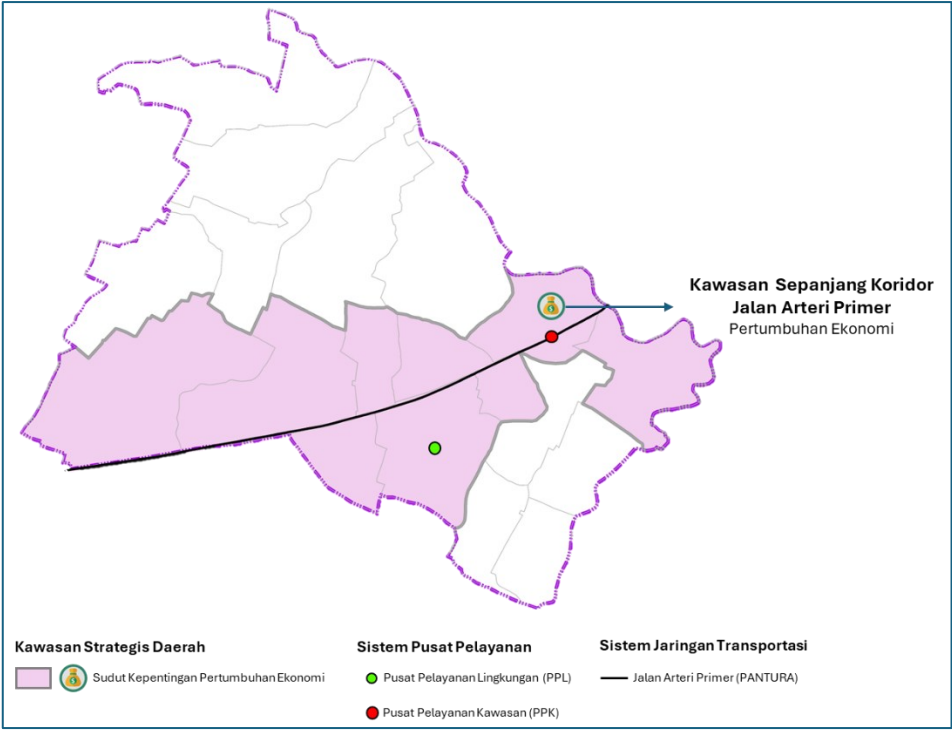
B. Rencana Kawasan Strategis

Dalam kerangka perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Karanganyar ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Daerah yang memiliki arti penting dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Penetapan ini didasarkan pada posisi geografis dan jaringan infrastruktur transportasi yang dimiliki, terutama keberadaan koridor jalan arteri primer yang melintasi wilayah ini dan berfungsi sebagai tulang punggung pergerakan barang dan jasa antara Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus serta daerah lain di kawasan Pantura Timur Jawa Tengah.

Kawasan sepanjang koridor jalan arteri primer di Kecamatan Karanganyar memiliki potensi besar sebagai zona pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menggerakkan sektor-sektor produktif masyarakat. Jalan arteri primer ini menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Demak, sehingga menciptakan aksesibilitas tinggi terhadap pasar, logistik, dan mobilitas tenaga kerja. Hal ini menjadikan kawasan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan, jasa, pergudangan, dan bahkan kawasan industri berskala kecil dan menengah (IKM).

Gambar III.9.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Karanganyar



12. Kecamatan Mijen

Kecamatan Mijen merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki posisi yang cukup strategis karena terletak di bagian barat laut Kabupaten Demak dan menjadi salah satu kawasan penghubung antarwilayah kabupaten. Dari sisi geografis, Kecamatan Mijen berada di antara 6° 45' 47" hingga 6° 52' 2" Lintang Selatan dan 110° 39' 33" hingga 110° 45' 34" Bujur Timur.

Secara administratif, Kecamatan Mijen memiliki batas wilayah yang langsung bersinggungan dengan beberapa kawasan penting di sekitarnya. Di sebelah utara, Mijen berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara, yang



merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi dan industri kreatif di Jawa Tengah. Di bagian timur, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar, yang juga menjadi kawasan strategis dalam perencanaan wilayah Kabupaten Demak. Sementara itu, di sebelah selatan, Kecamatan Mijen berbatasan dengan Kecamatan Demak, yang merupakan pusat pemerintahan kabupaten, sedangkan di bagian barat, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan Wedung, salah satu kawasan pesisir yang memiliki potensi kelautan dan perikanan.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Dalam kerangka penataan ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Mijen memiliki peran penting dalam sistem hierarki struktur ruang sebagai bagian dari upaya pemerataan pelayanan dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Demak, Kecamatan Mijen ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sekaligus sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Sebagai PPK, Kecamatan Mijen berperan melayani aktivitas sosial dan ekonomi dengan skala kecamatan atau mencakup beberapa desa di sekitarnya. Peran ini mencakup fungsi pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta fasilitas umum lainnya yang menjangkau penduduk lintas desa. Fungsi ini sangat relevan dengan posisi geografis Mijen yang strategis, karena berada di antara pusat-pusat kegiatan penting di Kabupaten Demak serta berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara.

Selain sebagai PPK, Kecamatan Mijen juga memiliki fungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berkonsentrasi di Desa Bakung. Fungsi PPL bertujuan melayani kebutuhan masyarakat dalam skala lebih kecil, yaitu antar desa atau lingkungan lokal. Di tingkat PPL, pelayanan lebih diarahkan pada penyediaan fasilitas pendidikan dasar, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pasar desa, dan kegiatan ekonomi kerakyatan seperti sentra pertanian atau industri rumah tangga.

13. Kecamatan Kebonagung

Kecamatan Kebonagung merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di bagian selatan Kabupaten Demak. Secara geografis, kecamatan ini berada pada koordinat antara 110° 40' 4" hingga 110° 45' 45" Bujur Timur dan 6° 57' 50" hingga 7° 3' 15" Lintang Selatan. Letak geografis ini menunjukkan bahwa Kebonagung menempati wilayah yang strategis di antara batas Kabupaten Demak dan wilayah tetangganya. Dari segi administratif, Kecamatan Kebonagung berbatasan langsung dengan Kecamatan Dempet, Wonosalam, dan Guntur di bagian utara, yang menjadikannya terhubung dengan pusat-pusat kegiatan sosial-ekonomi lokal. Sementara itu, di bagian selatan, wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan, yang memberikan potensi interaksi antar wilayah

baik dalam aspek mobilitas penduduk, perdagangan, maupun pemanfaatan sumber daya alam.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Dalam struktur tata ruang wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Kebonagung memiliki peran penting dalam kedudukan hierarki struktur ruang perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan sekaligus sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai PPK, Kecamatan Kebonagung menjalankan fungsi pelayanan terhadap kegiatan sosial, ekonomi, dan administratif yang berskala kecamatan maupun mencakup beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini mencakup penyediaan fasilitas umum seperti pusat pemerintahan kecamatan, pendidikan menengah, pasar kecamatan, serta fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang secara keseluruhan menjadi simpul aktivitas utama bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.

Sementara itu, sebagai PPL yang berlokasi di Desa Werdoyo, Kecamatan Kebonagung juga menjalankan peran strategis dalam mendukung kegiatan pelayanan antar desa dalam satu kawasan lingkungan yang lebih kecil. PPL berfungsi sebagai simpul pelayanan dasar dan interaksi masyarakat antar desa yang mencakup fasilitas pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar, fasilitas keagamaan, dan kegiatan ekonomi lokal seperti pasar desa dan pusat kerajinan atau pertanian rakyat.

Kombinasi peran sebagai PPK dan PPL ini menunjukkan bahwa Kecamatan Kebonagung memiliki posisi penting dalam pengembangan struktur ruang wilayah, baik sebagai pusat pertumbuhan lokal maupun sebagai penghubung antar wilayah desa. Keberadaan pusat-pusat pelayanan tersebut tidak hanya mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat, tetapi juga memperkuat jaringan permukiman dan konektivitas antarwilayah dalam konteks pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Demak.

14. Kecamatan Wedung

Kecamatan Wedung adalah salah satu wilayah administratif yang terletak di bagian barat laut Kabupaten Demak. Secara geografis, wilayah ini berada pada koordinat antara 110° 32' 3" hingga 110° 40' 28" Bujur Timur dan 6° 42' 21" hingga 6° 50' 8" Lintang Selatan. Letaknya yang strategis menjadikan Kecamatan Wedung memiliki karakter geografis yang khas, yakni meliputi kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sisi barat.

Dari sisi administratif, Kecamatan Wedung dikelilingi oleh beberapa wilayah yang turut membentuk dinamika sosial dan ekonomi setempat. Di bagian utara, Wedung berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara, yang memungkinkan adanya interaksi lintas daerah, khususnya dalam bidang perdagangan, perikanan, dan transportasi. Di sebelah timur, wilayah ini berbatasan dengan Kecamatan



Mijen, sementara di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bonang. Posisi tersebut menjadikan Kecamatan Wedung sebagai penghubung antara kawasan pesisir utara dan wilayah pedalaman Kabupaten Demak.

A. Kedudukan Hierarki Struktur Ruang

Kecamatan Wedung memiliki peran penting dalam struktur tata ruang wilayah Kabupaten Demak, yang tercermin melalui kedudukannya dalam hierarki struktur ruang sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Sebagai PPK, Kecamatan Wedung berfungsi sebagai pusat kegiatan yang melayani kebutuhan masyarakat dalam skala kecamatan atau mencakup beberapa desa di sekitarnya. Fungsi ini ditunjang oleh keberadaan fasilitas pelayanan dasar seperti pusat pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, serta sarana transportasi yang memungkinkan aksesibilitas antardesa. Peran sebagai PPK juga menjadikan Kecamatan Wedung sebagai simpul penggerak pertumbuhan wilayah dan pusat distribusi aktivitas sosial-ekonomi di kawasan pesisir timur Kabupaten Demak.

Selain itu, Kecamatan Wedung juga memiliki fungsi sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yang lebih terfokus pada pelayanan kegiatan skala antar desa. Dalam konteks ini, Desa Buko dan Desa Bungo menjadi titik konsentrasi pelayanan lokal yang mendukung kebutuhan masyarakat setempat, seperti pelayanan administrasi, layanan sosial, serta pusat aktivitas ekonomi mikro. Peran PPL ini bersifat komplementer terhadap PPK, di mana keduanya bersama-sama menciptakan jaringan pelayanan yang menyeluruh dan merata di wilayah kecamatan. Dengan demikian, struktur ruang di Kecamatan Wedung dirancang untuk mendorong keterpaduan pembangunan, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan lokal, dan mendukung konektivitas antarkawasan secara berkelanjutan.

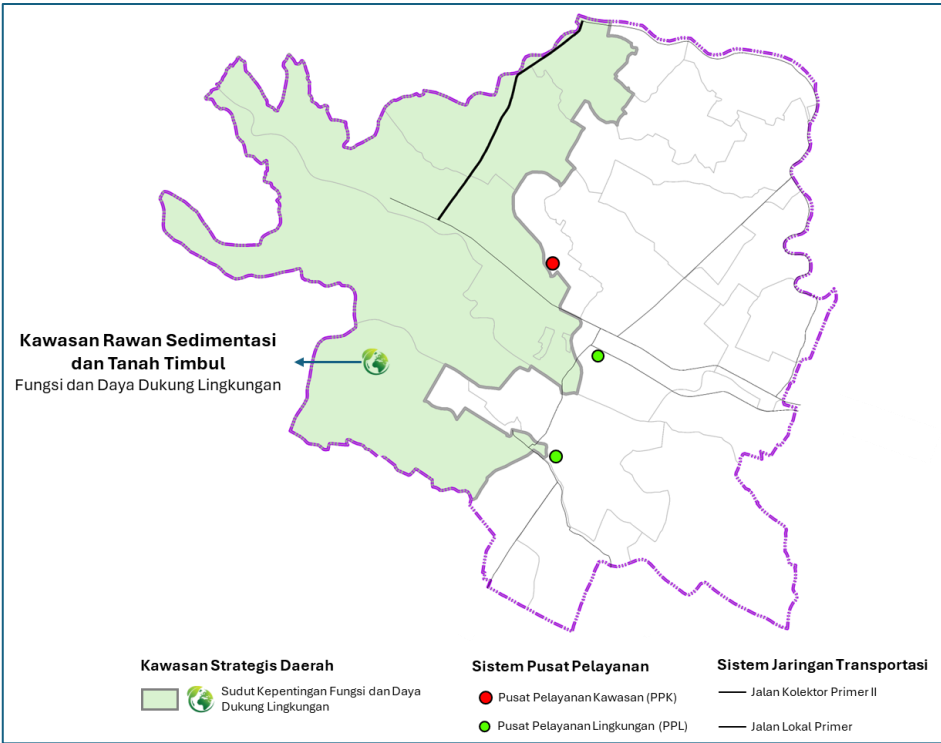
B. Rencana Kawasan Strategis

Rencana Kawasan Strategis Kecamatan Wedung ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Daerah yang memiliki nilai penting dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan ini didasarkan pada kondisi geografis dan ekologis Kecamatan Wedung yang berada di wilayah pesisir utara Kabupaten Demak, yang secara alami sangat dipengaruhi oleh proses-proses dinamika pesisir, seperti sedimentasi dan pembentukan tanah timbul.

Kawasan ini termasuk dalam wilayah yang mengalami perubahan morfologi lahan secara signifikan akibat sedimentasi yang terus berlangsung dari waktu ke waktu, terutama di muara sungai dan sepanjang garis pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Fenomena tanah timbul di wilayah ini menciptakan ruang baru yang secara alami berpotensi dimanfaatkan, namun di sisi lain juga menuntut pengelolaan yang cermat untuk menjaga stabilitas lingkungan pesisir.

Sebagai kawasan strategis dari aspek lingkungan hidup, wilayah ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengelolaan ruang, terutama dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, dan zona sempadan pantai. Pengelolaan kawasan strategis ini harus mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis yang dapat berdampak pada keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Gambar III.10.
Kawasan Pertumbuhan Kecamatan Wedung



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang mencakup indikasi program dan pagu indikatif program guna mencapai visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029. Selain itu, bab ini menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, dengan memuat target indikasi program dan pagu indikatif sesuai periodisasi RPJMD.

Kerangka pendanaan mencerminkan kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029, sedangkan belanja daerah merupakan kebutuhan anggaran yang diperlukan guna membiayai pembangunan selama periode tersebut.

Indikasi program merujuk pada program-program yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029. Sementara itu, pagu indikatif merupakan gambaran kebutuhan pendanaan yang tersedia dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disusun beserta kebutuhan pendanaannya selanjutnya dijadikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rumusan target kinerja program dalam setiap urusan pemerintahan, baik bidang wajib maupun pilihan, disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD Kabupaten Demak, APBD Provinsi, APBN, serta sumber pendanaan lainnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2026-2029 berisi program, kegiatan dan subkegiatan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah yaitu penyusunan RKPD tahun 2030 dan Renja Perangkat Daerah 2030 yang akan menjadi tanggungjawab Kepala Daerah Periode 2030-2034. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah. Uraian program

pembangunan tiap urusan/unsur adalah sebagai berikut:

XX. Non Urusan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan program yang dilaksanakan secara rutin oleh seluruh perangkat daerah dengan indikator tingkat kepuasan layanan kesekretariatan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Terdapat kegiatan khusus pada Dinas Kesehatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD serta pada Sekretariat Daerah dengan kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, Penataan Organisasi, dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Pada Sekretariat DPRD juga terdapat tambahan kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dan Layanan Administrasi DPRD.

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini melaksanakan prioritas Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

Program ini juga dimaksudkan untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang pendidikan yaitu peningkatan pelayanan dasar pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal/kesetaraan. Tolak ukur yang ditetapkan yaitu tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama serta tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Adapun



dalam program ini memiliki kegiatan prioritas pengembangan sekolah unggulan di setiap kecamatan sebagai model pendidikan berkualitas melalui seleksi dan penetapan sekolah unggulan, revitalisasi infrastruktur sekolah, penambahan peralatan teknologi, peningkatan SDM guru dan kepala sekolah, pembentukan tim pengembang sekolah unggulan (TPSU), dan program branding dan promosi sekolah unggulan. Tidak hanya itu, adanya Program Beasiswa "Demak Pintar" untuk Siswa Berprestasi dan Tidak Mampu melalui Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima, Penyaluran Beasiswa (Prestasi, Tidak Mampu, Disabilitas), Bantuan Non-Tunai (seragam, kuota internet, sepeda), Pendampingan & Monitoring, dan Festival & Apresiasi Siswa Berprestasi. Rehabilitasi & Pembangunan Fasilitas Satuan Pendidikan melalui Rehabilitasi Ruang Kelas dan Sarana Pendukung, Pembangunan Gedung Baru Sekolah & Ruang Kelas, Pengadaan Perabot & Alat Belajar, Pembangunan Sarana Air Bersih, Sanitasi, dan Ramah Difabel, Pengadaan Sarana Teknologi & Digitalisasi Pembelajaran. Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Olahraga Daerah melalui Fasilitas Sarana Olahraga Sekolah. Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi melalui Beasiswa Pendidikan Anak Tidak Mampu dan Anak Putus Sekolah. Peningkatan Akses dan Konektivitas Internet Sekolah melalui Survei & Pemutakhiran Data Internet Sekolah, Pengadaan & Instalasi Infrastruktur Jaringan, Pengadaan Paket Internet Tahunan, Pelatihan Pengelolaan Internet Sekolah, dan Monitoring & Bantuan Teknis Rutin. Program Inkubasi Inovasi & Teknologi Tepat Guna Berbasis Komunitas melalui Pembentukan & Pengadaan Pusat Inovasi Komunitas (PIK)

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diukur dengan persentase muatan lokal yang telah memiliki silabus dan kurikulum. Adapun dalam program ini memiliki kegiatan prioritas pengembangan kurikulum berbasis karakter melalui Workshop dan Penyusunan Modul Kurikulum Karakter, Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah, Implementasi Program Sekolah Berkarakter, Monitoring dan Evaluasi, dan Apresiasi Sekolah Inspiratif Berkarakter

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diukur dengan proporsi pendidik bersertifikat profesi serta indeks distribusi guru. Adapun dalam program ini memiliki kegiatan prioritas peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan dan transformasi digital seperti pelatihan kompetensi pedagogik dan profesional, pelatihan digitalisasi pembelajaran, pendidikan karakter dan etika profesi, mentoring oleh guru penggerak, dan pembentukan komunitas

belajar.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan; dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diukur dengan persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan, persentase pelayanan kesehatan sesuai standar, persentase UHC, prevalensi stunting, prevalensi wasting, prevalensi obesitas dan prevalensi gizi buruk. Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Olahraga Daerah melalui Kampanye dan Pelatihan Aktivitas Fisik Rutin

- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diukur dengan persentase tenaga kesehatan berkompetensi di fasilitas pelayanan kesehatan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan melalui Pelatihan SDM Kesehatan Terkait Operasionalisasi Fasilitas

- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diukur dengan persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan melalui Pengadaan Alat Kesehatan Standar dan Penunjang, Pengembangan Rumah Sakit Pratama dan RSUD, Penyediaan Sarana Ambulans dan Mobil Layanan Kesehatan, Rehabilitasi dan Pembangunan Puskesmas dan Pustu Baru

- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diukur dengan persentase rumah tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diukur dengan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dan persentase sarana prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik. Pembangunan & Perbaikan Infrastruktur Penunjang Pangan melalui Pembangunan/Rehabilitasi Irigasi & Jaringan Air Bersih. Penguatan Sistem Mitigasi & Penanganan Bencana Iklim Ekstrem melalui Rehabilitasi dan Normalisasi Sungai & Saluran Air

- 2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diukur dengan persentase penduduk yang terlayani akses air minum



- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diukur dengan persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak.
- 4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
Program ini diukur dengan persentase drainase perkotaan yang tertangani. Pembangunan & Perbaikan Infrastruktur Penumpu Pangan melalui Pembangunan & Perbaikan Drainase Lingkungan & Perkotaan. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama melalui Penataan Drainase Perkotaan dan Jalan Lingkungan, Revitalisasi Drainase Kota dengan Estetika Terpadu
- 5) Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diukur dengan rasio kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kabupaten
- 6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
Program ini diukur dengan luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik. Penguatan Daya Tarik dan Infrastruktur Wisata melalui Penataan Kawasan Wisata Religi dan Heritage
- 7) Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diukur dengan panjang jalan dalam kondisi mantap. Pembangunan & Perbaikan Infrastruktur Penumpu Pangan melalui Peningkatan Jalan Kabupaten Strategis (Hotmix/Cor Beton), Pembangunan Jalan Usaha Tani & Tambak (JUT/JITUT). Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi melalui Rehabilitasi Jalan Rusak Berat & Ringan, Pelebaran dan Penataan Sempadan Jalan, Pembangunan Talud Jalan di Pinggir Sungai. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama melalui Penataan Jalur Pedestrian Berkarakter
- 8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
Program ini diukur dengan rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih. Pembangunan & Perbaikan Infrastruktur Penumpu Pangan melalui Survei Teknis dan Perencanaan Infrastruktur Prioritas, Pembangunan/Rehab Jembatan & Box Culvert. Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi melalui Perbaikan Jembatan Rusak & Sambungan Jalan.
- 9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diukur dengan persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah melalui Penyusunan Peta Potensi & Prioritas Investasi. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama melalui Penataan



Ruang Kota dan Fasilitas Umum, Penataan Kawasan Perkotaan “Tera Kota Demak”

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman; dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Program Pengembangan Perumahan

Program ini diukur dengan persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana

2) Program Kawasan Permukiman

Program ini diukur dengan persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani

3) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diukur dengan persentase berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di luar kawasan kumuh. Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi melalui Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diukur dengan persentase rumah yang mendapatkan pelayanan PSU layak

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Peran Satpol PP dibutuhkan untuk menertibkan pedagang kaki lima dan menjaga kondusivitas wilayah untuk penciptaan iklim berusaha yang aman dan nyaman. Indikator keberhasilan program ini yaitu persentase penegakkan Perda dan cakupan petugas perlindungan masyarakat (linmas). Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi melalui Penataan & Penertiban Bangunan Liar di Sempadan Jalan

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diukur dengan tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota

3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diukur dengan persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana, persentase penanganan tanggap darurat bencana dan persentase penanganan pascabencana. Penguatan Sistem Mitigasi & Penanganan Bencana Iklim Ekstrem melalui Pengadaan &



Operasi Pompa Banjir dan Sumur Resapan, Pelatihan & Simulasi Desa Tangguh Bencana, Kampanye & Edukasi Iklim, Rob, dan Konservasi Lingkungan

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diukur dengan persentase PSKS yang diberdayakan

2) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diukur dengan persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti. Perlindungan & Pemberdayaan Kelompok Rentan & Marginal melalui Bantuan Alat Bantu & Aksesibilitas untuk Difabel, Bantuan Sosial & Pendampingan Lansia dan ODGJ

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diukur dengan cakupan penduduk miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial. Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi melalui Bantuan Sosial Tunai & Sembako Bersyarat, Pendampingan Sosial & Penguatan Keluarga Rentan, Bantuan Iuran JKN dan Jaminan Kesehatan untuk Keluarga Miskin, Pelatihan Keterampilan & Kewirausahaan bagi Kelompok Rentan

4) Program Penanganan Bencana

Program ini diukur dengan persentase korban bencana yang pulih fungsi sosialnya.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diukur dengan persentase taman makam pahlawan yang terawat.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diukur dengan persentase ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja mikro dan makro

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diukur dengan persentase pencari kerja yang diberi pelatihan dan persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi. Adapun dalam program ini memiliki kegiatan prioritas seperti Program Pelatihan Vokasional dan Keterampilan Teknis melalui



Pemetaan Minat dan Kebutuhan Dunia Kerja, Pelatihan Teknis Modular (1–3 bulan), Pelatihan Soft Skill dan Kewirausahaan, Pelatihan Mobile Keliling (desa-desa pelosok), Link & Match Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), dan Platform Digital Lowongan Kerja Lokal

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diukur dengan persentase tenaga kerja yang ditempatkan

4) Program Hubungan Industrial

Program ini diukur dengan angka sengketa pengusaha pekerja yang diselesaikan dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diukur dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diukur dengan persentase perempuan korban kekerasan dan TPPQ yang mendapatkan layanan komprehensif. Perlindungan & Pemberdayaan Kelompok Rentan & Marginal melalui Layanan Teadu Korban Kekerasan Perempuan & Anak

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diukur dengan persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diukur dengan tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diukur dengan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diukur dengan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini diukur dengan jumlah infrastruktur kemandirian pangan. Penguatan Sistem Mitigasi & Penanganan Bencana Iklim Ekstrem melalui Pengembangan Embung dan Sistem Irigasi Tahan Kekeringan

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diukur dengan ketersediaan pangan strategis

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan



Program ini diukur dengan persentase desa rawan pangan

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diukur dengan persentase keamanan pangan segar dari bahan pangan yang diuji

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diukur dengan persentase pelaksanaan rencana aksi gugus tugas reforma agraria

2) Program Penatagunaan Tanah

Program ini diukur dengan persentase tanah pemkab yang bersertifikat.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Indikator dari program ini yaitu ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup. Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi melalui Pengembangan Jalur Hijau Jalan Kabupaten. Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Olahraga Daerah melalui Pembangunan Jalur & Taman Olahraga Masyarakat. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Penguatan Komunitas melalui Monitoring dan Kajian Ekologi Pesisir

2) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diukur dengan penurunan frekuensi kejadian pencemaran, ketersediaan dokumen pemantauan lingkungan

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diukur dengan persentase RTH. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama melalui Penataan & Pengembangan RTH Kota Islami-Majapahit, Penataan Alun-Alun Demak (Kegiatan Khusus). Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Penguatan Komunitas melalui Penanaman dan Rehabilitasi Hutan Mangrove Pengembangan dan Pemanfaatan RTH Publik & Edukatif melalui Pembangunan Taman Kota & Taman Edukasi, RTH di Lingkungan Sekolah dan Fasilitas Publik, Pengembangan RTH Inklusif & Ramah Anak, Kampanye & Gerakan Adopsi Taman oleh Komunitas, Monitoring, Evaluasi & Digitalisasi Peta RTH

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diukur dengan Persentase Limbah B3 yang terkelola

- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diukur dengan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
Program ini diukur dengan persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama melalui Pelibatan Masyarakat & Komunitas Kota. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi Lingkungan Sekolah & Rumah, Festival Lingkungan & Apresiasi “Warga Resik”. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Penguatan Komunitas melalui Edukasi & Sekolah Pesisir untuk Anak dan Masyarakat
- 7) Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diukur dengan persentase sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat melalui Penguatan Infrastruktur TPST dan TPS 3R, Pendirian dan Revitalisasi Bank Sampah, Kemitraan & Inovasi Pengolahan Sampah Ekonomis

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- 1) Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diukur dengan persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik
- 2) Program Pencatatan Sipil
Program ini diukur dengan persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Program ini diukur dengan persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- 1) Program Peningkatan Kerja Sama Desa
Program ini diukur dengan peningkatan jumlah kerja sama desa yang difasilitasi. Digitalisasi Layanan dan Pemberdayaan Desa melalui Pelatihan SDM Digital Perangkat Desa & Pemuda, Implementasi Forum dan Media Digital Warga. Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah &



Pemerintah Desa melalui Sosialisasi Perbup & Pedoman Kolaborasi Desa–Daerah, Pelatihan & Workshop Sinergi Perencanaan Desa–Daerah, Forum Konsolidasi Camat dan Kepala Desa, Pendampingan Integrasi Data dan Perencanaan, Penghargaan Desa Sinergi & Inovatif

2) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diukur dengan persentase fasilitasi tata kelola desa. Digitalisasi Layanan dan Pemberdayaan Desa melalui Pengembangan Aplikasi Administrasi & Pelayanan Desa, Penguatan Infrastruktur TIK Desa,

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diukur dengan persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diukur dengan angka kelahiran remaja umur 15 – 19 tahun (ASFR 15-19)

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diukur dengan angka prevalensi kontrasepsi modern (MCPR) persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi

3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diukur dengan persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok ketahanan keluarga

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diukur dengan persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten. Rehabilitasi dan Penataan Jalan Kabupaten Terintegrasi melalui Pemasangan Rambu, Marka, dan PJU Jalan. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama melalui Pengadaan dan Rehabilitasi PJU Solar Cell & LED, Monitoring & Smart Lighting System, Penerangan Jalan Tematik (PJU Warisan Budaya)

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diukur dengan indeks PPID. Adapun kegiatan prioritas



seperti Bantuan Stimulan Produksi dan Pemasaran melalui Pendampingan Digitalisasi UMKM. Penguatan Daya Tarik dan Infrastruktur Wisata melalui Promosi dan Branding Digital “Visit Demak”, Digitalisasi dan E-Commerce Ekraf. Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah melalui Penyusunan dan Publikasi Profil Investasi Daerah. Transformasi Digital Pelayanan Publik & Administrasi melalui Penguatan Infrastruktur TIK Pemerintah Daerah. Penguatan Sinergi Pemerintah Daerah & Pemerintah Desa melalui Media Komunikasi Desa–Daerah. Revitalisasi dan Pengembangan Pasar Tradisional melalui Digitalisasi Sistem Pasar. Penataan Kawasan Perkotaan dan Penerangan Jalan Utama melalui Digitalisasi & Smart Urban Control. Perlindungan & Pemberdayaan Kelompok Rentan & Marginal melalui Sosialisasi & Kampanye Masyarakat Inklusif. Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat melalui Digitalisasi Sistem Pengelolaan Sampah

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini diukur dengan indeks layanan SPBE. Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah melalui Penguatan Layanan Perizinan dan OSS Daerah. Transformasi Digital Pelayanan Publik & Administrasi melalui Penerapan Aplikasi E-Government, Penguatan MPP & Layanan Online Terpadu, Pengembangan Sistem Administrasi Desa (SIADE).

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diukur dengan persentase koperasi yang berkualitas

2) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diukur dengan pertumbuhan UMKM

3) Program Pengembangan UMKM

Program ini diukur dengan persentase usaha mikro menjadi usaha kecil. Adapun program ini memiliki kegiatan prioritas seperti Bantuan Stimulan Produksi dan Pemasaran melalui Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produksi & Branding, Bantuan Modal Bahan Baku & Display Produk, Festival dan Expo Produk Lokal. Revitalisasi dan Pengembangan Pasar Tradisional melalui Rehabilitasi Sarana Fisik Pasar, Pengembangan Zona Kuliner & UMKM di Pasar, Pelatihan Pedagang Pasar Tradisional, Event “Pasar Rame” dan Festival Pasar Rakyat, Program Inkubasi Inovasi & Teknologi Tepat Guna Berbasis Komunitas



melalui Hibah Mini untuk Prototipe dan Uji Pasar, Program Inkubasi Startup Sosial dan UMKM Inovatif

1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal; dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diukur dengan jumlah nilai investasi PMDN dan PMA

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diukur dengan pertumbuhan jumlah investasi

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diukur dengan rata – rata lama pengurusan perizinan berusaha. Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah melalui Pendampingan Izin Usaha Mikro dan UMKM

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diukur dengan persentase perusahaan yang telah dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diukur dengan persentase data investasi daerah yang dipublikasikan

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga; dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diukur dengan cakupan organisasi kepemudaan yang dibina. Adapun dalam program ini memiliki kegiatan prioritas pemberdayaan organisasi pemuda dan perempuan seperti Gerakan “Demak Aktif” melalui Pemetaan Organisasi dan Potensi Komunitas, Pelatihan Kepemimpinan dan Literasi Digital, Pelatihan Keterampilan & Kewirausahaan Kreatif, Dukungan Modal Awal (Hibah Kelompok), dan Festival & Apresiasi Karya Pemuda & Perempuan, Rehabilitasi dan Pembangunan Fasilitas Olahraga Daerah melalui Pembangunan Stadion dan GOR Kabupaten, Pembangunan Lapangan Serbaguna dan Open Space

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diukur dengan persentase jumlah atlet berprestasi

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diukur dengan persentase organisasi pramuka aktif

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini diukur dengan indeks SDI.



o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian; dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

- 1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Program ini diukur dengan indeks keamanan informasi.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan; dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan
Program ini diukur dengan persentase peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan
- 2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Program ini diukur dengan benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan serta persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan
- 3) Program Pengelolaan Permuseuman
Program ini diukur dengan persentase peningkatan kunjungan ke museum

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan
Program ini diukur dengan rasio kunjungan masyarakat ke perpustakaan
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
Program ini diukur dengan persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- 1) Program Pengelolaan Arsip
Program ini diukur dengan persentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi pengolahan arsip digital
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Program ini diukur dengan persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan; yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program ini diukur dengan produksi perikanan tangkap
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
Program ini diukur dengan produksi perikanan budidaya



3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diukur dengan produksi pengolahan hasil perikanan

4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Program ini diukur persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata; dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diukur dengan jumlah tamu wisatawan mancanegara dan jumlah tamu wisatawan nusantara. Penguatan Daya Tarik dan Infrastruktur Wisata melalui Pengembangan Desa Wisata dan Ekowisata Pesisir, Penguatan Ekonomi Kreatif Terintegrasi dengan Wisata, Pengembangan Sentra & Galeri Produk Kreatif Wisata

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diukur dengan persentase kegiatan kalender event yang dipromosikan ke luar daerah. Penguatan Daya Tarik dan Infrastruktur Wisata melalui Festival Wisata Religi dan Budaya Demak, Festival Ekraf dan Apresiasi Produk Lokal, Pelatihan Desain, Kemasan, dan Branding Produk Wisata.

3) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diukur dengan persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dibina dan persentase tenaga kerja pariwisata yang bersertifikat. Adapun kegiatan prioritas seperti Penguatan Daya Tarik dan Infrastruktur Wisata melalui Peningkatan SDM & Sertifikasi Pelaku Wisata, Inkubasi Ekraf Pemula di Desa Wisata. Rehabilitasi Ekosistem Pesisir & Penguatan Komunitas melalui Penguatan Ekowisata dan Desa Wisata Mangrove

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian; dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diukur dengan persentase alsintan pertanian dalam kondisi baik, persentase alsintan perkebunan dalam kondisi baik serta persentase alsintan peternakan dalam kondisi baik

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diukur dengan persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diukur dengan jumlah kasus penyakit hewan yang



terkonfirmasi

4) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diukur dengan persentase poktan yang dibina

5) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diukur dengan luas areal yang tertangani

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan; dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diukur dengan persentase took swalayan yang direkomendasi

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diukur dengan persentase kualitas sarana distribusi perdagangan dalam kondisi baik serta persentase PKL yang tertata

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diukur dengan disparitas harga

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini diukur dengan persentase UKM yang melakukan ekspor

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diukur dengan persentase Alat-alat, Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diukur dengan persentase kepatuhan pelaku usaha yang telah mengikuti sosialisasi produk legal dalam negeri

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diukur dengan persentase ketersediaan dokumen perencanaan industri

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Program ini diukur dengan rasio jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini diukur dengan persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi; dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

1) Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Program ini diukur dengan jumlah calon transmigran yang terdaftar

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah; dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diukur dengan nilai LPPD, persentase fasilitasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat, indeks reformasi hukum, indeks kualitas kebijakan dan aksi HAM. Adapun dalam program ini memiliki kegiatan prioritas seperti Program “Demak Barokah” – Insentif Guru Madin/TPQ/Ponpes melalui Pendataan dan Verifikasi Guru Madin/TPQ dan Ponpes, Penyaluran Insentif Berkala, Pelatihan Metodologi & Pendidikan Karakter, Pemberian Kartu Identitas Guru Madin/TPQ/Ponpes (IGM), dan Apresiasi Guru Madin/TPQ/Ponpes Teladan. Tidak hanya itu terdapat Santri Creative Festival melalui Lomba Kreativitas Santri, Bazaar Produk Santri dan UMKM Pesantren, Santri Talkshow dan Seminar Motivasi, Penghargaan & Beasiswa Santri Berprestasi, dan Dokumentasi dan Publikasi Digital. Bantuan Fisik & Operasional Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan melalui Pendataan dan Verifikasi Lembaga Keagamaan, Hibah Revitalisasi Tempat Ibadah, Bantuan Operasional & Perlengkapan Lembaga Keagamaan, Pelatihan Manajemen Lembaga & Akuntabilitas, dan Apresiasi Tempat Ibadah Teladan. Program Beasiswa “Demak Qur’ani” – Hafizh Al-Qur’an melalui Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa Hafizh, Penyaluran Beasiswa Tahunan Berdasarkan Level Hafalan, Pelatihan Karakter Santri Hafizh, dan Dokumentasi dan Apresiasi Hafizh Terbaik. Forum Silaturahmi & Sinergi “Ulama-Umaro” melalui Pembentukan Forum dan SK Bupati, Pertemuan Rutin dan Dialog Tematik, afari Keagamaan dan Kolaborasi Sosial, Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Publik Berbasis Nilai, dan Media dan Dokumentasi Forum. Dukungan kegiatan majlis akbar dan keagamaan seperti Bantuan Majlis Haul Akbar & Kegiatan Keagamaan Massal lainnya melalui Majlis Haul Akbar, Demak Bersolawat, Peringatan Hari Besar Keagamaan, Safari Keagamaan & Dakwah Keliling, Dukungan Hibah Kegiatan Keagamaan Lokal, Festival Keagamaan & Kreasi Santri, dan Dokumentasi & Live Streaming. Layanan Keliling Terpadu “Demang Ngantor Deso” melalui Penyusunan Jadwal, SOP, dan Tim Layanan Bergerak, Pengadaan & Operasional Mobil Layanan Keliling, dan Pelaksanaan Layanan dan Sosialisasi di Desa

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diukur dengan return on asset BUMD, nilai SAKIP perangkat daerah, indeks tata kelola pengadaan, persentase fasilitasi kebijakan



urusan perekonomian dan persentase fasilitasi kebijakan urusan SDA

b. Sekretariat DPRD; dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Program ini diukur dengan persentase penetapan ranperda dan persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diukur dengan persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD, persentase IKU daerah yang mencapai target dan persentase perencanaan pembangunan daerah berbasis IT

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diukur dengan persentase kesesuaian Renstra – Renja – RKPD

b. Keuangan; dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diukur dengan skor kesesuaian pagu program dokumen perencanaan dan penganggaran, persentase pelayanan perbendaharaan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan persentase laporan SKPD yang telah diselesaikan sesuai SAP

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diukur dengan persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diukur dengan deviasi realisasi PAD terhadap target PAD dalam APBD

c. Kepegawaian; dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diukur dengan persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya, persentase tingkat kedisiplinan, persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya serta persentase formasi kebutuhan ASN yang terisi. Penguatan Merit Sistem ASN dan Budaya Kerja Se Pemantauan & Evaluasi Kinerja Berbasis Sistem



Merithat melalui Seleksi Terbuka Jabatan dan Talent Pool ASN,

d. Pendidikan dan Pelatihan; dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diukur dengan persentase implementasi rencana program pengembangan kompetensi. Transformasi Digital Pelayanan Publik & Administrasi melalui Penerapan Aplikasi E-Government, Pelatihan ASN & Admin Digital. Penguatan Merit Sistem ASN dan Budaya Kerja Sehat melalui Penyusunan Roadmap Merit Sistem Daerah, Pelatihan ASN: Kepemimpinan Humanis dan Bebas Tekanan, Internalisasi Budaya Kerja Kolaboratif & Anti-Toxic.

e. Penelitian dan Pengembangan; dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program ini diukur dengan persentase riset yang dilaksanakan sesuai rencana induk riset

2) Program Riset dan Inovasi Daerah

Program ini diukur dengan persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi dan peningkatan minat masyarakat berinovasi. Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah melalui Promosi dan Forum Investasi. Program Inkubasi Inovasi & Teknologi Tepat Guna Berbasis Komunitas melalui Pelatihan Rutin Teknologi Tepat Guna, Kompetisi dan Pameran Inovasi, Dokumentasi & Promosi Produk Inovasi

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah; dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diukur dengan tindaklanjut rekomendasi BPK tahun anggaran sebelumnya

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program ini diukur dengan persentase perangkat daerah yang menyusun register risiko

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan; dilaksanakan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Demak yang berjumlah 14 (empat belas) Kecamatan

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini diukur dengan persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini diukur dengan persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan

3) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Program ini diukur dengan cakupan keamanan wilayah

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diukur dengan persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diukur dengan persentase desa yang tertib administrasi. Digitalisasi Layanan dan Pemberdayaan Desa melalui Monitoring & Evaluasi Perkembangan Desa Digital

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik; dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diukur dengan cakupan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Program ini diukur dengan rasio masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diukur dengan persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif

4) Program Pembinaan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini diukur dengan persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan ketahanan yang paham terhadap ketahanan bangsa dan kerukunan umat beragama

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diukur dengan jumlah potensi konflik sosial yang teridentifikasi

Rincian program yang mencakup semua urusan beserta pagu indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1

Program Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2026 - 2030

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.696.784.443.396		1.760.182.604.392		1.804.812.179.237		1.864.022.311.666		2.119.337.300.003		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			849.626.781.337		871.659.847.687		895.424.450.836		921.135.964.025		948.955.982.172		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			849.626.781.337		871.659.847.687		895.424.450.836		921.135.964.025		948.955.982.172		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				621.240.884.213		631.073.066.592		654.096.975.172		679.456.058.361		707.187.003.008	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	80,6	80,6		80,6		80,62		80,62		80,63		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				227.400.897.124		238.981.781.095		239.722.475.664		240.074.905.664		240.163.979.164	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				0		610.000.000		610.000.000		610.000.000		610.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing tenaga pendidik dan kependidikan	Proporsi Pendidik Bersertifikat Profesir (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya kapasitas dan daya saing tenaga pendidik dan kependidikan	Indeks Distribusi Guru (Dengan Satuan:Angka)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				985.000.000		995.000.000		995.000.000		995.000.000		995.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya kurikulum berbasis karakter	Persentase muatan lokal yang telah memiliki silabus dan kurikulum (Dengan Satuan:%)	67,78	67,8		67,8		67,85		67,85		67,9		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			588.709.757.310		617.699.385.950		634.124.999.163		651.835.801.864		870.735.655.650		
	DINAS KESEHATAN DAERAH			588.709.757.310		617.699.385.950		634.124.999.163		651.835.801.864		870.735.655.650		
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				443.318.418.602		465.684.159.189		487.485.884.350		504.572.798.998		522.848.764.732	Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	91,02	91,07		91,09		91,13		91,15		91,17		Dinas Kesehatan Daerah
1.02.02	PROGRAM PEMEMUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				141.468.617.308		148.092.505.361		142.716.393.413		143.340.281.466		343.964.169.518	Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan urusan Pengendalian Penyakit (Dengan Satuan:Persen)	4,04	4,04		4,04		4,04		4,04		4,04		Dinas Kesehatan Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rata-rata persentase capaian SPM Bidang Kesehatan urusan Kesehatan Masyarakat (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persetase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah		
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Kebersertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (Dengan Satuan:Persen)	79,13	80,10		80,20		80,30		80,40		80,50		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi wasting; (Dengan Satuan:Persen)	4,04	4,02		4,01		4,00		3,99		3,98		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Hipertensi (Dengan Satuan:Persen)	35,1	27,60		27,60		27,60		27,60		27,40		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Dengan Satuan:Persen)	NA	40		50		60		70		80		Dinas Kesehatan Daerah
	MENINGKATNYA PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Depresi yang Mendapatkan Layanan (Dengan Satuan:Persen)	0,004	0,015		0,002		0,002		0,002		0,002		Dinas Kesehatan Daerah
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				2.048.880.000		2.048.880.000		2.048.880.000		2.048.880.000		2.048.880.000	Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan fasilitas	Persentase tenaga kesehatan berkompotensi di fasilitas pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan fasilitas	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Dengan Satuan:Angka)	1,94	1,98		2,00		2,02		2,04		2,06		Dinas Kesehatan Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				776.000.000		776.000.000		776.000.000		776.000.000		776.000.000	Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan serta sarana produksi makanan dan minuman sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (Dengan Satuan:Persen)	NA	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:Persen)	NA	85		88		92		95		96		Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya jaminan keamanan, kualitas ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				1.097.841.400		1.097.841.400		1.097.841.400		1.097.841.400		1.097.841.400	Dinas Kesehatan Daerah
	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam promosi Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase rumah tangga PHBS (Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat) (Dengan Satuan:Persen)	93,55	93,55		93,55		93,55		93,55		93,55		Dinas Kesehatan Daerah
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pengukuran kebugaran (Dengan Satuan:Persen)	59,25	81,48		92,59		100		100		100		Dinas Kesehatan Daerah
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			144.190.714.631		147.915.223.897		151.943.062.455		156.308.743.628		161.024.139.038		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			144.190.714.631		147.915.223.897		151.943.062.455		156.308.743.628		161.024.139.038		
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				24.275.462.999		24.885.066.777		25.466.642.661		26.122.744.812		26.949.185.659	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	92,09	92,1		92,11		92,12		92,13		92,14		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				31.000.000.000		32.000.000.000		33.000.000.000		34.000.000.000		35.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	88,07	89,78		90,98		92,19		93,4		94,61		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	Persentase sarana prasarana pengendali banjir dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	17,92		17,92		18,41		22,62		23,11		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				3.722.530.000		3.819.800.000		3.923.698.560		4.036.308.709		4.157.801.601	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya layanan akses air minum perpipaan	persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (PDAM dan Non PDAM) (Dengan Satuan:%)	92,81	93,11		93,25		93,4		93,55		93,7		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9.444.207.511		9.690.985.392		9.954.580.195		10.240.276.646		10.548.508.973	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Layanan Air Limbah	Persentase rumah tangga yang terlayani akses sanitasi layak (Dengan Satuan:%)	83,33	83,96		84,27		84,59		84,9		85,22		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				524.300.000		538.000.000		524.300.000		568.494.184		582.605.859	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kinerja drainase perkotaan	Persentase drainase perkotaan yang tertangani (Dengan Satuan:%)	92,2	88,84		89,99		91,15		92,31		93,46		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				19.430.558.000		19.938.280.000		20.480.601.216		21.068.394.471		21.702.553.144	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kepatuhan bangunan gedung	Rasio kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kabupaten (Dengan Satuan:angka)	1	1		1		1		1		1		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungannya	Luas kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik (Dengan Satuan:Ha)	0	1		1		1		1		1		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				53.915.476.121		55.324.291.728		56.829.112.463		58.460.107.991		60.219.757.241	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penyelenggaraan jalan	Panjang Jalan dalam kondisi mantap (Dengan Satuan:Km)	750,074	752,024		755,784		759,563		763,361		767,178		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				400.000.000		320.000.000		330.000.000		340.000.000		350.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kualitas tenaga kerja konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih (Dengan Satuan:angka)	52,85	57,7		59,7		61,7		63,7		65,7		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.378.180.000		1.298.800.000		1.334.127.360		1.372.416.815		1.413.726.561	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya kepatuhan penataan ruang	Persentase kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (Dengan Satuan:%)	0	70		75		80		85		90		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			69.412.298.439		71.205.168.645		73.138.856.975		75.235.147.611		77.501.958.426		
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			69.412.298.439		71.205.168.645		73.138.856.975		75.235.147.611		77.501.958.426		
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.640.000.000		12.640.000.000		12.837.500.000		13.054.750.000		13.293.725.000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	8996758900	12640000000		12640000000		12837500000		13054750000		13293725000		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				3.650.000.000		3.675.000.000		3.700.000.000		3.725.000.000		3.750.000.000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Tersedianya perumahan rumah layak huni dan terjangkau bagi korban bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi rumah tangga korban bencana	100	20		40		60		80		100		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Persen)												
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				3.860.000.000		3.860.000.000		3.860.000.000		3.860.000.000		3.860.000.000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh	Persentase kawasan permukiman kumuh yang ditangani (Dengan Satuan:Persen)	10	10		20		30		40		50		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				10.370.000.000		10.375.000.000		10.380.000.000		10.385.000.000		10.390.000.000	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya jumlah RT yang mendapatkan akses Rumah Layak Huni.	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh. (Dengan Satuan:Persen)	5,1	20		40		60		80		100		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				38.892.298.439		40.655.168.645		42.361.356.975		44.210.397.611		46.208.233.426	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang dilengkapi PSU (Dengan Satuan:Persen)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			29.004.967.427		34.310.960.821		32.296.442.416		41.380.987.146		42.770.597.325		
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			17.492.439.326		21.068.261.221		22.277.795.991		30.860.208.000		32.194.329.000		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.712.034.100		15.138.922.891		14.989.745.991		16.938.161.000		17.996.074.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				4.405.240.586		4.356.248.330		5.138.042.000		5.486.542.000		5.650.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase penegakan perda dan perkada (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN				1.375.164.640		1.573.090.000		2.150.008.000		8.435.505.000		8.548.255.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran (Dengan Satuan:Menit)	15	15		15		15		15		15		Satuan Polisi Pamong Praja
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Dengan Satuan:Persentase)	100	100		100		100		100		Satuan Polisi Pamong Praja		
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			11.512.528.101		13.242.699.600		10.018.646.425		10.520.779.146		10.576.268.325		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				8.222.528.101		10.415.699.600		7.173.646.425		7.752.779.146		7.780.268.325	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	94,04	94,06		94,07		94,08		94,09		94,1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				3.290.000.000		2.827.000.000		2.845.000.000		2.768.000.000		2.796.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya kualitas mitigasi dan penanggulangan bencana	Persentase Masyarakat yang menerima pelayanan informasi serta pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			15.839.924.252		17.392.017.392		17.884.367.392		18.125.667.392		18.348.967.392		
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			15.839.924.252		17.392.017.392		17.884.367.392		18.125.667.392		18.348.967.392		
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				9.503.753.552		9.790.007.492		10.042.357.492		10.227.657.492		10.412.957.492	Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				649.000.000		1.285.000.000		1.290.000.000		1.300.000.000		1.310.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang diberdayakan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				2.342.160.800		3.042.000.000		3.132.000.000		3.132.000.000		3.132.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak
	Meningkatnya rehabilitasi sosial PPKS	Persentase penyanggandisabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				2.650.009.900		2.465.009.900		2.490.009.900		2.466.009.900		2.444.009.900	Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak
	Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan penduduk miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	65,59	71,65		71,8		74,68		74,83		78,92		Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				595.000.000		705.000.000		815.000.000		875.000.000		915.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak
	Meningkatnya pemulihan sosial dan perlindungan korban bencana	Persentase korban bencana yang pulih fungsi sosialnya (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				100.000.000		105.000.000		115.000.000		125.000.000		135.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan P erempuan D an Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang terkelola dengan baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan P e r e m p u a n D a n Perlindungan Anak
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			197.403.362.811		191.244.352.320		198.840.871.138		205.431.057.328		212.160.400.734		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			12.791.477.373		13.200.118.477		13.552.521.999		13.961.012.352		14.408.137.569		
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK			12.791.477.373		13.200.118.477		13.552.521.999		13.961.012.352		14.408.137.569		
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.393.477.373		8.697.118.477		8.899.029.589		9.205.767.102		9.109.745.609	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)		88		88,5		89		89,5		90		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				120.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		130.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kerja mikro dan makro	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tenaga kerja mikro dan makro (Dengan Satuan:Persen)	50	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				1.685.000.000		2.050.000.000		2.277.492.410		2.390.245.250		2.717.391.960	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (Dengan Satuan:Persen)	49,92	50,69		51,08		51,47		51,86		52,24		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				455.000.000		455.000.000		455.000.000		475.000.000		480.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	meningkatkan penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dengan Satuan:Persen)	82,75	82,15		82,42		82,56		82,68		82,77		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				2.138.000.000		1.948.000.000		1.871.000.000		1.840.000.000		1.971.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Meningkatnya pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Angka sengketa pengusaha-pekerja yang diselesaikan (Dengan Satuan:Persen)	2,1	3		3		3		3		3		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Meningkatnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dengan Satuan:Persen)	41,54	43,04		44,54		46,04		47,54		49,04		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.912.090.430	2.959.000.000		3.114.000.000		3.164.000.000		3.214.000.000		
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.912.090.430	2.959.000.000		3.114.000.000		3.164.000.000		3.214.000.000		
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				650.000.000		220.000.000		240.000.000		260.000.000		290.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Dengan Satuan:Angka)	0.326	0.330		0.335		0.340		0.345		0.350		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				1.057.396.000		185.000.000		215.000.000		260.000.000		240.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				960.000.000		980.000.000		1.000.000.000		1.020.000.000		1.040.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	Meningkatnya peran kelembagaan peningkatan kualitas keluarga	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif (Dengan Satuan:%)	70	80		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				776.694.430		50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (Dengan Satuan:%)	80	90		100		100		100		100		Dinas Sosial, Pemberdayaan P e r e m p u a n D a n Perlindungan Anak
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				1.153.000.000		1.154.000.000		1.159.000.000		1.164.000.000		1.174.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan P e r e m p u a n D a n Perlindungan Anak
	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Dengan Satuan:%)	77.85	77.85		77.85		77.85		77.85		77.85		Dinas Sosial, Pemberdayaan P e r e m p u a n D a n Perlindungan Anak
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				315.000.000		370.000.000		440.000.000		390.000.000		390.000.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan P e r e m p u a n D a n Perlindungan Anak
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak ekkerasan, eksploitasi, pelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Dengan Satuan:%)	87.31	87.31		87.31		87.31		87.31		87.31		Dinas Sosial, Pemberdayaan P e r e m p u a n D a n Perlindungan Anak
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			6.995.000.000		6.995.000.000		6.995.000.000		6.995.000.000		6.995.000.000		
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			6.995.000.000		6.995.000.000		6.995.000.000		6.995.000.000		6.995.000.000		
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				5.460.000.000		5.460.000.000		5.460.000.000		5.460.000.000		5.460.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Jumlah infrastruktur kemandirian pangan (Dengan Satuan:Unit)	544	546		548		550		552		554		Dinas Pertanian Dan Pangan
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1.145.000.000		1.145.000.000		1.145.000.000		1.145.000.000		1.145.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan Strategis (Dengan Satuan:Ton)	0	652595		653734		654845		655958		657073		Dinas Pertanian Dan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase desa rawan pangan (Dengan Satuan:%)	0	33,7		33,7		33,7		33,7		33,7		Dinas Pertanian Dan Pangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000		120.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya pengawasan keamanan pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar dari bahan pangan yang diuji (Dengan Satuan:%)	0	91,57		91,59		91,61		91,63		91,65		Dinas Pertanian Dan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi reforma agraria	Persentase pelaksanaan rencana aksi gugus tugas reforma agraria (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Meningkatnya penatagunaan tanah aset pemkab	Persentase tanah pemkab yang bersertifikat (Dengan Satuan:%)	98	98,42		98,83		99,23		99,62		99,89		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			26.451.673.415		27.134.901.290		27.873.697.609		28.672.553.093		29.536.390.492		
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			26.451.673.415		27.134.901.290		27.873.697.609		28.672.553.093		29.536.390.492		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18.715.788.415		19.149.016.290		19.612.812.609		20.171.668.093		20.235.505.492	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas perencanaan lingkungan hidup	Ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:Dokumen)	1	3		3		3		3		3		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				700.885.000		730.885.000		760.885.000		890.885.000		990.885.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya pengendalian dan pemantauan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan frekuensi kejadian pencemaran Lingkungan (Dengan Satuan:%)	4	5		6		6		7		7		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.450.000.000		2.500.000.000		2.600.000.000		2.700.000.000		3.000.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengembangan Ruang terbuka Hijau (RTH)	Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) (Dengan Satuan:Ha)	4716,69	4719,49		4722,29		4725,09		4727,89		4730,69		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				60.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		90.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang tekelola (Dengan Satuan:%)	90	92		92,5		93		93,5		94		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				140.000.000		140.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kepatuhan usaha dan /atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan /atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (Dengan Satuan:%)	3	4		5		6		7		8		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				50.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Dengan Satuan:%)	14,29	12,5		21,97		31,44		40,91		50,38		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				4.185.000.000		4.335.000.000		4.450.000.000		4.450.000.000		4.850.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
	Meningkatnya pengelolaan persampahan yang	Persentase sampah terolah di fasilitas	17,79	17,71		17,37		17,2		17,03		16,85		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	terpadu dan berkelanjutan	pengolahan sampah (Dengan Satuan:%)												
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			10.700.033.305		10.976.407.541		11.275.259.908		11.598.406.960		11.947.840.011		
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			10.700.033.305		10.976.407.541		11.275.259.908		11.598.406.960		11.947.840.011		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.103.005.305		8.379.379.541		8.678.231.908		9.001.378.960		9.350.812.011	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	NA	85		85,5		86		86,5		87		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				2.175.000.000		2.175.000.000		2.175.000.000		2.175.000.000		2.175.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya tata kelola data kependudukan	Persentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP elektronik. (Dengan Satuan:%)	98.7	98.75		98.80		98.85		98.90		98.95		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL				175.028.000		175.028.000		175.028.000		175.028.000		175.028.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meingkatnya tata kelola data pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil. (Dengan Satuan:%)	99,66	99,67		99,67		99,68		99,69		99,7		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				247.000.000		247.000.000		247.000.000		247.000.000		247.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan. (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			19.318.019.425		19.992.041.834		20.849.805.118		21.706.329.171		22.452.374.545		
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			19.318.019.425		19.992.041.834		20.849.805.118		21.706.329.171		22.452.374.545		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.182.519.425		9.464.041.834		10.003.805.118		10.540.329.171		11.036.374.545	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				140.000.000		220.000.000		275.000.000		335.000.000		395.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kerja sama desa	Peningkatan Jumlah Kerja sama Desa yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	99,31	99,32%		99,33%		99,34%		99,35%		99,36%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				8.940.500.000		9.138.000.000		9.316.000.000		9.466.000.000		9.571.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Presentase Fasilitasi tata kelola Desa (Dengan Satuan:%)	98,90%	98,91%		98,92%		98,93%		98,94%		98,95%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.055.000.000		1.170.000.000		1.255.000.000		1.365.000.000		1.450.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD) (Dengan Satuan:%)	96,64%	96,65%		96,66%		96,67%		96,68%		96,69%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			13.979.806.650		14.220.806.650		14.367.606.650		14.555.806.650		14.810.806.650		
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK				530.303.550		581.303.550		626.303.550		693.303.550		735.303.550	Dinas Pemberdayaan Masvarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya Pelaksanaan pembangunan kependudukan	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) (Dengan Satuan:%)	7,22	7,08		7,06		7,04		7,02		7,01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)				6.961.303.100		7.108.303.100		7.185.103.100		7.286.303.100		7.454.303.100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Prevalensi Kontrasepsi Modern (MCPR) (Dengan Satuan:%)	73,77%	73,78%		73,79%		73,80%		73,81%		73,82%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak Terpenuhi(unmet need) (Dengan Satuan:%)	6,23	6		5,9		5,8		5,7		5,6		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				6.488.200.000		6.531.200.000		6.556.200.000		6.576.200.000		6.621.200.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	persentase desa/kelurahan yang memiliki kelompok Ketahanan K e l u a r g a (D e n g a n Satuan:%)	95,01%	95,02%		95,03%		95,04%		95,05%		95,06%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			53.880.002.649		46.237.553.675		50.022.237.115		52.562.384.354		55.137.698.694		
	DINAS PERHUBUNGAN			53.880.002.649		46.237.553.675		50.022.237.115		52.562.384.354		55.137.698.694		
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.913.327.400		9.772.775.400		9.853.775.400		9.637.815.400		10.256.815.400	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	88,81	89,35		89,52		89,87		89,92		90,11		Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				33.966.675.249		36.464.778.275		40.168.461.715		42.924.568.954		44.880.883.294	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan kabupaten (IUP) (Dengan Satuan:%)	0,38	0,38		0,39		0,4		0,41		0,42		Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			11.684.736.992		11.700.751.530		11.917.468.234		12.236.964.205		12.561.516.370		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			11.684.736.992		11.700.751.530		11.917.468.234		12.236.964.205		12.561.516.370		
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.617.342.000		8.925.751.530		8.952.468.234		9.116.964.205		9.186.516.370	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				725.000.000		1.350.000.000		1.475.000.000		1.545.000.000		1.650.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi Publik	Indeks PPID (Dengan Satuan:Angka)	95,2	96,5		97		97,5		98		98,5		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.342.394.992		1.425.000.000		1.490.000.000		1.575.000.000		1.725.000.000		Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Layanan SPBE (Dengan Satuan:Angka)	69	76		82		88		94		100		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			1.648.105.000		1.690.000.000		1.690.000.000		1.765.000.000		1.765.000.000		
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			1.648.105.000		1.690.000.000		1.690.000.000		1.765.000.000		1.765.000.000		
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				275.000.000		300.000.000		300.000.000		310.000.000		310.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Kualitas Koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (Dengan Satuan:%)	66,2	62,69		62,69		62,69		62,7		62,7		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				893.725.000		910.000.000		910.000.000		965.000.000		965.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Jumlah UMKM	Pertumbuhan UMKM (Dengan Satuan:%)	4,25	4,25		4,26		4,27		4,28		4,29		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				479.380.000		480.000.000		480.000.000		490.000.000		490.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya UMKM yang Naik Kelas	Persentase Usaha Mikro Menjadi U s a h a K e c i l (D e n g a n Satuan:%)	3,48	3,48		3,49		3,5		3,51		3,52		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6.676.958.794		6.849.419.882		7.035.907.614		7.237.555.542		7.455.606.273		
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			6.676.958.794		6.849.419.882		7.035.907.614		7.237.555.542		7.455.606.273		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				6.282.955.794		6.437.138.232		6.569.916.964		6.701.915.892		7.006.858.773	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				36.288.000		37.971.000		81.503.000		40.122.000		41.329.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya iklim investasi	Jumlah nilai investasi PMDN dan PMA (Dengan Satuan:Miliar)	3,952	5,007		5,638		6,35		7,153		8,06		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				59.322.000		62.074.000		63.762.000		165.591.000		67.565.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya jumlah investasi	Pertumbuhan Jumlah Investasi (Dengan Satuan:%)	12,53	12,57		12,6		12,63		12,65		12,68		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				131.183.000		137.269.650		141.001.650		145.046.650		149.411.500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya kemudahan perizinan	Rata-rata lama pengurusan perizinan berusaha (Dengan Satuan:hari)	1	1		1		1		1		1		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				84.916.000		88.855.000		91.270.000		93.888.000		96.712.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Adanya Pendampingan kepatuhan LKPM	Persentase perusahaan yang telah dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal (Dengan Satuan:%)	15,15	10		10		10		10		10		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				82.294.000		86.112.000		88.454.000		90.992.000		93.730.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Tersedianya data investasi daerah	Persentase data investasi daerah yang dipublikasikan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			17.398.438.278		17.847.827.541		18.333.766.633		18.859.209.300		19.427.393.454		
	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			17.398.438.278		17.847.827.541		18.333.766.633		18.859.209.300		19.427.393.454		
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.956.995.638		6.162.662.519		6.370.566.154		6.558.909.592		6.744.901.574	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				724.000.000		759.000.000		794.000.000		829.000.000		864.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan Organisasi Kepemudaan yang Dibina (Dengan Satuan:Angka)	3,32 77,3	4 84		4,3 86		4,5 88		4,7 90		4,9 92		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				9.232.442.640		9.361.165.022		9.524.200.479		9.746.299.708		10.013.491.880	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase jumlah atlit berprestasi (Dengan Satuan:%)	57	65		66		68		70		72		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				1.485.000.000		1.565.000.000		1.645.000.000		1.725.000.000		1.805.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
	Meningkatnya Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi pramuka aktif (Dengan Satuan:%)	96	96		97		97		98		98		Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			250.000.000		450.000.000		525.000.000		555.000.000		600.000.000		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			250.000.000		450.000.000		525.000.000		555.000.000		600.000.000		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				250.000.000		450.000.000		525.000.000		555.000.000		600.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Satu Data	Indeks SDI (Dengan Satuan:Angka)	57,63	67,63		72,63		77,63		82,63		87,63		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			300.000.000		400.000.000		450.000.000		470.000.000		500.000.000		
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				300.000.000		400.000.000		450.000.000		470.000.000		500.000.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (Dengan Satuan:Angka)	560	570		575		580		585		590		Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			2.559.696.883		2.538.000.000		2.575.000.000		2.600.000.000		2.610.000.000		
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			2.559.696.883		2.538.000.000		2.575.000.000		2.600.000.000		2.610.000.000		
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				1.410.000.000		1.410.000.000		1.410.000.000		1.410.000.000		1.410.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya pengembangan kebudayaan	Persentase peningkatan penyelenggaraan event kebudayaan (Dengan Satuan:%)	4	4		4		4		4		4		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan (Dengan Satuan:%)	3	2		2		2		2		2		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				749.696.883		728.000.000		765.000.000		790.000.000		800.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Meningkatnya tata kelola museum	Persentase peningkatan kunjungan museum (Dengan Satuan:%)	10	12		14		16		17		18		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			7.126.823.617		7.267.523.900		7.341.700.258		7.605.335.701		7.814.636.676		
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			7.126.823.617		7.267.523.900		7.341.700.258		7.605.335.701		7.814.636.676		
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.928.323.617		5.952.523.900		6.040.700.258		6.127.940.701		6.158.636.676	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	DAERAH KABUPATEN /KOTA													
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				1.095.000.000		1.211.000.000		1.186.000.000		1.362.395.000		1.461.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Rasio kunjungan masyarakat ke perpustakaan (Dengan Satuan:Angka)	0,22	0,24		0,26		0,27		0,28		0,29		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				103.500.000		104.000.000		115.000.000		115.000.000		195.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatnya ketersediaan koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno (Dengan Satuan:%)	0	8,99		13,44		16,27		17,6		17,87		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			430.500.000		485.000.000		621.900.000		586.500.000		624.000.000		
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				362.000.000		450.000.000		506.900.000		531.500.000		489.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatnya pengelolaan arsip dinamis dan statis	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi pengolahan arsip digital (Dengan Satuan:%)	26,92	50		61,54		73,08		84,62		96,15		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				68.500.000		35.000.000		115.000.000		55.000.000		135.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (Dengan Satuan:%)	15,38	38,46		50		61,54		76,92		92,31		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			99.599.870.014		102.115.223.095		105.479.292.213		108.810.739.221		112.651.780.431		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			11.049.235.504		11.334.629.384		11.643.234.983		11.976.928.139		12.337.765.153		
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			11.049.235.504		11.334.629.384		11.643.234.983		11.976.928.139		12.337.765.153		
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.149.235.504		6.330.629.384		6.576.234.983		6.744.928.139		6.971.765.153	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	0	80		80,2		80,4		80,6		80,8		Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				1.559.000.000		1.584.500.000		1.616.000.000		1.661.000.000		1.715.500.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan: Ton)	9108	9162,37		9189,86		9217,43		9245,08		9272,82		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.632.000.000		1.665.000.000		1.685.000.000		1.740.000.000		1.785.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya produksi Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (Dengan Satuan: Ton)	50.842	52.910,52		53.968,73		55.048,10		56.149,07		57.272,05		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				75.000.000		85.000.000		75.000.000		85.000.000		75.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya kepatuhan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (Dengan Satuan: Persen)	0	75		75		75		75		75		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.634.000.000		1.669.500.000		1.691.000.000		1.746.000.000		1.790.500.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	produksi pengolahan hasil perikanan (Dengan Satuan: Ton)	22.010	23.420		24.380		25.403		26.495		27.660		Dinas Kelautan Dan Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			14.478.709.100		14.807.338.805		15.547.705.744		16.094.599.446		16.902.954.418		
	DINAS PARIWISATA			14.478.709.100		14.807.338.805		15.547.705.744		16.094.599.446		16.902.954.418		
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.840.209.100		6.810.538.805		7.141.065.744		7.627.599.446		8.321.204.418	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan: %)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.758.000.000		3.984.000.000		4.193.200.000		4.215.000.000		4.239.500.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara;	248	340		355		375		390		410		Dinas Pariwisata

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		(Dengan Satuan:Orang)												
	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Tamu Wisatawan Nusantara; (Dengan Satuan:Orang)	3913112	5382146		5651255		5933815		6230510		6542035		Dinas Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				3.576.500.000		3.650.800.000		3.833.340.000		3.857.000.000		3.920.000.000	Dinas Pariwisata
	Terlaksananya Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persentase kegiatan kalender event yang dipromosikan ke luar daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				304.000.000		362.000.000		380.100.000		395.000.000		422.250.000	Dinas Pariwisata
	Meningkatnya pengembangan sub sektor ekonomi kreatif	Persentase sub sektor ekonomi kreatif yang dibina (Dengan Satuan:%)	17	20		40		60		80		100		Dinas Pariwisata
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata yang Bersertifikat (Dengan Satuan:%)	10	10		12		14		15		16		Dinas Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			45.870.151.033		47.120.620.774		48.597.146.041		50.243.703.475		51.970.130.906		
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			45.870.151.033		47.120.620.774		48.597.146.041		50.243.703.475		51.970.130.906		
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				29.268.258.472		29.518.728.213		30.225.874.344		31.453.872.475		32.180.299.906	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				5.108.572.561		5.108.572.561		5.877.951.697		6.296.511.000		6.296.511.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Tersedianya Alsintan Pertanian	Persentase alsintan pertanian dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	90		90		90		90		90		Dinas Pertanian Dan Pangan
	Tersedianya Alsintan Pertanian	Persentase alsintan perkebunan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	90		90		90		90		90		Dinas Pertanian Dan Pangan
	Tersedianya Alsintan Pertanian	Persentase alsintan peternakan dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	90		90		90		90		90		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				8.014.600.000		9.014.600.000		9.014.600.000		9.014.600.000		10.014.600.000	Dinas Pertanian Dan Pangan

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Tersedianya Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	90		90		90		90		90		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000		195.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Terkendalinya Hama Penyakit Ternak	Jumlah kasus penyakit hewan yang terkonfirmasi (Dengan Satuan:Ekor)	1428	1400		1372		1344		1317		1291		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Terkendalinya dan tertanggulangnya bencana pertanian	Persentase luasan puso pertanian (Dengan Satuan:%)	0	10		10		10		10		10		Dinas Pertanian Dan Pangan
	Terkendalinya dan tertanggulangnya bencana pertanian	Persentase luasan puso perkebunan (Dengan Satuan:%)												
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				2.883.720.000		2.883.720.000		2.883.720.000		2.883.720.000		2.883.720.000	Dinas Pertanian Dan Pangan
	Meningkatnya kapasitas SDM Pertanian	Persentase poktan yang dibina (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Pertanian Dan Pangan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			27.301.774.377		28.007.634.132		28.816.205.445		29.615.508.161		30.560.929.954		
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			27.301.774.377		28.007.634.132		28.816.205.445		29.615.508.161		30.560.929.954		
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.096.588.377		12.318.948.132		12.877.519.445		12.979.522.161		13.324.943.954	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				5.700.000		5.700.000		5.700.000		6.000.000		6.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Kemudahan Perizinan Bagi Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Toko Swalayan yang Direkomendasi (Dengan Satuan:%)	98,92	98,92		98,93		98,94		98,95		98,96		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				14.281.986.000		14.751.986.000		15.001.986.000		15.679.986.000		16.279.986.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Kualitas Sarana Distribusi Perdagangan Dalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:%)	55,56	50		50		50		50		50		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				590.000.000		593.500.000		593.500.000		607.500.000		607.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disparitas Harga (Dengan Satuan:%)	0	10		10		10		10		10		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				90.000.000		95.000.000		95.000.000		97.500.000		97.500.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Luar Negeri (Dengan Satuan:%)	0,23	0,17		0,18		0,19		0,2		0,21		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				182.500.000		187.500.000		187.500.000		190.000.000		190.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
	Meningkatnya Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP Bertanda Tera Sah Yang Berlaku (Dengan Satuan:%)	133,22	90		91		92		93		94		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000		55.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah Mengikuti Sosialisasi Produk Legal Dalam Negeri (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			820.000.000		760.000.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000		
	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK			820.000.000		760.000.000		780.000.000		780.000.000		780.000.000		
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				720.000.000		660.000.000		680.000.000		680.000.000		680.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Tersedianya dokumen perencanaan industri	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan industri (Dengan Satuan:Persen)	0	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Meningkatnya Pemantauan Perkembangan Industri	Rasio jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000		70.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
	Tersedianya Informasi Perkembangan Industri	Persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini (Dengan Satuan:%)	125	100		100		100		100		100		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			80.000.000		85.000.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000		
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				80.000.000		85.000.000		95.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	meningkatkan layanan transmigrasi	jumlah calon transmigran yang terdaftar (Dengan Satuan:Kepala Keluarga)	7	6		6		6		6		6		Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Demak
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			132.314.673.413		135.732.267.140		139.397.671.373		143.392.144.778		147.744.825.082		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH			59.415.296.493		60.949.951.262		62.609.422.920		64.403.798.448		66.344.135.243		
	SEKRETARIAT DAERAH			59.415.296.493		60.949.951.262		62.609.422.920		64.403.798.448		66.344.135.243		
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				42.191.990.693		43.281.779.862		44.460.204.020		45.734.426.448		47.112.298.343	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan lingkup setda	Indeks Kepuasan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	90,07	90,45		90,7		90,85		91		91,2		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan lingkup setda	Persentase kegiatan pimpinan yang terfasilitasi (Dengan Satuan:Persentase)	93,83	85		85		85		85		Sekretariat Daerah		
	Meningkatnya kematangan organisasi	Nilai Kematangan Organisasi (Dengan Satuan:Angka)	38,02	38,27		38,42		38,6		38,78		38,9		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas kinerja PD	Persentase PD dengan Nilai AKIP M e m u a s k a n (D e n g a n Satuan:%)	26,83	30		32,53		34,44		36,89		38		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya tata kelola pelayanan publik	Persentase UPP yang memiliki nilai Baik (Dengan Satuan:%)	35	55		65		75		80		85		Sekretariat Daerah
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				14.170.547.800		14.536.563.000		14.932.347.000		15.360.305.300		15.823.075.700	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase fasilitasi kebijakan bidang administrasi tata pemerintahan dan kerjasama daerah (Dengan Satuan:%)	0	0		0		0		0		0		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase fasilitasi kebijakan urusan kesejahteraan rakyat (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Reformasi Hukum (Dengan Satuan:Angka)	97,92	97,95		97,98		98		98,03		98,05		Sekretariat Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Indeks Kualitas Kebijakan (Dengan Satuan:Angka)	66,88	67		68		69		70		71		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai Aksi HAM Daerah (Dengan Satuan:Angka)	100	100		100		100		100		100		Sekretariat Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.052.758.000		3.131.608.400		3.216.871.900		3.309.066.700		3.408.761.200	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	71	71		71		71		71		71		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Angka)	81,95	82,05		82,1		82,15		82,2		82,25		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ (Dengan Satuan:%)	66,67	88,89		88,89		88,89		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan urusan perekonomian (Dengan Satuan:%)	0	81,82		90,91		90,91		100		100		Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan	Persentase fasilitasi kebijakan urusan SDA (Dengan Satuan:%)	0	5		5		5		5		5		Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD			72.899.376.920		74.782.315.878		76.788.248.453		78.988.346.330		81.400.689.839		
	SEKRETARIAT DPRD			72.899.376.920		74.782.315.878		76.788.248.453		78.988.346.330		81.400.689.839		
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				46.100.539.004		47.883.477.962		49.596.174.894		51.739.476.552		52.052.836.551	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	84,13	85		85,25		85,5		85,75		86		Sekretariat DPRD
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				26.798.837.916		26.898.837.916		27.192.073.559		27.248.869.778		29.347.853.288	Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Dengan Satuan:%)	n/a	60		63		66		68		70		Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Dengan Satuan:%)	n/a	87		88		89		90		91		Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			464.069.043.548		467.689.372.030		470.032.629.426		472.889.673.930		475.181.305.601		
5.01	PERENCANAAN			10.293.342.500		12.197.327.500		11.745.554.288		12.100.327.500		12.500.327.500		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			10.293.342.500		12.197.327.500		11.745.554.288		12.100.327.500		12.500.327.500		
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.954.925.000		6.999.425.000		6.996.425.000		7.002.425.000		7.002.425.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	76	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.434.417.500		2.046.167.500		1.597.394.288		1.946.167.500		2.346.167.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Terpenuhinya keselarasan RKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD (Dengan Satuan:%)	100 persen	100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		100 persen		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				1.904.000.000		3.151.735.000		3.151.735.000		3.151.735.000		3.151.735.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpenuhinya keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan PD	Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Terpenuhinya keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan PD	Persentase Kesesuaian Renstra - Renja dan RKPD - Renja bidang perekonomian, SDA, Infrastruktur dan kewilayahan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
5.02	KEUANGAN			439.282.047.812		441.169.978.273		443.161.142.499		445.263.405.759		447.484.913.125		
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			439.282.047.812		441.169.978.273		443.161.142.499		445.263.405.759		447.484.913.125		
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26.077.901.408		27.051.598.091		28.104.279.564		29.242.645.080		30.473.609.537	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	NA	100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				375.933.023.169		376.847.256.947		377.785.739.700		378.749.637.444		379.740.180.353	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Terpenuhinya keselarasan proses perencanaan dan penganggaran	Skor Kesesuaian Pagu Program dokumen perencanaan dan penganggaran (Dengan Satuan:Angka)	100	100		100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Terlaksananya penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik	Persentase pelayanan perbendaharaan Pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah		
	terselesaikannya Laporan Keuangan seluruh SKPD sesuai SAP	persentase laporan SKPD yang telah diselesaikan sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya barang milik daerah yang dimanfaatkan	Persentase barang milik daerah yang dimanfaatkan (Dengan Satuan:%)	14	15		16		17		18		20		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235		36.271.123.235	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya realisasi PAD	Deviasi realisasi PAD terhadap target PAD dalam APBD (Dengan Satuan:Angka)	5	5		5		5		5		5		Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
5.03	KEPEGAWAIAN			11.060.518.236		10.143.721.257		10.415.917.639		10.751.825.671		10.345.744.976		
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			11.060.518.236		10.143.721.257		10.415.917.639		10.751.825.671		10.345.744.976		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.937.824.236		7.962.499.257		8.129.503.739		8.354.599.871		8.596.158.176	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				2.122.694.000		2.181.222.000		2.286.413.900		2.397.225.800		1.749.586.800	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:%)	80,7	80,75		80,8		80,85		80,9		80,95		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya pembinaan disiplin pegawai	Persentase tingkat kedisiplinan (Dengan Satuan:%)	96,5	97		97		97		98		98		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (Dengan Satuan:%)	80	81		82		83		84		85		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terpenuhinya kebutuhan formasi ASN	Persentase formasi kebutuhan ASN yang terisi (Dengan Satuan:%)	86,66	86,68		86,7		86,72		86,74		86,76		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.154.894.000		2.771.015.000		2.816.075.000		2.741.015.000		2.776.350.000		
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				2.154.894.000		2.771.015.000		2.816.075.000		2.741.015.000		2.776.350.000	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Terlaksananya Rencana Pengembangan Kompetensi	Persentase Implementasi Rencana Program Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:%)	85,37	86,36		87,36		88,36		89,36		90,36		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.278.241.000		1.407.330.000		1.893.940.000		2.033.100.000		2.073.970.000		
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			1.278.241.000		1.407.330.000		1.893.940.000		2.033.100.000		2.073.970.000		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				324.033.000		325.240.000		326.510.000		427.840.000		429.240.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Terlaksananya riset sesuai rencana induk riset	Persentase riset yang dilaksanakan sesuai rencana induk riset (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				954.208.000		1.082.090.000		1.567.430.000		1.605.260.000		1.644.730.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Tersusunya Hasil Riset yang menjadi rekomendasi kebijakan	Persentase Hasil Riset yang menjadi Rekomendasi Kebijakan (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
	Meningkatnya minat masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Berinovasi	Persentase Peningkatan minat masyarakat dan Perangkat Daerah dalam Berinovasi (Dengan Satuan:%)	0	3,33		6,45		9,09		11,11		12,5		Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			22.116.633.708		22.672.215.233		23.292.447.419		23.964.100.306		24.402.725.133		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH			22.116.633.708		22.672.215.233		23.292.447.419		23.964.100.306		24.402.725.133		
	INSPEKTORAT DAERAH			22.116.633.708		22.672.215.233		23.292.447.419		23.964.100.306		24.402.725.133		

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.808.821.708		13.823.615.233		14.443.847.419		14.970.500.306		15.110.225.133	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	N/A	80		81		82		83		84		Inspektorat Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				4.992.274.000		5.173.100.000		5.173.100.000		5.298.100.000		5.367.500.000	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Tindakanjnt rekomendasi BPK Tahun Anggaran sebelumnya (Dengan Satuan:%)	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Inspektorat Daerah
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				3.315.538.000		3.675.500.000		3.675.500.000		3.695.500.000		3.925.000.000	Inspektorat Daerah
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Manajemen Risiko (Dengan Satuan:Angka)	2,988	2,99		2,992		2,994		2,996		2,998		Inspektorat Daerah
7	UNSUR KEWILAYAHAN			57.908.962.565		59.271.324.511		60.804.084.856		62.446.090.536		64.415.590.710		
7.01	KECAMATAN			57.908.962.565		59.271.324.511		60.804.084.856		62.446.090.536		64.415.590.710		
	KECAMATAN MRANGGEN			3.098.521.535		3.175.196.331		3.268.107.259		3.367.758.287		3.422.201.867		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.693.791.535		2.764.716.331		2.840.757.259		2.889.693.287		2.911.201.867	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				43.880.000		48.880.000		50.000.000		60.000.000		62.000.000	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				102.500.000		102.500.000		103.000.000		115.000.000		120.000.000	Kecamatan Mranggen

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				156.565.000		157.315.000		168.065.000		181.065.000		197.000.000	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				73.785.000		73.785.000		74.285.000		90.000.000		92.000.000	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				28.000.000		28.000.000		32.000.000		32.000.000		40.000.000	Kecamatan Mranggen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mranggen
	KECAMATAN KARANGAWEN			3.692.566.071		3.787.942.422		3.891.075.943		4.002.593.525		4.123.182.367		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.358.566.071		3.272.442.422		3.442.575.943		3.552.093.525		3.664.682.367	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				20.000.000		27.000.000		28.000.000		28.000.000		23.000.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				95.000.000		100.000.000		98.000.000		98.000.000		98.000.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				112.000.000		158.500.000		155.500.000		155.500.000		155.500.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				47.000.000		90.000.000		67.000.000		67.000.000		60.000.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				60.000.000		140.000.000		100.000.000		102.000.000		122.000.000	Kecamatan Karangawen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangawen
	KECAMATAN GUNTUR				3.722.159.501		3.620.841.191		3.730.747.090		3.820.281.572		4.126.066.518	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.151.364.901		3.021.506.862		3.119.426.073		3.196.734.139		3.490.048.132	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Guntur
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				29.355.800		30.823.590		31.440.062		32.068.864		32.710.240	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Guntur
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				105.295.800		110.560.590		112.771.802		115.027.238		117.327.783	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Guntur
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				143.035.800		150.187.590		153.191.342		156.255.169		159.380.272	Kecamatan Guntur

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Guntur
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				28.377.900		29.796.795		30.392.731		31.000.586		31.620.598	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		1000		Kecamatan Guntur
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				264.729.300		277.965.764		283.525.080		289.195.576		294.979.493	Kecamatan Guntur
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Guntur
	KECAMATAN SAYUNG				3.956.431.639		4.044.292.074		4.184.085.844		4.292.886.400		4.422.431.986	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.566.038.439		3.643.912.074		3.749.885.844		3.823.686.400		3.892.231.986	Kecamatan Sayung
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sayung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				31.000.000		23.000.000		32.000.000		42.000.000		42.000.000	Kecamatan Sayung
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sayung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				93.180.000		93.180.000		94.000.000		101.000.000		101.000.000	Kecamatan Sayung
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sayung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				155.000.000		157.000.000		180.000.000		185.000.000		185.000.000	Kecamatan Sayung
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sayung

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				30.000.000		38.000.000		40.000.000		45.000.000		50.000.000	Kecamatan Sayung
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sayung
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				81.213.200		89.200.000		88.200.000		96.200.000		152.200.000	Kecamatan Sayung
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Sayung
	KECAMATAN KARANGTENGAH			3.265.429.339		3.349.773.052		3.440.976.627		3.539.594.438		3.646.234.194		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.800.429.339		2.894.773.052		2.955.976.627		3.027.594.438		3.102.234.194	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				50.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				115.000.000		125.000.000		145.000.000		155.000.000		165.000.000	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				140.000.000		150.000.000		160.000.000		170.000.000		180.000.000	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				50.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kecamatan Karangtengah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				110.000.000		100.000.000		100.000.000		107.000.000		119.000.000	Kecamatan Karangtengah
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karangtengah
	KECAMATAN WONOSALAM			2.935.192.388		3.011.006.315		3.092.986.359		3.181.630.827		3.277.485.971		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.518.192.388		2.504.006.315		2.565.986.359		2.669.630.827		2.709.485.971	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				55.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000		101.000.000	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				105.000.000		110.000.000		110.000.000		115.000.000		115.000.000	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				132.000.000		157.000.000		157.000.000		157.000.000		157.000.000	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				40.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Kecamatan Wonosalam
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				85.000.000		100.000.000		120.000.000		100.000.000		135.000.000	Kecamatan Wonosalam

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wonosalam
	KECAMATAN DEMPET			2.575.069.630		2.957.110.338		3.037.622.967		3.124.680.730		3.218.820.100		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.108.753.064		2.516.218.957		2.579.218.957		2.611.118.957		2.665.418.957	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				110.806.000		70.487.000		70.487.000		80.487.000		83.487.000	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				95.000.000		95.000.000		95.000.000		105.000.000		105.000.000	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				112.750.000		118.750.000		138.000.000		148.000.000		155.000.000	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				85.648.000		75.000.000		80.000.000		80.000.000		90.000.000	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				62.112.566		81.654.381		74.917.010		100.074.773		119.914.143	Kecamatan Dempet
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Dempet
	KECAMATAN GAJAH			3.159.437.809		3.241.043.836		3.329.287.063		3.424.703.870		3.526.882.240		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.682.437.809		2.726.543.836		2.812.287.063		2.898.703.870		2.999.382.240	Kecamatan Gajah

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				95.000.000		95.000.000		95.000.000		98.000.000		98.500.000	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				110.000.000		112.000.000		113.000.000		115.000.000		117.000.000	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				117.000.000		121.000.000		121.000.000		121.000.000		121.000.000	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				30.000.000		41.000.000		41.000.000		45.000.000		45.000.000	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				125.000.000		145.500.000		147.000.000		147.000.000		146.000.000	Kecamatan Gajah
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Gajah
	KECAMATAN KARANGANYAR			3.050.551.268		3.173.626.975		3.173.626.975		3.347.877.373		3.435.610.378		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.558.945.339		2.656.148.809		2.656.148.809		2.812.422.064		2.855.204.378	Kecamatan Karanganyar

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				68.000.000		70.720.000		70.720.000		73.548.800		76.490.000	Kecamatan Karanganyar
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				103.445.000		114.582.800		114.582.800		119.166.112		145.748.000	Kecamatan Karanganyar
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				165.170.000		173.776.800		173.776.800		180.727.872		187.956.000	Kecamatan Karanganyar
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				73.190.929		76.118.566		76.118.566		79.163.308		82.329.000	Kecamatan Karanganyar
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				81.800.000		82.280.000		82.280.000		82.849.217		87.883.000	Kecamatan Karanganyar
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Karanganyar
	KECAMATAN MIJEN			3.186.871.821		3.279.186.449		3.369.195.909		3.466.041.239		3.571.275.527		
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.626.271.821		2.809.186.449		2.852.195.909		2.897.841.239		2.946.255.527	Kecamatan Mijen

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	-	100		100		100		100		100		Kecamatan Mijen
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				57.000.000		60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000	Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mijen
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				149.500.000		130.000.000		143.000.000		156.800.000		172.480.000	Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mijen
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				147.600.000		140.000.000		154.000.000		169.400.000		186.340.000	Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mijen
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				78.500.000		60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000	Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mijen
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				128.000.000		80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000	Kecamatan Mijen
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Mijen
	KECAMATAN DEMAK				15.799.831.200		15.919.788.889		16.315.344.718		16.625.999.711		17.084.077.042	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA				11.871.806.200		11.932.788.889		12.223.344.718		12.471.999.711		12.865.077.042	Kecamatan Demak

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Demak
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				30.000.000		30.000.000		30.000.000		34.000.000		34.000.000	Kecamatan Demak
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Demak
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.439.000.000		1.443.000.000		1.493.000.000		1.493.000.000		1.493.000.000	Kecamatan Demak
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Demak
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				559.025.000		610.000.000		665.000.000		720.000.000		770.000.000	Kecamatan Demak
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Demak
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000		330.000.000	Kecamatan Demak
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Demak
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				1.570.000.000		1.574.000.000		1.574.000.000		1.577.000.000		1.592.000.000	Kecamatan Demak
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Demak
	KECAMATAN BONANG				3.256.688.982		3.340.806.937		3.426.766.394		3.525.120.241		3.631.474.561	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.810.688.982		2.894.806.937		2.973.766.394		3.072.120.241		3.178.474.561	Kecamatan Bonang

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.000.000		100.000.000		102.000.000		102.000.000		102.000.000	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				91.000.000		91.000.000		96.000.000		96.000.000		96.000.000	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000		90.000.000	Kecamatan Bonang
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Bonang
	KECAMATAN WEDUNG				3.339.889.687		3.426.156.658		3.519.439.913		3.620.306.469		3.729.377.890	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.752.255.166		2.963.156.658		3.053.439.913		3.151.306.469		3.257.377.890	Kecamatan Wedung

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				71.135.661		72.000.000		74.000.000		76.000.000		78.000.000	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				151.851.519		126.000.000		127.000.000		128.000.000		129.000.000	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				208.639.115		125.000.000		125.000.000		125.000.000		125.000.000	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				47.634.430		40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				108.373.796		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Kecamatan Wedung
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Wedung
	KECAMATAN KEBONAGUNG				2.870.321.695		2.944.553.044		3.024.821.795		3.106.615.854		3.200.470.069	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.425.321.695		2.479.553.044		2.541.821.795		2.606.615.854		2.685.470.069	Kecamatan Kebonagung

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				80.000.000		80.000.000		88.000.000		95.000.000		105.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang baik (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				55.000.000		65.000.000		70.000.000		70.000.000		75.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan yang aktif (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya Keamanan Wilayah	Cakupan keamanan wilayah (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				60.000.000		60.000.000		60.000.000		70.000.000		70.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				100.000.000		110.000.000		115.000.000		115.000.000		115.000.000	Kecamatan Kebonagung
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang tertib administrasi (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Kebonagung
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			16.151.211.850		15.947.722.712		47.531.482.686		59.945.097.959		17.356.425.444		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			16.151.211.850		15.947.722.712		47.531.482.686		59.945.097.959		17.356.425.444		
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			16.151.211.850		15.947.722.712		47.531.482.686		59.945.097.959		17.356.425.444		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.029.739.850		4.886.250.712		4.828.010.686		5.258.625.959		5.204.953.444	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode	Bidang Urusan/Program	Indikator Outcome	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya kepuasaan layanan kesekretariatan	IKM Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	95	95,7		96,4		97,1		97,6		98		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.740.000.000		1.760.000.000		1.867.000.000		1.955.000.000		1.975.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan (Dengan Satuan:%)	73	75		76,5		77,5		78		80		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				3.561.472.000		3.581.472.000		34.831.472.000		46.836.472.000		4.281.472.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya kesadaran berpolitik yang baik	Rasio masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik (Dengan Satuan:%)	73	74,42		74,56		74,72		74,84		74,98		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				2.845.000.000		2.745.000.000		2.905.000.000		2.845.000.000		2.845.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persesntase Organisai masyarakat yang aktif (Dengan Satuan:%)	71	71,5		72		72,5		73		73,5		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				870.000.000		870.000.000		920.000.000		870.000.000		870.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase masyarakat yang telah mendapatkan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan masyarakat (Dengan Satuan:%)	70	72		73		74		75		76		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.105.000.000		2.105.000.000		2.180.000.000		2.180.000.000		2.180.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	Meningkatnya kewaspadaan terhadap konflik sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang teridentifikasi (Dengan Satuan:Kasus)	10	10		12		14		16		18		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL:				2.686.348.201.305		2.754.855.081.433		2.850.190.658.348		2.940.901.215.724		3.173.250.353.138		

4.2 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

Penetapan Indikator Kinerja dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terbagi menjadi dua yakni Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menentukan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator yang menentukan target penyelenggaraan pemerintahan daerah selama pelaksanaan pembangunan jangka menengah.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Berikut ini penetapan Indikator Kinerja Utama pada pembangunan Kabupaten Demak tahun 2025-2029.

Tabel IV.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Demak Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,57	75,42	75,94	76,60	77,54	78,72	79,21
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,58	87,00	87,50	88,80	89,00	89,30	89,50
3	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,39	78,00	78,58	79,17	79,76	80,36	80,95
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	4,85-5,32	5,10-6,00	6,50-7,10	7,00-7,80	7,50-8,00	7,90-8,30
5	Indeks Layanan Infrastruktur daerah	Angka	34,83	35,55	37,25	40,30	42,67	44,05	46,76
6	Indeks Gini	Angka	0,314	0,264-0,292	0,299-0,307	0,297-0,306	0,296-0,305	0,294-0,304	0,293-0,303
7	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,95	6,95	6,98	7,00	7,02	7,04	7,07
8	Kontribusi Penurunan emisi GRK Kumulatif	Ton CO2eq	102.345,16	1.399.991	2.001.681	2.603.370	3.205.060	3.806.750	4.408.440
9	PDRB per kapita	Juta Rp/ Tahun	28,30	29,58-29,99	31,77-32,45	34,11-35,10	36,63-37,97	39,34-41,08	42,57-44,77
10	Tingkat Kemiskinan	%	11,89	11,64-10,39	11,38-10,04	10,56-9,35	9,74-8,83	8,92-8,31	8,40-7,79

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Kinerja pembangunan suatu daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Demak diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Aspek Geografi Dan Demografi								
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	90,47	90,62	90,78	90,93	91,08	91,23	91,39
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten	Angka	59,27	60,52	61,77	63,02	64,27	65,52	66,77
4	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	7,59	7,32	6,90	6,31	5,36	4,43	3,19
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	57,38	72,60	72,64	72,69	72,73	72,77	72,82
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	5,79	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	32,00
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,88	23,00	26,35	29,70	33,05	36,40	39,75
8	Indeks Risiko Bencana	Angka	91,76	89,03-87,77	87,90-86,11	86,76-84,45	85,63-82,79	84,49-81,13	83,36-79,47
9	Jumlah Penduduk	Ribu Jiwa	1252,97	1265,05	1276,68	1287,85	1298,55	1308,75	1318,47
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,07	1,05	1,03	1,00	1,08	0,96	0,94
11	Rasio Penduduk (Rasio Jenis Kelamin)	Angka	101,79	101,73	101,66	101,58	101,49	101,40	101,30
12	Kepadatan Penduduk	Orang/ km2	1.256,82	1.268,93	1.280,60	1.291,80	1.302,54	1.312,77	1.322,52
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,06	4,85-5,32	5,10-6,00	6,50-7,10	7,00-7,80	7,50-8,00	7,90-8,30

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Tingkat Kemiskinan	%	11,89	11,64-10,39	11,38-10,04	10,56-9,35	9,74-8,83	8,92-8,31	8,40-7,79
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp/ Tahun	28,30	29,58-29,99	31,77-32,45	34,11-35,10	36,63-37,97	39,34-41,08	42,57-44,77
4	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	%	21,70	22,09-22,29	22,29-22,58	22,49-22,87	22,69-23,16	22,89-23,45	23,09-23,74
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,75	4,4-5,3	4,34-4,64	4,23-4,53	4,11-4,41	3,98-4,30	3,79-4,19
6	Indeks Gini	Angka	0,314	0,264-0,292	0,299-0,307	0,297-0,306	0,296-0,305	0,294-0,304	0,293-0,303
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,57	75,42	75,94	76,60	77,54	78,72	79,21
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,79	75,87	76,18	76,49	76,80	77,11	77,43
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Kasus	8	12	12	11	11	10	10
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10	7,50	7,32	7,14	6,95	6,77	6,59
	Angka Populasi Bebas Penyakit Tidak Menular (PTM)	%	NA	98,15	98,15	98,15	99,07	99,07	99,07
	Angka Populasi Bebas Penyakit Menular (PM)	%	NA	81,48	82,41	83,33	85,19	86,11	87,04
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	89,5	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	90,5	93,00	94,00	95,00	96,00	96,00	99,00
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	99,4	97,90	98,75	98,79	98,83	98,87	98,91
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	42,71	43,00	43,50	44,54	46,04	47,54	49,04
15	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	85,53	87,08	87,86	88,63	89,41	90,18	90,96
16	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	78,62	81,26	82,58	83,90	85,22	86,54	87,86
17	Numerasi SD/Sederajat	%	78,83	82,68	84,60	86,52	88,44	90,37	92,29
18	Numerasi SMP/Sederajat	%	74,42	78,49	80,53	82,56	84,60	86,63	88,67
19	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,28	9,37	9,50	9,64	9,77	9,91	10,04
20	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,36	14,00	14,17	14,27	14,37	14,47	14,57

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	6,84	7,00	7,16	7,33	7,49	7,66	7,82
22	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	%	86,41	93,69	94,01	94,32	94,64	94,95	95,27
23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	64,88	65,50	66,68	67,58	68,48	69,38	70,28
24	Indeks Harmoni Indonesia	Angka	6,95	6,95	6,98	7,00	7,02	7,04	7,07
25	Nilai kinerja kebudayaan	Angka	39,08	39,61	40,49	41,37	42,25	43,13	44,01
26	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar muatan lokal bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	%	80,23*	82,32	83,1415	83,963	84,7845	85,61	86,4275
27	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	%	18,15*	18,21	18,97	19,74	20,50	21,26	22,02
28	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Orang	3.171.247	3393.234	3.630.760	3.884.914	4.156.858	4.447.838	4.759.187
29	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	%	18,25*	18,96	19,39	19,82	20,25	20,68	21,11
30	Tingkat pemanfaatan perpustakaan	%	0,085	0,67	0,86	1,06	1,25	1,44	1,63
31	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,32	65,08-65,11	65,85 - 65,89	66,61 - 66,68	67,38 - 67,47	68,14 - 68,26	68,91 - 69,04
32	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,326	0,323-0,317	0,320-0,304	0,321 - 0,293	0,319 - 0,282	0,317 - 0,271	0,315 - 0,26
III	Aspek Daya Saing Daerah								
1	Angka Ketergantungan	%	44,14	44,51	44,86	45,20	45,52	45,83	46,14
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	31,66	33,43	33,82	34,21	34,60	35,00	35,39
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,37	2,40	2,52	2,70	2,87	3,05	3,22
4	LPE Kategori Industri Pengolahan	%	4,77	4,82	4,87	4,94	5,01	5,11	5,22
5	LPE Kategori Pertanian,	%	0,63	0,95	1,18	1,48	1,70	1,95	2,15

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kehutanan dan Perikanan								
6	Kontribusi PDRB Kabupaten Demak Terhadap Provinsi Jawa Tengah	%	1,95	1,98	1,98	1,99	2,00	2,00	2,00
7	Pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah (Pertanian, Industri, Perdagangan, Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum)	%	3,72	3,76	3,80	3,86	3,91	3,99	4,07
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	248	298	349	355	375	390	410
9	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	2,15	2,74	3,05	3,24	3,42	3,47	3,64
10	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,741	1,82	1,88	1,90	1,95	1,99	2,03
11	Return on Aset (ROA) BUMD	%	3,19	3,50	3,56	3,63	3,69	3,75	3,81
12	Kapabilitas Inovasi	Angka	1,95	2,30	2,39	2,47	2,56	2,64	2,73
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	72,36	72,54	72,72	72,90	73,09	73,27	73,45
14	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	58,56	59,16	59,62	60,07	60,53	60,98	61,44
15	Indeks Inovasi Daerah	Angka	55,67	56,23	56,79	57,36	58,79	60,26	61,77
16	Disparitas Harga	%	0,0373	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	28,98	29,08	29,09	29,09	29,10	29,11	29,11
18	Pertumbuhan PMTB	%	7,10	7,11	7,12	7,13	7,14	7,15	7,16
19	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	-17,39	-16,89	-16,39	-15,89	-15,39	-14,89	-14,39
20	Indeks Layanan Infrastruktur daerah	Angka	34,83	35,55	37,25	40,30	42,67	44,05	46,76
21	Indeks Kinerja Infrastruktur Daerah	Angka	86,32	85,44	86,73	87,48	88,23	88,98	89,72
22	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	80,32	80,42	80,52	80,62	80,72	80,78	80,83
23	Indeks Desa	Angka	0,7458	0,7533	0,7608	0,7684	0,7761	0,7838	0,7917
24	Persentase Desa Mandiri	%	26,34	27,98	29,22	30,86	32,10	33,74	35,36
25	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	57,14	57,14	57,14	57,14	42,85	42,85	28,57
26	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap	%	81,48	85,25	85,75	86,25	86,75	87,25	87,75

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Kewenangan Kabupaten/Kota								
27	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/K ota	%	15	15,00	20,00	22,00	25,00	30,00	31,00
28	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	%	84,96*	87,69	89,06	90,43	91,79	93,16	94,53
29	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,63	0,94	0,93	0,91	0,90	0,89	0,87
30	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB	%	NA	4,57	4,58	4,59	4,60	4,61	4,62
31	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	%	NA	4,16	4,17	4,18	4,19	4,20	4,21
32	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,57	0,60	0,63	0,66	0,69	0,72	0,75
33	Indeks Akses Keuangan Daerah	poin	3,92	3,99	4,03	4,06	4,10	4,14	4,15
34	Ternak Besar	Ton	814,40	830,39	845,88	860,44	875,08	890,8	905,59
35	Ternak Kecil	Ton	1016,08	1056,31	1106,17	1156,13	1206,19	1256,35	1306,61
36	Unggas	Ton	48829,78	49829,78	50829,93	51829,72	52829,18	53829,34	54829,24
37	Telur Ayam	Ton	1069,94	1354,91	1361,68	1368,49	1375,33	1382,21	1389,12
38	Telur Itik	Ton	1073,15	2158,21	2179,79	2201,59	2223,61	2245,84	2268,30
39	Telur Puyuh	Ton	73,51	200,85	201,05	201,25	201,45	201,65	201,86
IV	Aspek Pelayanan Umum								
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	97,92	97,93	97,95	97,98	98,00	98,03	98,05
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	86,58	87,00	87,50	88,80	89,00	89,30	89,50
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,93	3,98	3,98	4,03	4,03	4,08	4,08
4	Nilai SAKIP	Angka	69,10	69,2	70,00	70,30	70,50	70,70	71,00
5	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,47	4,52	4,60	4,63	4,65	4,70	4,75
6	Rasio konektivitas kabupaten	Angka	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7	Indeks Integritas Nasional	Angka	77,39	78,50	78,55	78,60	78,65	78,70	78,75
8	Kapasitas Institusi	Angka	4,89	4,89	4,90	4,90	4,90	4,91	4,91

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Baseli ne 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
9	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Angka Kejadian Konflik Sosial	Kasus	0	0	0	0	0	0	0
11	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,66	3,7	3,74	3,78	3,82	3,86	3,90
12	Indeks SPIP	Angka	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22	3,27	3,32
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	88,48	88,60	88,65	88,70	88,75	88,80	88,85
14	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	82,53	82,60	82,70	82,80	82,90	83,00	83,10
15	Indeks Sistem Merit	Angka	0,705	0,708	0,713	0,738	0,775	0,810	0,825

Tabel IV.4
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Demak Tahun 2025-2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	80,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	99,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	18,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99
6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	94,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	95,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	101,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	57,51	19,00	29,00	39,00	49,00	60,00	70,00
20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	43,79	27,68	36,74	45,81	54,87	63,94	73,00
21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	97,11	80,64	81,87	83,10	84,33	85,56	86,79
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	92,26	92,42	92,58	92,73	92,89	93,05	93,20
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	5,79	6,11	6,42	6,73	7,05	7,36	7,67
24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	81,48	85,25	85,75	86,25	86,75	87,25	87,75

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
26	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	50,00	55,70	57,70	59,70	61,70	63,70	65,70
27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
29	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31	Persentase Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,66	0,70	0,73	0,77	0,81	0,85	0,89
32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Waktu	15	15	15	15	15	15	15

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	49,92	52,42	55,04	57,79	60,68	63,72	66,90
44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	33,07	33,29	33,51	33,7	33,9	34,08	34,25
45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	92,65	93,87	95,10	96,32	97,55	98,77	100,00
46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	82,75	85,63	88,50	91,38	94,25	97,13	100,00
47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	27,66	27,93	28,21	28,50	28,78	29,07	29,36
48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	9,36	8,42	7,58	6,82	6,14	5,52	4,97
50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	16,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	%	56,26	72,60	72,64	72,69	72,73	72,78	72,82
58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	91,71	93,09	94,47	95,85	97,24	98,62	100,00
59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
60	Perekaman KTP elektronik	%	98,70	98,91	99,13	99,35	99,57	99,78	100,00
61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	59,91	62,42	64,94	67,45	69,97	72,48	75,00
62	Kepemilikan akta kelahiran	%	87,50	NA	87,75	88	88,25	88,75	89
63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	57,14	57,14	57,14	57,14	42,85	42,85	28,57
65	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	44,44	10,00	12,50	15,00	17,50	20,00	22,50
66	Persentase desa mandiri	%	65,22	27,98	29,22	30,86	32,10	33,74	35,36
66	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,02	2,02	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01
67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	73,77	74,81	75,85	76,88	77,92	78,96	80,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,23	5,92	5,63	5,35	5,08	4,82	4,58
69	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
70	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39	0,40	0,41
71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	13,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	66,20	62,69	62,69	62,69	62,69	62,70	62,70
75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	62,56	63,19	63,82	64,46	65,10	65,75	66,41
76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	12,53	19,78	27,04	34,29	41,54	48,80	56,05
77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	26,63	26,70	26,85	27,00	27,15	27,30	27,44
78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	30,00	30,30	30,70	31,00	31,50	31,70	32,00
79	Peningkatan prestasi olahraga	%	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00
80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	86,82	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
83	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	66,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	75,26	76,25	77,26	78,26	79,26	80,26	81,26
85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	64,88	67,40	69,92	72,44	74,96	77,48	80,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	91,65	91,85	92,05	92,25	92,45	92,65	92,85
87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	83,33	83,54	83,88	84,00	84,24	84,36	84,55
88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	%	102,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	42,53	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	40,51	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
91	Tingkat hunian akomodasi	%	50,07	51,32	52,60	53,92	55,26	56,65	58,06
92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,37	3,35	4,32	5,30	6,28	7,26	8,24
93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	1,25	1,43	1,69	1,95	2,21	2,47	2,73
94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	614,41	620,55	626,76	633,03	639,36	645,75	652,21
95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-13,15	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50	-12,50
96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0,00	-	-	-	-	-	-
97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	%	103,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
98	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	60,40	63,42	66,59	69,92	73,42	77,09	80,95
99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	133,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	1,41	1,42	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48
101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	131,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	125,00	130,00	130,00	135,00	135,00	140,00	140,00
106	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	kawasan	1	1	1	1	1	1	1
107	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	7,61	7,58	7,54	7,50	7,46	7,43	7,39
108	Rasio PAD	%	22,00	22,22	22,44	22,67	22,89	23,12	23,35
109	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	%	3,02	3,07	3,12	3,17	3,22	3,27	3,32
110	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	%	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
111	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	67,52	68,20	68,88	69,57	70,27	70,97	71,68

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Baseline 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
112	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
113	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	50,32	50,82	51,33	51,84	52,36	52,88	53,41
115	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	48,42	48,91	49,40	49,89	50,39	50,89	51,40
116	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	27,11	27,38	27,66	27,93	28,21	28,50	28,78
117	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	65,48	NA	65,49	65,50	65,51	65,52	65,53
118	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	15,88	NA	15,90	15,90	16,00	16,00	16,10
119	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	38,22	NA	38,23	38,24	38,25	38,26	38,37
120	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,67	0,65	0,62	0,59	0,56	0,53	0,50
121	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,80	21,07	19,34	17,61	15,88	14,15	12,42
122	Manajemen Aset	%	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
123	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5,12	4,69	4,25	3,81	3,37	2,94	2,50
124	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	%	97,56	97,97	98,37	98,78	99,19	99,59	100,00
125	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak periode 2025-2045. RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi acuan, pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Demak lima tahun ke depan agar senantiasa selaras, terpadu dan searah dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan pembangunan nasional.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 ditentukan oleh dukungan yang solid dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak serta kerjasama yang kuat antara Pemerintah Kabupaten Demak dengan Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Tidak kalah penting komitmen dan dukungan DPRD Kabupaten Demak serta kerjasama dengan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Dokumen ini juga merupakan implementasi dari Visi, Misi, dan Program Prioritas Bupati/Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029 yang disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak dan pemangku kepentingan secara runut dan jelas dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini. Untuk itu, menjadi penting dipahami oleh segenap pihak terkait tentang bagaimana mengoperasionalkan RPJMD ini, baik dalam tahapan normal maupun masa transisi, agar dokumen RPJMD ini benar-benar menjadi rujukan dalam pengelolaan kinerja oleh Perangkat Daerah dalam koordinasi Bappeda.

5.1. Pedoman Transisi

Setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, perlu disusun RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2030-2034 sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2030. Pedoman transisi demikian dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah pada akhir periode RPJMD hingga terpilihnya kepala daerah baru dan tersedianya dokumen RPJMD sebagai hasil penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pedoman transisi ini juga dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada pemerintah daerah

agar lebih siap dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan sebagai upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan ketersediaan dokumen rencana pembangunan.

Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Kabupaten Demak maka pedoman transisi ditetapkan sebagai berikut:

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum serta prioritas program APBD masa transisi yaitu tahun pertama di bawah kepemimpinan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode berikutnya.
- 3) RKPD masa transisi di tahun 2030 menjadi bagian tidak terpisahkan dari RPJMD periode saat ini 2025-2029, dikarenakan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 memuat hingga tahun 2030.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Demak serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, konsistensi, transparansi, inovasi, kerjasama, dan rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029. Dalam hal ini, penting untuk menyusun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 sebagai aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2030. Adapun tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kaidah pelaksanaan RPJMD Demak Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;

2. Seluruh OPD/unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, Bapperida Kabupaten Demak berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi, dan mediasi terhadap penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029 ke dalam Renstra PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Setiap PD berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Demak yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD dengan berpedoman pada RPJMD ini;
5. RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun RKPD setiap tahun selama 5 tahun masa kepemimpinan bupati yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Demak dan selanjutnya RKPD merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
6. Bapperida Kabupaten Demak melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah;
7. Pelaksanaan pembangunan daerah agar mengedepankan prinsip – prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
8. Manajemen Risiko harus disusun dan diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi potensi hambatan atau ancaman yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMD;
9. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BUPATI DEMAK

dr. Hj. Eisti'anah, S.E